BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

DISKOMINFO Kepri

STANDAR DATA STATISTIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
2025

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

kominfo@kepriprov.go.id
www.satudata.kepriprov.go.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, Dokumen Kompilasi Standar Data Statistik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Dokumen ini merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menerapkan Standar Data Statistik (SDS) sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 10 Tahun 2023 tentang Standar Data Statistik. Melalui penerapan SDS, diharapkan data sektoral di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menjadi lebih akurat, konsisten, terpadu, serta dapat dimanfaatkan secara luas dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen ini menjadi acuan bersama dalam mewujudkan tata kelola data yang berkualitas dan berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, 17 September 2025
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kepulauan Riau

HENDRI KURNIADI, S.STP., M.Si
NIP 197711161996121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Tujuan 1
C. Ruang Lingkup 2
D. Komponen SDS 3
E. Penetapan SDS 4
F. Struktur Kode Standar Data Statistik 6
BAB II STANDAR DATA STATISTIK PROVINSI 7
A. Standar Data Statistik 7
B. Konsep dan Definisi 214
PENUTUP 297
DAFTAR PUSTAKA 298

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan data oleh pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik termasuk dalam kategori statistik sektoral, yaitu data yang dimanfaatkan untuk mendukung tugas dan fungsi instansi pemerintah sesuai kewenangannya. Ketersediaan data sektoral yang berkualitas menjadi fondasi penting dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah. Namun, dalam praktiknya masih terdapat tantangan dalam mewujudkan data yang terstandar, terintegrasi, dan siap digunakan untuk kepentingan perumusan kebijakan.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Komunikasi dan Informatika selaku walidata provinsi bekerja sama dengan berbagai pihak produsen data, pembina data serta koordinator data untuk menghasilkan Standar Data Statistik (SDS) Provinsi Kepulauan Riau sebagai pedoman resmi dalam menghasilkan dan menyajikan data sektoral.

Dengan adanya Standar Data Statistik ini, diharapkan pengelolaan data sektoral di Provinsi Kepulauan Riau semakin konsisten, mudah digunakan, serta mampu menjadi dasar pengambilan keputusan dan pembangunan daerah yang berbasis data yang akurat dan terpercaya.

B. Tujuan

Penyusunan Standar Data Statistik yang disajikan dalam Dokumen Kompilasi SDS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bertujuan untuk menjadi acuan teknis dan substansi dalam penerapan komponen standar data statistik oleh seluruh produsen data di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Secara umum, tujuan penyusunan dokumen ini adalah untuk:

1. Menyeragamkan pemahaman antar perangkat daerah mengenai komponen standar data statistik sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 10 Tahun 2023 tentang Standar Data Statistik;
2. Menjamin konsistensi dan keterpaduan data statistik sektoral, sehingga data yang dihasilkan oleh masing-masing produsen data dapat dibandingkan, diintegrasikan, dan dimanfaatkan lintas perangkat daerah;
3. Meningkatkan kualitas metadata dan interoperabilitas data, dengan memastikan setiap elemen data memiliki konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, satuan, dan sumber rujukan yang jelas serta terstandar;
4. Mendukung pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia di tingkat daerah, khususnya dalam aspek penerapan standar data pada data statistik sektoral;
5. Menjadi referensi dalam penyusunan, pembaruan, dan validasi metadata pada Portal Satu Data Provinsi Kepulauan Riau (https://satudata.kepriprov.go.id) agar seluruh dataset yang dipublikasikan memenuhi standar data statistik.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan Dokumen Kompilasi Standar Data Statistik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berfokus pada penetapan dan penerapan komponen standar data statistik yang digunakan oleh seluruh produsen data di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Dokumen ini disusun sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia, khususnya untuk memastikan bahwa data statistik sektoral yang dihasilkan oleh perangkat daerah telah memenuhi unsur keseragaman konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, satuan, dan sumber rujukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 10 Tahun 2023 tentang Standar Data Statistik.

Secara rinci, ruang lingkup dokumen ini meliputi:

1. Penjelasan konsep dan prinsip dasar standar data statistik, termasuk hubungan antara standar data statistik dan prinsip Satu Data Indonesia;

2. Kompilasi komponen standar data statistik, yang mencakup penguraian unsur:
    - Konsep dan definisi data statistik sektoral;
    - Klasifikasi dan kodefikasi data;
    - Ukuran dan satuan pengukuran;
    - Sumber rujukan dan acuan regulasi.
3. Penerapan standar data statistik oleh produsen data, sebagai acuan dalam penyusunan metadata dan penyajian data pada Portal Satu Data Provinsi Kepulauan Riau;
4. Cakupan penerapan dokumen, yang berlaku bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai produsen data statistik sektoral.

D. Komponen SDS

Berdasarkan Peraturan Badan BPS Nomor 10 Tahun 2023, SDS terdiri dari beberapa komponen yang dirancang untuk memastikan konsistensi, akurasi, dan keterbandingan data statistik yang dihasilkan. Komponen standar data statistik tersebut ini mencakup:

1. **Konsep**

   merupakan ide atau gagasan yang mendasari data dan menjelaskan lebih lanjut mengenai suatu Data Statistik yang terstandar. Konsep digunakan untuk menggambarkan fenomena atau objek yang diukur. Konsep ini harus jelas dan dapat dipahami oleh semua pengguna data, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda.
2. **Definisi**

   merupakan penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain. Definisi harus mampu menjelaskan secara rinci tentang istilah-istilah yang digunakan dalam statistik,

sehingga semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang data statistik yang dimaksud dan dapat dibandingkan secara tepat. Definisi harus disusun berdasarkan referensi yang sahih dan kredibel, seperti peraturan perundang-undangan, standar internasional, literatur ilmiah, atau kesepakatan instansi yang relevan.

3. **Klasifikasi**

   Merupakan penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh lembaga pemerintah di bidang statistik atau dibakukan secara luas. Klasifikasi ini memudahkan dalam pengelompokan data sehingga lebih mudah dianalisis dan diinterpretasikan. Klasifikasi yang baik harus memenuhi prinsip *exhaustive* “Semua objek dapat diklasifikasikan”, *mutually exclusive* “setiap objek hanya tercakup dalam satu kategori dan saling lepas”, serta kategori disusun secara berhierarki.

4. **Ukuran**

   merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan. Ukuran digunakan untuk mengukur fenomena atau objek yang diamati. Ukuran ini harus sesuai dengan standar yang digunakan di level internasional agar data yang dihasilkan dapat dibandingkan dengan data dari negara lain.

5. **Satuan**

   merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebuah keseluruhan. Satuan ini harus konsisten dan sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga memudahkan dalam interpretasi dan analisis data.

E. Penetapan SDS

Penetapan SDS melibatkan beberapa tahapan yang mencakup penyusunan, pengusulan, reviu, dan penetapan. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai tahapan-tahapan tersebut:

Penetapan Standar Data Statistik dilakukan melalui beberapa tahapan, meliputi:

1. **Penyusunan Standar Data Statistik**

   Dilakukan oleh produsen data dengan mengacu pada ketentuan BPS dan kebutuhan pengguna data di daerah. Proses ini mencakup identifikasi variabel, konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, dan satuan. Penyusunan SDS oleh Produsen Data mengacu pada daftar data daerah sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 476 Tahun 2024 tentang Daftar Data Prioritas Provinsi Kepulauan Riau.

2. **Pengusulan Standar Data Statistik**

   Hasil penyusunan SDS kemudian disampaikan kepada Walidata untuk dilakukan verifikasi awal. Selanjutnya, SDS yang telah diperiksa oleh walidata diteruskan kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau sebagai pembina data statistik untuk proses reviu.

3. **Reviu Standar Data Statistik**

   Pada tahap ini BPS Provinsi Kepulauan Riau melakukan reviu terhadap SDS yang telah diajukan oleh walidata untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan dan prinsip statistik resmi. Proses ini dilakukan oleh BPS Provinsi Kepulauan Riau dengan mengacu pada referensi yang sahih dan kredibel seperti peraturan perundang-undangan, standar internasional, dan literatur ilmiah.

4. **Penetapan Standar Data Statistik**

   SDS yang telah disetujui ditetapkan melalui publikasi resmi Dinas Komunikasi dan Informatika selaku walidata dan diberlakukan untuk digunakan serta dijadikan rujukan dan diimplementasikan dalam kegiatan statistik perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Pada akhirnya, melalui penyusunan SDS dan penyediaan data statistik yang terstandar, berarti penyelenggara statistik telah turut serta dalam sistem statistik nasional untuk mewujudkan pembangunan nasional berkelanjutan. Lebih lanjut, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan statistik dan pembangunan nasional dapat terus ditingkatkan.

F. Struktur Kode Standar Data Statistik

Struktur kode SDS digunakan untuk mengidentifikasi setiap jenis data statistik secara unik dan sistematik. Kode ini membantu integrasi dan interoperabilitas antarinstansi dalam pengelolaan serta penggunaan data. Struktur kode SDS terdiri dari kombinasi delapan digit angka, dengan format kode yang mencakup:

1. **Kode CSA (*Classification of Statistical Activities*)**

   Merupakan sistem klasifikasi yang digunakan sebagai dasar penyediaan informasi berbasis data kegiatan statistik internasional. Kode CSA sebagai elemen pertama, yang diwakili oleh tiga angka pertama dari kombinasi kode SDS.

2. **Kode CA (*Classification of Activities*)**

   Merupakan elemen kedua pada kombinasi kode SDS, yang diwakili oleh satu angka berikutnya setelah kode CSA. Kode ini memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai jenis data statistik berupa data numerik (kode 1) atau data kategorik (kode 2).

3. **Nomor Urut**

   Merupakan elemen ketiga pada kode SDS yang diwakili empat angka terakhir, bertujuan untuk memberikan identitas unik pada setiap SDS dalam satu kode CSA dan jenis data tertentu.

4. **Kode konsep**

   Memiliki format kode yang diawali dengan huruf “K” yang menunjukkan konsep dan diikuti 5 angka yang menunjukkan nomor urut. Nomor ini diatur berurutan berdasarkan penggunaan konsep pada SDS yang ditetapkan.

Kode SDS digunakan dalam pencarian dan pertukaran data antarinstansi dapat dilakukan lebih efisien, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan statistik sektoral di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. hal ini juga merujuk kepada Kode Standar Data Statistik Nasional pada Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik 846 Tahun 2024 Tentang Standar Data Statistik Nasional.

BAB II
STANDAR DATA STATISTIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. Standar Data Statistik

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10320001	Akreditasi Program Satuan Pendidikan	K00035] Akreditasi; [K01971] Satuan Pendidikan;	Pengakuan terhadap program satuan pendidikan yang diberikan oleh badan yang berwenang berdasarkan syarat kebakuan atau kriteria tertentu.	-	1. Akreditasi A; 2. Akreditasi B; 3. Akreditasi C; 4. Tidak Terakreditasi;		
10310002	Angka Anak Tidak Sekolah	[K01289] Partisipasi Sekolah;	Bagian dari anak usia sekolah pada setiap jenjang pendidikan yang tidak terdaftar sebagai peserta didik dalam satuan pendidikan pada jenjang terkait.	[32010026] Wilayah; [10320055] Tingkat Pendidikan;	-	Persentase	persen
10410005	Angka Fertilitas Total / Total Fertility Rate (TFR)	[K02352] Fertilitas; [K00819] Kelahiran Hidup;	Angka yang menggambarkan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang perempuan selama masa usia suburnya.	[32010026] Wilayah; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [10320055] Tingkat Pendidikan;		Tingkat	kelahiran

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10410005	Angka Fertilitas Total/*Total Fertility Rate* (TFR)	[K02352] Fertilitas; [K00819] Kelahiran Hidup;	Angka yang menggambarkan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang perempuan selama masa usia suburnya.	[32010026] Wilayah; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [10320055] Tingkat Pendidikan;	-	Tingkat	kelahiran
10310003	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	[K01289] Partisipasi Sekolah;	Lamanya bersekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.	[32010026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin;	-	Waktu	tahun
10410001	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis	[K02230] Tuberkulosis (TB);	Angka yang menggambarkan bagian dari seluruh kasus tuberkulosis yang ditemukan dan diobati, yang mendapat pengobatan lengkap dan sembuh.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
10410008	Angka Kematian Bayi (AKB)/*Infant Mortality Rate* (IMR)	[K00845] Kematian/Mortalitas; [K00232] Bayi;	Angka yang menggambarkan banyaknya kematian bayi berumur di bawah satu tahun pada setiap 1.000 kelahiran hidup.	[32010026] Wilayah; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [10320055] Tingkat Pendidikan; [33220007] Jenis Kelamin;	-	Tingkat	kematian perseribu kelahiran hidup

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10410009	Angka Kematian Ibu (AKI)/Maternal Mortality Ratio (MMR)	[K00842] Kematian Ibu/Maternal Mortality;	Angka yang menggambarkan banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian yang terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama masa kehamilan, melahirkan, dan masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan untuk setiap 100.000 kelahiran hidup.	[32010026] Wilayah;	-	Tingkat	kematian perseratus ribu kelahiran hidup
	Angka Konsumsi Ikan (AKI)	Konsumsi; Ikan;	Rata-rata Konsumsi ikan per kapita secara nasional dari seluruh provinsi dibagi jumlah provinsi pada periode 1 tahun.	[32010026] Wilayah; Jenis Ikan; Periode Waktu;	-	Rata - rata	kg / kapita / tahun
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK	Angka Melanjutkan; Sekolah Menengah Pertama; Sekolah Menengah Atas; Sekolah Menengah Kejuruan;	Angka yang menggambarkan bagian dari seluruh lulusan SMP/MTS pada tahun sebelumnya yang melanjutkan pendidikan ke SMA/SMK	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	Partisipasi Sekolah; Sekolah Luar Biasa (SLB);	Angka yang menggambarkan bagian dari seluruh penduduk pada rentang usia sekolah yang bersekolah di SLB	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	Partisipasi Sekolah; Sekolah Menengah Atas (SMA); Madrasah Aliyah (MA); Sekolah	Angka yang menggambarkan bagian dari seluruh penduduk pada rentang usia sekolah yang bersekolah SMA/MA/SMK.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Menengah Kejuruan (SMK);					
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK	Partisipasi Sekolah; Sekolah Menengah Atas (SMA); Madrasah Aliyah (MA); Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);	Angka yang mengambarkan bagian dari seluruh penduduk usia 16-18 tahun yang sedang bersekolah SMA/MA/SMK di usia 16-18 tahun.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 Tahun	Partisipasi Sekolah; Sekolah Menengah Atas (SMA); Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);	Angka yang mengambarkan bagian dari seluruh penduduk usia 16-18 tahun (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) yang sedang bersekolah SMA/SMK.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
10410016	Angka Prevalensi Kontraseptif Modern pada Kelompok Perempuan Usia Reproduksi	[K00970] Kontrasepsi; [K02314] Wanita Usia Subur (WUS);	Bagian dari seluruh perempuan usia reproduksi (15—49 tahun) yang menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
10410014	Angka Prevalensi Kontraseptif/ Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	[K00970] Kontrasepsi;	Bagian dari populasi pasangan usia subur (PUS) yang aktif menggunakan salah satu alat kontrasepsi.	[32010026] Wilayah;		Persentase	persen
	Angka Putus Sekolah SLB	Putus Sekolah; SLB;	Angka yang menggambarkan bagian dari seluruh siswa yang terdaftar pada SLB yang berhenti sebelum tamat	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Angka Putus Sekolah SMA/SMK	Putus Sekolah; Sekolah Menengah Atas; Sekolah Menengah Kejuruan;	Angka yang menggambarkan bagian dari seluruh siswa yang terdaftar pada jenjang SMA/SMK yang berhenti sebelum tamat	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Asia Power Index (Diplomatic Influence) Disesuaikan dengan Karakteristik Daerah, dalam Rumpun Arah Pembangunan (IE)yang sama	Asia Power Index (Diplomatic Influence); Karakteristik Daerah; Rumpun; Arah Pembangunan;	Pengukuran nilai dan Ranking 27 negara berdasarkan delapan indikator, termasuk ekonomi, militer, hubungan ekonomi, pertahanan, pengaruh diplomatik, dan budaya, untuk memahami kemampuan mereka dalam membentuk dan merespons lingkungan eksternal.	[32010026] Wilayah;	-	Indeks	-
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Asistensi; Penyusunan; Dokumen; Perencanaan; Pembangunan; Perangkat Daerah; Infrastruktur;	Kegiatan Asistensi yang dilakukan untuk membantu perangkat daerah dalam menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur.	Perangkat Daerah;	-	Total	dokumen
	Banyaknya Peserta Bimbingan Teknis Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik yang terlaksana	Bimbingan Teknis; Bantuan Keuangan; Partai Politik;	Banyaknya Peserta bimbingan teknis yang dilaksasnakan dalam satu tahun.	[32010026] Wilayah;	-	Total	orang
	Bauran Energi Terbarukan	Energi Terbarukan;	Persentase antara total konsumsi Energi Terbarukan terhadap total konsumsi energi primer.	Tahun;	-	Persentase	persen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Bentuk Pendidikan	[K02373] Pendidikan;	Jenis Penyelenggaraan pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus		1. Sekolah Menengah Atas (SMA) 2. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 3. Sekolah Luar Biasa (SLB)		
	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatmant Coverage)	Kabupaten; Kota; Obat; Tuberkulosis (TB); Treatment Coverage;	Perbandingan banyaknya kabupaten/kota yang mencapai angka cakupan penemuan pengobatan (*Treatment Coverage*) sesuai target terhadap banyaknya kabupaten/kota.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Cakupan Pengawasan Pemanfaatan Ruang 12 Mil	Pemanfaatan Ruang; Laut;	Perbandingan cakupan pemanfaatan ruang terhadap pengawasannya	[32010026] Wilayah; Jenis Aktivitas yang diawasi; Metode Pengawasan; Status tindak Lanjut;	-	Persentase	persen
	Data Desa-desa Berlistrik dan belum Berlistrik di Provinsi Kepulauan Riau	Desa berlistrik;	Desa yang seluruh atau sebagian KK di dalamnya memiliki sumber penerangan listrik, baik dari listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun listrik non-PLN.	[32010026] Wilayah;	-	Jumlah	rumah
	Debit Instalasi Pengolahan Air Limbah	Air Limbah;	Rata-rata laju aliran limbah di dalam instalasi pengolahan air limbah (IPAL) pada periode waktu tertentu.	[32020026] Wilayah;	-	Debit	meter kubik per jam

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Dokumen Inventarisasi Daerah Rawan Kekeringan dan Sulit Air di Provinsi Kepulauan Riau	Rawan Kekeringan dan Sulit Air;	Tersusunnya dokumen Inventarisasi Daerah Rawan Kekeringan dan Sulit Air di Provinsi Kepulauan Riau.	[32010026] Wilayah;	-	Jumlah	dokumen
	Frekuensi Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Frekuensi; Fasilitasi; Lembaga; Pembinaan; Spiritual;	Kekerapan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual.	[32010026] Wilayah;	-	Frekuensi	kali per bulan
	Frekuensi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Frekuensi; Sarana; Prasarana; Spiritual;	Kekerapan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual.	[32010026] Wilayah;	-	Frekuensi	kali per bulan
11010012	Indeks Demokrasi Indonesia	[K008370] Demokrasi;	Angka yang menggambarkan perkembangan demokrasi Indonesia yang dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan politik oleh pemerintah pusat maupun daerah.	[32010026] Wilayah;	-	Indeks	-
	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	Ekonomi Biru;	Alat ukur yang digunakan untuk menilai dan memantau keberlanjutan serta dampak dari kegiatan ekonomi yang terkait dengan sektor kelautan dan pesisir di Indonesia.	Lingkungan; Ekonomi masyarakat;	-	Indeks	-
	Indeks Ekonomi Hijau	Ekonomi Hijau;	Indeks Ekonomi Hijau mengukur kemampuan ekonomi suatu negara dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi sambil menjaga kualitas lingkungan dan kesejahteraan sosial.	[32010026] Wilayah;	-	Indeks	-
	Indeks Kapasitas Daerah	Kapasitas Daerah;	Penilaian tahunan atas kapasitas atau ketahanan suatu daerah dalam menghadapi bencana.	[32010026] Wilayah;	-	Indeks	-

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
25010045	Indeks Kepuasan Masyarakat	[K01368] Pelayanan Publik;	Angka yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan untuk memenuhi kebutuhannya terhadap pelayanan yang diterima.	[32010026] Wilayah;	-	Indeks	-
25010045	Indeks Kepuasan Masyarakat	[K01368] Pelayanan Publik;	Angka yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan untuk memenuhi kebutuhannya terhadap pelayanan yang diterima.	[32010026] Wilayah;	-	Indeks	-
	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	[K00893] Kerukunan Umat Beragama;	Angka yang menggambarkan persepsi masyarakat terhadap kehidupan keberagamaan, yang diukur melalui tiga dimensi utama: toleransi, kesetaraan, dan kerja sama.	[32010026] Wilayah;	-	Indeks	-
	Indeks Ketahanan Pangan	[K00914] Ketahanan Pangan;	Angka yang menggambarkan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan.	[3200026] Wilayah;	-	Indeks	-

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
33210018	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	[K00908] Kesetaraan Gender;	Angka yang menggambarkan suatu kondisi dan kedudukan antara laki laki dan perempuan yang tidak setara dalam hal memperoleh hak-haknya sebagai manusia terkait akses dan kontrol sumber daya, partisipasi dalam seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan.	[32010026] Wilayah;		Indeks	-
	Indeks Kualitas Kebijakan	Kualitas; Kebijakan;	Instrumen untuk mengukur kualitas kebijakan pemerintah terutama terhadap dampak atau hasil bagi pembangunan yang strategis dengan mengedepankan prinsip berbasis bukti (evidence-based).	[32010026] Wilayah;	-	Indeks	-
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Kualitas; Lingkungan Hidup;	Angka yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup suatu wilayah pada periode tertentu. Nilai IKLH merupakan komposit dari indeks kualitas udara, air tawar, lahan (termasuk tutupan dan ekosistem gambut), serta kualitas air laut.	[32010026] Wilayah;	-	Indeks	-
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Tutupan Lahan;	Angka yang menggambarkan kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan.	[32010026] Wilayah;	-	Indeks	-
31010019	Indeks Kualitas Udara	Pencemaran Udara;	Angka yang menggambarkan tingkat polusi udara di suatu wilayah.	[32010026] Wilayah;	-	Indeks	-
	Indeks Manajemen Risiko	Manajemen Risiko;	Penilaian yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko	[25020054] Klasifikasi Instansi Pemerintah;	-	Indeks	-

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Indeks Modal Manusia	Modal Manusia;	Ukuran potensi ekonomi individu yang mencakup pengetahuan, keterampilan, kemampuan, pengalaman, dan atribut lainnya seperti kesehatan dan kepribadian.	[32010026] Wilayah; Jenis Kelamin;	-	indeks	-
	Indeks Pelayanan Publik	[K01368] Pelayanan Publik;	Angka yang menggambarkan hasil pengukuran kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan adminstratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik	[32010026] Wilayah; Perangkat Daerah terpilih	-	Indeks	-
	Indeks Pelayanan Publik	Pelayanan Publik;	Sebuah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. IPP digunakan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas layanan, serta memastikan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. IPP juga menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan dan strategi pembangunan pelayanan publik.	[25020054] Klasifikasi Instansi Pemerintah;	-	Indeks	-
	Indeks Pelayanan Publik (Ombudsman)	[K01368] Pelayanan Publik; Opini (Pengawasan Pelayanan Publik Ombudsman);	Angka yang diperoleh dari hasil pengukuran kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik	[32010026] Wilayah	-	Indeks	-

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
33210001	Indeks Pembangunan Gender	[K00472] Pembangunan Gender;	Angka yang menggambarkan tingkat keberhasilan capaian pembangunan yang mengakomodasi persoalan gender pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup.	[32010026] Wilayah;		Indeks	-
	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	Pembangunan Keluarga;	Angka yang menggambarkan kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman,kemandirian dan kebahagiaan keluarga serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga	[32010026] Wilayah;		Indeks	-
	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Pembangunan Keluarga; Keluarga Berkualitas;	Angka pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga yang dibentuk dari 17 variabel serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga	[32010026] Wilayah;		Indeks	
	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	[K01384] Pembangunan; [K02130] Teknologi; [K00600] Informasi; TIK;	Angka yang menggambarkan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi	[32010026] Wilayah	-	Indeks	-
33210003	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	[K00485] Hak Asasi Manusia (HAM); [K00091] Anak;	Angka yang menggambarkan pencapaian pembangunan pemenuhan hak anak atas hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, serta hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang.	[32010026] Wilayah;		Indeks	-
	Indeks Pencegahan Bencana	Pencegahan Bencana;	Penilaian tahunan atas pencegahan suatu bencana.	[32010026] Wilayah;	-	Indeks	-

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Pengelolaan; Keanekaragaman Hayati;	Angka yang menggambarkan keanekaragaman makhluk hidup di muka bumi dan peranan-peranan ekologisnya yang meliputi keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman genetik.	[32010026] Wilayah;	-	Indeks	-
	Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	Pemulihan; Bencana;	Penilaian tahunan atas pengembangan sistem pemulihan bencana.	[32010026] Wilayah;	-	Indeks	-
	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;	Indikator yang menggambarkan atau mengukur kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	[32010026] Wilayah;	-	Indeks	-
	Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Kesiapsiagaan; Darurat; Bencana;	Penilaian tahunan atas Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana.	[32010026] Wilayah;	-	Indeks	-
33210004	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	[K01681] Perlindungan Anak;	Angka yang menggambarkan pencapaian pemenuhan hak anak dan perlindungan-khusus anak meliputi hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, dan perlindungan khusus.	[32010026] Wilayah;		Indeks	-
33210005	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	[K01681] Perlindungan Anak;	Angka yang menggambarkan pencapaian pembangunan perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.	[32010026] Wilayah;		Indeks	-
	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	Aparatur Sipil Negara (ASN); Profesionalitas;	Ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.	[32010026] Wilayah;	-	Indeks	

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Indeks Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi;	Angka yang menggambarkan pencapaian dari upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)	Perangkat Daerah	-	Indeks	-
	Indeks Reformasi Hukum	Reformasi Hukum;	Sistem penilaian pelaksanaan Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.	[32010026] Wilayah;	-	Indeks	-
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;	Angka yang menggambarkan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan yang dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain.		1. Kurang 2. Cukup 3. Baik 4. Sangat baik 5. Memuaskan	Indeks	-
	% Keuangan	Inklusi Keuangan;	Ketersediaan akses dan pemanfaatan atas produk dan/atau layanan PUJK yang terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan masyarakat.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Jumah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Prasarana; Fasilitas Pelayanan Kesehatan;	Banyaknya unit prasarana Fasilitas Layanan kesehatan yang tersedia dan berfungsi di rumah sakit	Jenis prasarana;	-	Total	unit
	Jumlah Akseptor yang Di-IB (Inseminasi Buatan)	Akseptor IB; Inseminasi Buatan (IB);	Banyaknya ternak betina produktif yang dimanfaatkan untuk penerapan teknik inseminasi buatan, yaitu memasukkan mani atau semen ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting.	[32010026] Wilayah; Tahun Penyajian;	-	Total	ekor

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan pada Periode Pelaporan Tertentu	Alat Kesehatan; Fasilitas Pelayanan Kesehatan; ;	Banyaknya unit alat kesehatan atau alat penunjang medik yang tersedia dan berfungsi di fasilitas layanan kesehatan rumah sakit pada periode pelaporan tertentu.	Jenis alat kesehatan; Kondisi alat;	-	Total	unit
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Alat Kesehatan; [K00443] Fasilitas Pelayanan Kesehatan;	Banyaknya unit alat kesehatan atau alat penunjang medik yang tersedia dan berfungsi di fasilitas layanan kesehatan rumah sakit.	Jenis Alat Kesehatan	-	Total	unit
	Jumlah Alat Mesin Pertanian dan Sarana Pendukung Pertanian yang Diadakan	Alat dan Mesin Pertanian; Sarana Pertanian;	Banyaknya pengadaan peralatan yang dioperasikan dengan motor penggerak ataupun tanpa motor penggerak untuk kegiatan budi daya pertanian seperti traktor, robot, alat kontrol, sprayer, fertigasi, fumigator, komputer, alat irigasi, dan mesin pengolah pakan serta segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan/atau bahan yang dibutuhkan untuk budi daya pertanian termasuk benih tanaman dan benih hewan atau bibit hewan, pupuk, pestisida, pakan, dan alat dan mesin pertanian.	[32010026] Wilayah; Tahun Penyajian	-	Total	unit
	Jumlah Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan	Alat Penangkapan Ikan (API); Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI);	Banyaknya alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan digunakan untuk membantu kegiatan penangkapan.	[32010026] Wilayah; Tahun; Jenis Alat;	-	Total	unit
	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Alat praktik; peraga; peserta didik;	Banyaknya alat praktik dan peraga yang tersedia untuk mendukung proses pembelajaran peserta didik pada bentuk pendidikan tertentu.	Wilayah Bentuk Pendidikan	-	Total	paket

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Aparatur Sipil Negara (ASN); ;	Banyaknya Aparatur Sipil Negara yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun tertentu.	1. Jenis Kelamin; 2. Kelompok Usia; 3. Jabatan; 4. Perangkat Daerah; 5. Status Kepegawaian (PNS/PPPK);	-	Total	orang
	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diberikan Penghargaan	Penghargaan; Aparatur Sipil Negara (ASN);	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menerima penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi kerja, dedikasi, inovasi, pengabdian, atau kontribusi lainnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan pada periode tertentu.	[32010026] Wilayah; Jabatan;	-	Total	orang
	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendapat pembinaan kedisiplinan	Disiplin; Aparatur Sipil Negara (ASN); Pembinaan;	Banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengikuti kegiatan pembinaan kedisiplinan sebagai upaya peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kode etik, dan norma perilaku dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada periode tertentu.	[32010026] Wilayah;	-	Total	dokumen
	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengikuti Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	Ujian Dinas; Penyesuaian Ijazah; Aparatur Sipil Negara (ASN);	Banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah menjalani ujian dinas atau proses penyesuaian ijazah dalam rangka pengembangan karier	[32010026] Wilayah; Jabatan; Pangkat/golongan ;	-	Total	orang
25010015	Jumlah Aparatur Sipil Negara yang Telah Mengikuti Pelatihan Fungsional	[K00147] Aparatur; Sipil Negara (ASN); [K01354] Pelatihan; [K00645] Jabatan Fungsional;	Banyaknya pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional dan telah mengikuti serta lulus pelatihan fungsional.	[32010026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [25020001] Golongan Pegawai Negeri Sipil (PNS); [10320009] Jenjang Pendidikan;	-	Total	orang

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Aparatur yang mendapatkan Peningkatan SDM	Peningkatan SDM;	Jumlah aparatur yang telah dilakukan Peningkatan Kapasitas SDM melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	[32010026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin;	-	Jumlah	orang
	Jumlah aplikasi atau website yang diaudit security assesment dan kontra penginderaan	Aplikasi; Website; Audit; Security Assesment; Kontra Penginderaan;	Banyaknya aplikasi/web yang telah diaudit security assesment dan kontra penginderaan.	Jenis Aplikasi;		Total	aplikasi/web
	Jumlah ASN yang Memiliki Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural	Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural;	Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.	Lulus pelatihan manajerial dan sosio kultural;	-	Jumlah	asn
	Jumlah ASN yang Memiliki Kompetensi Teknis dan Pengembangan Kompetensi Lainnya	Kompetensi Teknis dan Pengembangan Kompetensi Lainnya;	Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan.	Lulus pelatihan;	-	Jumlah	asn

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Kompetensi Pemerintahan	Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan;	Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan adalah proses pemberian Sertifikat Kompetensi Pemerintahan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Pemerintahan	Bersertifikat Uji Kompetensi;	-	Jumlah	asn
	Jumlah Bahan Habis Pakai Non Medis Pendukung Kegiatan Laundry, Pengadaan Linen	Bahan Habis Pakai; Non Medis;	Bagian dari seluruh jumlah kebutuhan bahan/barang yang sekali dipakai langsung habis, atau tidak dapat digunakan kembali untuk pemakaian berikutnya pendukung kegiatan laundry, pengadaan linen.	Periode Tahun	-	Total	paket
	Jumlah Bahan Medis Habis Pakai	Bahan Medis Habis Pakai;	Banyaknya alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai (single use) yang daftar produknya diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Jenis Barang;	-	Total	pcs / box / set
	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Koleksi Perpustakaan;	Banyaknya bahan perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan.	[32010026] Wilayah;	-	Total	judul
	Jumlah Bandar Udara	Bandar Udara;	Banyaknya tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.	[32010026] Wilayah; [24420001] Hierarki Bandar Udara; [24420013] Jenis Penggunaan Bandar Udara; [24420007] Klasifikasi Bandar Udara;	-	Total	unit

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Bantuan Mesin/Peralatan bagi Industri Kecil	Bantuan; Industri; Mesin/Peralatan;	Banyaknya unit bantuan berupa mesin dan/atau peralatan yang diberikan kepada pelaku industri kecil dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi, kualitas, dan daya saing usaha industri kecil, melalui program fasilitasi dari pemerintah pusat, daerah, atau lembaga lainnya selama periode tertentu.	[32010026] Wilayah;	-	Total	unit
	Jumlah Bibit Ikan Kerapu Cantang yang Dibudidayakan	Pembibitan Ikan; Pembudidayaan Ikan; Prasarana;	Banyaknya bibit ikan Kerapu Cantang yang dibudidayakan.	[32010026] Wilayah; Tahun;	-	Total	ekor
	Jumlah Bibit Ternak yang Dihasilkan	Bibit Ternak;	Banyaknya ternak yang dihasilkan mempunyai sifat unggul dan mampu mewariskan sifat tersebut serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.	[32010026] Wilayah; Tahun Penyajian	-	Total	ekor
	Jumlah BLUD Provinsi yang di bina	Badan layanan umum daerah (BLUD);	Banyaknya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang telah mendapatkan pembinaan teknis dan pengawasan dari Pemerintah Provinsi umumnya melalui Gubernur dalam kurun waktu penilaian tahunan.	[32010026] Wilayah;	-	Total	lembaga
	Jumlah Budidaya Rumput Laut	Budidaya; Rumput Laut;	Banyaknya rumput laut yang dibudidayakan.	[32010026] Wilayah; Tahun;	-	Total	kg

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah bulan pemenuhan Kebutuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tepat waktu	Pemenuhan Kebutuhan Operasional; Administrasi Keuangan; Kepala daerah; Wakil kepala daerah;	Banyaknya bulan yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan dan Operasional (meliputi gaji dan tunjangan, medical check up, penyediaan pakaian dinas, dan dana operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah)	[32010026] Wilayah;	-	Total	bulan
	Jumlah bulan Pemenuhan Kebutuhan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Fasilitas Materi dan Komunikasi pimpinan;	Banyaknya bulan yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan (fasilitasi untuk pelaksanaan koordinasi dan kebutuhan operasional untuk mendukung kelancaran aktifitas/kegiatan asisten administrasi umum dan staf ahli meliputi belanja operasional kantor seperti makan minum tamu, makan minum rapat, alat tulis kantor, belanja alat dan bahan untuk kegiatan kantor, biaya perjalanan dinas).	[32010026] Wilayah;	-	Total	bulan
	Jumlah Bulan Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah	[K01925] Rumah Tangga; Kepala daerah; Wakil Kepala daerah; Sekretariat daerah;	Banyaknya bulan yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga (kebutuhan rumah tangga yang dimaksud antara lain: belanja alat tulis kantor, belanja makan minum tamu, makan minum rapat, belanja perjalanan dinas, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor untuk mendukung kegiatan operasional Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah).	[32010026] Wilayah;	-	Total	bulan

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Business Meeting yang Diikuti/Diselenggarakan	Business Meeting;	Banyaknya rapat bisnis sebagai kegiatan formal yang dilakukan untuk tujuan bisnis, baik yang dihadiri oleh pihak luar maupun diorganisir sendiri yang melibatkan diskusi tentang strategi, proyek, atau masalah bisnis lainnya.	Tipe Rapat; Jenis Partisipasi;		Total	kegiatan (rapat)
	Jumlah Cadangan Pangan yang di kembangkan	[K00305] Cadangan Pangan Pemerintah;	Banyaknya persediaan bahan pangan pokok yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat disalurkan untuk keperluan konsumsi maupun dalam rangka stabilisasi harga pangan, penanganan masalah pangan/krisis pangan, pemberian bantuan pangan, kerja sama internasional, dan/atau keperluan lain yang diusahakan agar menjadi lebih maju, bertambah, atau meningkat.	Tahun Penyajian	-	Massa	ton
	Jumlah Cagar Budaya Provinsi yang Dimanfaatkan	Pemanfaatan; Cagar budaya; Provinsi;	Banyaknya penggunaan objek Cagar Budaya yang berada di wilayah administratif provinsi secara langsung atau tidak langsung oleh pemerintah daerah, masyarakat, atau pihak lain untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, agama, sosial, budaya, pariwisata, dan ekonomi kreatif dengan tetap menjamin kelestarian nilai, keaslian, dan keberadaan Cagar Budaya	[32010026] Wilayah;	-	Total	objek
	Jumlah Calon Pekerja Migran yang Terlayani	Calon Pekerja Migran Indonesia;	Banyaknya calon pekerja migran yang terlayani	[32010026] Wilayah;	-	Total	orang
	Jumlah Cold Storage	Cold Storage;	Banyaknya unit fasilitas penyimpanan berpendingin (cold storage) yang digunakan untuk menyimpan hasil perikanan agar tetap segar, dalam kondisi beku atau dingin, yang tercatat atau tersedia di suatu wilayah pada periode tertentu	[32010026] Wilayah;	-	Total	unit

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Daerah Aliran Sungai	Daerah Aliran Sungai (DAS);	Banyaknya wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah.	[32010026] Wilayah;	-	Total	area
	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/ Kota	Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota;	Banyaknya Daftar Arsip yang dilakukan Pendampingan Penyelamatan bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota.	[32010026] Wilayah;	-	total	arsip
	Jumlah Data dan Informasi HAKI yang ditindaklanjuti se Provinsi Kepulauan Riau (Kabupaten/Kota)	Data; Informasi; HAKI;	Banyaknya Data dan Informasi HAKI yang ditindak lanjuti se- Provinsi Kepulauan Riau (Kabupaten/Kota).	[32010026] Wilayah;	-	Jumlah	dokumen
	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Tersedia	Pemasaran Ikan; Pengolahan Ikan; Hasil Perikanan;	Banyaknya dokumen yang menyajikan data dan informasi terkait usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan.	[32010026] Wilayah; Tahun;	-	Total	dokumen
	Jumlah Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri yang Disediakan	Informasi;	Banyaknya keseluruhan data dan aktivitas penyampaian informasi pariwisata yang ditujukan untuk audiens di dalam maupun luar negeri yang telah disediakan	Jenis informasi/data (data statistik kunjungan wisatawan, data potensi destinasi, dsb); Media distribusi; [32010026] Wilayah;	-	Total	dokumen, produk atau kegiatan

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Data Kepegawaian yang Terkelola	Data Kepegawaian; Data;	Banyaknya data yang memuat informasi mengenai pegawai aparatur sipil negara yang telah dikumpulkan, disimpan, dipelihara, dan diperbarui secara sistematis oleh instansi pemerintah dalam suatu sistem pengelolaan data kepegawaian pada periode tertentu.	[32010026] Wilayah;	-	Total	data
	Jumlah data Ormas dan LSM Penerima Bantuan yang telah Diverifikasi	Penerima bantuan; Organisasi Kemasyarakatan (Ormas); Verifikasi;	Banyaknya data Ormas dan LSM yang telah diverifikasi sebagai penerima bantuan.	[32010026] Wilayah;	-	Total	ormas
	Jumlah Data Realisasi Pada Setiap Wilayah	Data; Realisasi;	Akumulasi data penerimaan (realisasi) keuangan atau pendapatan, baik pajak maupun retribusi, yang tercatat dan terdistribusi berdasarkan wilayah administratif tertentu	[32010026] Wilayah; Jenis Pajak;	-	Jumlah	rupiah
	Jumlah Daya Tarik Wisata Provinsi yang Dikembangkan	Daya tarik wisata;	Banyaknya lokasi atau objek wisata yang memiliki daya tarik wisata secara aktif dikembangkan oleh pemerintah daerah, swasta, atau masyarakat untuk menjadi tujuan kunjungan wisatawan.	Jenis (alam, budaya, buatan); Status (terdaftar resmi dan belum terdaftar); [32010026] Wilayah;	-	Total	daya tarik
	Jumlah Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi yang Ditetapkan	Daya tarik wisata;	Banyaknya lokasi atau objek wisata yang secara resmi telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai daya tarik wisata unggulan provinsi.	[32010026] Wilayah;	-	Total	daya tarik

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Dikembangkan	Destinasi Pariwisata;	Banyaknya destinasi pariwisata yang secara aktif dikembangkan oleh pemerintah daerah, swasta, atau masyarakat untuk menjadi tujuan kunjungan wisatawan.	[32010026] Wilayah; Tingkat prioritas (unggul, potensial, alternatif); Jenis daya tarik (alam, budaya dan buatan);	-	Total	destinasi
	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Ditetapkan	Destinasi Pariwisata;	Banyaknya destinasi pariwisata yang secara resmi telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, swasta, atau masyarakat untuk menjadi tujuan kunjungan wisatawan.	[32010026] Wilayah;	-	Total	destinasi
24510010	Jumlah Devisa Sektor Pariwisata	[K00379] Devisa; [K00860] Kepariwisataan;	Banyaknya penerimaan devisa sektor pariwisata yang berasal dari kunjungan wisatawan mancanegara.	[32010026] Wilayah;	-	Total	miliar dolar amerika serikat
10410032	Jumlah Dokter	[K00397] Dokter;	Banyaknya lulusan pendidikan kedokteran yang ahli dalam hal penyakit dan pengobatan	[32010026] Wilayah;	-	Total	orang
10410033	Jumlah Dokter Gigi	[K00397] Dokter;	Banyaknya lulusan pendidikan kedokteran yang ahli dalam hal penyakit dan pengobatan gigi.	[32010026] Wilayah;	-	Total	orang
	Jumlah Dokter Spesialis	Dokter;	Banyaknya lulusan pendidikan kedokteran yang memiliki keahlian dan pengetahuan mendalam di bidang kedokteran tertentu.	[32010026] Wilayah;	-	Total	orang
	Jumlah Dokumen Analisa Jabatan	Dokumen; Analisa Jabatan;	Banyaknya dokumen yang berisi informasi mengenai jabatan, termasuk uraian jabatan, beban kerja per jabatan, peta jabatan, dan bobot jabatan.	Perangkat Daerah	-	Total	dokumen
	Jumlah Dokumen Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah;	Banyaknya Dokumen Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	[25020054] Klasifikasi Instansi Pemerintah;	-	Total	dokumen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Risiko Bencana; Pembangunan; Bencana; Dokumen;	Banyaknya dokumen analisis risiko bencana pada kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana	Jenis Risiko Bencana; Tingkat Risiko; [32010026] Wilayah; Tahun;	-	Total	dokumen
	Jumlah Dokumen Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen; Perencanaan; Pembangunan; Daerah; Pembangunan Manusia;	Banyaknya Jumlah Dokumen Asistensi yang disusun dan disampaikan untuk membantu perangkat daerah dalam menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia.	Perangkat Daerah;	-	Total	dokumen
	Jumlah Dokumen Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Penyusunan Dokumen; Perencanaan; Pembangunan; Perangkat daerah; bidang perekonomian;	Banyaknya dokumen Asistensi yang telah disusun dan disampaikan untuk membantu perangkat daerah dalam menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian.	Perangkat Daerah;	-	Total	dokumen
	Jumlah Dokumen Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Dokumen; Asistensi; Penyusunan; Dokumen; Perencanaan ; Pembangunan; Daerah; SDA;	Banyaknya Dokumen Asistensi yang disusun dan disampaikan dalam menyusun dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA.	Perangkat Daerah;	-	Total	dokumen
	Jumlah Dokumen Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah; Dokumen; Asistensi; Penyusunan; Perencanaan; Pembangunan; Perangkat Daerah; Infrastruktur;	Banyaknya Dokumen Asistensi yang disusun dan disampaikan untuk membantu perangkat daerah dalam menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur.	OPD;	-	Jumlah	dokumen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah dokumen Assets management	Penatausahaan ; Barang milik daerah;	Banyaknya dokumen pengelolaan menyeluruh aset (BMN/BMD) mulai dari perencanaan hingga penghapusan, berbasis prinsip tata kelola yang baik.	[32010026] Wilayah;	-	Total	dokumen
	Jumlah Dokumen Berdasarkan Tingkat Penerapan Kerangka Hukum/Regulasi/Kebijakan/ Kelembagaan yang Mengakui dan Melindungi Hak Akses untuk Perikanan Skala Kecil	Perikanan; Kerangka; Kebijakan; Dokumen;	Banyaknya dokumen yang berisikan penerapan kebijakan hukum yang melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil.	[32010026] Wilayah; Tahun;	-	Total	dokumen
	Jumlah Dokumen Berupa Penerapan Pendekatan Berbasis Ekosistem dalam Pengelolaan Areal Lautan	Ekosistem; Laut; Dokumen;	Banyaknya dokumen terkait pengelolaan areal lautan yang melakukan penerapan pendekatan berbasis lingkungan ekosistem	Jenis Ekosistem; Status Penerapan; [32010026] Wilayah; Zona Laut;	-	Total	dokumen
	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perikanan Tangkap	Penangkapan Ikan; Dokumen;	Banyaknya dokumen yang menyajikan data dan informasi terkait kegiatan perikanan tangkap.	Jenis Dokumen; [32010026] Wilayah; Tahun;	-	Total	dokumen
	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahaan	Dokumen; Lahan; Relokasi;	Banyaknya dokumen resmi yang mencatat identifikasi, klasifikasi, dan verifikasi lahan yang memenuhi kriteria teknis dan administratif untuk digunakan sebagai lokasi relokasi permukiman oleh Pemerintah Provinsi.	[32010026] Wilayah; [32020020] Klasifikasi Wilayah;	-	Total	dokumen
	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen; Kawasan Rawan Bencana; Relokasi;	Banyaknya dokumen resmi yang mencatat informasi teknis, fisik, dan/atau administratif tentang rumah-rumah yang berada di kawasan rawan bencana dan/atau berpotensi terkena relokasi sebagai bagian dari program strategis pemerintah provinsi.	[32010026] Wilayah; [32020020] Klasifikasi Wilayah;	-	Total	dokumen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah dokumen data terpadu kesejahteraan sosial yang dipublikasikan	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial, serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).	[32010026] Wilayah;	-	Jumlah	dokumen
	Jumlah Dokumen Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersifat Inovatif yang ditindaklanjuti se Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah; Dokumen; Diseminasi; Prosedur; Pemerintahan Daerah; Inovatif;	Banyaknya dokumen Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif yang ditindaklanjuti se-Provinsi Kepulauan Riau.	[32010026] Wilayah;	-	Jumlah	dokumen
	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Fasilitasi Kerja Sama Daerah;	Banyaknya dokumen Fasilitasi Kerja Sama Daerah	[32010026] Wilayah	-	Total	dokumen
	Jumlah Dokumen Harmonisasi Regulasi Pelayanan Perizinan	Dokumen; Harmonisasi Regulasi Pelayanan Perizinan;	Banyaknya dokumen yang telah disusun dan disetujui dalam rangka harmonisasi regulasi yang berkaitan dengan pelayanan perizinan mencakup dokumen-dokumen yang berisi kebijakan, prosedur, dan peraturan yang disesuaikan untuk meningkatkan efisiensi dan konsistensi dalam pelayanan perizinan.	Jenis Pelayanan;		Total	dokumen
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD;	Banyaknya dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	[32010026] Wilayah	-	Total	dokumen
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Badan Musyawarah;	Banyaknya dokumen resmi yang dihasilkan sebagai bukti dukungan administrasi, koordinasi, dan penyediaan bahan dalam pelaksanaan fungsi dan tugas Badan Musyawarah DPRD.	[32010026] Wilayah	-	Total	dokumen
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan	Hasil Fasilitasi Penataan;	Banyaknya dokumen Hasil Fasilitasi Penataan wilayah	[32010026] Wilayah	-	Total	dokumen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Sistem Informasi; [K01411] Pemerintah Daerah; Keuangan Daerah;	Banyaknya dokumen yang merekam seluruh proses pelaksanaan (implementasi) serta kegiatan pemeliharaan, perbaikan, dan pengembangan berkelanjutan dari sistem informasi yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengelola data dan proses keuangan daerah.	[32010026] Wilayah;	-	Total	dokumen
	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN)	Pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN); Aparatur Sipil Negara (ASN);	Jumlah dokumen hasil pengelolaan dan pelaksanaan pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN) karena pensiun, meninggal, atau alasan administratif lainnya	[32010026] Wilayah;	-	Total	dokumen
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kas Daerah;	Banyaknya dokumen resmi yang dihasilkan melalui proses koordinasi antara unit teknis pengelolaan kas daerah (seperti Subbidang Pengelolaan Kas atau Bidang Perbendaharaan) dan berbagai pemangku kepentingan (unit kerja daerah, bank/kantor kas, instansi terkait)	[32010026] Wilayah;	-	Total	dokumen
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum;	Banyaknya dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	[32010026] Wilayah	-	Total	dokumen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	[K00103] Anggaran; Belanja daerah;	Jumlah dokumen yang berisi hasil kesepakatan, harmonisasi, sinkronisasi, dan penyesuaian antara rencana pembangunan daerah dan rencana anggaran belanja, yang disusun dan disepakati melalui mekanisme formal seperti Musrenbang, forum perangkat daerah, atau koordinasi lintas sektor, dan menjadi dasar penyusunan KUA-PPAS, RKPD, dan RKA-SKPD, sesuai dengan ketentuan UU No. 23/2014, PP No. 12/2019, Permendagri No. 86/2017, dan Permendagri No. 77/2020.	[32010026] Wilayah;	-	Total	dokumen
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	[K00103] Anggaran; Pembiayaan daerah;	Jumlah dokumen tertulis yang memuat hasil sinkronisasi, harmonisasi, dan kesepakatan antar pemangku kepentingan daerah (Bappeda, BPKAD, SKPD, dan DPRD) mengenai perencanaan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD, yang diperoleh melalui proses koordinasi formal seperti forum perangkat daerah, musrenbang, dan rapat teknis, dan menjadi dasar penyusunan KUA–PPAS serta RAPBD, sesuai ketentuan dalam UU No. 17/2003, UU No. 23/2014, PP No. 12/2019, Permendagri No. 86/2017, dan Permendagri No. 77/2020.	[32010026] Wilayah;	-	Total	dokumen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring / Pemantauan, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Fasilitas; Asistensi; Sinkronisasi; Supervisi; Monitoring / Pemantauan; Evaluasi; [K00349] Dana Perimbangan; Dana; Transfer ;	Banyaknya berkas terdokumentasi yang menjadi bukti sah bahwa seluruh proses administratif dan teknis (koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring, evaluasi) telah dilakukan dalam mengelola dana perimbangan (seperti DAU, DAK) dan transfer lainnya, mencakup analisis, rekomendasi, hasil temuan, tindak lanjut, dan laporan capaian secara formal	[32010026] Wilayah;	-	Total	dokumen
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	[K02220] Transaksi ; Transaksi non tunai; Lembaga keuangan ; [K00713] Bank;	Banyaknya dokumen yang menjadi bukti formal bahwa telah dilakukan Koordinasi dan Pelaksanaan Kerja Sama antara entitas pemerintah (misalnya KPPN) dengan lembaga keuangan baik bank maupun non-bank dalam rangka implementasi sistem pembayaran nontunai serta Monitoring dan Evaluasi efektivitas sistem transaksi non tunai, termasuk identifikasi hambatan, temuan risiko, pencapaian implementasi, dan tindak lanjut.	[32010026] Wilayah;	-	Total	dokumen
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Antar Daerah	Mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN); Aparatur Sipil Negara (ASN); Jabatan Pimpinan Tinggi; Jabatan Administrasi; Jabatan Pelaksana;	Banyaknya dokumen resmi yang dihasilkan sebagai bukti pelaksanaan proses mutasi Aparatur Sipil Negara, yang mencakup mutasi pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana, serta mutasi ASN antar daerah, yang diterbitkan oleh instansi pemerintah pada periode tertentu.	[32010026] Wilayah; Jenis Kelamin;	-	Total	dokumen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Reses;	Banyaknya dokumen resmi yang memuat laporan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD di daerah pemilihannya, yang dilakukan pada masa reses sesuai jadwal yang telah ditetapkan.	[32010026] Wilayah	-	Total	dokumen
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Fungsi Penganggaran (Budgeting);	Banyaknya dokumen resmi yang dihasilkan dari proses pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) antara Kepala Daerah dan DPRD, yang memuat kesepakatan bersama terkait rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah untuk satu tahun anggaran.	[32010026] Wilayah	-	Total	dokumen
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Rancangan; Peraturan Daerah;	Banyaknya dokumen resmi yang dihasilkan dari proses pembahasan Ranperda oleh DPRD bersama Kepala Daerah atau perangkat daerah terkait, yang memuat hasil kesepakatan, perubahan, atau catatan penting terhadap substansi Ranperda sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah.	[32010026] Wilayah	-	Total	dokumen
	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelayanan Publik	Dokumen; Pembinaan; [K01368] Pelayanan Publik;	Banyaknya Dokumen kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik	[32010026] Wilayah, Perangkat Daerah terpilih	-	Total	dokumen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Penatausahaan; Pembiayaan Daerah;	Banyaknya dokumen resmi yang memuat seluruh kegiatan administratif dan pencatatan pembiayaan daerah termasuk pinjaman, pembayaran utang, penerimaan atau pemberian hibah, investasi, serta penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) yang disusun oleh perangkat daerah pengelola keuangan (seperti BPKAD atau SKPKD) berdasarkan pelaksanaan penatausahaan pembiayaan dalam APBD.	[32010026] Wilayah;	-	Total	dokumen
	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Dikelola	Pendidikan Lanjutan; Aparatur Sipil Negara (ASN);	Banyaknya dokumen resmi yang dihasilkan dari pelaksanaan pendidikan lanjutan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan dikelola oleh instansi pemerintah sebagai bagian dari pengembangan kompetensi ASN pada periode tertentu.	[32010026] Wilayah; Tingkat Pendidikan terakhir; Jabatan;	-	Total	orang
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan;	Banyaknya dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	[32010026] Wilayah	-	Total	dokumen
	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan promosi Aparatur Sipil Negara (ASN)	Promosi Aparatur Sipil Negara (ASN); Aparatur Sipil Negara (ASN);	Banyaknya dokumen resmi yang dihasilkan sebagai bukti pelaksanaan proses pengelolaan promosi Aparatur Sipil Negara yang disusun dan diterbitkan oleh instansi pemerintah pada periode tertentu.	[32010026] Wilayah; Jabatan;	-	Total	orang
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Sistem Informasi Kepegawaian; Sistem Informasi;	Banyaknya sistem informasi kepegawaian yang secara aktif digunakan dan dikelola oleh instansi	[32010026] Wilayah;	-	Total	dokumen
	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang di Laksanakan	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan;	Banyaknya dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang di Laksanakan	[32010026] Wilayah	-	Total	dokumen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	penilaian kelayakan; usul perizinan; pendidikan menengah; masyarakat;	Banyaknya dokumen hasil penilaian kelayakan terhadap usul perizinan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat.	Wilayah;	-	Total	dokumen
	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	penilaian; kelayakan; usul perizinan; pendidikan khusus; masyarakat;	Banyaknya dokumen hasil penilaian kelayakan terhadap usul perizinan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.	Wilayah;	-	Total	dokumen
	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Penyusunan; Program Pembentukan; Peraturan Daerah;	Banyaknya dokumen resmi yang dihasilkan dari proses penyusunan dan pembahasan daftar prioritas rancangan peraturan daerah untuk jangka waktu tertentu (biasanya 1 tahun anggaran), yang telah disepakati bersama antara DPRD dan kepala daerah.	[32010026] Wilayah	-	Total	dokumen
	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Penyusunan; Naskah Akademik;	Banyaknya dokumen resmi berupa penjelasan, keterangan, dan/atau naskah akademik yang disusun dalam rangka mendukung penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) atau produk hukum daerah lainnya, yang prosesnya memperoleh dukungan, bimbingan, atau pendampingan (fasilitasi) dari pihak yang berwenang.	[32010026] Wilayah	-	Total	dokumen
	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Pemetaan Kompetensi ASN; pendidik; tenaga kependidikan; pendidikan menengah; pendidikan khusus;	Banyaknya dokumen hasil perhitungan dan pemetaan pendidik serta tenaga kependidikan satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus.	Wilayah	-	Total	dokumen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas dana, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Rekonsiliasi; [K00159] Aset; Ekuitas dana; [K01450] Pendapatan; Belanja daerah; Pembiayaan daerah; Laporan operasional (LO); Beban;	Banyak nya dokumen yang memuat hasil pencocokan data keuangan dan akuntansi antara entitas pelaporan (seperti OPD) dengan BPKAD atau unit akuntansi lainnya, yang mencakup Aset, Kewajiban, Ekuitas Dana, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan Laporan Operasional (Pendapatan-LO), Beban	[32010026] Wilayah;	-	Total	dokumen
	Jumlah Dokumen Indeks Daya Saing Daerah Provinsi Kepri	Jumlah; Dokumen; Indeks Daya Saing Daerah;	Banyaknya Dokumen IDSD yang merupakan gambaran tingkat produktivitas, perkembangan, persaingan, dan kemandirian suatu daerah.	[32010026] Wilayah;	-	Jumlah	dokumen
	Jumlah Dokumen Jejaring Kelitbangan dan Inovasi Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah; Dokumen; Inovasi;	Banyaknya dokumen Jejaring Kelitbangan dan Inovasi Provinsi Kepulauan Riau.	[32010026] Wilayah;	-	Jumlah	dokumen
	Jumlah Dokumen Kajian dan Regulasi Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha	Dokumen Kajian; Kajian; Pemberian Insentif; Pemberian Kemudahan;	Banyaknya dokumen yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah atau institusi terkait yang mencakup informasi, kebijakan, dan peraturan mengenai pemberian insentif, kemudahan berusaha, serta kajian yang relevan dengan topik tersebut.	Lembaga Penerbit; Tahun Terbit; Jenis Dokumen;		Total	dokumen
	Jumlah Dokumen Kajian Isu Strategis di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah; Dokumen; Kajian; Isu Strategis;	Banyaknya dokumen yang memuat Hasil kajian dan analisis tentang isu-isu strategis yang relevan dengan pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau.	OPD;	-	Jumlah	dokumen
	Jumlah Dokumen Kajian Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah; Dokumen; Kajian; Penelitian; Pengembangan Perindustrian; Perdagangan;	Banyaknya dokumen yang memuat hasil kajian, penelitian dan pengembangan prindustrian dan perdagangan.	[32010026] Wilayah;	-	Jumlah	dokumen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	Perundang-undangan;	Banyaknya dokumen Penunjang dalam menyusun suatu Rancangan Peraturan Daerah.	[32010026] Wilayah	-	Total	dokumen
	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun /Tereview/Terlegalisasi	Dokumen; PKP;	Banyaknya dokumen perencanaan, regulasi, pedoman, atau strategi di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang Tersusun, Tereview, Terlegalisasi.	[32010026] Wilayah;	-	Total	dokumen
	Jumlah Dokumen Kebijakan BUMD dan BLUD yang disusun	Laporan Evaluasi Kinerja BUMD dan BLUD;	Banyaknya Dokumen Kebijakan BUMD dan BLUD yang disusun	[32010026] Wilayah	-	Total	dokumen
	Jumlah Dokumen Kebijakan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi;	Banyaknya Dokumen Kebijakan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	[32010026] Wilayah	-	Total	dokumen
	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah yang disusun	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;	Banyaknya Dokumen Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah yang disusun	[32010026] Wilayah	-	Total	dokumen
	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha yang disusun	Laporan Evaluasi Kinerja BUMD;	Banyaknya Dokumen Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha yang disusun	[32010026] Wilayah	-	Total	dokumen
	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Fasilitasi Peraturan Gubernur dan kebijakan Perekonomian;	Banyaknya Dokumen Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	[25020054] Klasifikasi Instansi Pemerintah;	-	Total	dokumen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN); Aparatur Sipil Negara (ASN); Pegawai Negeri Sipil (PNS); Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK); Koordinasi; Fasilitasi;	Banyaknya dokumen resmi yang mencerminkan kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	[32010026] Wilayah;	-	Total	dokumen
	Jumlah Dokumen Kelembagaan dan Analisa Jabatan yang Disusun	Dokumen; [K02366] Lembaga; Analisis Jabatan;	Banyaknya dokumen kelembagaan sebagai suatu tatanan dan pola hubungan antara anggota masyarakat atau organisasi yang saling mengikat yang dapat menentukan bentuk hubungan antar manusia atau antar organisasi yang diwadahi dalam suatu organisasi atau jaringan dan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik atauran formal maupun informal untuk pengendalian perilaku sosial serta insentif untuk bekerjasama dan mencapai tujuan bersama.	Perangkat Daerah	-	Total	dokumen
	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Dokumen; Lembaga; Kemitraan; Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;	Banyaknya dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	Bentuk Dokumen; [32010026] Wilayah; Waktu;	-	Total	dokumen
	Jumlah dokumen Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	Kerja Sama Antar Pemerintah;	Banyaknya dokumen Kerja Sama Antar Pemerintah yang Di Fasilitasi	[32010026] Wilayah	-	Total	dokumen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah dokumen Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	Kerja Sama Badan Usaha/Swasta;	Banyaknya dokumen Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	[32010026] Wilayah	-	Total	dokumen
	Jumlah dokumen konten media komunikasi publik yang diproduksi	Dokumen; Konten; Media; Komunikasi Publik;	Banyaknya bentuk informasi yang dapat berupa tulisan, gambar, suara, animasi, atau kombinasi dari semuanya dalam bentuk digital, termasuk software aplikasi untuk diunduh (download) terkait program dan kebijakan pemerintah.		1. Media cetak 2. Media daring 3. Media luar ruang 4. Media Penyiaran 5. Media sosial	Total	konten
	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS perubahan yang disusun	Kebijakan umum anggaran (KUA); Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);	Banyaknya dokumen perubahan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas program dan plafon anggaran (PPAS) sementara yang telah disusun	[32010026] Wilayah;	-	Total	dokumen
	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	Kebijakan umum anggaran (KUA); Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);	Banyaknya Dokumen yang menyajikan kerangka kebijakan umum keuangan daerah untuk satu tahun anggaran serta dokumen yang menjabarkan program prioritas dan batas maksimal (plafon) anggaran per SKPD/urusan/pelaksana, sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD.	[32010026] Wilayah;	-	Total	dokumen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja yang Telah Tersusun	Dokumen; Akuntabilitas Kinerja; Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);	Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau ketidaktercapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi.	Perangkat Daerah	-	Total	dokumen
	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Kerjasama Perbatasan;	Banyaknya Dokumen Laporan Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	[32010026] Wilayah	-	Total	dokumen
	Jumlah Dokumen LKJip Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Jumlah; Dokumen; LKJip;	Banyaknya Dokumen LKJIP Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.	OPD;	-	Jumlah	dokumen
	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Dokumen; Monitoring; Evaluasi; Perencanaan; Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian;	Banyaknya Dokumen yang memuat hasil Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang telah disusun dan disampaikan.	Perangkat Daerah;	-	Total	dokumen
	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah; Dokumen; Monitoring; Evaluasi; Perencanaan; Pembangunan; Daerah; Infrastruktur;	Banyaknya Dokumen yang memuat hasil Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang telah disusun dan disampaikan.	OPD;	-	Jumlah	dokumen
	Jumlah Dokumen Mutasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Provinsi Kepri	Mutasi; pendidik; tenaga kependidikan;	Banyaknya dokumen terkait mutasi pendidik dan tenaga kependidikan di Provinsi Kepulauan Riau.	Wilayah	-	Total	dokumen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Mutasi dan Promosi Aparatur Sipil Negara (ASN)	Mutasi; Promosi; Aparatur Sipil Negara (ASN);	Banyaknya dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pemerintah atas pelaksanaan proses mutasi dan promosi Aparatur Sipil Negara pada periode tertentu.	[32010026] Wilayah; Jabatan;	-	Persentase	persen
	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Otonomi Daerah	Pelaksanaan Otonomi Daerah;	Banyaknya dokumen Pelaksanaan Otonomi Daerah	[32010026] Wilayah	-	Total	dokumen
	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN)	Penilaian Kinerja; Evaluasi Kinerja; Aparatur Sipil Negara (ASN);	Banyaknya dokumen resmi yang dihasilkan dari proses penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN)	[32010026] Wilayah; Predikat kinerja;	-	Total	dokumen
	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan;	Banyaknya dokumen Pelaksanaan Tugas Pemerintahan mencakup LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban)	[32010026] Wilayah	-	Total	dokumen
	Jumlah Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan Kinerja pada Website Kepri;	Banyaknya Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	[25020054] Klasifikasi Instansi Pemerintah;	-	Total	dokumen
	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan; Kawasan Perbatasan;	Banyaknya Dokumen Pemanfaatan bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain	[32010026] Wilayah	-	Total	dokumen
	Jumlah Dokumen Pembangunan Kawasan Perbatasan	Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan; Kawasan Perbatasan;	Banyaknya Dokumen Pembangunan bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain	[32010026] Wilayah	-	Total	dokumen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Dokumen pembinaan pelaksanaan RB dan Akuntabilitas Kinerja	Dokumen; Akuntabilitas Kinerja; RB;	Banyaknya dokumen pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instani pemerintah atas pengguna anggaran melalui kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara mandiri hasil analisis terhadap pelaksanaan kinerja.	Perangkat Daerah	-	Total	dokumen
	Jumlah Dokumen Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran di Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau	Peta Daerah Rawan Kebakaran;	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	[32010026] Wilayah;	-	Jumlah	dokumen
	Jumlah Dokumen Pemetaan Potensi Investasi	Dokumen; Pemetaan; Potensi Investasi;	Banyaknya Dokumen yang dibuat sebagai hasil dari proses pemetaan potensi investasi, yang dapat meliputi laporan, studi, peta, dan dokumen lain yang terkait dengan identifikasi dan analisis potensi investasi.	Letak Geografis; Sektor; Jenis Dokumen;		Total	dokumen
	Jumlah Dokumen Pemetaan Potensi Investasi Daerah	Dokumen; Pemetaan; Potensi Investasi Daerah;	Banyaknya dokumen yang berisi informasi terperinci mengenai potensi investasi di suatu daerah mencakup analisis pasar, peluang investasi, dan rekomendasi strategis.	Letak Geografis; Sektor; Jenis Dokumen;		Total	dokumen
	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Bencana; Rehabilitasi; Rekonstruksi; Dokumen; Pasca;	Banyaknya dokumen penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota melalui pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITUPASNA) Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (r3p)	Jenis Dokumen; Jenis Bencana; [32010026] Wilayah; Tahun;	-	Total	dokumen
	Jumlah Dokumen Pendataan Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Dokumen; Rumah Korban Bencana; Relokasi;	Banyaknya dokumen resmi yang mencatat data fisik dan/atau administrasi mengenai rumah-rumah milik warga yang menjadi korban bencana atau yang direlokasi	[32010026] Wilayah;	-	Total	dokumen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			sebagai bagian dari program pemerintah daerah provinsi.				
	Jumlah Dokumen Pendukung Kelembagaan Keamanan Pangan (Keamanan Pangan Segar Provinsi)	Keamanan Pangan Segar;	Banyaknya dokumen mengenai kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan Segar dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.	[32010026] Wilayah; Tahun Penyajian	-	Total	dokumen
	Jumlah Dokumen Pendukung Terkait Kelautan dan Perikanan	Dokumen; Kelautan; Perikanan;	Banyaknya dokumen resmi yang berisi peraturan terkait kelautan dan perikanan	Jenis Dokumen;	-	Total	dokumen
	Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah	Anggaran Daerah;	Banyaknya dokumen resmi yang disusun dan ditetapkan sebagai bagian dari siklus pengelolaan keuangan daerah, yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah untuk periode satu tahun anggaran.	[32010026] Wilayah	-	Total	dokumen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Dokumen Pengawasan Lokpri dan Pulau Terluar Kabupaten/Kota	Lokasi Prioritas (Lokpri); Pulau-Pulau Kecil Terluar.;	Banyaknya dokumen Pengawasan Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) dan Pulau-Pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional di Kabupaten/Kota	[32010026] Wilayah	-	Total	dokumen
	Jumlah Dokumen Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi yang disusun	Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi di Provinsi Kepulauan Riau;	Banyaknya dokumen Pengelola Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi yang disusun	[32010026] Wilayah	-	Total	dokumen
	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kenaikan Pangkat Aparatur Sipil Negara (ASN)	Kenaikan Pangkat; Aparatur Sipil Negara (ASN);	Banyaknya dokumen resmi yang disusun dan diterbitkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar pelaksanaan proses pengelolaan kenaikan pangkat Aparatur Sipil Negara pada periode tertentu.	[32010026] Wilayah; Jabatan;	-	Total	orang
	Jumlah Dokumen Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TJSLDU) Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah; Dokumen; Pengelolaan; Tanggung Jawab Sosial; Lingkungan Dunia Usaha;	Banyaknya dokumen Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TJSLDU) Provinsi Kepulauan Riau.	W[32010026] Wilayah;	-	Jumlah	dokumen
	Jumlah Dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	- Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah; - Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK).;	Banyaknya Dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	[32010026] Wilayah	-	Total	dokumen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	- Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau; - Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK).;	Banyaknya Dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	[32010026] Wilayah	-	Total	dokumen
	Jumlah Dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Kegiatan Strategis, Pembangunan Wilayah dan dana alokasi khusus;	Banyaknya Dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah dan laporan dana alokasi khusus	[32010026] Wilayah	-	Total	dokumen
	Jumlah Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Dokumen Pengendalian Pelaksanaan kerjasama daerah;	Banyaknya Dokumen yang dihasilkan oleh pemerintah daerah terkait Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah.		-	Total	dokumen
	Jumlah Dokumen Penyiapan Materi Pimpinan yang Disiapkan	Materi, Pimpinan;	Banyaknya dokumen/materi yang disiapkan berupa Pidato, Sambutan, Pointer yang disampaikan kepada Pimpinan	[32010026] Wilayah	-	Total	dokumen
	Jumlah Dokumen Perencanaan OPD yang Responsif Gender	Dokumen; Perangkat Daerah; Responsif Gender;	banyaknya dokumen perencanaan yang disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan menerapkan prinsip anggaran responsif gender, yaitu dokumen yang memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dalam hal akses, partisipasi, kontrol, serta manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki, disabilitas dan lansia	[32010026] Wilayah;		Total	dokumen
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen; Perencanaan; Pembangunan Daerah; Bidang; Pembangunan Manusia;	Banyaknya Dokumen Perencanaan yang disusun dan disampaikan untuk Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD/RPJMD/RKPD).	Perangkat Daerah;	-	Total	laporan

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Dokumen; Perencanaan; Pembangunan Daerah; Bidang Pemerintahan;	Banyaknya Dokumen Perencanaan yang disusun dan disampaikan untuk Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD/RPJMD/RKPD).	Perangkat Daerah;	-	Total	dokumen
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Dokumen; Perencanaan; Pembangunan; Daerah; SDA;	Banyaknya Dokumen Perencanaan yang disusun dan disampaikan untuk Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD/RPJMD/RKPD).	Perangkat Daerah;	-	Total	dokumen
	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Dokumen; Prasarana; Sarana; Utilitas Umum;	Banyaknya dokumen rencana teknis, rencana kegiatan, atau rencana anggaran yang disusun oleh pemerintah pusat/daerah yang berisi perencanaan penyediaan atau pengembangan infrastruktur dasar permukiman, baik di kawasan baru, kawasan kumuh, maupun kawasan relokasi.	[32010026] Wilayah;	-	Total	dokumen
	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);	Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disusun kembali ketika terdapat perubahan APBD (Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	[32010026] Wilayah;	-	Total	dokumen
	Jumlah Dokumen Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022	Jumlah Dokumen; Perubahan; RKPD;	Banyaknya Dokumen Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 yang dihasilkan.		-	Total	dokumen
	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Dokumen; Ketahanan Ekonomi; Sosial; Budaya;	Banyaknya Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.	[32010026] Wilayah;	-	Total	dokumen
	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Pokok-Pokok Pikiran DPRD;	Banyaknya konsep Pengembangan Pemikiran DPRD yang dituangkan dalam suatu dokumen	[32010026] Wilayah	-	Total	dokumen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Dokumen Profil Pemetaan Kompetensi Pegawai	Pemetaan Kompetensi; Pegawai; Aparatur Sipil Negara (ASN); ;	Banyaknya dokumen hasil pemetaan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam lingkup jabatan dan organisasi	[32010026] Wilayah;	-	Total	dokumen
	Jumlah Dokumen Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran	Regulasi kebijakan anggaran;	Banyaknya dokumen perundang-undangan yang menetapkan kerangka fiskal, prioritas anggaran, pagu anggaran, aturan teknis penyusunan anggaran, serta kebijakan ekonomi-fiskal terkait penggunaan anggaran—baik pada tingkat nasional (APBN/RAPBN) maupun daerah (APBD/RKA-SKPD).	[32010026] Wilayah;	-	Total	dokumen
	Jumlah Dokumen Rekomendasi dan Kebijakan Energi dan Air yang disusun	Rekomendasi dan Kebijakan Energi dan Air;	Banyaknya Dokumen Rekomendasi dan Kebijakan Energi dan Air yang disusun	[32010026] Wilayah	-	Total	dokumen
	Jumlah Dokumen Rekomendasi dan Kebijakan Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro Yang Disusun	Surat Edaran Tentang Pengendalian Inflasi Menjelang Hari Raya Idul Fitri;	Banyaknya Dokumen Rekomendasi dan Kebijakan Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro Yang Disusun	[25020054] Klasifikasi Instansi Pemerintah;	-	Total	dokumen
	Jumlah Dokumen Rekomendasi dan Kebijakan Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro Yang Disusun	Rapat Koordinasi Optimalisasi UMKM;	Banyaknya Dokumen Rekomendasi dan Kebijakan Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro Yang Disusun	[25020054] Klasifikasi Instansi Pemerintah;	-	Total	dokumen
	Jumlah Dokumen Rekomendasi dan Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan yang disusun	Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan;	Banyaknya Dokumen Rekomendasi dan Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan yang disusun	[32010026] Wilayah	-	Total	dokumen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Dokumen Rekomendasi GMP	GMP (Good Manufacturing Practices);	Banyaknya Dokumen Resmi atau lisensi yang diberikan terkait Good Manufacturing Practice / Cara produksi yang baik	[32010026] Wilayah; Tahun;	-	Total	dokumen
	Jumlah Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Jumlah; Dokumen; Rencana Kinerja Tahunan (RKT);	Banyaknya Dokumen perencanaan yang memuat rencana dan target pencapaian Kinerja Tahunan (RKT) badan perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.	OPD;	-	Jumlah	dokumen
	Jumlah Dokumen Rencana Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Legalisasi;	Banyaknya dokumen rencana penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dilegalisasi	Dokumen; Tahun;	-	Total	dokumen
	Jumlah Dokumen Renja dan Renja Perubahan Barenlitbang	Jumlah; Dokumen; Renja; Perubahan;	Banyaknya Dokumen perencanaan yang memuat rencana dan target pencapaian kinerja tahunan Barenlitbang yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah,serta dokumen perubahan yang memuat penyesuaian rencana kerja akibat perubahan kondisi atau kebijakan.	OPD;	-	Jumlah	dokumen
	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang Diverifikasi	Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);	Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah disusun oleh Kepala SKPD dan kemudian ditelaah/verifikasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk memastikan kesesuaiannya sebelum menjadi bagian dari rancangan Perda APBD	[32010026] Wilayah;	-	Total	dokumen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah dokumen RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023	Jumlah Dokumen; RKPD;	Banyaknya dokumen RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 yang dihasilkan.		-	Total	dokumen
	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh	Dokumen; Rumah Layak Huni; Kawasan Kumuh;	Banyaknya dokumen resmi (berita acara serah terima/BAST) yang menyatakan bahwa rumah baru layak huni telah dibangun dan diserahkan kepada penerima manfaat (masyarakat), khususnya yang berada di kawasan permukiman kumuh sesuai kriteria yang ditetapkan pemerintah.	[32010026] Wilayah;	-	Total	dokumen
	Jumlah Dokumen SOP Ketentraman dan Ketertiban Umum yang disusun	SOP Trantibum;	Banyaknya SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang tersusun	SOP;	-	Jumlah	dokumen
	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Badan pemeriksa keuangan (BPK); Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD);	Banyaknya dokumen formal yang memuat tanggapan serta rencana aksi dari pemerintah daerah melalui kepala daerah dan perangkat terkait sebagai bentuk tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	[32010026] Wilayah;	-	Total	dokumen
	Jumlah Dokumen Tatalaksana Pemerintah yang Dikelola	Dokumen; Tatalaksana Pemerintah;	Banyaknya dokumen proses analisis dan perbaikan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.	Perangkat Daerah	-	Total	dokumen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Dokumen yang Berisi Data dan Informasi Sop/Juknis Prosedur Penetapan Izin Usaha Bidang Perikanan Budidaya (Luasan Pemanfaatan Lahan dan Sarana Prasarana Perikanan Budidaya, Produksi, dll)	SOP/Juknis Prosedur Penetapan Izin Usaha Bidang Perikanan; Budidaya; Perizinan Berusaha; Pembudidayaan Ikan;	Banyaknya dokumen yang berisi data dan informasi SOP/Juknis Prosedur Penetapan Izin Usaha Bidang Perikanan Budidaya (luasan pemanfaatan lahan dan sarana prasarana perikanan budidaya, produksi, dll).	Jenis Dokumen; [32010026] Wilayah;	-	Total	dokumen
	Jumlah Dokumen yang Berisi Data dan Informasi Tentang Keragaan Perikanan Budidaya (Luasan Pemanfaatan Lahan dan Sarana Prasarana Perikanan Budidaya, Produksi, dll)	Pembudidayaan Ikan; Dokumen;	Banyaknya dokumen yang menyajikan data dan informasi terkait perikanan budidaya	Jenis Dokumen; [32010026] Wilayah; Tahun;	-	Total	dokumen
	Jumlah Dokumen yang Disusun terkait Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pengadaan Barang/Jasa;	Banyaknya dokumen yang disusun terkait pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah	[32010026] Wilayah;	-	Total	dokumen
	Jumlah Dokumen yang Disusun terkait Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pengadaan Barang/Jasa;	Banyaknya dokumen yang disusun terkait pengelolaan informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan	[32010026] Wilayah;	-	Total	dokumen
	Jumlah Dokumen yang disusun terkait Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Pengadaan Barang/Jasa;	Banyaknya dokumen yang disusun terkait Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	[32010026] Wilayah;	-	Total	dokumen
	Jumlah dukungan administratif, keuangan dan tata kelola KPID Provins Kepri	Dukungan Administratif; Keuangan; KPID;	Banyaknya dukungan yang diberikan pada Komisi Penyiaran Daerah (KPID) Provinsi Kepri berupa tata kelola, administratif dan keuangan	Jenis Dukungan; Jenis Kegiatan;		Total	dokumen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Ekosistem Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Ekosistem Ekonomi Kreatif;	Banyaknya Ekosistem Ekonomi Kreatif yang dikembangkan untuk mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi kreatif di suatu wilayah.	[32010026] Wilayah; Subsektor;	-	Total	unit (ekosistem per wilayah atau per sektor)
	Jumlah Ekosistem Ekonomi Kreatif yang Dimonitoring dan Dievaluasi	Ekosistem Ekonomi Kreatif;	banyaknya ekosistem ekonomi kreatif yang telah dilakukan proses pemantauan (monitoring) dan penilaian kinerja (evaluasi) oleh pihak berwenang dalam suatu periode tertentu	[32010026] Wilayah; Subsektor;	-	Total	unit (ekosistem per wilayah atau per sektor)
	Jumlah Eksemplar Buku Data dan Informasi Pembangunan Provinsi Kepri	Jumlah; Eksemplar; Buku Data; informasi; Pembangunan;	Banyaknya eksemplar buku yang memuat data dan Informasi Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau.		-	Jumlah	eksemplar
31010040	Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Emisi Gas Rumah Kaca;	Banyaknya pelepasan gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah dari kegiatan yang dijalankan dalam pembangunan sektor-sektor prioritas mencakup kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri, limbah dan ekosistem pesisir dan laut (blue carbon).	[32010026] Wilayah;	-	Total	million tonnes of carbon dioxide equivalent
	Jumlah Fasilitas Sekolah	Fasilitas Sekolah;	Banyaknya sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan, yang meliputi ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang administrasi, serta fasilitas pendukung lainnya pada bentuk pendidikan tertentu di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.	[32010026] Wilayah; Bentuk Pendidikan;	-	Total	unit

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Fasilitasi Bagi Pelaku Usaha Perikanan yang Terlaksana	Pelaku Usaha; Perikanan; Fasilitas;	Serangkaian usaha fasilitasi/pendampingan yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha.	[32010026] Wilayah; Tahun;	-	Total	unit kegiatan / jumlah pelaku usaha/ kelompok usaha yang difasilitasi
	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Izin Pembangunan dan Operasional Pelabuhan Pengumpan Regional	Izin Pembangunan; Pelabuhan Pengumpan;	Banyaknya kegiatan atau dokumen fasilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi atau instansi terkait dalam rangka membantu badan usaha atau instansi pemohon dalam proses pemenuhan persyaratan perizinan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	[32010026] Wilayah;	-	Jumlah	laporan
	Jumlah Fasilitasi Tim Pengorganisasian Kelitbangan	Jumlah; Fasilitasi; Tim Pengorganisasian ;	Banyaknya fasilitasi yang diberikan kepada tim pengorganisasian kelitbangan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan.	OPD;	-	Jumlah	laporan
	Jumlah Fasiltasi Agenda Kelitbangan	Jumlah; Fasiltasi; Agenda;	Banyaknya fasilitasi yang diberikan untuk mendukung pelaksanaan agenda kelitbangan, termasuk perencanaan,pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan.	OPD;	-	Jumlah	laporan
	Jumlah Forum Anak yang Dibina	Forum 677hh Anak; Pembinaan;	Banyaknya Forum Anak yang mendapatkan fasilitasi, pendampingan, atau pembinaan dari pemerintah, pemerintah daerah, maupun lembaga/mitra terkait, baik dalam aspek kelembagaan, kapasitas, maupun program/kegiatan.	[32010026] Wilayah;		Total	forum
	Jumlah Fungsional Analis Kebijakan Berdasarkan Jenjang	Aparatur Sipil Negara (ASN); Jabatan Fungsional; Jabatan	Banyaknya ASN dalam Jabatan Fungsional Analis Kebijakan yang berada pada masing-masing jenjang	Jenjang jabatan fungsional;	-	Total	orang

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Fungsional Analis Kebijakan;					
	Jumlah Fungsional Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Dibina	Jabatan Fungsional; Aparatur Sipil Negara (ASN);	Banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menduduki jabatan fungsional dan mendapatkan pembinaan dari instansi pemerintah melalui kegiatan pembimbingan, pengawasan, pengembangan kompetensi, serta fasilitasi lainnya dalam rangka peningkatan profesionalisme dan kinerja pada periode tertentu.	[32010026] Wilayah; Jenjang jabatan fungsional;	-	Total	orang
	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial di dalam panti	Gelandangan dan Pengemis;	Banyaknya gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial di dalam panti.	[32010026] Wilayah	-	Jumlah	orang
	Jumlah Genset yang tersedia di Daerah Terpencil dan Perdesaan di Provinsi Kepulauan Riau	Genset yang tersedia di Daerah Terpencil dan Perdesaan;	Banyaknya Genset yang tersedia di daerah terpencil dan perdesaan di Provinsi Kepulauan Riau.	[32010026] Wilayah;	-	Jumlah	unit
	Jumlah Guru di Provinsi Kepulauan Riau	Guru;	Banyaknya pendidik profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil belajar, membimbing, dan melatih peserta didik pada jalur pendidikan formal di seluruh jenjang pendidikan pada wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Guru mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maupun guru non-PNS yang diakui oleh bentuk pendidikan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	[32010026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; Bentuk Pendidikan; Status Sertifikasi;	-	Total	orang

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Hewan Satwa yang Dilakukan Pemeriksaan Kesehatan	Hewan; Pemeriksaan Kesehatan Hewan;	Banyaknya binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya yang dilakukan pemeriksaan kesehatan hewan dan penyidikan penyakit pada hewan atau ternak.	[32010026] Wilayah; Tahun Penyajian; Jenis Hewan	-	Total	ekor
	Jumlah Individu Calon Wirausaha Baru yang Telah Mengikuti Pelatihan	[K02166] Pekerja Mandiri/Wirausaha; Pelatihan;	Banyaknya orang yang belum memiliki usaha atau sedang dalam tahap merintis usaha, yang telah mengikuti kegiatan pelatihan secara formal atau nonformal dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kewirausahaan, guna mendorong terciptanya usaha baru yang produktif dan berdaya saing.	[32010026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin;	-	Total	orang
	Jumlah Industri dan Usaha Pariwisata yang Difasilitasi Standarisasi	Industri Pariwisata; Usaha Pariwisata;	Banyaknya Industri dan Usaha di sektor pariwisata yang telah difasilitasi oleh pemerintah daerah, baik berupa penyusunan standar pelayanan, pelatihan, sertifikasi, maupun pendampingan penerapan standar operasional guna menjamin mutu layanan dan produk dalam penyelenggaraan pariwisata.	Jenis usaha;	-	Total	usaha
	Jumlah Infeksi Baru HIV per 1000 Penduduk Tidak Terinfeksi	Penduduk; Human Immunodeficiency Virus;	Banyaknya kasus baru HIV pada penduduk berusia 15 tahun ke atas dalam periode tertentu untuk setiap 1.000 orang yang masih berisiko (belum terinfeksi HIV).	[32010026] Wilayah;	-	Total	kasus perseribu penduduk
	Jumlah Izin Penggunaan Arsip	Penggunaan Arsip;	banyaknya penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK.	[25020054] Klasifikasi Instansi Pemerintah		total	dokumen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Jabatan Fungsional Bersertifikasi Kompetensi (Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jabatan Fungsional dan Sertifikasi Kompetensi;	Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Sertifikasi Kompetensi adalah proses pemberian Sertifikat Kompetensi kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi.	Uji Kompetensi;	-	Jumlah	asn
	Jumlah Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang Terbentuk	Lembaga Penyedia Layanan; Peningkatan Kualitas Hidup Anak;	banyaknya hubungan kemitraan atau kerja sama yang dibangun secara formal maupun informal antara lembaga pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat yang menyediakan layanan bagi anak, dengan tujuan memperkuat koordinasi, sinergi program, dan efektivitas pelayanan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup anak.	[32010026] Wilayah;		Total	lembaga
	Jumlah Kab/Kota yang di Tata Kelembagaannya	Tata Kelola; [K02366] Lembaga; [K00709] Kabupaten; [K00989] Kota;	Banyaknya Perangkat Daerah di Kabupaten Kota yang ditata secara tepat fungsi, tepat ukuran dan sinergis secara berkelanjutan menuju perangkat daerah yang modern.	[32010026] Wilayah; Perangkat Daerah	-	Total	kab/kota

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Kabupaten/Kota Sehat (KKS)	Kabupaten/Kota Sehat;	Banyaknya kabupaten/kota yang menyelenggarakan tatanan kabupaten/kota sehat dengan kriteria memiliki SK Tim Pembina KKS, SK Forum KKS tingkat kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan, serta rencana kerja untuk mendapatkan swastisaba dan telah diverifikasi oleh Tim Pembina Provinsi	[32010026] Wilayah;	-	Total	kabupaten/kota
	Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Kesehatan Kerja	Kabupaten; Kota; Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3);	Banyaknya kabupaten/kota yang melaksanakan kesehatan kerja.	[32010026] Wilayah;	-	Total	kabupaten/kota
	Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Kesehatan Olahraga	Kabupaten; Kota; Kesehatan; Olahraga;	Banyaknya kabupaten/kota yang melaksanakan kesehatan olahraga.	[32010026] Wilayah;	-	Total	kabupaten/kota
10410036	Jumlah Kabupaten/Kota yang Mencapai Eliminasi Malaria	[K00709] Kabupaten; [K00989] Kota; [K00428] Eliminasi Penyakit; [K01133] Malaria;	Banyaknya kabupaten/kota yang telah mencapai pengurangan kasus penyakit malaria pada tahun tertentu.	[32010026] Wilayah;	-	Total	kabupaten/kota
	Jumlah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Penyebaran Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dari Provinsi	Kabupaten; Kota; Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE); Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;	Banyaknya kabupaten/kota yang mendapatkan penyebaran komunikasi informasi dan edukasi (KIE) perilaku hidup bersih dan sehat dari provinsi.	[32010026] Wilayah;	-	Total	kabupaten/kota

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Kajian dan Penelitian Terdokumentasi yang telah dilakukan oleh Instansi Kelitbangan di Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah; Kajian; Penelitian; Terdokumentasi;	Banyaknya dokumentasi hasil kajian dan penelitian yang dilakukan oleh instansi Kelitbangan, yang biasanya berfokus pada isu-isu strategis yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan, tata kelola pemerintahan, peningkatan pelayanan publik, dan pengembangan potensi daerah.	OPD;	-	Jumlah	buku
	Jumlah Kajian Pemetaan Pemanfaatan EBT (Energi Baru Terbarukan) Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah; Kajian; Pemetaan; Pemanfaatan; EBT (Energi Baru Terbarukan);	Banyaknya Kajian yang memetakan potensi, ketersediaan, dan Pemanfaatan EBT (Energi Baru Terbarukan) Provinsi Kepulauan Riau.	[32010026] Wilayah;	-	Jumlah	dokumen
24110254	Jumlah Kapal Penangkap Ikan	[K02362] Kapal Penangkap Ikan;	Banyaknya kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan, serta memiliki alat penangkapan ikan.	[32010026] Wilayah; [24420010] Jenis Pelabuhan Perikanan;	-	Total	unit
	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO	[K00809] Kekerasan; [K01647] Perempuan; [K01642] Perdagangan Orang;	Banyaknya kasus yang dilaporkan terkait kekerasan terhadap perempuan usia > 18 tahun termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang.	[32010026] Wilayah;		Total	kasus
	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang Dikembangkan	kawasan strategis pariwisata;	Banyaknya kawasan yang merupakan kawasan strategis pariwisata yang secara aktif dikembangkan oleh pemerintah daerah, swasta, atau masyarakat untuk menjadi tujuan kunjungan wisatawan.	[32010026] Wilayah;	-	Total	kawasan
	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang Ditetapkan	Kawasan Strategis Pariwisata;	Banyaknya kawasan di tingkat provinsi yang telah ditetapkan secara resmi sebagai kawasan strategis pariwisata.	[32010026] Wilayah;	-	Total	kawasan strategis

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Akuntansi; [K01411] Pemerintah Daerah;	Banyaknya dokumen berbentuk kebijakan dan pedoman teknis operasional yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan akuntansi daerah.	[32010026] Wilayah;	-	Total	dokumen
	Jumlah Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang Ditetapkan	Kebijakan Pengawasan;	Banyaknya Regulasi/ Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang ditetapkan	[25020054] Klasifikasi Instansi Pemerintah;	-	Total	laporan
	Jumlah kegiatan peningkatan pemahaman masyarakat terkait perlindungan perempuan termasuk TPPO	Masyarakat; Perlindungan Perempuan; [K01642] Perdagangan Orang;	Banyaknya kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi terkait perlindungan perempuan termasuk TPPO.	[32010026] Wilayah;		Total	kegiatan
	Jumlah Kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Perhutanan Sosial;	Banyaknya pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan persiapan (seperti penataan areal, perizinan, inventarisasi, dan penyusunan rencana) dan pengembangan (seperti pendampingan masyarakat dan pembentukan kemitraan lingkungan).	[32010026] Wilayah;	-	Total	kegiatan
	Jumlah kekerasan emosional	[K00811] Kekerasan Emosional;	Banyaknya korban yang mengalami kekerasan emosional/psikis (perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang).	[32010026] Wilayah; [32020020] Klasifikasi Wilayah;		Total	kasus

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah kekerasan fisik	[K00812] Kekerasan Fisik;	banyaknya korban yang mengalami kekerasan fisik (perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat).	[32010026] Wilayah; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [10320055] Tingkat Pendidikan; [10120063] Status Perkawinan;		Total	kasus
	Jumlah Kekerasan fisik dan non fisik	[K00812] Kekerasan Fisik, [K00813] Kekerasan Seksual, [K00811] Kekerasan Emosional;	banyaknya korban yang mengalami kekerasan fisik, seksual dan emosional/psikis.	[32010026] Wilayah; [32020020] Klasifikasi Wilayah;		Total	kasus
	Jumlah Kekerasan Seksual	[K00813] Kekerasan Seksual;	banyaknya jumlah, bentuk, serta karakteristik kasus kekerasan seksual yang dialami individu (terutama perempuan dan anak) dalam kurun waktu tertentu.	[32010026] Wilayah; [32020020] Klasifikasi Wilayah;		Total	kasus
	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang mendapatkan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Lembaga; Kelompok Tani Hutan;	Banyaknya Kelompok Tani Hutan yang mendapatkan fasilitasi atau pembinaan yang meliputi penguatan organisasional dan pendampingan kelembagaan misalnya melalui pelatihan, workshop, atau pendampingan teknis.	[32010026] Wilayah;	-	Total	kelompok
	Jumlah Kelompok yang Dikembangkan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kelompok; Ketersediaan Pangan; Pangan Lokal;	Banyaknya kelompok yang dikembangkan guna tersedianya pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.	[32010026] Wilayah; Tahun Penyajian	-	Total	kelompok

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Kelompok yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi keluarga	pemberdayaan Ekonomi Keluarga;	banyaknya kelompok masyarakat/keluarga yang memperoleh fasilitasi, pendampingan, pelatihan, bantuan, atau akses program dalam rangka meningkatkan kapasitas, keterampilan, serta kemandirian ekonomi keluarga untuk mendukung ketahanan dan kesejahteraan keluarga.	[32010026] Wilayah;		Total	kelompok
	Jumlah Kelompok yang Menerapkan Pola B2SA	Kelompok; Beragam, Bergizi Seimbang; dan Aman (B2SA);	Banyaknya kelompok yang melaksanakan kaidah mengonsumsi pangan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan tubuh untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.	[32010026] Wilayah; Tahun Penyajian	-	Total	kelompok
	Jumlah Kelompok yang Terbina Melalui Peningkatan Kualitas Teknis dan Manajemen Usaha Kelompok	Kualitas Teknis; Manajemen Usaha kelompok;	Banyaknya kelompok yang terbina melalui peningkatan kualitas teknis dan manajemen usaha kelompok	[32010026] Wilayah; Tahun;	-	Total	kelompok
	Jumlah keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	Bantuan Kesejahteraan Lainnya;	Jenis bantuan yang tidak dapat dikategorikan sebagai bantuan ekonomi produktif.	[32010026] Wilayah;	-	Jumlah	kartu keluarga
	Jumlah keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Kelompok Usaha Bersama;	Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga.	[32010026] Wilayah;	-	Jumlah	kartu keluarga
	Jumlah keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Usaha Ekonomi Produktif;	Bantuan peningkatan ekonomi bagi warga miskin berupa bantuan modal usaha.	[32010026] Wilayah;	-	Jumlah	kartu keluarga

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah keluarga yang Mendapatkan Pengarahan Mengenai Kesetaraan Gender dan Hak Anak	Keluarga; Kesetaraan Gender; Hak Anak;	Banyaknya keluarga yang mengikuti kegiatan penyuluhan, bimbingan, pelatihan, atau pengarahan yang bertujuan meningkatkan pemahaman dan praktik keluarga dalam menerapkan prinsip kesetaraan gender serta menjamin pemenuhan hak anak.	[32010026] Wilayah;		Total	keluarga
	Jumlah Keluarga yang Tercakup Layanan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	[K00829] Keluarga; [K00611] Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);	Banyaknya keluarga yang tercakup dalam layanan pengelolaan air limbah secara fisika, kimia dan/atau biologi sehingga memenuhi baku mutu air limbah.				
	Jumlah kelulusan siswa setingkat menengah atas	Tamat Sekolah;	Banyaknya peserta didik yang mampu menyelesaikan pendidikan menengah atas	[32010026] Wilayah; Jenis Kelamin;	-	Total	orang
	Jumlah kelulusan siswa setingkat pendidikan menengah atas	Tamat Sekolah;	Banyaknya peserta didik yang mampu menyelesaikan pendidikan menengah atas	[32010026] Wilayah; Jenis Kelamin; Bentuk Pendidikan;	-	Total	orang
	Jumlah Kepala Sekolah di Provinsi Kepulauan Riau	Kepala sekolah;	Banyaknya Kepala Sekolah yang aktif bertugas dan memenuhi kualifikasi sesuai standar nasional pada bentuk pendidikan tertentu	[32010026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; Bentuk Pendidikan; Status Sertifikasi;	-	Total	orang
	Jumlah ketelibatan masyarakat dalam KIE	KIE (Komunikasi, Infomasi, dan Edukasi);	Banyaknya masyarakat yang terlibat dalam penggunaan KIE Perpustakaan.	Waktu		total	orang

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Ketersediaan Data/Informasi Perkembangan Investasi di Kepulauan Riau	Data; Informasi; Investasi;	Banyaknya data atau informasi terkait perkembangan investasi di Kepulauan Riau yang tersedia dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan (pemerintah, investor, masyarakat) dalam periode waktu tertentu.	Sektor;		Total	informasi/data
	Jumlah Klaster Perikanan Budidaya yang Terbentuk Berdasarkan Jenis/ Kawasan	Pembudidayaan Ikan; Kawasan Budi Daya Perikanan;	Banyaknya pembagian klaster perikanan budidaya berdasarkan jenis/kawasan	[32010026] Wilayah; Tahun;	-	Total	klaster
	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Koleksi Budaya;	Banyaknya semua bahan perpustakaan yang membahas tentang etnis baik yang mutakhir maupun retrospektif yang memuat informasi tentang 7 (tujuh) unsur kebudayaan sesuai dengan peraturan perundangan yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh perpustakaan daerah tingkat provinsi.	[32010026] Wilayah;	-	Total	eksemplar
	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Provinsi yang Dikembangkan	Koleksi Perpustakaan;	Banyaknya koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang dikembangkan.	[32010026] Wilayah;	-	Total	judul
	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	Kompetensi; Muatan Lokal; Pendidikan Menengah;	Banyaknya kompetensi dasar muatan lokal untuk pendidikan menengah yang telah disusun.	[32010026] Wilayah;	-	Total	dokumen
	Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan permakanan	Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Provinsi;	Korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan permakanan.	[32010026] Wilayah;	-	Jumlah	orang
	Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima mendapatkan dukungan psikososial	Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Provinsi;	Korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima mendapatkan dukungan psikososial.	[32010026] Wilayah;	-	Jumlah	orang

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Korban Bencana Hilang per 100.000 Orang	Korban; Bencana; Hilang;	Banyaknya korban hilang per 100.000 orang akibat bencana dalam suatu wilayah.	Jenis Bencana; [32010026] Wilayah; Waktu;	-	Total	orang per 100.000 orang
	Jumlah Korban Bencana Mengungsi per 100.000 Orang	Korban; Bencana; Pengungsi;	Banyaknya korban mengungsi per 100.000 orang akibat bencana dalam suatu wilayah.	Jenis Bencana; [32010026] Wilayah; Waktu;	-	Total	orang per 100.000 orang
	Jumlah Korban Bencana Meninggal per 100.000 Orang	Korban; Bencana; Meninggal;	Banyaknya korban meninggal per 100.000 orang akibat bencana dalam suatu wilayah	Jenis Bencana; [32010026] Wilayah; Waktu;	-	Total	orang per 100.000 orang
	Jumlah Korban Bencana Terluka per 100.000 Orang	Korban; Bencana; Luka;	Banyaknya korban terluka per 100.000 orang akibat bencana dalam suatu wilayah.	Jenis Bencana; [32010026] Wilayah; Waktu;	-	Total	orang per 100.000 orang
	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Korban Bencana; Logistik; Evakuasi;	Banyaknya korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jenis Bencana; [32010026] Wilayah; Waktu;	-	Total	orang
	Jumlah korban perdagangan orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti	Korban perdagangan Orang;	Seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.	[32010026] Wilayah;	-	Jumlah	orang

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
24510014	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	[K01008] Wisata; [K02332] Wisatawan Mancanegara;	Banyaknya perjalanan kurang dari enam bulan yang dilakukan oleh wisatawan mancanegara dalam wilayah Indonesia dengan tujuan bukan untuk sekolah atau bekerja, dengan mengunjungi objek wisata komersial, dan/atau menginap di akomodasi komersial.	[32010026] Wilayah;	-	Total	kunjungan
24510015	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	[K01008] Wisata; [K02334] Wisatawan Nusantara;	Banyaknya perjalanan kurang dari enam bulan yang dilakukan oleh penduduk dalam wilayah Indonesia dengan tujuan bukan untuk sekolah atau bekerja, dengan mengunjungi objek wisata komersial, dan/atau menginap di akomodasi komersial, dan/atau jarak perjalanan lebih besar dari atau sama dengan 100 kilometer pergi-pulang.	[32010026] Wilayah;	-	Total	kunjungan
	Jumlah Kurikulum SMK yang Link and Match dengan DUDI	Kurikulum; Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); Link and Match (terhubung); Relevan; Usaha; Industri;	Banyaknya kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang terhubung/relevan (link and match) dengan dunia usaha dan dunia industri.	[32010026] Wilayah;	-	Total	dokumen
	Jumlah Kurikulum yang sesuai dengan Kearifan Lokal Pendidikan Khusus	Kurikulum; Kearifan Lokal; Pendidikan Khusus;	Banyaknya Kurikulum yang sesuai dengan kearifan Lokal Pendidikan Khusus	[32010026] Wilayah;	-	Total	dokumen
	Jumlah Kurikulum yang sesuai dengan kearifan Lokal Pendidikan Khusus	Kurikulum; Kearifan Lokal; Sekolah Luar Biasa (SLB);	Banyaknya kurikulum pendidikan khusus yang disusun sesuai kearifan lokal.	[32010026] Wilayah;	-	Total	dokumen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Kurikulum yang sesuai dengan kearifan Lokal Pendidikan Menengah	Kurikulum; Kearifan Lokal; Pendidikan Menengah;	Banyaknya Kurikulum yang sesuai dengan kearifan Lokal Pendidikan Menengah	[32010026] Wilayah;	-	Total	dokumen
	Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	Lanjut Usia Terlantar;	seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.	[32010026] Wilayah;	-	Jumlah	orang
	Jumlah laporan Analisis Kondisi Daerah Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah; Laporan Analisis; Kondisi daerah; Permasalahan; Isu strategis; Pembangunan daerah;	Banyaknya Laporan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah terkait analisis Kondisi Daerah ,Permasalahan, dan isu strategis Pembangunan Daerah.		-	Total	laporan
	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Barang Milik Daerah;	Banyaknya laporan resmi aset daerah (LBKP, LBP, LBMD) yang disusun dan disampaikan sesuai kewenangan (Kuasa Pengguna → Pengguna → Pengelola) dalam periode yang diatur.	[32010026] Wilayah;	-	Total	laporan
	Jumlah Laporan Daftar aset tetap milik daerah	Aset Tetap;	Banyaknya laporan resmi yang disusun oleh pemerintah daerah mengenai Daftar Aset Tetap milik daerah dalam periode tertentu (biasanya tahunan). Laporan ini memuat seluruh informasi seperti kode barang, jenis aset, nilai perolehan, lokasi, masa manfaat, kondisi aset, serta status penyusutan atau mutasi aset tersebut.	[32010026] Wilayah;	-	Total	laporan
	Jumlah Laporan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Distribusi; Alat Kesehatan; Obat; Vaksin; Makanan; Fasilitas Pelayanan Kesehatan;	Banyaknya laporan distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan lainnya yang disusun.	[32010026] Wilayah;	-	Total	laporan

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Peraturan daerah Kab/Kota; Peraturan Kepala daerah; APBD-P;	Banyaknya laporan mengenai keputusan resmi yang dikeluarkan oleh Gubernur (sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat), yang berisi hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan APBD), dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD	[32010026] Wilayah;	-	Total	laporan
	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	[K00622] Investasi; [K01411] Pemerintah Daerah;	Banyaknya dokumen atau laporan yang merangkum hasil evaluasi investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.	[32010026] Wilayah;	-	Total	laporan
	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Cicilan; Bunga; Pinjaman; [K01411] Pemerintah daerah;	Banyaknya laporan yang disusun oleh instansi pengelola keuangan daerah (seperti Badan Keuangan Daerah atau BPKAD) yang memuat hasil kajian terhadap perencanaan pembayaran pinjaman, pelaksanaan pembayaran pinjaman serta Analisis Pembayaran.	[32010026] Wilayah;	-	Total	laporan
	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Pinjaman Daerah;	Banyaknya laporan yang disusun oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang berisi Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah.	[32010026] Wilayah;	-	Total	laporan
	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Bantuan Keuangan;	Banyaknya laporan yang telah disusun dan disampaikan oleh instansi pemerintah daerah (misalnya BPKAD) yang berisi kajian mengenai Perencanaan bantuan keuangan, Pelaksanaan atau penyaluran bantuan keuangan, dan Evaluasi dan analisis antara perencanaan dan realisasi.	[32010026] Wilayah;	-	Total	laporan

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota	Hasil Evaluasi; RKPD;	Banyaknya Laporan yang dihasilkan oleh pemerintah Kabupaten/kota terkait hasil evaluasi atas dokumen RKPD yang telah disusun dan dilaksanakan.	[32010026] Wilayah;	-	Total	laporan
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan;	Banyaknya Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	[32010026] Wilayah	-	Total	laporan
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kab/Kota	Peraturan Daerah Kab/Kota; [K01276] Pajak; [K01898] Retribusi;	Banyaknya laporan keputusan resmi yang dikeluarkan oleh Gubernur, berisi penyatuan dan pengesahan hasil evaluasi internal dan eksternal atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	[32010026] Wilayah;	-	Total	laporan
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Fasilitasi; Pelaksanaan Acara;	Jumlah kegiatan pelayanan yang dilakukan untuk mendukung pelaksanaan acara pimpinan	[32010026] Wilayah	-	Total	dokumen
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Tugas dan Fungsi DPRD;	Banyaknya dokumen laporan yang disusun oleh sekretariat DPRD sebagai hasil dari kegiatan fasilitasi terhadap fraksi-fraksi di DPRD.	[32010026] Wilayah	-	Total	laporan
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Komunikasi, Pimpinan;	Banyaknya laporan tentang kegiatan pelayanan yang dilakukan untuk mendukung komunikasi pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	[32010026] Wilayah	-	Total	dokumen
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan;	Banyaknya laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan (laporan pelaksanaan kegiatan fasilitasi komunikasi yang dilaksanakan oleh asisten administrasi umum dan staf ahli)	[32010026] Wilayah;	-	Total	laporan

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Fasilitasi; Kunjungan Tamu;	Banyaknya laporan tentang kegiatan pelayanan kepada pimpinan saat menerima kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ataupun sebagai tamu dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah	[32010026] Wilayah	-	Total	dokumen
	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Inventarisasi; Barang Milik Daerah;	Banyaknya laporan resmi yang dibuat oleh Pengguna/Pengelola Barang Milik Daerah, yang memuat hasil inventarisasi fisik dan yuridis barang milik daerah, dan disusun sebagai bagian dari kewajiban penatausahaan sesuai ketentuan perundang-undangan	[32010026] Wilayah;	-	Total	laporan
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Laporan; Pelayanan; Penghubung;	Banyaknya dokumen resmi yang dihasilkan sebagai bentuk pelaporan atas kegiatan koordinasi dan sinkronisasi antara Pemerintah Daerah dengan instansi pemerintah pusat, lembaga vertikal, dan/atau mitra strategis lainnya yang dilaksanakan oleh unit pelayanan penghubung dalam rangka memperlancar komunikasi, fasilitasi kebijakan, pelayanan tamu daerah, serta penyampaian aspirasi daerah di tingkat pusat.	[32010026] Wilayah;	-	Total	laporan
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Akuntansi; Kas daerah;	Banyaknya Dokumen laporan tahunan yang merekam secara formal hasil koordinasi antar unit teknis seperti Subbid Pengelolaan Kas, Subbid Akuntansi, hingga SKPD terkait dalam pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah	[32010026] Wilayah;	-	Total	laporan

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang ditingkatkan	Pelayanan Publik; Aparatur; Masyarakat; Laporan;	Banyaknya dokumen hasil evaluasi, pemantauan, dan pengukuran terhadap mutu penyelenggaraan pelayanan publik, baik kepada masyarakat maupun kepada aparatur, yang memuat upaya atau rekomendasi peningkatan kualitas layanan sesuai standar pelayanan, disusun dan dilaporkan dalam kerangka sistem pelaporan kinerja pemerintahan daerah.	[32010026] Wilayah;	-	Total	laporan
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Hasil Monitoring; Evaluasi; Penyusunan; Laporan Berkala; Pelaksanaan Pembangunan;	Banyaknya Laporan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah terkait hasil Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan pelaksanaan Pembangunan Daerah.		-	Total	laporan
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Pendistribusian Pendidik; Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah Pendidikan Khusus;	Banyaknya laporan hasil pelaksanaan penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus.	Wilayah	-	Total	dokumen
	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Pelayanan; Kelembagaan; Aparatur; Masyarakat; Laporan;	Banyaknya dokumen laporan yang memuat hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan kelembagaan, baik kepada aparatur pemerintah maupun kepada masyarakat, yang disusun secara sistematis untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kinerja kelembagaan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.	[32010026] Wilayah;	-	Total	laporan

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Unit Kearsipan Lembaga Kearsipan;	Banyaknya Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi.	[32010026] Wilayah;	-	Total	laporan
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Peneyelamatan Non Kebakaran	Pembinaaan Penyelenggaraan; Pencegahan; Penanggulangan; Penyelamatan kebakaran dan non kebakaran;	Banyaknya laporan Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	[32010026] Wilayah;	-	Jumlah	laporan
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Pengawasan Arsip;	Banyaknya Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi.	[32010026] Wilayah;	-	total	laporan
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang Diterbitkan	Laporan Hasil Pengawasan;	Banyaknya Laporan Pengawasan Audit Tujuan Tertentu yang diterbitkan	[25020054] Klasifikasi Instansi Pemerintah;	-	Total	laporan
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Internal yang Diterbitkan Sesuai Standar Audit	Laporan Hasil Pengawasan;	Banyaknya Laporan Hasil Pengawasan Internal yang diterbitkan sesuai standar audit	[25020054] Klasifikasi Instansi Pemerintah;	-	Total	laporan
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan yang diterbitkan	Laporan Hasil Pengawasan;	Banyaknya Laporan Hasil Pengawasan Keuangan yang diterbitkan	[25020054] Klasifikasi Instansi Pemerintah;	-	Total	laporan
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja yang diterbitkan	Laporan Hasil Pengawasan;	Banyaknya Laporan Hasil Pengawasan Kinerja yang diterbitkan	[25020054] Klasifikasi Instansi Pemerintah;	-	Total	laporan
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Dana Bagi Hasil;	Banyaknya laporan yang disusun oleh pemerintah provinsi atau instansi terkait (misalnya BPKAD Provinsi) yang memuat hasil pengelolaan dana bagi hasil yang diterima dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain.	[32010026] Wilayah;	-	Total	laporan

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Dana Darurat;	Banyaknya laporan yang disusun oleh instansi pengelola keuangan daerah (seperti BPKAD) yang memuat hasil pengelolaan dana darurat dan dana untuk kebutuhan mendesak.	[32010026] Wilayah;	-	Total	laporan
	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang ditingkatkan	Promosi; Produk Unggulan; Pelestarian; Seni; Budaya; Laporan;	Banyaknya dokumen laporan yang memuat hasil kegiatan promosi terhadap produk unggulan daerah serta upaya pelestarian seni dan budaya lokal yang dilaksanakan dan ditingkatkan baik dari sisi cakupan, kualitas, maupun dampaknya terhadap masyarakat, dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi kreatif dan pelestarian jati diri budaya bangsa.	[32010026] Wilayah;	-	Total	laporan
	Jumlah Laporan Hasil Reviu Keuangan yang diterbitkan	Laporan Hasil Pengawasan;	Banyaknya Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang diterbitkan	[25020054] Klasifikasi Instansi Pemerintah;	-	Total	laporan
	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja yang diterbitkan	Laporan Hasil Pengawasan;	Banyaknya Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah yang diterbitkan	[25020054] Klasifikasi Instansi Pemerintah;	-	Total	laporan
	Jumlah Laporan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan Informasi; Harga Pangan; Neraca Bahan Makanan;	Banyaknya laporan informasi mengenai harga pangan dan analisis situasi ketersediaan pangan di suatu negara/wilayah dalam kurun waktu tertentu berdasarkan aspek penyediaan dan pemanfaatan pangan.	[32010026] Wilayah; Tahun Penyajian; Jenis Pangan;	-	Total	laporan
	Jumlah Laporan Kab/Kota yang diawasi	Laporan Hasil Pengawasan;	Banyaknya Laporan Hasil Pengawasan terhadap kabupaten/ Kota yang diawasi (diterbitkan)	[25020054] Klasifikasi Instansi Pemerintah;	-	Total	laporan
	Jumlah Laporan Kerja Sama yang dievaluasi	Kerja Sama yang dievaluasi;	Banyaknya Laporan Kerja Sama yang di Evaluasi	[32010026] Wilayah	-	Total	laporan

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Laporan Kerjasama Pengawasan yang Diselenggarakan	Laporan Hasil Pengawasan;	Banyaknya Laporan Kerjasama Pengawasan yang Diselenggarakan	[25020054] Klasifikasi Instansi Pemerintah;	-	Total	laporan
	Jumlah Laporan Keterangan dan Pemanfatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Laporan; Keterangan dan Pemanfaatan data; Informasi perencanaan Pembangunan; SKPD;	Banyaknya Laporan yang memuat Keterangan dan Pemanfatan data dan informasi Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD dalam menyusun rencana pembangunan daerah.		-	Total	laporan
	Jumlah Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah	Keterangan; Laporan Pertanggunggungj awaban (LKPJ); Kepala Daerah;	Banyaknya Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ).		-	Total	laporan
	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Satuan kerja perangkat daerah (SKPD); Badan layanan umum daerah (BLUD); [K01411] Pemerintah daerah;	Banyaknya laporan keuangan SKPD, BLUD , serta Laporan keuangan yang menyatukan (menggabungkan) laporan keuangan dari SKPD dan BLUD (jika ada), sebagai entitas pelaporan daerah tunggal.	[32010026] Wilayah;	-	Total	laporan
	Jumlah laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Pencegahan Korupsi;	Banyaknya Laporan Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang dilaksanakan	[25020054] Klasifikasi Instansi Pemerintah;	-	Total	laporan
	Jumlah laporan monitoring dan aspirasi publik	Laporan; Monitoring; Aspirasi Publik;	Banyaknya laporan dari hasil monitoring dan aspirasi publik	Jenis Kegiatan; [32010026] Wilayah;		Total	dokumen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Penyalahgunaan Narkotika dan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama yang telah disusun	Monitoring; Evaluasi; Ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya; Penyalahgunaan narkotika; FKUB;	Banyaknya Laporan Monitoring dan Evaluasi Ketahanan Ekonomi, sosial budaya, penyalahgunaan narkotika dan fasilitasi kerukunan umat beragama.	[32010026] Wilayah;	-	Total	dokumen
	Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan ekosistem SPBE	Laporan Monitoring; Evaluasi; Ekosistem SPBE;	Banyaknya Laporan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan ekosistem SPBE.	Jenis Kegiatan;		Total	laporan
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Laporan; Advokasi; Edukasi; Sosialisasi; Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA);	Banyaknya laporan yang memuat hasil kegiatan advokasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai gabungan aneka pangan sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang memenuhi standar keamanan pangan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.	[32010026] Wilayah; Tahun Penyajian	-	Total	laporan
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Kebijakan; Jalan;	Banyaknya laporan tentang kebijakan yang diterapkan dalam pengelolaan dan pemeliharaan jalan provinsi berjalan sesuai rencana, mencapai tujuan yang diharapkan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.	[32010026] Wilayah;	-	Total	laporan
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi Publik RKPD Provinsi Kepulauan Riau	RKPD; Pelaksanaan; Kegiatan; Konsultasi Publik;	Banyaknya laporan kegiatan konsultasi publik RKPD Provinsi Kepulauan Riau yang dilaksanakan.	[32010026] Wilayah;	-	Total	laporan

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Lembaga Kerjasama Tripartit;	Banyaknya dokumen tentang pelaksanaan forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh.	[32010026] Wilayah;	-	Total	dokumen
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	RPJPD; RPJMD; RKPD;	Banyaknya Laporan yang memuat hasil pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD).	Perangkat Daerah;	-	Total	laporan
	Jumlah Laporan Pemantauan Ketahanan Pangan dan Gizi	Laporan Pemantauan Ketahanan Pangan dan Gizi;	Banyaknya laporan yang memuat hasil kegiatan pemantauan mengenai suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan dan gizi bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan gizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk mewujudkan status gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.	[32010026] Wilayah; Tahun Penyajian	-	Total	laporan
	Jumlah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Daerah	Laporan Hasil Pengawasan;	Banyaknya Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Daerah Yang telah diselesaikan	[25020054] Klasifikasi Instansi Pemerintah;	-	Total	laporan

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah laporan Penatalaksanaan dan pengawasan kegiatan, kelembagaan dan pelayanan publik pada pemerintah provinsi yang diselenggarakan penyelenggara	Laporan; Tatalaksana; Pengawasan; Pelayanan Publik; Pemerintah Daerah;	Banyaknya laporan dari kegiatan penatalaksanaan, pengawasan kegiatan, kelelmbagaan dan pelayanan publik pada pemerintah provinsi yang diselenggrakan oleh penyelenggara.	Jenis Kegiatan;		Total	dokumen
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Penatausahaan; Barang Milik Daerah;	Banyaknya laporan penatausahaan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah	[32010026] Wilayah;	-	Total	laporan
	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan	Laporan Hasil Pengawasan;	Banyaknya Laporan Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daewrah yang dilaksanakan	[25020054] Klasifikasi Instansi Pemerintah;	-	Total	laporan
	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi yang Dilaksanakan	Laporan Hasil Pengawasan;	Banyaknya Laporan Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi yang dilaksanakan	[25020054] Klasifikasi Instansi Pemerintah;	-	Total	laporan
	Jumlah Laporan Pendampingan, Asistensi dan Penilaian Reformasi Birokrasi yang Dilaksanakan	Laporan Hasil Pengawasan;	Banyaknya Laporan Pelaksanaan Pendampingan, Asistensi dan Penilaian Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan	[25020054] Klasifikasi Instansi Pemerintah;	-	Total	laporan
	Jumlah Laporan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas yang Dilaksanakan	Laporan Hasil Pengawasan;	Banyaknya Laporan Pelaksanaan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas yang dilaksanakan	[25020054] Klasifikasi Instansi Pemerintah;	-	Total	laporan

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Laporan Pengawasan Peredaran Alat Mesin Pertanian, Pupuk dan Pestisida	Alat dan Mesin Pertanian; [K01833] Pupuk; Pestisida;	Banyaknya laporan yang memuat hasil kegiatan pemantauan, pemeriksaan terhadap distribusi, penjualan, dan penggunaan peralatan yang dioperasikan dengan motor penggerak ataupun tanpa motor penggerak untuk kegiatan budi daya pertanian seperti traktor, robot, alat kontrol, sprayer, fertigasi, fumigator, komputer, alat irigasi, dan mesin pengolah pakan, serta pupuk, dan pestisida.	[32010026] Wilayah; Tahun Penyajian	-	Total	laporan
	Jumlah Laporan Pengawasan Peredaran Benih Perkebunan	Peredaran Benih; Tanaman Perkebunan;	Banyaknya laporan yang memuat hasil kegiatan pemantauan, pemeriksaan terhadap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran benih tanaman perkebunan kepada masyarakat di dalam negeri dan/atau luar negeri, baik untuk diperdagangkan maupun tidak diperdagangkan.	[32010026] Wilayah; Tahun Penyajian	-	Total	laporan
	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Dokumentasi Kegiatan; Pimpinan;	Banyaknya laporan tentang kegiatan pimpinan yang berhasil di dokumetasikan berupa foto dan video ke dalam media cetak, media penyimpanan maupun media online	[32010026] Wilayah	-	Total	dokumen
	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Pengelolaan Hubungan; Keprotokolan;	Banyaknya laporan tentang kegiatan pimpinan yang difasilitasi melalui komunikasi dan hubungan keprotokolan dengan protokol pihak lain	[32010026] Wilayah	-	Total	dokumen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar (Jumlah Tenaga Pengembang yang Mengikuti Kompetensi)	Pengembangan kompetensi bagi tenaga pengembang;	Pengembangan Kompetensi bagi tenaga pengembang adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Tenaga Pengembang Kompetensi) dengan standar kompetensi Jabatan dan rencana pengembangan karier.	Laporan;	-	Jumlah	dokumen
	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD) Tahunan Provinsi Kepulauan Riau	Laporan pengendalian; evaluasi; RKPD;	Banyaknya Laporan yang dihasilkan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terkait pengendalian dan evaluasi Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD) Tahunan.		-	Total	laporan
	Jumlah Laporan Pengendalian terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten/Kota	Jumlah; Laporan; RKPD; Pengendalian; Kebijakan;	Banyaknya Laporan yang dihasilkan oleh pemerintah provinsi kepulauan riau terkait pengendalian kebijakan RKPD untuk memastikan implementasi kebijakan yang efektif dan efisien.	Kab/Kota;	-	Total	laporan
	Jumlah laporan penguatan kapasita sumber daya komunikasi publik	Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik;	Banyaknya laporan yang dihasilkan terkait kegiatan peningkatan/penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik dalam periode tertentu	[32010026] Wilayah; Jenis kegiatan		Total	laporan
	Jumlah laporan penyelenggaraan tata kelola komisi informasi Daerah	Komisi Informasi;	Banyaknya laporan resmi yang dihasilkan terkait pelaksanaan tata kelola Komisi Informasi Daerah dalam periode tertentu.	[32010026] Wilayah; Jenis Laporan;		Total	laporan
	Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Barenlitbang yang Tersusun	Jumlah; Laporan; realisasi fisik; keuangan;	Banyaknya Laporan yang memuat realisasi fisik dan keuangan kegiatan Barenlitbang yang telah dilaksanakan dalam periode tertentu.	OPD;	-	Jumlah	dokumen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Laporan Sinkronisasi dan Evaluasi Program Kegiatan Pusat dan Daerah di Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah; Laporan sinkronisasi; Evaluasi; Program; Kegiatan pusat; Daerah;	Banyaknya Laporan yang dihasilkan oleh pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau yang terkait Sinkronisasi dan evaluasi program kegiatan pusat dan daerah.		-	Total	laporan
	Jumlah Laporan Verifikasi Permohonan Non Perizinan	Laporan Verifikasi; Permohonan Non Perizinan;	Banyaknya laporan yang dihasilkan dari proses verifikasi terhadap permohonan yang tidak terkait dengan izin resmi.	Jenis Permohonan;		Total	laporan
	Jumlah Laporan Verifikasi Permohonan Perizinan	Laporan; Verifikasi; Permohonan Perizinan;	Banyaknya laporan yang diterbitkan setelah proses verifikasi permohonan perizinan, baik yang disetujui, ditolak, atau memerlukan revisi. Laporan ini mencakup hasil verifikasi yang dilakukan oleh tim atau pihak berwenang terkait permohonan izin.	Jenis Perizinan;		Total	laporan
	Jumlah layanan hubungan media	Kemitraan Media; Pelayanan Publik;	Banyaknya media yang melakukan kerjasama yang saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan kepercayaan antara Pemerintah dengan media.	Jenis Media: (Media radio Media televisi Media cetak Media komunitas di bidang diseminasi informasi);		Total	media
	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Akses Layanan Kearsipan JIKN;	Banyaknya Layanan penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/kota melalui JIKN.	[32010026] Wilayah;	-	Total	layanan
	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi	Layanan Perpustakaan;	Banyaknya layanan perpustakaan rujukan tingkat daerah provinsi yang dikembangakanmelalui peningkatan koleksi.	[32010026] Wilayah;	-	total	layanan

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi anak yang ditingkatkan kapasitasnya	Lembaga; Anak;	Banyaknya lembaga, baik pemerintah maupun non-pemerintah, yang memberikan layanan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak serta telah memperoleh fasilitasi, pembinaan, pelatihan, atau penguatan kelembagaan dari instansi/OPD terkait, dengan tujuan meningkatkan kualitas, jangkauan, dan efektivitas layanan yang diberikan kepada anak.	[32010026] Wilayah;		Total	lembaga
	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan/Layanan Korban Kekerasan terhadap Perempuan yang difasilitasi Penguatan dan Lembaga Pengembangannya	Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan; Korban Kekerasan; Lembaga; Pengembangan;	Banyaknya lembaga layanan bagi perempuan korban kekerasan yang mendapat dukungan penguatan kapasitas dan pengembangan dari pemerintah/OPD untuk memenuhi standar layanan.	[32010026] Wilayah;		Total	lembaga
	Jumlah lembaga penyelenggara pelayanan dan rehabilitasi sosial anak terlantar yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak;	Banyaknya organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.	[32010026] Wilayah;	-	Jumlah	lembaga
	Jumlah lembaga penyelenggara pelayanan sosial lanjut usia terlantar yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi	Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;	Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU) adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial lanjut usia yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.	[32010026] Wilayah;	-	Jumlah	lembaga
	Jumlah Lembaga Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Difasilitasi	Lembaga Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN); Fasilitasi;	Banyaknya dokumen resmi yang mendukung kegiatan lembaga profesi Aparatur Sipil Negara (ASN)	[32010026] Wilayah;	-	Total	dokumen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Lokasi Prioritas dan PKSN yang Didata / Dikaji / Diedukasi dalam Pengembangan Kawasan Perbatasan	Lokasi Prioritas (Lokpri); PKSN BWN-KP;	Banyaknya Lokasi Prioritas dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang Didata / Dikaji / Diedukasi dalam Pengembangan Kawasan Perbatasan	[32010026] Wilayah	-	Total	lokasi prioritas
	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca Literasi;	Banyaknya lokus pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada pendidikan tingkat menengah dan pendidikan khusus.	[32010026] Wilayah;	-	Total	lokus
	Jumlah Luas Perairan/Lahan yang Sesuai untuk Pengembangan Komoditas Budidaya Perikanan	Lahan; Pembudidayaan Ikan;	Banyaknya lahan/luas perairan yang sesuai untuk pengembangan komoditas budidaya perairan yang tersedia.	[32010026] Wilayah; Tahun;	-	Total	hektar
	Jumlah Lumbung yang Dipelihara	Lumbung Pangan Masyarakat (LPM);	Banyaknya sarana fisik untuk penyimpanan pangan guna mewujudkan cadangan pangan masyarakat dan usaha ekonomi produktif masyarakat.	Tahun Penyajian	-	Total	unit
	Jumlah Masyarakat Gemar Membaca	Gemar Membaca;	Banyaknya masyarakat gemar membaca.	[32010026] Wilayah;	-	Total	orang
	Jumlah Masyarakat yang Berperan dalam Pelestarian Naskah Kuno dan Pendaftaran Naskah Kuno	Pelestarian Naskah Kuno Pendaftaran Naskah Kuno;	Banyaknya masyarakat yang berperan dalam pelestarian naskah kuno dan pendaftaran naskah kuno.	[32010026] Wilayah;	-	Total	orang
	Jumlah media komunikasi publik yang telah terkelola dengan baik	Media Komunikasi Publik;	Banyaknya media komunikasi publik yang telah terkelola dengan baik.	Jenis Media: (Media cetak, media elektronik);		Total	media
	Jumlah Media Publikasi	Media Publikasi;	Banyaknya Media Publikasi merujuk pada total media (seperti surat kabar, majalah, situs web, stasiun televisi, radio) yang dipakai untuk menyebarluaskan informasi atau berita.	Jenis Media; Tujuan Publikasi;		Total	unit; media publikasi

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Media yang Digunakan Dalam Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif	Pemasaran; Produk; Ekonomi Kreatif Media;	Banyaknya jenis atau platform media yang dimanfaatkan oleh pelaku ekonomi kreatif untuk mempromosikan atau memasarkan produk ekonomi kreatif.	Jenis media; [32010026] Wilayah;	-	Total	media
	Jumlah mitra dan organisasi dan kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan dan pengembangan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Mitra, Organisasi Kemasyarakatan, Pemberdayaan, pengembangan, ketahanan, kesejahteraan, keluarga;	banyaknya lembaga, organisasi masyarakat, dunia usaha, maupun kelompok/mitra kerja lainnya yang secara aktif terlibat dalam program, kegiatan, atau kerja sama yang mendukung peningkatan kapasitas, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga, baik melalui dukungan program, fasilitasi, maupun sumber daya.	[32010026] Wilayah;		Total	organisasi
	Jumlah mitra strategis Pemda termasuk media lokal yang melaksanakan diseminasi informas kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah	Kemitraan; Pemda; Media Komunikasi Publik; Diseminasi Informasi; Prioritas Nasional; Prioritas Daerah;	Banyaknya mitra strategis termasuk media lokal yang terlibat secara aktif bersama pemerintah daerah dalam menyebarluaskan (mendiseminasikan) informasi terkait kebijakan dan program prioritas di tingkat nasional maupun daerah dalam periode tertentu.	[32010026] Wilayah; Jenis media		Total	mitra
	Jumlah Monev TLHP BPK dan APIP	Laporan Hasil Pengawasan;	Banyaknya Pelaksanaan Monev TLHP BPK dan APIP yang telah dilaksanakan	[25020054] Klasifikasi Instansi Pemerintah;	-	Total	laporan
	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Capaian MCP KPK	MCP KPK;	Banyaknya Pelaksanaan Monev terhadap MCP KPK yang telah dilaksanakan	[25020054] Klasifikasi Instansi Pemerintah;	-	Total	monev
	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Naskah Dinas Pemeliharaan Penyusutan Arsip;	Banyaknya Naskah Dinas yang dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan.	[32010026] Wilayah;	-	Total	naskah
	Jumlah Nelayan yang Terlindungi	Nelayan; Jaminan sosial;	banyaknya nelayan yang mendapatkan jaminan sosial berupa BPJS Ketenagakerjaan.	[32010026] Wilayah; Tahun;	-	Total	orang

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Nomor register Rancangan Peraturan Daerah Kab/Kota Yang diklarifikasi	Nomor Register; Peraturan Daerah Kab/Kota; Klarifikasi;	banyaknya Nomor register Rancangan Peraturan Daerah Kab/Kota sesuai dengan Ketentuan Peraturan perundang-undangan.	[32010026] Wilayah;	-	Total	nomor register
	Jumlah Obat yang Disediakan pada Periode Pelaporan Tertentu	Obat;	Banyaknya ketersediaan obat disediakan oleh rumah sakit dalam periode pelaporan tertentu.	Jenis obat; Waktu;	-	Total	pcs / botol / strip
	Jumlah Objek Cagar Budaya Provinsi yang Dilindungi	Perlindungan; Cagar budaya; Provinsi;	Banyaknya objek cagar budaya (benda, bangunan, struktur, situs, atau kawasan) yang dilakukan tindakan perlindungan oleh pemerintah provinsi yang berada di wilayah administratif provinsi	[32010026] Wilayah;	-	Total	objek
	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan	Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK);	Banyaknya unsur budaya yang termasuk dalam daftar Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah mengalami proses penguatan kapasitas, peningkatan kualitas, perluasan akses, atau adaptasi agar tetap relevan dan berkelanjutan dalam kehidupan masyarakat.	[32010026] Wilayah;	-	Total	objek
	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi	Pelindungan; Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK);	Banyaknya unsur budaya atau objek yang termasuk dalam ruang lingkup pemajuan kebudayaan dan telah memperoleh bentuk perlindungan formal atau non-formal oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat, melalui kebijakan, peraturan, penetapan hukum, atau tindakan pelestarian yang menjamin keberlanjutan nilai budaya	[32010026] Wilayah;	-	Total	objek
	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dimanfaatkan	Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK);	Banyaknya objek pemajuan kebudayaan yang telah digunakan secara aktif oleh masyarakat, pemerintah, atau pelaku usaha dalam berbagai bidang kehidupan (pendidikan, ekonomi, pariwisata, seni, media, dll.)	[32010026] Wilayah;	-	Total	objek

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah OPD yang dikompilasi datanya	Kompilasi; Data; Perangkat Daerah;	Banyaknya Organisasi Perangkat Daerah yang datanya yang telah dikompilasi	Perangkat Daerah;		Total	opd
	Jumlah Orang yang Diberdayakan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Sumber Daya Manusia; Kawasan Strategis Pariwisata;	Banyaknya sumber daya manusia yang dilibatkan secara aktif dan diberdayakan dalam proses pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) di tingkat provinsi.	[32010026] Wilayah;	-	Total	orang
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka Kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Rawan Bencana; Ancaman Bencana; Bencana; Tempat Tinggal; Komunikasi; Informasi; Edukasi;	Banyaknya orang yang mendapatkan sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (per jenis Bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Jenis Bencana; Kelompok Peserta; [32010026] Wilayah;	-	Total	orang
	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Biaya penunjang Operasional; Kepala Daerah; Wakil Kepala daerah;	Banyaknya orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional (anggaran yang disediakan untuk mendukung kegiatan dan fungsi operasional kepala daerah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dana ini bertujuan untuk memastikan bahwa kepala daerah dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif dan efisien) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	[32010026] Wilayah;	-	Total	orang

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji / Upah dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Gaji / Upah; Tunjangan jabatan; Kepala daerah; Wakil Kepala daerah;	Banyaknya Orang yang Menerima Gaji (komponen gaji yang dimaksud meliputi: gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, Tunjangan Fungsional, Tunjangan Beras, Tunjangan PPH, Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian. Sedangan komponen tunjangan meliputi: tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan prestasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	[32010026] Wilayah;	-	Total	orang
	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up rutin / berkala Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Medical Check Up (MCU) rutin / Berkala; Kepala daerah; Wakil Kepala daerah;	Banyaknya Orang yang Mengikuti Medical Check Up rutin / berkala (pemeriksaan kesehatan rutin yang dilakukan oleh tenaga medis untuk menilai status kesehatan seseorang) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	[32010026] Wilayah;	-	Total	orang
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,Karakter Bangsa,Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Bela negara; Bhineka Tunggal Ika; Ideologi; Karakter bangsa; Penyelenggaraan Pembauran kebangsaan; Pelatihan; Sosialisasi; Sejarah kebangsaan; Wawasan kebangsaan;	Banyaknya Orang yang mengikuti pelatihan, sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggel Ika, dan Sejarah Kebangsaan.	[32010026] Wilayah;	-	Total	orang

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Akuntansi; [K01411] Pemerintah daerah;	Banyaknya peserta baik pegawai PNS maupun Non-ASN yang mengikuti kegiatan pembinaan formal di lingkungan pemerintah provinsi. Kegiatan ini mencakup pelatihan, bimbingan teknis, fasilitasi, atau workshop yang berfokus pada: Penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD), Penyusunan dan analisis laporan keuangan daerah, dan Proses pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.	[32010026] Wilayah;	-	Total	orang
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Penatausahaan; Keuangan daerah; [K01411] Pemerintah daerah;	Banyaknya individu (pegawai PNS dan/atau Non-ASN) yang secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan teknis dan peningkatan kapasitas terkait penatausahaan keuangan daerah meliputi pencatatan, pelaporan, dan pengelolaan administrasi keuangan yang efisien di tingkat kabupaten/kota	[32010026] Wilayah;	-	Total	orang
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Sistem Informasi; [K01411] Pemerintah Daerah; Keuangan Daerah;	Banyaknya pegawai yang secara resmi terlibat dalam kegiatan peningkatan kapasitas, pelatihan, atau bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi terkait penggunaan, pengelolaan, atau pengembangan sistem informasi keuangan daerah.	[32010026] Wilayah;	-	Total	orang
	Jumlah Organisasi Perempuan yang Terbina	Organisasi; [K01647] Perempuan; Terbina;	Jumlah organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan dari pemerintah atau OPD melalui kegiatan fasilitasi, pendampingan, pelatihan, pemberdayaan, atau bentuk penguatan kapasitas lainnya, sehingga organisasi tersebut menjadi lebih berdaya dan mampu berperan aktif dalam pembangunan.	[32010026] Wilayah;		Total	organisasi

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Pakan Ikan Air Laut (Pallet) yang Disalurkan atau Digunakan dalam Budidaya Ikan	Pakan; Ikan; Pembudidayaan Ikan;	Banyaknya pakan ikan air laut (pallet) yang disalurkan atau digunakan dalam budidaya ikan.	Jenis Ikan Budidaya; Jenis Pakan; [32010026] Wilayah;	-	Total	kg
	Jumlah Pakan Udang dan Bandeng yang Disalurkan atau Digunakan dalam Budidaya Ikan	Pakan; Pembudidayaan Ikan;	Banyaknya pakan udang dan bandeng yang disalurkan atau digunakan dalam budidaya ikan.	Jenis Komoditas; [32010026] Wilayah;	-	Total	kg
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	[K01925] Rumah Tangga; Kepala daerah;	Banyaknya paket kebutuhan rumah tangga (kebutuhan rumah tangga yang dimaksud antara lain: belanja alat tulis kantor, belanja makan minum tamu, makan minum rapat, belanja perjalanan dinas, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor untuk mendukung kegiatan operasional Kepala Daerah).	[32010026] Wilayah;	-	Total	paket
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	[K01925] Rumah Tangga; Sekretariat daerah;	Banyaknya paket kebutuhan rumah tangga (kebutuhan rumah tangga yang dimaksud antara lain: belanja alat tulis kantor, belanja makan minum tamu, makan minum rapat, belanja perjalanan dinas, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor untuk mendukung kegiatan operasional Sekretaris Daerah).	[32010026] Wilayah;	-	Total	paket
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	[K01925] Rumah Tangga; Wakil Kepala daerah;	Banyaknya paket kebutuhan rumah tangga (kebutuhan rumah tangga yang dimaksud antara lain: belanja alat tulis kantor, belanja makan minum tamu, makan minum rapat, belanja perjalanan dinas, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor untuk mendukung kegiatan operasional Wakil Kepala Daerah).	[32010026] Wilayah;	-	Total	paket

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Pakaian dinas; Atribut; Kelengkapan Pakaian Dinas; Kepala daerah; Wakil Kepala daerah;	Banyaknya paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan (belanja pakaian dinas KDH dan WKDH antara lain: pakaian sipil lengkap, pakaian dinas lapangan, pakaian dinas upacara, pakaian korpri, pakaian pramuka lengkap, pakaian melayu beserta songket, pakaian batik tradisional, pakaian olahraga).	[32010026] Wilayah;	-	Total	paket
	Jumlah Paket Sarana Perikanan Budidaya	Pembudidayaan Ikan; Sarana;	Banyaknya paket sarana perikanan budidaya yang ada.	[32010026] Wilayah; Tahun;	-	Total	unit
	Jumlah Paket Sarana Perikanan Budidaya Guna Menjamin Pelaksanaan Pengembangan Perikanan Budidaya	Pembudidayaan Ikan; Sarana;	Banyaknya satu kesatuan bantuan atau dukungan berupa barang, alat, atau fasilitas penunjang pengembangan pembudidayaan ikan.	[32010026] Wilayah; Tahun; Jenis Paket Sarana;	-	Total	paket
	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	[K01300] Pegawai Negeri Sipil (PNS);	Banyaknya Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	[33220007] Jenis Kelamin; Jabatan; Golongan; [10320055] Tingkat Pendidikan;	-	Total	orang
	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang Mengikuti Penilaian Kompetensi	Kompetensi; Pegawai Negeri Sipil (PNS);	Banyaknya Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti kegiatan penilaian kompetensi yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah untuk mengukur potensi, kapasitas, dan kesesuaian kompetensi terhadap jabatan pada periode tertentu.	[32010026] Wilayah; Jabatan;	-	Total	orang
	Jumlah pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan yang mendapat bantuan kesejahteraan sosial	Veteran dan keluarganya;	Banyaknya pejuang, perintis kemerdekaan, atau keluarga pahlawan.	[32010026] Wilayah;	-	Jumlah	orang

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	Pelabuhan Pengumpan;	Banyaknya tempat pelabuhan pengumpan regional yang secara aktif melayani kegiatan angkutan laut atau penyeberangan (beroperasi) dan memiliki kondisi prasarana yang terawat/terpelihara sesuai standar teknis yang ditetapkan, sehingga mampu mendukung kelancaran distribusi barang, jasa, dan pergerakan orang di dalam wilayah provinsi	[32010026] Wilayah;	-	Total	unit
	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan	Pelabuhan Penyeberangan;	Banyaknya tempat pelabuhan yang menyediakan layanan penyeberangan untuk kendaraan, penumpang, dan barang melalui kapal penyeberangan atau ferry	[32010026] Wilayah;	-	Jumlah	unit
	Jumlah Pelabuhan Perikanan yang Terbina dan Terlayani	Pelabuhan; Perikanan;	Banyaknya pelabuhan perikanan yang dibina dan dilayani.	[32010026] Wilayah; Tahun;	-	Total	pelabuhan
	Jumlah Pelaksanaan Coaching Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersifat Inovatif yang ditindaklanjuti se Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah; Coaching; Diseminasi; Prosedur; Pemerintah Daerah; Inovatif;	Banyaknya Dokumen Pelaksanaan Coaching Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif yang ditindaklanjuti se-Provinsi Kepulauan Riau.	[32010026] Wilayah;	-	Jumlah	dokumen
	jumlah pelaksanaan fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Fasilitas; Pembimbingan; Pengembangan;	banyaknya kegiatan atau intervensi yang dilakukan oleh lembaga/instansi terkait dalam rangka memberikan dukungan, pendampingan, peningkatan kapasitas, serta penguatan kepada keluarga dan masyarakat untuk memastikan optimalnya pengasuhan pada periode periode 270 hari (9 bulan) selama kehamilan dan 730 hari pertama (2 tahun) pada kehidupan pertama bayi setelah dilahirkan, meliputi	[32010026] Wilayah;		Total	kegiatan

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			aspek kesehatan, gizi, stimulasi tumbuh kembang, serta perlindungan anak.				
	Jumlah Pelaksanaan Perlindungan dan Pengamanan di Kawasan Hutan	Kawasan Hutan; Perlindungan Hutan;	Banyaknya pelaksanaan tugas administratif, teknis, dan operasi lapangan, yang meliputi pencegahan, pengawasan, patroli, penegakan hukum (yustisi), penyediaan sarana/prasarana, pembentukan Satuan Pengamanan Kehutanan, serta tindakan avertif-preventif-represif yang ditujukan untuk menjaga keselamatan hutan, kawasan hutan, ekosistem, dan hasil hutan dari berbagai gangguan dan ancaman.	[32010026] Wilayah;	-	Total	kawasan
	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan Kapasitasnya	Pelaku Ekonomi Kreatif;	Banyaknya pelaku ekonomi kreatif yang telah mengikuti proses peningkatan kapasitas guna meningkatkan keterampilan, kreativitas, daya saing, dan nilai tambah usahanya.	Subsektor ekraf (16 sub); [32010026] Wilayah;	-	Total	orang
	Jumlah Pelaku Industri yang difasilitasi	Pelaku Industri;	banyaknya orang atau pihak yang melakukan kegiatan industri dan telah diberikan fasilitas oleh pihak lain (misalnya pemerintah atau lembaga).	[32010026] Wilayah;	-	Total	pelaku industri

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Pelaku Industri Rumahan yang ditingkatkan kapasitasnya	Industri Rumahan; Kapasitas;	banyaknya individu, khususnya perempuan dan kelompok usaha kecil, yang mendapatkan penguatan kapasitas melalui pelatihan, pendampingan, bimbingan teknis, atau bentuk fasilitasi lainnya sehingga memiliki peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan/atau manajemen usaha untuk mengembangkan dan memperkuat usaha industri rumahannya.	[32010026] Wilayah;		Total	pelaku industri
	Jumlah Pelayanan Perizinan yang terlayani	Perizinan Berusaha;	Banyaknya layanan perizinan yang diproses dan diselesaikan melalui sistem OSS RBA.	[32010026] Wilayah; Sektor;		Total	perizinan
	Jumlah Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang Dilaksanakan	Pemasaran; Daya Tarik Wisata; Destinasi Pariwisata; Kawasan Strategis Pariwisata. ;	Banyaknya kegiatan promosi atau pemasaran pariwisata yang dilaksanakan, baik di dalam maupun luar negeri, yang secara langsung menampilkan, memperkenalkan, atau memasarkan daya tarik wisata, destinasi pariwisata, dan/atau kawasan strategis pariwisata provinsi.	Objek;	-	Total	kegiatan
	Jumlah Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pembangunan; Fasilitas Pelayanan Kesehatan;	Banyaknya pembangunan fasillitas kesehatan lainnya yang dilaksanakan tahun berjalan.	[32010026] Wilayah;	-	Total	unit
	Jumlah Pembangunan Pelabuhan	Pelabuhan;	Banyaknya unit kegiatan dalam pembangunan Check Point Pelabuhan Tambatan Perahu Baran, Pembangunan Tambatan Kapal/Perahu di karimun, Pengembangan Pelabuhan Antang Tarempa, Pengembangan Pelabuhan Batu Duyung, Pengembangan Pelabuhan Pering Natuna, dan Pusat Logistik di Natuna yang telah dilaksanakan oleh pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten/kota pada tahun tertentu.	Infrastruktur; Tipe Kegiatan; [32010026] Wilayah;	-	Total	unit

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Pembangunan Penerangan Jalan di Provinsi Kepulauan Riau	Pembangunan Penerangan Jalan;	Penerangan Jalan Umum/Lingkungan.	[32010026] Wilayah;	-	Jumlah	unit
	Jumlah Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik;	Banyaknya Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan.	[32010026] Wilayah;	-	Jumlah	unit
	Jumlah Pembinaan Reformasi Birokrasi yang Terlaksana pada Perangkat Daerah	Reformasi Birokrasi (RB); Perangkat Daerah;	Banyaknya upaya perubahan terencana dan sistematis yang memberikan dampak signifikan pada peningkatan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas administrasi pemerintahan, serta kualitas pelayanan publik.	Perangkat Daerah terpilih	-	Total	opd
	Jumlah Pemegang Perizinan Operasi yang telah Melaksanakan Kewajiban Usaha Sesuai Ketentuan	Pemegang Perizinan Operasi yang telah Melaksanakan Kewajiban Usaha Sesuai Ketentuan;	Dokumen Pemegang Perizinan Operasi yang telah Melaksanakan Kewajiban Usaha Sesuai Ketentuan.	Tahun;	-	Jumlah	dokumen
	Jumlah Pemegang Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri yang telah Melaksanakan Kewajiban Usaha Sesuai Ketentuan	Pelaku Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang Telah Melaksanakan Kewajiban Usaha Sesuai Ketentuan;	Perbandingan pelaku usaha Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan dengan seluruh jumlah pelaku Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.	Tahun;	-	Persentase	persen
	Jumlah Pemeliharaan Alat Kesehatan dan Alat Penunjang Medik	Pemeliharaan Alat Kesehatan;	Banyaknya alat kesehatan atau alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar.	Periode Tahun	-	Total	unit
	Jumlah Pemeliharaan Pembangkit Listrik Desa	Pemeliharaan Pembangkit Listrik;	Unit pemeliharaan pembangkit listrik desa.	Tahun;	-	Jumlah	unit

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	Pemusnahan Arsip;	Banyaknya Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK.	[32010026] Wilayah;	-	total	arsip
	Jumlah Penambahan Investor Dalam Negeri dan Luar Negeri	PMDN; PMA;	Banyaknya Pelaku Usaha atau Investor yang melakukan Penanaman Modal atau Investasi pada Pasar uang, Pasar Modal atau Sektor Ekonomi Lainnya di wilayah tersebut.	[32010026] Wilayah;		Total	investor
	Jumlah Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Penanganan pelanggaran perda dan pergub;	Banyaknya pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang ditangani	[32010026] Wilayah;	-	Jumlah	perda/ perkada
	Jumlah Penanganan Unjuk Rasa dan atau Kerusuhan Massa	Penanganan unjuk rasa dan Kerusuhan Massa;	Banyaknya upaya penanganan unjuk rasa dan Kerusuhan Massa untuk menjaga kondisi agar tetap tertib dan aman	[32010026] Wilayah;	-	Jumlah	kali
	Jumlah Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah yang terealisasi	Pajak Daerah; Retribusi Daerah;	Total penerimaan yang sudah berhasil diperoleh oleh pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) dari pungutan pajak daerah dan retribusi daerah selama periode tertentu	[32010026] Wilayah; Jenis Pajak dan Retribusi;	-	Jumlah	rupiah
10310060	Jumlah Pendidik	[K02183] Pendidik;	Banyaknya orang yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, yang mengajar pada satuan pendidikan.	[32010026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [10320055] Tingkat Pendidikan; Ijazah tertinggi; Status kepegawaian; Status Sertifikasi; Latar Belakang Program Studi; Bidang Studi yang Diajarkan;	-	Total	orang

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Pendidik; Tenaga Kependidikan; Fasilitasi; Kenaikan Pangkat; Golongan; Promosi; Kompetensi;	Banyaknya guru dan tenaga kependidikan di bentuk pendidikan tertentu yang menerima dukungan atau fasilitasi dalam bentuk kenaikan pangkat/golongan, promosi jabatan, peningkatan kompetensi, dan peningkatan kualifikasi pendidikan.	[32010026] Wilayah; Bentuk pendidikan;	-	Total	orang
	Jumlah Penerima Bantuan Pendidikan pada jenjang Perguruan Tinggi	Penerima Bantuan; Pendidikan; Perguruan Tinggi;	Banyaknya Penerima Bantuan Pendidikan pada jenjang Perguruan Tinggi.	[32010026] Wilayah;	-	Total	orang
	Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Alat Kesehatan; Fasilitas Pelayanan Kesehatan;	Banyaknya pengadaan alat kesehatan untuk fasilitas pelayanan kesehatan pada tahun dimaksud.	[32010026] Wilayah;	-	Total	unit
	Jumlah Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN)	Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN); Aparatur Sipil Negara (ASN); Pegawai Negeri Sipil (PNS); Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK); Koordinasi; Fasilitasi;	Banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berhasil direkrut melalui proses seleksi CPegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam satu periode tertentu.	[32010026] Wilayah; Jabatan;	-	Total	orang
	Jumlah Pengadaan Bahan Makanan dan Minuman Pasien	Pengadaan; Bahan; Makan Minum Pasien;	Bagian dari seluruh proses, cara, perbuatan mengadakan, menyediakan barang yang akan dibuat menjadi makanan dan minuman yang diberikan kepada pasien yang pengadaannya dapat berupa bahan makanan basah, bahan makanan kering dan/atau dalam bentuk makanan jadi.	Periode Tahun	-	Total	kegiatan

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Pengadaan Pembangunan Gedung UPT Pertanian	Pengadaan; [K02346] Bangunan Gedung; Unit Pelaksaan Teknis (UPT);	Banyaknya pengadaan oleh perangkat daerah untuk membangun fasilitas fisik unsur pelaksana tugas teknis pada UPTD.	[32010026] Wilayah; Tahun Penyajian; Jenis Bangunan	-	Total	unit
	Jumlah Pengajuan Akreditasi Program Pelatihan yang Tepat Waktu	Akreditasi Program Pelatihan;	Akreditasi Program Pelatihan adalah penilaian kelayakan Pelatihan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Lembaga terhadap program penyelenggaraan Pelatihan Struktural, Pelatihan Teknis, Pelatihan Fungsional, Pelatihan Sosial Kultural, atau Pelatihan Dasar CPNS.	Status Akreditasi;	-	Jumlah	predikat
	Jumlah Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan di Lingkungan RSUD Raja Ahmad Tabib	Pengembangan Mutu; Kompetensi Teknis; Sumber Daya Manusia;	Banyaknya sumber daya manusia kesehatan kompetensi dan kualifikasi meningkat.	Periode Tahun	-	Total	orang
	Jumlah Pengguna Sistem Informasi Layanan Pendapatan Daerah	Layanan, Pendapatan Daerah;	Banyaknya pengguna Sistem Informasi Layanan Pendapatan Daerah	[32010026] Wilayah;	-	Total	orang
	Jumlah Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Pemasaran; Promosi; Media;	Banyaknya kegiatan promosi atau pemasaran pariwisata yang dilaksanakan, baik di dalam maupun luar negeri melalui media cetak, elektronik dan media lainnya	Jenis Media;	-	Total	kegiatan
	Jumlah Peningkatan Kualitas Teknis dan Manajemen Usaha Kelompok	Kualitas Teknis; Manajemen Usaha Kelompok;	Banyaknya peningkatan kualitas teknis dan manajemen usaha kelompok	[32010026] Wilayah; Tahun;	-	Total	unit

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	Disabilitas Terlantar;	Banyaknya orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.	[32010026] Wilayah;	-	Jumlah	orang
	Jumlah Penyelenggaraan Layanan Konsultasi	Layanan Konsultasi;	Banyaknya sesi atau acara konsultasi yang dilakukan oleh penyelenggara layanan konsultasi dalam periode yang ditentukan, biasanya dalam satu tahun mencangkup semua jenis konsultasi yang dilakukan, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun organisasi.	Jenis Layanan; [32010026] Wilayah;		Total	kegiatan
	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan	Pelayanan Non Perizinan;	Banyaknya penyelenggaraan layanan yang dilakukan oleh instansi atau lembaga yang tidak memerlukan izin atau perizinan dari pihak berwenang.	Jenis Pelayanan Non Perizinan yang Diberikan; Sektor;		Total	izin
	Jumlah Penyelesaian Masalah Hukum yang difasilitasi	Masalah Hukum; Fasilitasi;	Banyaknya Penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.	[32010026] Wilayah;	-	Total	kasus
	Jumlah Penyu yang Dilakukan Rehabilitasi, Relokasi dan Karantina di Kawasan Konservasi Natuna	Rehabilitasi, Relokasi; Karantina; Penyu; Kawasan Konservasi;	Banyaknya penyu yang telah dilakukan rehabilitasi, relokasi dan karantina di kawasan konservasi Natuna.	Jenis Dokumen; [32010026] Wilayah;	-	Total	dokumen
	Jumlah Perahu/Kapal Penangkap Ikan	Kapal Penangkapan Ikan;	Banyaknya unit perahu atau kapal yang digunakan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan dalam periode tertentu di suatu wilayah, baik milik perorangan maupun kelompok/korporasi	[32010026] Wilayah;	-	Total	unit

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Perangkat Daerah	Perangkat Daerah;	Banyaknya unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah	Perangkat Daerah	-	Total	opd
	Jumlah Perangkat Daerah Provinsi yang Ditata Kelembagaannya	Perangkat Daerah; [K02366] Lembaga; Tata Kelola;	Banyaknya Perangkat Daerah di Provinsi yang ditata secara tepat fungsi, tepat ukuran dan sinergis secara berkelanjutan menuju perangkat daerah yang modern.	Perangkat Daerah	-	Total	opd
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dibina dan Dievaluasi Pelaksanaan Budaya Kerjanya	Perangkat Daerah; Budaya Kerja;	Banyaknya Perangkat Daerah yang diatur kepercayaan, proses berpikir, dan perilaku karyawan yang berdasarkan pada ideologi dan prinsip suatu Perangkat Daerah bahwa kebiasaan tersebut merupakan kebiasaan yang harus ditaati untuk mencapai sebuah tujuan.	Perangkat Daerah	-	Total	opd
	Jumlah Perangkat Daerah yang Memenuhi Kriteria Zona Integritas	Zona Integritas;	Banyaknya Perangkat Daerah yang telah memenuhi kriteria Zona Integritas	[K01411] Pemerintah Daerah;	-	Total	perangkat daerah
	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	Perangkat Daerah; Pusat data;	Banyaknya unsur pemerintahan daerah yang menggunakan fasilitas berupa penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.	Perangkat Daerah;		Total	opd

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Perangkat Daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Perangkat Daerah; Jaringan Intra; Pengamanan;	Banyaknya unsur perangkat daerah yang terhubung jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi serta yang menggunakan jaringan interkoneksi di seluruh dunia yang memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi secara interaktif yang disediakan oleh Dinas Kominfo.	Perangkat Daerah;		Total	perangkat daerah
	Jumlah Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Peraturan daerah; Peraturan Kepala daerah; APBD;	Jumlah peraturan daerah yang ditetapkan oleh DPRD bersama Kepala Daerah yang memuat asumsi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah selama satu tahun anggaran serta peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah (Gubernur / Bupati / Walikota) yang memuat rincian operasional anggaran sesuai dengan Perda APBD—misalnya rincian belanja per SKPD, kode rekening, program/kegiatan dan target capaian kinerja.	[32010026] Wilayah;	-	Total	peraturan daerah
	Jumlah Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Peraturan daerah; Peraturan Kepala daerah; APBD;	Banyaknya peraturan / regulasi yang ditetapkan oleh DPRD bersama Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) untuk menetapkan modifikasi APBD dalam satu tahun anggaran yang sedang berjalan—baik berupa penyesuaian pendapatan, belanja, maupun pembiayaan akibat perubahan kondisi dan asumsi serta peraturan yang dibentuk oleh Kepala Daerah yang merinci secara teknis penggunaan anggaran setelah APBD berubah.	[32010026] Wilayah;	-	Total	peraturan daerah

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Perawat Gigi	Perawat;	Banyaknya orang yang telah lulus pendidikan perawat gigi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.	[32010026] Wilayah;	-	Total	orang
	Jumlah Perda/Perkada yang dilakukan Pengawasan	Pengawasan Perda/Perkada;	Banyaknya Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang diawasi	[32010026] Wilayah;	-	Jumlah	perda/ perkada
	Jumlah Perempuan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	[K01647] Perempuan; Kapasitas;	Jumlah perempuan yang memperoleh kegiatan peningkatan kapasitas melalui pelatihan, pendampingan, bimbingan teknis, pendidikan, atau bentuk penguatan lainnya, sehingga memiliki pengetahuan, keterampilan, dan/atau sikap yang lebih baik untuk mendukung peran, partisipasi, serta kemandirian mereka dalam pembangunan.	[32010026] Wilayah;		Total	orang
	Jumlah Perempuan yang mengikuti sekolah perempuan	[K01976] Sekolah; [K01647] Perempuan;	Jumlah perempuan dengan keterbatasan sosial dan ekonomi yang memperoleh bantuan pendidikan kesetaraan Paket C (setara SMA), serta mendapatkan peningkatan kapasitas diri, keterampilan hidup, wawasan, dan kemampuan untuk berperan aktif di masyarakat sebagai agen perubahan.	[32010026] Wilayah;		Total	orang
	Jumlah Perempuan yang Terlatih untuk Peningkatan Ketahanan dan Kualitas Keluarga	Perempuan; Terlatih; Ketahanan; Kualitas Keluarga;	banyaknya perempuan yang mengikuti kegiatan pelatihan, pembinaan, atau pendampingan yang bertujuan meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan mereka dalam memperkuat peran keluarga, memelihara ketahanan keluarga, serta meningkatkan kualitas hidup anggota keluarga.	[32010026] Wilayah;		Total	orang

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Periode Pendataan	Periode; Pendataan;	Banyaknya jangka waktu tertentu yang digunakan untuk melakukan proses sistematis pengumpulan dan pencatatan informasi atau data.	[32010026] Wilayah;	-	Waktu	bulan
	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Perkara Perselisihan;	Banyaknya kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan oleh Mediator Hubungan Industrial yang berkedudukan di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang penyelesaiannya sampai pada tingkat perjanjian bersama (PB).	Status penyelesaian;	-	Total	perkara
	Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Perlengkapan sekolah;	Banyaknya perlengkapan sekolah yang tersedia pada suatu bentuk pendidikan dalam periode tertentu	Wilayah Bentuk Pendidikan	-	Total	paket
	Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis IS020000, (ITSM : Information Technology Service Management)	Perpustakaan Elektronik Manajemen Layanan;	Banyaknya perpustakaan elektronik yang dipelihara dengan manajemen layanan TIK.	Waktu	-	total	perpustakaan
	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah Provinsi sesuai kewenangannya	Perpustakaan; Standar Nasional Perpustakaan;	Banyaknya perpustakaan yang dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah Provinsi sesuai kewenangannya.	[32010026] Wilayah;	-	total	perpustakaan
	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	TRC (Tim Reaksi Cepat);	Banyaknya personil Tim Reaksi Cepat (TRC) yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya	Jenis Kapasitas;	-	Total	orang
10310063	Jumlah Peserta Didik	[K01735] Peserta Didik;	Banyaknya orang yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.	[32010026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; Status Sekolah (Negeri/swasta);	-	Total	orang

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10310064	Jumlah Peserta Didik Mengulang Kelas	[K01735] Peserta Didik; [K02367] Mengulang Kelas;	Banyaknya peserta didik yang mengulang kelas pada suatu tingkatan kelas pendidikan dan tahun ajaran tertentu.	[32010026] Wilayah; [10320051] Status Satuan Pendidikan; [33220007] Jenis Kelamin; [10320076] Tingkatan Kelas Pendidikan;	-	Total	orang
10310065	Jumlah Peserta Didik Putus Sekolah	K01735] Peserta Didik; [K02380] Putus Sekolah;	Banyaknya peserta didik yang tidak mampu menyelesaikan pendidikan atau dikeluarkan dari satuan pendidikan sehingga tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.	[32010026] Wilayah; [10320051] Status Satuan Pendidikan; [10320055] Tingkat Pendidikan;	-	Total	orang
	Jumlah Peserta Didik yang Menerima Biaya Personil	Peserta Didik; Biaya Personal;	Banyaknya siswa pada bentuk pendidikan tertentu yang menerima bantuan biaya personal untuk menunjang kegiatan belajar seperti seragam, buku, atau biaya transportasi.	[32010026] Wilayah; Bentuk Pendidikan;	-	Total	orang
	Jumlah Peserta Kegiatan Diseminasi Pencegahan Kewaspadaan Dini serta Penanganan Konflik Sosial di Daerah	Kewaspadaan dini; Konflik sosial; Diseminasi;	Banyaknya peserta kegiatan diseminasi pencegahan Kewaspadaan Dini serta penanganan Konflik Sosial di Daerah.	[32010026] Wilayah;	-	Total	orang
	Jumlah Peserta Konsultasi Publik	Peserta; Konsultasi Publik;	Banyaknya jumlah orang yang hadir dan berpartisipasi aktif dalam acara konsultasi publik yang diadakan.	Lokasi;		Total	peserta
	Jumlah Peserta Pelaksanaan Pembinaan Ormas/LSM yang sesuai dengan Kebijakan/Regulasi	Permbinaan; Organisasi kemasyarakatan (Ormas);	Banyaknya Peserta melakukan Pembinaan Ormas.	[32010026] Wilayah;	-	Total	orang

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Peserta Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	[K00103] Anggaran;	Jumlah orang yang tercatat secara resmi sebagai peserta kegiatan pembinaan perencanaan dan penganggaran daerah yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah (misalnya Bappeda, BPKAD, atau instansi terkait lainnya) di tingkat Provinsi, baik secara luring maupun daring, dalam satu tahun kalender	[32010026] Wilayah;	-	Total	orang
	Jumlah Peserta Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Aliran Kepercayaan di Provinsi Kepri	Forum kerukunan umat beragama (FKUB); Toleransi; Aliran kepercayaan;	Banyaknya peserta yang mengikuti Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama dan aliran kepercayaan di Provinsi Kepri.	[32010026] Wilayah;	-	Total	orang
	Jumlah Peserta Rapat Kerja Pokja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Rapat kerja; Kelompok kerja; Demokrasi;	Banyaknya Peserta yang mengikuti rapat kerja kelompok kerja IDI selama satu tahun.	[32010026] Wilayah;	-	Total	orang
	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Forkopimda	Forkopimda (FKPD);	Banyaknya Peserta Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dalam satu tahun.	[32010026] Wilayah;	-	Total	orang
	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi	Rapat; Koordinasi; Konflik sosial;	Banyaknya Peserta Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi dalam 1 tahun.	[32010026] Wilayah;	-	Total	orang
	Jumlah Peserta Sosialisasi Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Ideolog Pancasila; Sosialisasi; Wawasan kebangsaan;	Banyaknya peserta yang mengikuti sosialisasi Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.	[32010026] Wilayah;	-	Total	orang
	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Konservasi Energi	Bimbingan Teknis (Bimtek) Konservasi Energi;	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Konservasi Energi.	[32010026] Wilayah; Tahun;	-	Jumlah	orang

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Petugas Cek Fisik Kapal yang Dilatih	Petugas Pemeriksa Fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan;	Banyaknya petugas pemeriksa fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang sudah diberikan pelatihan peningkatan kapasitas melalui metode pembelajaran.	Instansi penyelenggara pelatihan; Jenis Pelatihan; [32010026] Wilayah;	-	Total	orang
	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Administrasi; Keuangan daerah; Kas daerah; Penatausahaan;	Banyaknya dokumen pedoman teknis untuk memastikan penerimaan dan pengeluaran kas dikelola terpadu, terdokumentasi, dan dapat diaudit	[32010026] Wilayah;	-	Total	dokumen
	Jumlah potensi pekerja sosial masyarakat (psm) yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitasi	Pekerja Sosial Masyarakat;	Banyaknya warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdi di bidang kesejahteraan sosial.	[32010026] Wilayah;	-	Jumlah	orang
	Jumlah PPNS yang Mendapatkan Pengembangan Karier	Pengembangan Karir Penyidikan Pegawai Negeri Sipil;	Banyaknya PPNS yang mendapatkan pengembangan karier	[32010026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin;	-	Jumlah	orang
	Jumlah Produksi Bibit/Benih Tanaman Holtikultura	Produksi Benih; Benih Hortikultura;	Banyaknya serangkaian kegiatan untuk menghasilkan tanaman hortikultura atau bagian dari tanaman hortikultura yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman yang bermutu.	[32010026] Wilayah; Tahun Penyajian; Jenis Komoditas Tanaman Hortikultura	-	Total	batang

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Produksi Bibit/Benih Tanaman Perkebunan	Benih; Produksi Benih; Tanaman Perkebunan;	Banyaknya serangkaian kegiatan untuk menghasilkan tanaman perkebunan atau bagian dari tanaman perkebunan yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman yang bermutu.	[32010026] Wilayah; Tahun Penyajian; Jenis Komoditas Tanaman Perkebunan	-	Total	batang
	Jumlah Produksi Bibit/Benih Tanaman Perkebunan dan Holtikultura yang Bersertifikasi	Produksi Benih; Tanaman Perkebunan; Tanaman Holtikultura; Sertifikasi Benih;	Banyaknya serangkaian kegiatan untuk menghasilkan benih bermutu tanaman perkebunan dan tanaman hortikultura yang telah melalui proses sertifikasi melalui serangkaian pemeriksaan dan/atau pengujian serta memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal.	[32010026] Wilayah; Tahun Penyajian	-	Total	batang
24110109	Jumlah Produksi Pembudidayaan Ikan	[K01779] Produksi; [K01405] Pembudidayaan Ikan;	Banyaknya ikan konsumsi, ikan hias, dan rumput laut yang telah dipanen dari tempat pemeliharaan yang diusahakan oleh pelaku usaha budi daya ikan.	[32010026] Wilayah;	-	Massa	ton
24110003	Jumlah Produksi Penangkapan Ikan	[K01779] Produksi; [K01439] Penangkapan Ikan;	Banyaknya seluruh hasil yang diperoleh dari kegiatan penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air dari sumber perikanan, baik di laut maupun perikanan darat.	[32010026] Wilayah;	-	Massa	kilogram
	Jumlah Profil Pulau kecil Terluar	Pulau-Pulau Kecil Terluar;	Banyaknya profil pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional	[32010026] Wilayah	-	Total	profil
	Jumlah Pulau Terluar yang Terinventarisasi	Pulau-Pulau Kecil Terluar;	Banyaknya pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional yang telah dicatat atau didaftarkan dalam sebuah inventaris	[32010026] Wilayah	-	Total	pulau

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Pupuk dan Pestisida Cair yang Diadakan	[K01833] Pupuk; Pestisida;	Banyaknya penyediaan atau pengadaan bahan yang diberikan pada tanah, air, atau daun dengan tujuan untuk memperbaiki pertumbuhan tanaman, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau menambah unsur hara serta zat atau senyawa kimia, zat pengatur dan perangsang tumbuh, bahan lain, serta organisme renik, atau virus yang digunakan untuk melakukan perlindungan tanaman yang berwujud seperti air (dapat mengalir, tidak padat, dan tidak berupa gas).	[32010026] Wilayah; Tahun Penyajian	-	Volume	liter
	Jumlah Pupuk dan Pestisida yang Diadakan	[K01833] Pupuk; Pestisida;	Banyaknya penyediaan atau pengadaan bahan yang diberikan pada tanah, air, atau daun dengan tujuan untuk memperbaiki pertumbuhan tanaman, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau menambah unsur hara serta zat atau senyawa kimia, zat pengatur dan perangsang tumbuh, bahan lain, serta organisme renik, atau virus yang digunakan untuk melakukan perlindungan tanaman.	[32010026] Wilayah; Tahun Penyajian	-	Total	kilogram
	Jumlah Puspaga yang Dibina dan Dikembangkan	Puspaga; Pembinaan; Pengembangan;	Banyaknya Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang telah memperoleh fasilitasi, pembinaan, serta pengembangan kapasitas dari instansi/OPD terkait dalam rangka meningkatkan fungsi, kualitas layanan, serta keberlanjutan program Puspaga di tingkat daerah.	[32010026] Wilayah;		Total	puspaga

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Peraturan daerah Provinsi; APBD; Peraturan kepala daerah;	Banyaknya Dokumen rancangan peraturan daerah yang disusun oleh pemerintah daerah (provinsi) dalam rangka menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta dokumen serta Dokumen penjabaran yang menyertai Raperda tentang pertanggungjawaban APBD, berfungsi merinci substansi laporan keuangan dan menyampaikan isi pertanggungjawaban secara lebih terstruktur.	[32010026] Wilayah;	-	Total	dokumen
	Jumlah Ranperda dalam Propem Perda yang Difasilitasi	Rancangan; Peraturan Daerah; Program Pembentukan;	Banyaknya dokumen pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan	[32010026] Wilayah	-	Total	dokumen
	Jumlah Realisasi BBNKB	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;	Total pembayaran atau penerimaan yang diterima oleh pemerintah daerah dari wajib bayar atas transaksi balik nama kendaraan bermotor, yang dapat terjadi karena perubahan pemilik kendaraan	[32010026] Wilayah;	-	Jumlah	rupiah
	Jumlah Realisasi Pajak Air Permukaan	Pajak Air Permukaan;	Jumlah penerimaan yang masuk ke kas pemerintah provinsi dari pungutan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan oleh pihak tertentu, dalam suatu periode anggaran	[32010026] Wilayah;	-	Jumlah	rupiah

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Realisasi Pajak Alat Berat	Pajak Alat Berat;	Jumlah penerimaan yang masuk ke kas daerah dari pungutan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat oleh badan atau orang pribadi, dalam suatu periode anggaran	[32010026] Wilayah;	-	Jumlah	rupiah
	Jumlah Realisasi Pajak Rokok	Pajak Rokok;	Jumlah dana yang disalurkan Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi atas bagian Pajak Rokok yang telah dipungut sebelumnya dari produsen rokok.	[32010026] Wilayah;	-	Jumlah	rupiah
	Jumlah Realisasi PBBKB	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;	Total penerimaan atau pendapatan yang diterima oleh pemerintah provinsi dari pungutan pajak atas konsumsi bahan bakar kendaraan bermotor, baik untuk kendaraan pribadi maupun kendaraan niaga, dalam suatu periode anggaran tertentu	[32010026] Wilayah;	-	Jumlah	rupiah
	Jumlah Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD);	Banyaknya pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber pendapatan yang sah dan diakui dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)	[32010026] Wilayah; Jenis PAD;	-	Jumlah	rupiah
	Jumlah Realisasi PKB	Pajak Kendaraan Bermotor;	Total uang yang terkumpul atau jumlah pembayaran yang diterima oleh pemerintah daerah dari wajib pajak kendaraan bermotor dalam suatu periode anggaran tertentu	[32010026] Wilayah;	-	Jumlah	rupiah
	Jumlah Register Cagar Budaya	[K01861] Registrasi; Cagar Budaya;	Banyaknya objek cagar budaya yang telah dicatat secara resmi melalui proses registrasi oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau pihak berwenang ke dalam sistem pencatatan nasional atau daerah	[32010026] Wilayah;	-	Total	cagar budaya

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Regulasi Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha	Regulasi; Pemberian Insentif; Pemberian Kemudahan;	Banyaknya regulasi yang telah diterbitkan dalam periode tertentu oleh otoritas pemerintah yang berfokus pada pemberian insentif (misalnya, pajak, subsidi) dan kemudahan berusaha (misalnya, pengurangan prosedur birokrasi, penyederhanaan izin usaha).	Tahun; Regulasi; Tingkatan Pemerintah; Sektor; Jenis Insentif;		Total	regulasi
	Jumlah rekomendasi dan kebijakan bidang sumber daya alam yang disusun	Rekomendasi Kebijakan Sumber Daya Alam;	Banyaknya rekomendasi dan kebijakan bidang sumber daya alam yang disusun	[32010026] Wilayah	-	Total	dokumen
	Jumlah Rekomendasi dan kebijakan dibidang perekonomian yang disusun	Rekomendasi Surat Edaran Gubernur;	Banyaknya Rekomendasi dan kebijakan dibidang perekonomian yang disusun	[25020054] Klasifikasi Instansi Pemerintah;	-	Total	rekomendasi
	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Perikanan (Rekomendasi SIPPHP)	Perizinan Berusaha; Pemasaran Ikan; Pengolahan Ikan; Perikanan;	Banyaknya surat pertimbangan teknis dan administratif yang dikeluarkan oleh instansi daerah sebagai dasar penerbitan Surat Izin Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (SIPPHP), untuk menjamin kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan berjalan sesuai ketentuan perundangan.	[32010026] Wilayah; Tahun;	-	Total	dokumen
	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Pengolahan	Perizinan Berusaha; Pengolahan Ikan; Perikanan;	Banyaknya persetujuan tertulis yang dikeluarkan oleh instansi sebagai bagian dari proses perizinan usaha pengolahan hasil perikanan dari instansi berwenang.	[32010026] Wilayah; Tahun;	-	Total	dokumen
	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Perikanan	Perizinan Berusaha; Perikanan;	Banyaknya persetujuan tertulis yang dikeluarkan oleh instansi sebagai syarat administratif bagi pelaku usaha berupa perizinin berusaha perikanan dari instansi berwenang	Jenis Usaha Perikanan; [32010026] Wilayah; Sakala Usaha; Jenis Pemohon;	-	Total	dokumen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata yang dihasilkan	Rekomendasi Kebijakan; Kesejahteraan Rakyat; Kepemudaan; Olahraga; Kebudayaan; Pariwisata;	Banyaknya Rekomendasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata yang dihasilkan.	Jenis Kebijakan; [32010026] Wilayah; Waktu;	-	Total	dokumen
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan yang dihasilkan	Rekomendasi Kebijakan; Kesejahteraan Rakyat; Telekomunikasi; Informatika; Statistik; Persandian; Perhubungan;	Banyaknya Rekomendasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan yang dihasilkan.	Jenis Kebijakan; [32010026] Wilayah; Waktu;	-	Total	dokumen
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Brerencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang dihasilkan	Rekomendasi Kebijakan; Kesejahteraan Rakyat; Pemberdayaan Perempuan; Perlindungan Anak; Pengendalian Penduduk; Keluarga Berencana; Administrasi; Kependudukan; Pencatatan Sipil; Pemberdayaan Masyarakat Desa; Transmigrasi; Tenaga Kerja;	Banyaknya Rekomendasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang dihasilkan.	Jenis Kebijakan; [32010026] Wilayah; Waktu;	-	Total	dokumen
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kesejahteraan	Rekomendasi; Kesejahteraan	Banyaknya Rekomendasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial yang dihasilkan	[32010026] Wilayah;	-	Total	dokumen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Rakyat Bidang Sosial yang dihasilkan	Rakyat; Sosial;					
	Jumlah Rekomendasi Kesejahteraan di Bidang Kesehatan yang dihasilkan	Rekomendasi; Kesejahteraan; Kesehatan;	Banyaknya Rekomendasi Kesejahteraan di Bidang Kesehatan yang dihasilkan.	[32010026] Wilayah;	-	Total	dokumen
	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi	Rekomendasi Perizinan Operasi;	Dokumen rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi.	Tahun;	-	Jumlah	dokumen
	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas	Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;	Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.	Tahun;	-	Jumlah	dokumen
	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut	Pemanfaatan Ruang; Laut;	Banyaknya surat atau dokumen rekomendasi teknis yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sebagai bagian dari proses penerbitan Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut.	[32010026] Wilayah; Tahun;	-	Total	dokumen
	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun	Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan; Kawasan Perbatasan.;	Banyaknya Rencana Aksi Pembangunan bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain yang Disusun	[32010026] Wilayah	-	Total	rencana aksi
	Jumlah Rombongan Belajar	Rombongan Belajar;	Banyaknya kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam bentuk pendidikan tertentu	[32010026] Wilayah; Bentuk Pendidikan;	-	Total	unit
	Jumlah Rombongan Belajar setingkat Pendidikan Menengah Atas	Rombongan Belajar;	Banyaknya kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas pada pendidikan menengah atas	[32010026] Wilayah;	-	Total	unit

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah RS Rujukan Regional dan Provinsi	Rumah Sakit; Rujukan;	Banyaknya rumah sakit rujukan regional dan provinsi.	[32010026] Wilayah;	-	Total	rumah sakit
10310066	Jumlah Ruang Kelas	[K01905] Ruang Kelas;	Banyaknya ruangan di dalam bangunan sekolah atau kampus, yang berfungsi sebagai tempat untuk kegiatan tatap muka dalam proses kegiatan belajar mengajar (KBM).	[32010026] Wilayah; [10320051] Status Satuan Pendidikan; [10720073] Kondisi Bangunan; Jenis Fasilitas Sekolah;	-	Total	unit
	Jumlah Rumah Korban Bencana yang Terbangun dan/atau Terehabilitasi	Rumah; Korban; Bencana;	Banyaknya unit rumah milik warga terdampak bencana yang telah selesai dibangun ulang (rekonstruksi) dan/atau diperbaiki (rehabilitasi) oleh pemerintah atau melalui fasilitasi pemerintah (provinsi/kabupaten/kota), baik melalui APBN, APBD, hibah, maupun kemitraan, untuk dikembalikan menjadi hunian layak huni.	[32010026] Wilayah; [32020020] Klasifikasi Wilayah;	-	Total	unit rumah
	Jumlah Rumah Layak Huni yang Dibangun	Rumah Layak Huni;	Banyaknya unit rumah baru yang dibangun oleh pemerintah (pusat atau daerah) dan/atau maupun lembaga resmi/swasta yang telah memenuhi kriteria “rumah layak huni” sesuai standar nasional pada periode tertentu.	[32010026] Wilayah;	-	Total	unit rumah
24110276	Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian yang Menggunakan Lahan dari Perhutanan Sosial	Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP); Lahan; Perhutanan Sosial;	Banyaknya rumah tangga yang anggota rumah tangganya mengikuti program perhutanan sosial dan menggunakan lahan yang diterima dari program perhutanan sosial.	[32010026] Wilayah;	-	Total	kelompok

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Rumah Tangga Yang Terdampak Relokasi Program Provinsi Yang Terbangun dan/atau Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	Rumah Tangga; Relokasi; Rumah;	Banyaknya rumah tangga yang memperoleh rumah baru yang terbangun secara fisik, atau difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi melalui berbagai skema penyediaan perumahan (hibah, subsidi, kemitraan, atau bantuan langsung), baik di lokasi baru (relokasi) maupun di permukiman yang ditata ulang (in-situ).	[32010026] Wilayah; [32020020] Klasifikasi Wilayah;	-	Total	rumah tangga
	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang diperbaiki	Rumah Layak Huni; Perbaikan;	Banyaknya unit rumah baru yang diperbaiki oleh pemerintah (pusat atau daerah) dan/atau maupun lembaga resmi/swasta yang telah memenuhi kriteria “rumah layak huni” sesuai standar nasional pada periode tertentu.	[32010026] Wilayah;	-	Total	unit rumah
	Jumlah Sampel Hewan dan Produk Pangan Asal Hewan yang Diuji	Contoh/Sampel; Pengambilan Contoh/Sampel; Produk Pangan Asal Hewan;	Banyaknya Satu atau lebih satuan satuan (unit) hasil dari bagian hewan yang dipilih dari suatu kumpulan (populasi) satuan serta produk pangan asal hewan yang telah melalui serangkaian pengujian laboratorium dan pemeriksaan keamanan.	[32010026] Wilayah; Tahun Penyajian; Jenis Uji Lab; Jenis Hewan	-	Total	sampel
	Jumlah Sampel Hewan yang Diperiksa	Contoh/Sampel; Pengambilan Contoh/Sampel;	Banyaknya satu atau lebih satuan satuan (unit) hasil dari bagian hewan yang dipilih dari suatu kumpulan (populasi) satuan, atau bagian terpilih dari hasil dengan jumlah yang lebih besar yang telah melalui serangkaian pengujian laboratorium dan pemeriksaan keamanan.	[32010026] Wilayah; Tahun Penyajian; Jenis Hewan	-	Total	sampel
	Jumlah Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Sarana; Fasilitas Pelayanan Kesehatan ;	Banyaknya unit sarana Fasilitas Layanan kesehatan yang tersedia dan berfungsi di rumah sakit	Jenis sarana;	-	Total	unit

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Sarana Peningkatan Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil (Bot Pancung, Mesin Tempel, Mesin Ketinting, Sampan Bahan Fibre Glass, Sampan Dayung Kayu dan Peralatan Pendukung Lainnya	Sarana; Usaha Perikanan Tangkap;	Berbagai bentuk sarana yang diberikan kepada nelayan kecil guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha perikanan tangkap. Sarana ini meliputi alat transportasi perairan dan alat pendukung kegiatan penangkapan.	[32010026] Wilayah; Tahun; Jenis Sarana;	-	Total	unit
	Jumlah Sarana Prasarana Pertanian yang Diadakan	Sarana Pertanian; Prasarana Pertanian;	Banyaknya segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan/atau bahan yang dibutuhkan untuk budi daya pertanian serta yang menjadi penunjang utama dan pendukung budi daya pertanian yang disediakan atau diadakan.	[32010026] Wilayah; Tahun Penyajian	-	Total	unit
	Jumlah Satlinmas yang Terlatih dan Dikukuhkan	Satlinmas terlatih dan dikukuhkan;	Jumlah anggota satlinmas yang telah dikukuhkan oleh bupati/walikota dan diberi pelatihan	[32010026] Wilayah; Jenis Kelamin;	-	Jumlah	orang
10310067	Jumlah Satuan Pendidikan	K01971] Satuan Pendidikan; [K01976] Sekolah;	Banyaknya unit kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.	[32010026] Wilayah; [10320055] Tingkat Pendidikan; [10320051] Status Satuan Pendidikan;	-	Total	unit

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ Komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup	Satuan Pendidikan Formal; Komunitas Masyarakat; Lingkungan Hidup;	Banyaknya satuan pendidikan formal dan lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup" adalah ukuran kuantitatif yang meliputi: (1) jumlah sekolah/sekolah formal pada tingkat pendidikan dasar, menengah, dan tinggi; serta (2) jumlah lembaga swadaya masyarakat atau komunitas yang terlibat aktif dalam program pendidikan dan gerakan lingkungan hidup seperti PBLHS (misal, sebagai lembaga pembina, kader Adiwiyata, atau pemberi dukungan teknis/pembinaan).	[32010026] Wilayah;	-	Total	unit
	Jumlah satuan pendidikan setingkat Pendidikan Menengah Atas	Sekolah; Satuan Pendidikan; Pendidikan Menengah;	Banyaknya satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan menengah atas yang menyelenggarakan proses pembelajaran setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan telah memperoleh izin operasional dari pemerintah atau pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau pada periode tertentu.	[32010026] Wilayah;	-	Total	unit
	Jumlah Satuan Pendidikan yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan; Pembinaan; Kelembagaan; Manajemen;	Banyaknya sekolah pada satuan pendidikan tertentu yang mendapatkan pembinaan terkait kelembagaan dan manajemen sekolah oleh pihak yang berwenang.	[32010026] Wilayah; Bentuk pendidikan;	-	Total	unit
	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mengelola Dana BOS	Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);	Banyaknya satuan pendidikan tertentu yang mengelola Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai pedoman penggunaan dana BOS.	[32010026] Wilayah; Bentuk pendidikan;	-	Total	unit
	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan; Belajar; Ujian;	Banyaknya sekolah pada bentuk pendidikan tertentu yang melaksanakan proses pembelajaran dan ujian sesuai ketentuan kurikulum yang berlaku.	[32010026] Wilayah; Bentuk Pendidikan;	-	Total	unit

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah SDM Kesehatan Provinsi dengan Sertifikasi UKOM (Uji Kompetensi) yang Diterbitkan Tahun Berjalan	Sumber Daya Manusia (SDM); Kesehatan; Sertifikasi; Uji Kompetensi;	Banyaknya sertifikasi UKOM (Uji Kompetensi) yang diterbitkan tahun berjalan.	[32010026] Wilayah;	-	Total	sertifikat
	Jumlah SDM Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	Pegawai Negeri Sipil (PNS); Sumber Daya Manusia (SDM);	Banyaknya sumber daya manusia yang bekerja pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dengan status bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang meliputi Pegawai Tidak Tetap (PTT), jasa tenaga administrasi (JTA), atau tenaga pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	[33220007] Jenis Kelamin; [10320055] Tingkat Pendidikan;	-	Total	orang
	Jumlah sekolah yang diberikan rekomendasi perizinan	Sekolah; rekomendasi; perizinan;	Banyaknya sekolah yang diberikan rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan.	Wilayah	-	Total	unit
	Jumlah Sengketa yang difasilitasi	Sengketa; Fasilitasi;	Banyaknya Penyelesaian Perselisihan Litigasi dan Non Litigasi.	[32010026] Wilayah;	-	Total	sengketa
	Jumlah Sertifikat Benih/Bibit Tanaman Pertanian yang Diterbitkan	Sertifikat; Sertifikasi Benih;	Banyaknya dokumen keterangan atau laporan pemeriksaan yang diberikan oleh suatu lembaga kepada seseorang atau badan usaha sebagai bukti bahwa benih/bibit tanaman pertanian telah memenuhi persyaratan sesuai yang diminta setelah melalui proses serangkaian pengujian, serta memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal.	Jenis Komoditas Tanaman Pertanian	-	Total	sertifikat

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi yang tersedia	Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit;	Banyaknya sistem teknologi informasi komunikasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses pelayanan Rumah Sakit dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan dan prosedur administrasi untuk memperoleh informasi secara tepat dan akurat, dan merupakan bagian dari Sistem Informasi Kesehatan.	Periode Tahun	-	Total	sistem informasi kesehatan
	Jumlah Siswa setingkat pendidikan Menengah Atas	Siswa; Satuan Pendidikan; Pendidikan Menengah;	Banyaknya siswa yang terdaftar dan aktif mengikuti proses pembelajaran pada jenjang pendidikan menengah umum setingkat pendidikan menengah atas di seluruh satuan pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau pada periode tertentu.	[32010026] Wilayah;	-	Total	orang;
	Jumlah Siswa Tahun Sebelumnya setingkat pendidikan Menengah Atas	Siswa;	Banyaknya rombongan belajar yang terbentuk dan aktif menyelenggarakan kegiatan pembelajaran pada jenjang pendidikan menengah atas di Provinsi Kepulauan Riau pada periode tertentu.	[32010026] Wilayah; Jenis Kelamin; Bentuk Pendidikan;	-	Total	orang
	Jumlah Siswa Tingkat III Tahun Sebelumnya setingkat pendidikan Menengah Atas	Siswa;	Banyaknya peserta didik yang terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan pembelajaran pada tingkat III (kelas akhir) di jenjang pendidikan menengah atas pada tahun ajaran sebelumnya.	[32010026] Wilayah; Jenis Kelamin; Bentuk Pendidikan;	-	Total	orang
	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa; ajang kompetisi; lomba; akademik; non-akademik;	Banyaknya siswa pada bentuk pendidikan tertentu yang berpartisipasi pada ajang kompetisi atau lomba baik akademik maupun non akademik.	Wilayah Bentuk Pendidikan	-	Total	orang

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah SK Penetapan Status Darurat Bencana dan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) yang Ditetapkan Paling Lama 1X24 Jam Berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Status Keadaan Darurat Bencana; SKPDB (Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana); Dokumen;	Banyaknyak SK Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana dan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat	Jenis Bencana; [32010026] Wilayah; Tahun;	-	Total	dokumen
	Jumlah SMK Negeri Terevitalisasi	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); Revitalisasi;	Banyaknya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) negeri yang telah direvitalisasi sesuai program pemerintah.	[32010026] Wilayah;	-	Total	unit
	Jumlah Stakeholder Pariwisata yang Diberi Insentif	Stakeholder Pariwisata; Insentif;	Banyaknya pihak atau pelaku yang bergerak di sektor pariwisata yang menerima dukungan dalam bentuk insentif	Jenis stakeholdernya; Jenis insentif yang diberikan;	-	Total	stakeholder
	Jumlah Subsektor Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Subsektor Ekonomi Kreatif;	Banyaknya jenis subsektor dalam sektor ekonomi kreatif yang telah mendapatkan intervensi pengembangan, baik melalui fasilitasi, pembinaan, penguatan ekosistem, maupun peningkatan kapasitas.	Banyaknya subsektor;	-	Total	subsektor
	Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Periode Pelaporan Tertentu	Sumber Daya Manusia; Tenaga Kesehatan; Fasilitas Pelayanan Kesehatan;	Banyaknya sumber daya manusia berdasarkan jenis tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan yang telah memenuhi persyaratan standar kompetensi, kualifikasi pendidikan, dan perizinan praktik sesuai regulasi pada periode pelaporan tertentu.	Jenis tenaga kesehatan; Waktu;	-	Total	orang
	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan RSUD Raja Ahmad Tabib	Sumber Daya Manusia Kesehatan;	Banyaknya tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan yang mendukung, menunjang, terlibat, bekerja, dan mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan.	Periode Tahun	-	Total	orang

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Sumber Daya Manusia; Ekonomi Kreatif;	Banyaknyasumber daya manusia dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang telah memperoleh peningkatan kapasitas.	[32010026] Wilayah;	-	Total	orang
	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata yang Dibina	[K02077] Sumber Daya Manusia (SDM); [K02366] Lembaga;	Banyaknya individu, organisasi, dan sistem sosial-budaya yang memiliki peran dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan yang telah mendapatkan upaya pembinaan dari pemerintah, pemerintah daerah, atau lembaga terkait melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, fasilitasi, pendampingan, atau penguatan kapasitas kelembagaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	[32010026] Wilayah;	-	Total	orang/lembaga
	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Tenaga Ahli Fraksi;	Banyaknya personel yang direkrut oleh fraksi di DPRD untuk memberikan dukungan keahlian di bidang legislasi, anggaran, pengawasan, serta kebijakan strategis sesuai dengan kebutuhan fraksi.	[32010026] Wilayah	-	Total	dokumen
10410067	Jumlah Tenaga Gizi	[K02156] Tenaga gizi;	Banyaknya tenaga kesehatan yang telah memenuhi kualifikasi bidang gizi yang terdiri dari nutrisionis dan dietisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	[32010026] Wilayah;	-	Total	orang
10410068	Jumlah Tenaga Kebidanan	[K00287] Bidan;	Banyaknya tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan berdasarkan kompetensi untuk melakukan pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, dan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana.	[32010026] Wilayah;	-	Total	orang
10410069	Jumlah Tenaga Kefarmasian	[K00152] Apoteker; [K02186] Tenaga	Banyaknya tenaga kesehatan yang melakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.	[32010026] Wilayah;	-	Total	orang

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Teknis Kefarmasian;					
10410070	Jumlah Tenaga Keperawatan	[K01634] Perawat;	Banyaknya tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan berdasarkan kompetensi untuk melakukan asuhan keperawatan serta tindakan kolaborasi keperawatan dengan tenaga kesehatan lain sesuai kualifikasinya.	[32010026] Wilayah;	-	Total	orang
10210058	Jumlah Tenaga Kerja Tersertifikasi	[K02159] Tenaga Kerja; [K02383] Sertifikasi;	Banyaknya tenaga kerja yang berhasil melalui sertifikasi kompetensi dan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan sertifikat kompetensinya.	[32010026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin;	-	Total	orang
	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Tenaga Kerja; Pelatihan Berbasis Kompetensi Kerja;	Banyaknya peserta yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja dan terdaftar pada layanan Sisnaker (memiliki kode transaksi).	[32010026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin;	-	Total	orang
10410071	Jumlah Tenaga Kesehatan Lingkungan	[K02174] Tenaga Kesehatan;	Banyaknya tenaga kesehatan yang memenuhi kualifikasi bidang kesehatan lingkungan, mencakup tenaga lingkungan, entomolog kesehatan, dan mikrobiolog kesehatan.	[32010026] Wilayah;	-	Total	orang

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10410072	Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat	[K02174] Tenaga Kesehatan;	Banyaknya tenaga kesehatan yang telah memenuhi kualifikasi bidang kesehatan masyarakat yang terdiri dari epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan, tenaga biostatistik dan kependudukan, serta tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	[32010026] Wilayah;	-	Total	orang
	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitasi	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;	Banyaknya tenaga inti pengendali kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan.	[32010026] Wilayah;	-	Jumlah	orang
10410074	Jumlah Tenaga Keteknisan Medis	[K02174] Tenaga Kesehatan;	Banyaknya tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi keteknisan medis, mencakup perekam medis dan informasi kesehatan, teknik kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, refraksionis optisien/optometris, teknisi gigi, penata anestesi, terapis gigi dan mulut, dan audiologis.	[32010026] Wilayah;	-	Total	orang
10410075	Jumlah Tenaga Keterapian Fisik	[K02174] Tenaga Kesehatan;	Banyaknya tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dalam terapi fisik, mencakup fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara, dan akupuntur.	[32010026] Wilayah;	-	Total	orang

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah tenaga konstruksi terlatih (Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi)	Tenaga Kerja Konstruksi Tersertifikasi; Tenaga Kerja Konstruksi;	Tenaga Kerja Konstruksi yang selanjutnya disingkat TKK adalah setiap orang yang memiliki keterampilan atau pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan Pekerjaan Konstruksi yang dibuktikan dengan SKK Konstruksi. Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi yang selanjutnya disebut SKK Konstruksi adalah tanda bukti pengakuan kompetensi TKK.		-	jumlah	orang
	Jumlah Terbitan Eksemplar Buletin	Jumlah; Terbitan; Eksemplar; Buletin;	Banyaknya terbitan eksampler buletin yang diterbitkan.		-	Jumlah	kali
	Jumlah Terselenggaranya Event Promosi Penanaman modal	Promosi; Penanam Modal;	Banyaknya event promosi penanaman modal yang berhasil diselenggarakan dan direncanakan dalam periode waktu tertentu.	[32010026] Wilayah; Jenis Event;		Total	event promosi
	Jumlah Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi;	[K02077] Sumber Daya Manusia (SDM); Cagar budaya; Provinsi;	Banyaknya orang yang terdiri dari para ahli yang memiliki kompetensi di bidang pelestarian cagar budaya, guna memberikan pertimbangan profesional dan ilmiah dalam penilaian, rekomendasi, dan penetapan objek cagar budaya di wilayah provinsi,	[32010026] Wilayah;	-	Total	orang
	Jumlah Tim Ahli Cagar Budaya yang Tersertifikasi	Sertifikasi; Cagar Budaya; [K02077] Sumber Daya Manusia (SDM);	Banyaknya anggota Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) yang telah memiliki sertifikat kompetensi profesional di bidang pelestarian cagar budaya, yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi (LSP) yang diakui secara nasional, sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI)	[32010026] Wilayah;	-	Total	orang

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Tim Pendaftaran Cagar Budaya	Cagar budaya; [K01861] Registrasi;	Banyaknya orang yang memiliki kompetensi dalam bidang sejarah, arkeologi, antropologi, pelestarian, dan kebudayaan yang ditetapkan secara resmi oleh pemerintah atau pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas identifikasi, dokumentasi, verifikasi, dan pencatatan awal terhadap objek dugaan cagar budaya dalam rangka penyusunan daftar registrasi cagar budaya	[32010026] Wilayah;	-	Total	orang
	Jumlah titik teramankan berdasarkan jumlah titik pada pola hubungan komunikasi sandi (PHKS)	Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS); Titik;	Banyaknya titik yang diamankan berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi (PHKS) dibanding dengan jumlah seluruh titik yang telah diamankan	[32010026] Wilayah;		Total	titik
	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari Seluruh Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Produksi; Penangkapan Ikan; Pembudidayaan Ikan;	Seluruh hasil yang diperoleh dari kegiatan penangkapan dan budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang ditangkap dari sumber perikanan alami atau tempat pemeliharaan baik yang diusahakan oleh usaha perikanan berbadan hukum, perorangan maupun usaha perikanan lainnya.	[32010026] Wilayah; Tahun;	-	Total	ton
	Jumlah tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti	Tuna Sosial dan Korban perdagangan orang;	Seseorang yang karena faktor tertentu, tidak atau kurang mampu untuk melaksanakan kehidupan yang layak atau sesuai dengan norma agama, sosial atau hukum serta secara sosial cenderung terisolasi dari kehidupan masyarakat	[32010026] Wilayah;	-	Jumlah	orang

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah tuna sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti	Tuna Sosial;	Seseorang yang karena faktor tertentu, tidak atau kurang mampu untuk melaksanakan kehidupan yang layak atau sesuai dengan norma agama, sosial atau hukum serta secara sosial cenderung terisolasi dari kehidupan masyarakat.	[32010026] Wilayah;	-	Jumlah	orang
	Jumlah UKPBJ Kab/Kota yang Mengikuti Pembinaan	UKPBJ;	Banyaknya unit organisasi yang dibentuk di Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/Jasa pada pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota	[25020054] Klasifikasi Instansi Pemerintah;	-	Total	instansi
	Jumlah Unit Kerja Perangkat Daerah	Satuan Kerja Perangkat Daerah;	Banyaknya Organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi/tugas pemerintahan di bidang tertentu di provinsi, kabupaten, atau kota.	Perangkat Daerah	-	Total	unit kerja
	Jumlah Unit Prasarana Perbenihan, Pembesaran dan Unit Usaha	Pembibitan Ikan; Pembudidayaan Ikan; Prasarana;	Banyaknya Prasarana perbenihan,pembesaran dan unit usaha	[32010026] Wilayah; Tahun;	-	Total	unit
	Jumlah Unit Usaha Budidaya Perikanan yang Terkendali Hama Penyakit Ikan dan Obat-Obatan	Pembudidayaan Ikan; Unit; Usaha Perikanan;	Banyaknya unit usaha budidaya perikanan yang terkendali hama penyakit ikan dan obat-obatan.	[32010026] Wilayah; Tahun;	-	Total	unit
	Jumlah Upaya Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Prov Kepri	Upaya pencegahan gangguan trantibum;	Banyaknya Upaya pencegahan gangguan trantibum melalui patroli, cegah dini, deteksi dini, Pembinaan, Pengamanan dan Pengawalan	[32010026] Wilayah;	-	Jumlah	kali
	Jumlah Usaha Kreatif yang Dikembangkan dan Disediakan Sarana dan Prasarananya	Usaha; Ekonomi Kreatif; Sarana; Prasarana;	Banyaknya unit usaha di sektor ekonomi kreatif yang mendapatkan dukungan pengembangan melalui penyediaan sarana dan prasarana.	Subsektor ekraf; [32010026] Wilayah;	-	Total	unit usaha

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Video Promosi Digital	Promosi; Video Digital;	Banyaknya Video Digital yang dirancang khusus untuk tujuan promosi dan disebarkan melalui saluran digital seperti media sosial, situs web perusahaan, atau platform video seperti YouTube.	Platform; Jenis Video;		Total	unit (video)
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	Warga Negara yang memperoleh Layanan;	Banyaknya Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan Hukum perda dan Perkada	[32010026] Wilayah; Jenis Kelamin;	-	Jumlah	orang
	Jumlah Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Negara Republik Indonesia yang Terkelola Secara Berkelanjutan	Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP);	Banyaknya Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) yang dalam pengelolaannya telah menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan.	Nomor WPPNRI; Status Pengelolaan Berkelanjutan (Belum dimulai, dalam proses, telah dikelola sec berkelanjutan); Jensi perikanan dominan (Tangkap / budidaya); Zona Laut;	-	Total	unit
	Jumlah Wilayah yang Dilakukan Pengendalian	[K02323] Wilayah; Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;	Banyaknya daerah yang telah mendapatkan kegiatan penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan lingkungan dalam bentuk pengamatan dan pengidentifikasian, pencegahan, pengamanan, pemberantasan, dan/atau pengobatan.	[32010026] Wilayah; Tahun Penyajian	-	Total	kabupaten/kota
	Jumlah Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan dan Zoonosis	Wilayah; Penyakit Hewan; Zoonosis;	Banyaknya wilayah tertentu di mana tindakan pencegahan dan pengendalian terhadap gangguan kesehatan pada hewan telah berhasil diterapkan dan dipertahankan.	[32010026] Wilayah; Tahun Penyajian; Jenis Penyakit Hewan	-	Total	kabupaten/kota

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Kapasitas Air Baku	Kapasitas prasarana air baku untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga [K00019] Air baku;	Kapasitas prasarana air baku adalah kapasitas debit prasarana air baku yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga	[32010026] Wilayah;	-	jumlah	m3/detik
	Kapasitas Total Cold Storage	Kapasitas Terpasang; Cold Storage;	Kemampuan maksimum dari penyimpanan berpendingin (cold storage) yang digunakan untuk menyimpan hasil perikanan agar tetap segar, dalam kondisi beku atau dingin, yang tercatat atau tersedia di suatu wilayah pada periode tertentu.	[32010026] Wilayah;		Total	ton
	Ketersediaan Stok Ikan	Stok; Ikan;	Jumlah potensi sumber daya ikan yang tersedia di suatu wilayah perairan pada periode tertentu, yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kegiatan penangkapan maupun budidaya, tanpa mengganggu keseimbangan ekosistem	[32010026] Wilayah;	-	Total	ton
	Konsumsi Listrik Perkapita	Konsumsi Listrik;	Pemakaian tenaga listrik dibagi jumlah penduduk pada suatu wilayah dalam periode satu tahun.	[32010026] Wilayah; Tahun;	-	kwh	kwh/kapita
	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB (Sesuai Kompilasi Data Perikanan)	Sektor; Perikanan; Produk Domestik; Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB);	Nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dalam sektor perikanan (perikanan tangkap, budidaya, jasa perikanan) di mana nilai ini dihitung menggunakan harga yang berlaku di suatu wilayah dalam tahun tertentu.	Jenis Perikanan; [32010026] Wilayah;	-	Total	milyar rupiah
	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Harga Berlaku	Kontribusi; [K01705] Pertanian; [K01776] Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);	Seberapa besar pemberian andil dari sektor pertanian terhadap seluruh nilai tambah dari berbagai kegiatan ekonomi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu.	[32010026] Wilayah; Tahun Penyajian	-	Persentase	persen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Koordinasi; pelaksanaan Sinergitas; Dokumen; Harminsasi; Perencanaan; Pembangunan; Daerah; SDA;	Kegiatan Koordinasi yang dilakukan untuk memastikan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA antara Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan pemerintah pusat.	Perangkat Daerah;	-	Total	dokumen
	Laporan Hasil Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	indikator Kinerja; Perangkat Daerah; Bidang Pemerintahan;	Laporan yang memuat Hasil Capaian indikator Kinerja Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan yang telah disusun dan disampaikan.	Perangkat Daerah;	-	Total	dokumen
	Laporan Hasil Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	indikator Kinerja; Perangkat Daerah; Pembangunan Manusia;	Banyaknya Laporan yang memuat Hasil Capaian indikator Kinerja Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang telah disusun dan disampaikan.	Perangkat Daerah;	-	Total	laporan
	Laporan Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Dokumen Perencanaan Kabupaten Kota Bidang Pemerintahan	Sinkronisasi; Harmonisasi; Dokumen; Perencanaan; Bidang Pemerintahan;	Laporan yang memuat Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Dokumen Perencanaan Kabupaten/Kota Bidang Pemerintahan yang telah disusun dan disampaikan.	[32010026] Wilayah;	-	Total	laporan
	Laporan Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Dokumen Perencanaan Kabupaten/Kota Bidang Pembangunan Manusia	sinkronisasi; harmonisasi; Dokumen; Perencanaan; Pembangunan Manusia;	Banyaknya Laporan yang memuat Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Dokumen Perencanaan Kabupaten/Kota Bidang Pembangunan Manusia yang telah disusun dan disampaikan.	[32010026] Wilayah;	-	Total	laporan
	Laporan Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Dokumen Perencanaan Kabupaten/Kota Bidang Perekonomian	Sinkronisasi; Harmonisasi; Dokumen Perencanaan; Bidang Perekonomian;	Banyaknya Laporan yang memuat Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Dokumen Perencanaan Kabupaten/Kota Bidang Perekonomian yang telah disusun dan disampaikan.	Perangkat Daerah;	-	Total	dokumen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Laporan Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Dokumen Perencanaan Kabupaten/Kota Bidang Infrastruktur	Hasil Sinkronisasi; Harmonisasi; Dokumen; Perencanaan; Infrastruktur;	Tersedianya Laporan yang memuat Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Dokumen Perencanaan Kabupaten/Kota Bidang Infrastruktur yang telah disusun dan disampaikan.	OPD;	-	Jumlah	dokumen
	Laporan Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Dokumen Prioritas Nasional Bidang Pemerintahan	Sinkronisasi; Harmonisasi; Dokumen; Prioritas; Nasional; Bidang Pemerintahan;	Banyaknya Laporan Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Dokumen Prioritas Nasional Bidang Pemerintahan.	Perangkat Daerah;	-	Total	laporan
	Laporan Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Dokumen Prioritas Nasional Bidang Pembangunan Manusia	sinkronisasi; harmonisasi; Dokumen; Perencanaan; Pembangunan Manusia;	Banyaknya Laporan yang memuat Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Dokumen Prioritas Nasional Bidang Pembangunan Manusia yang telah disusun dan disampaikan.	Perangkat Daerah;	-	Total	laporan
	Laporan Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Dokumen Prioritas Nasional Bidang Perekonomian	Hasil Sinkronisasi; harmonisasi; Dokumen; Prioritas; Nasional; Bidang Perekonomian;	Banyaknya Laporan yang memuat Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Dokumen Prioritas Nasional Bidang Perekonomian yang telah disusun dan disampaikan.	Perangkat Daerah;	-	Total	dokumen
	Laporan Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Dokumen Prioritas Nasional Bidang SDA	Hasil Sinkronisasi ; harmonisasi; dokumen ; Prioritas; Nasional; SDA;	Laporan yang memuat Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Dokumen Prioritas Nasional Bidang SDA yang telah disusun dan disampaikan.	Perangkat Daerah;	-	Total	dokumen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Koordinasi; Sikronisasi; Kawasan Permukiman;	Dokumen administratif yang berisi hasil kegiatan koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan serta upaya penyelarasan program, kebijakan, dan kegiatan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan secara terpadu, efektif, dan berkelanjutan.	[32010026] Wilayah;	-	Total	laporan
	Indeks Ketahanan Nasional	Ketahanan Nasional;	Angka yang menggambarkan kondisi dinamis suatu bangsa yang meliputi ketangguhan dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam bentuk ancaman yang membahayakan integritas, identitas, serta perjuangan mewujudkan tujuan perjuangan nasional.	[32010026] Wilayah;	-	Indeks	-
31010018	Indeks Kualitas Air	Air Baku;	Angka yang menggambarkan kualitas air ambien yang baik pada badan air yang didekati dengan jumlah zat padat tersuspensi/total suspended solid (TSS), jumlah oksigen terlarut/dissolved oxygen (DO), kebutuhan oksigen biokimia/biochemical oxygen demand (BOD), kebutuhan oksigen kimia/chemical oxygen demand (COD), jumlah fosfat, jumlah fecal coli, dan jumlah coli.	[32010026] Wilayah;	-	Indeks	-
	Indeks Kualitas Air Laut	Air Laut;	Angka yang menggambarkan kondisi kualitas air laut yang merupakan nilai komposit dari beberapa parameter kualitas air laut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.	[32010026] Wilayah;	-	Indeks	-
	Luas Kawasan Konservasi	Kawasan Konservasi;	Total luas kawasan konservasi perairan laut.	[32010026] Wilayah; Tahun;	-	Total	hektar

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi	Lahan Kritis; Rehabilitasi;	Luas lahan kritis yang telah kehilangan fungsi produksi dan regulasi lingkungan yang telah menjalani rehabilitasi melalui kegiatan seperti reboisasi, penghijauan, dan penerapan teknik konservasi tanah.	[32010026] Wilayah;	-	Luas	hektare
	Luas Lahan Perkebunan yang Diremajakan/Diperluas	Luas; Lahan; Perkebunan; Peremajaan;	Total bidang lahan perkebunan, diukur dalam satuan luas (misalnya hektare), yang mengalami kegiatan peremajaan melalui penggantian tanaman perkebunan yang sudah tua, rusak, atau tidak produktif dengan tanaman baru yang lebih produktif, dan/atau kegiatan perluasan berupa pembukaan atau penambahan areal tanam baru di luar lahan eksisting.	[32010026] Wilayah; Tahun Penyajian; Jenis Komoditas Tanaman Perkebunan	-	Total	hektare
	Luas Lahan Tanaman Pangan dan Holtikutura yang Dioptimalisasikan	Optimasi Lahan Pertanian;	Ukuran atau besaran bidang tanah untuk usaha tani tanaman pangan dan/atau hortikultura yang mengalami peningkatan pemanfaatan melalui upaya perbaikan dan peningkatan daya dukung lahan, sehingga dapat menjadi lahan usaha tani yang lebih produktif.	[32010026] Wilayah; Tahun Penyajian; Jenis Komoditas Tanaman Pangan; Jenis Komoditas Tanaman Hortikultura	-	Total	hektare
	Luas Wilayah Terlindungi Bangunan Pengendali Banjir	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Provinsi;	Pemukiman yang terlindungi dari banjir yang sudah menjadi kewenangan pemerintah Provinsi dalam penggendalian banjir.	[32020026] Wilayah;	-	Luas	ha

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Meningkatkan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak yang ditingkatkan	Kualitas Keluarga, Kesetaraan Gender, Hak anak;	Upaya yang dilakukan melalui pembinaan, penyuluhan, pelatihan, atau kegiatan penguatan kapasitas keluarga agar keluarga memiliki pengetahuan, sikap, dan praktik yang lebih baik dalam menerapkan prinsip kesetaraan gender dan menjamin pemenuhan hak anak.	[32010026] Wilayah;		Total	keluarga
	Meningkatnya Kapasitas Orang Tua terhadap Pemenuhan Hak Anak Melalui Media Publikasi	Orang Tua; Hak Anak; Media; Publikasi;	Proses peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan orang tua dalam memenuhi, melindungi, serta menghormati hak-hak anak yang difasilitasi melalui penyebarluasan informasi, edukasi, dan sosialisasi dengan berbagai media publikasi.	[32010026] Wilayah;		Persentase	persen
	Nilai deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); [K00103] Anggaran;	Nilai yang menunjukkan Selisih atau perbedaan antara jumlah anggaran belanja yang direncanakan (dalam APBD) dengan jumlah belanja yang benar-benar direalisasikan selama satu periode anggaran (biasanya satu tahun)	[32010026] Wilayah;	-	Nilai	juta rupiah
	Nilai deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Pendapatan Asli Daerah (PAD); Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);	Nilai yang menunjukkan Selisih antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan (dalam dokumen APBD) dengan jumlah PAD yang benar-benar terealisasi dalam satu periode anggaran tertentu	[32010026] Wilayah;	-	Nilai	juta rupiah
	Nilai Ekspor Hasil Kelautan dan Perikanan	Ekspor Perikanan;	Nilai penjualan dan pengiriman produk perikanan ke luar negeri.	[32010026] Wilayah;		Total	us$

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat; Pelayanan Perizinan; Pelayanan Non Perizinan;	Nilai yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat berdasarkan hasil survei atau penilaian terhadap kualitas pelayanan yang diterima terkait perizinan dan non perizinan. Nilai ini sering kali dihitung dengan mengumpulkan data dari kuesioner atau wawancara yang menilai berbagai aspek pelayanan.	[32010026] Wilayah;		Indeks	-
23010064	Nilai Investasi	[K00622] Investasi;	Besarnya modal yang ditempatkan, baik berupa uang maupun aset berhaga lainnya, ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu.	[32010026] Wilayah; [22020004] Jenis Lapangan Usaha; Negara Asal Investor;		Nilai	rupiah; usd
	Nilai Produksi Perikanan Tangkap	Produksi; Penangkapan Ikan;	Nilai hasil tangkapan ikan (dan biota laut lainnya yang bernilai ekonomis) yang diperoleh nelayan dalam kurun waktu tertentu.	[32010026] Wilayah;		Total	idr
	Nilai SAKIP Dinas Pendidikan	SAKIP;	Nilai dari rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancanguntuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada dinas pendidikan, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja dinas pendidikan	-	1. AA (Sangat Baik): Nilai antara 90-100. 2. A (Baik): Nilai antara 80-90. 3. BB (Cukup Baik): Nilai antara 70-80. 4. B (Kurang Baik): Nilai antara 60-70.	Nilai	

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Nilai Tambah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Kehutanan	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Kehutanan;	Nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam sektor kehutanan pada suatu wilayah, atau merupakan nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di wilayah tertentu.	[32010026] Wilayah;	-	Nilai	miliar rupiah
	Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata-rata Tahunan	Saham;	Bagian dari modal dasar perseroan yang merupakan bukti keikutsertaan pemegang saham dalam kepemilikan perseroan.	[32010026] Wilayah;	-	Total	
	Nilai Tukar Petani	[K01744] Petani;	Angka yang menggambarkan daya beli petani serta kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya produksi.	[32010026] Wilayah; [24120027] Jenis Subsektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan;	-	Rasio	-
	Opini Audit Keuangan Daerah	Keuangan Daerah;	pernyataan profesional dari auditor mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan kriteria tertentu. Opini ini merupakan hasil dari pemeriksaan atas laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mencerminkan tingkat kepatuhan dan kesesuaian terhadap standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern	[32010026] Wilayah;	-	Indeks	-

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Opini Laporan Keuangan	BPK;	Pernyataan profesional pemeriksa (auditor) atas kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, yang diukur berdasarkan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.	-	-	-	-
	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Hasil Perikanan; Bimbingan;	Serangkaian acara yang dilakukan berkaitan dengan pemanfaatan dan peningkatan konsumsi hasil perikanan.	Jenis Kegiatan; Jenis Produk; Skala Usaha; [32010026] Wilayah;	-	Total	kegiatan; unit usaha; orang
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Manajemen; Lalu lintas; Jalan;	Serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas	[32010026] Wilayah;	-	Total	laporan
	Pelaksanaan Pengembangan Perikanan Budidaya Bibit Ikan Kerapu Cantang	Pembudidayaan Ikan; Pembibitan Ikan;	Proses kegiatan pengembangan perikanan budidaya berupa penyediaan bibit ikan kerapu cantang.	[32010026] Wilayah; Tahun;	-	Total	ekor
	Pembangunan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana BBI di Air Putih, Kec.Siantan Timur	Sarana; Prasarana; BBI;	Pemenuhan pembangunan dan penyediaan perlengkapan serta peningkatan sarana dan prasarana BBI	[32010026] Wilayah;	-	Total	paket

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Penerimaan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dari Sektor Pertambangan Mineral di Provinsi Kepulauan Riau	Penerimaan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;	Penerimaan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dari Sektor Pertambangan Mineral di Provinsi Kepulauan Riau.	Penerimaan daerah;	-	Rupiah	milyar
	Penetapan Pajak Air Tanah sesuai Ketentuan dan Peraturan yang berlaku	Pajak Air Tanah;	Pajak yang dipungut atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh orang pribadi atau badan.	Tahun;	-	Jumlah	dokumen
	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh	Kawasan Kumuh;	Selisih antara luas kawasan kumuh yang telah tertangani melalui intervensi program peningkatan kualitas permukiman (fisik maupun nonfisik), dibandingkan dengan luas kawasan kumuh yang menjadi kewnangan pemerintah provinsi ditetapkan dalam dokumen legal (SK Bupati/Wali Kota/Gubernur).	[32010026] Wilayah;	-	Luas	hektare
	Peningkatan Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang terdata	Industri Kecil dan Menengah (IKM);	Proses bertambahnya banyaknya unit usaha atau pelaku yang menjalankan kegiatan industri berskala kecil dan menengah dalam kurun waktu tertentu.	[32010026] Wilayah;	-	Total	unit
	Peningkatan Kapabilitas APIP	Kapabilitas APIP;	Perubahan tingkat kapabilitas APIP yang diukur melalui penilaian kapabilitas APIP, sesuai standar yang ditetapkan oleh BPKP, dan dilakukan secara berkala untuk meningkatkan efektivitas pengawasan intern.	-	-	-	-
	Peningkatan pelayanan prima	Pelayanan;	Pelayanan yang baik dan memuaskan pelanggan, sehingga pelanggan merasa puas dan sesuai dengan harapannya.	[32010026] Wilayah;	-	IKM	-

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Penyediaan Lintas Angkutan Penyeberangan	Angkutan Penyeberangan;	Proses dan sistem yang melibatkan penyediaan layanan transportasi yang menghubungkan dua area geografis yang dipisahkan oleh perairan atau rintangan lain, dengan menggunakan sarana angkutan seperti kapal atau feri	[32010026] Wilayah;	-	Jumlah	lintas
	Penyediaan Listrik bagi Rumah Penduduk Miskin	Penyediaan Listrik Bagi Rumah Penduduk Miskin;	Persentase Penyediaan Listrik Bagi Rumah Penduduk Miskin dengan jumlah penyediaan listrik bagi masyarakat.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan; Dokumen; Perencanaan; Perangkat Daerah;	Proses penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.	OPD;	-	Jumlah	dokumen
	Persentase Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Pelayanan Advokasi Hukum; Pemberdayaan Masyarakat; Kemitraan; Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;	Perbandingan banyaknya pelaksanaan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi terhadap banyaknya rencana advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase aFsilitasi Penerapan Inovasi Perangkat Daerah serta Kebijakan Inovasi di Daerah yang Terlaksana	Fasilitasi ; Penerapan; Inovasi; Perangkat daerah;	Bagian dari fasilitasi penerapan inovasi perangkat daerah dan kebijakan inovasi didaerah yang terlaksana.		-	Persentase	persen
	Persentase akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal)	Akses publik; Informasi keuangan daerah;	Bagian dari ketersediaan dan keterbukaan data serta dokumen keuangan pemerintah daerah yang dapat diakses oleh masyarakat melalui berbagai kanal informasi, baik online maupun offline, sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas publik	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Persentase Anak Terlantar yang Mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di dalam Panti	Anak Terlantar;	Bagian dari seluruh anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase Anak yang Memperoleh Akses Layanan Dasar	Layanan; Anak;	Bagian dari jumlah anak yang memperoleh akses layanan dasar (pendidikan, kesehatan, perlindungan, identitas hukum, partisipasi, dan kesejahteraan) dengan jumlah anak yang seharusnya memperoleh layanan tersebut.	[32010026] Wilayah;		Persentase	persen
	Persentase Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang Terlaksana	Analisis; Data; Informasi; Pemerintah Daerah; Perencanaan; Pembangunan Daerah;	bagian dari Jumlah Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah terlaksana dalam proses perencanaan pembangunan daerah,dibandingkan dengan total analisis yang direncanakan.		-	Persentase	persen
	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) terhadap belanja langsung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	Anggaran Responsif Gender (ARG); Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);	Ukuran yang menunjukkan perbandingan antara jumlah belanja langsung yang disusun dan dialokasikan secara responsif gender yaitu anggaran yang memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan total Belanja barang dan jasa dan modal APBD dalam satu tahun anggaran, dinyatakan dalam persen.	[32010026] Wilayah;		persentase	persen
	Persentase Anggaran sisa	[K00103] Anggaran; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);	Bagian dari total belanja yang dianggarkan dalam APBD pada tahun anggaran sebelumnya yang tidak terserap atau tidak terealisasi (anggaran sisa)	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Persentase Anggota Satlinmas yang telah Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Snggota Satlinmas;	Indikator yang menggambarkan jumlah anggota satlinmas yang ditingkatkan kapasitasnya	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase Angka Kecukupan Energi Tingkat Ketersediaan	Persentase; Angka Kecukupan Energi (AKE);	Bagian dari seluruh rata-rata angka kecukupan energi masyarakat Indonesia per orang per hari pada tingkat konsumsi, mengacu pada standar yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.	[10120066] Umur; [33220007] Jenis Kelamin	-	Persentase	persen
	Persentase Angka Kesembuhan Penyakit	Persentase; Angka Kesembuhan; Penyakit Hewan;	Bagian dari besarnya angka yang menunjukkan hewan yg berhasil pulih dari penyakit hewan.	[32010026] Wilayah; Tahun Penyajian; Jenis Penyakit	-	Persentase	persen
10310027	Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas	[K01154] Melek Huruf/ Aksara;	Bagian dari populasi penduduk umur 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dengan huruf latin dan atau huruf lainnya.	[32010026] Wilayah; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [10620071] Status Disabilitas;	-	Persentase	persen
	Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki Kinerja Baik	Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN); Aparatur Sipil Negara (ASN); Kinerja;	Bagian dari seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) pada periode hingga Desember tahun N yang memperoleh hasil penilaian kinerja dalam kategori minimal baik	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase Aset Dana Pensiun terhadap PDRB	Aset; Dana Pensiun; Produk; Domestik Regional Bruto (PDRB);	Bagian dari Aset dana pensiun terhadap PDRB.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Persentase ASN RSJKO Engku Haji Daud yang Mengikuti Diklat >20 Jam Pelajaran / Tahun pada Periode Pelaporan Tertentu	ASN; Pendidikan; Pelatihan;	Perbandingan banyaknya ASN RSJKO Engku Haji Daud yang mengikuti kegiatan diklat dengan total jam pelajaran lebih dari 20 jam selama satu tahun anggaran terhadap total pegawai yang ada sesuai dengan periode pelaporan tertentu.	Jenis pegawai; Jenis diklat; Waktu;	-	persentase	persen
	Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Pengembangan Kompetensi;	Pengembangan Kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan standar kompetensi Jabatan dan rencana pengembangan karier.	Lulus pengembangan kompetensi;	-	Persentase	persen
	Persentase Badan Usaha Angkutan Laut Berdomisili di Provinsi yang Memiliki Izin Usaha dan Beroperasi di Lintas Pelabuhan Antar Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi	Angkutan Laut; Izin Usaha;	Bagian dari banyaknya seluruh badan usaha angkutan laut yang telah memenuhi persyaratan izin usaha untuk beroperasi di pelabuhan-pelabuhan antar daerah dalam suatu provinsi	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase Barang Milik Daerah yang memiliki Dokumen Kepemilikan	Barang Milik Daerah;	Bagian dari Aset daerah (tanah, bangunan, peralatan, dsb.) yang dibeli atau diperoleh secara sah dan didokumentasikan dengan dokumen kepemilikan legal (sertifikat, AJB, BAST, kuitansi, dsb.), yang digunakan sebagai dasar penetapan status penggunaan, pencatatan, inventarisasi, dan pengamanan administrasi aset	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
10410095	Persentase Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Neonatal	[K00232] Bayi; [K01365] Pelayanan Neonatal;	Bagian dari populasi bayi berumur 0—28 hari yang mendapatkan pelayanan untuk bayi baru lahir sesuai standar kuantitas dan standar kualitas baik dengan mengunjungi atau dikunjungi oleh tenaga kesehatan.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Persentase Bayi Berusia 0-11 Bulan yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	Bayi; Imunisasi Dasar;	Bagian dari bayi berusia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase bayi kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif	Bayi; Air Susu Ibu (ASI);	Perbandingan banyaknya bayi kurang dari 6 bulan yang mendapatkan asi eksklusif terhadap keseluruhan bayi usia kurang dari 6 bulan.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase Benda, Bangunan, Struktur, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang telah ditetapkan terhadap Total Registrasi	Cagar Budaya; [K01861] Registrasi;	Bagian dari seluruh objek cagar budaya teregistrasi yang telah ditetapkan secara resmi oleh pemerintah sebagai Cagar Budaya dalam sistem pencatatan cagar budaya nasional atau daerah	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase Cadangan Pangan	Persentase; [K00305] Cadangan Pangan Pemerintah;	Bagian dari seluruh persediaan bahan pangan pokok yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat disalurkan untuk keperluan konsumsi maupun dalam rangka stabilisasi harga pangan, penanganan masalah pangan/krisis pangan, pemberian bantuan pangan, kerja sama internasional, dan/atau keperluan lain yang ditetapkan pemerintah.	Tahun Penyajian	-	Persentase	persen
10610031	Persentase Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	[K00677] Jaminan Sosial;	Bagian dari populasi penduduk yang mendapatkan perlindungan kesejahteraan.	[32010026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin;	-	Persentase	persen
	Persentase Calon Tenaga Kerja Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Baru	Tenaga Kerja; Pelatihan; Kewirausahaan;	Perbandingan calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan baru terhadap jumlah calon tenaga kerja	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Persentase Capaian Hasil Evaluasi RKPD	Evaluasi; RKPD;	Bagian dari besarnya capaian proses untuk menilai atau menentukan nilai suatu hal, program, atau objek berdasarkan kriteria atau standar yang telah ditetapkan serta RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat	OPD;	-	Persentase	persen
	Persentase Capaian Hasil Evaluasi RKPD	Evaluasi; RKPD;	Bagian dari capaian hasil evaluasi RKPD per triwulan pada periode tertentu.	OPD;	-	Persentase	persen
	Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan	Indikator Kinerja;	Bagian dari Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan	[25020054] Klasifikasi Instansi Pemerintah;	-	Persentase	persen
	Persentase Capaian Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Skor Hijau	Pencegahan Korupsi;	Bagian dari pelaksanaan rencana aksi pencegahan korupsi yang dinilai selesai sesuai indikator KPK melalui Monitoring Center for Prevention (MCP), dengan status capaian Skor Hijau.	[K00985] Korupsi;	-	Persentase	persen
	Persentase Daerah Rentan terhadap Kerawanan Pangan	Persentase; [K00881] Kerawanan Pangan;	Bagian dari seluruh kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian masyarak	[32010026] Wilayah; Tahun Penyajian	-	Persentase	persen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Persentase daerah yang aktif dalam pelaksanaan pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat di tingkat provinsi	Pengurangan Risiko Bencana;	Bagian dari daerah yang melakukan praktik mengurangi resiko bencana melalui upaya sistematis dalam menganalisa dan mengurangi faktor-faktor penyebab bencana, yaitu faktor kerawanan alam dan faktor kerentanan manusia.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase Daerah yang Dilakukan Pemantauan Situasi Ketahanan Pangan dan Gizi (SKPG)	Persentase; Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG);	Bagian dari seluruh banyaknya daerah yang telah mendapatkan pemantauan mengenai serangkaian proses untuk mengantisipasi kejadian kerawanan pangan dan gizi yang mencakup tahapan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian dan penyebaran informasi situasi pangan dan gizi.	[32010026] Wilayah; Tahun Penyajian	-	Persentase	persen
	Persentase Dana Pihak Ketiga terhadap PDRB	Dana Pihak Ketiga; Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);	Bagian dari dana pihak ketiga terhadap PDRB.	[32010026] Wilayah; Jenis Lapangan Usaha;	-	Persentase	persen
	Persentase Data (dokumen) Penetapan Pajak Air Tanah sesuai Ketentuan dan Peraturan yang berlaku	Pajak Air Tanah;	Pemanfaatan air tanah sesuai ketentuan dengan jumlah pajak air tanah.	Tahun;	-	Persentase	persen
	Persentase data yang dapat berbagi pakai	Data; Interoperabilitas;	Bagian dari seluruh data yang dapat berbagi pakai.	[32010026] Wilayah;		Persentase	persen
	Persentase Desa yang teraliri Listrik	Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik;	Perbandingan desa yang memiliki rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan baik dari listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun listrik non-PLN dengan jumlah Desa/Kelurahan keseluruhan.	[32010026] Wilayah;	-	Rasio	persen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Persentase Desa/Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Desa; Kelurahan; Buang Air Besar;	Bagian dari desa/kelurahan yang seluruh penduduknya tidak lagi melakukan praktik buang air besar sembarangan yang dibuktikan melalui proses verifikasi.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase desa/kelurahan yang terbentuk PATBM	Desa; Kelurahan; PATBM;	perbandingan antara jumlah desa/kelurahan yang telah membentuk Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) melalui SK Kepala Desa/Lurah atau keputusan resmi lainnya dengan total jumlah desa/kelurahan dalam suatu wilayah, dinyatakan dalam bentuk persen.	[32010026] Wilayah;		Persentase	persen
	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi dan SOP yang telah ditetapkan	Diseminasi; Layanan Informasi; Informasi Publik; Strategi Komunikasi; SOP;	Bagian dari kegiatan diseminasi dan layanan Informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi dan SOP yang telah ditetapkan	Jenis Kegiatan Diseminasi; Jenis Layanan Informasi Publik;		Persentase	persen
	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pendanaan yang Tersusun	Dokumen; Perencanaan; Pendanaan;	Bagian dari banyaknya dokumen perencanaan dan pendanaan yang tersusun pada periode tertentu.		-	Persentase	persen
	Persentase Dokumen RANPERDA APBD Provinsi yang disusun	Peraturan daerah Provinsi; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;	Bagian dari tahapan penyusunan dokumen peraturan kepala daerah terkait APBD Provinsi dan rancangan peraturan daerah yang disusun pada tahun berjalan.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
10410096	Persentase Fasilitas Kesehatan dengan Paket Obat Esensial yang Tersedia dan Terjangkau Secara Berkelanjutan	[K00443] Fasilitas Pelayanan Kesehatan; [K01238] Obat;	Bagian dari fasilitas kesehatan yang memiliki serangkaian obat-obatan terpilih yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan, mencakup upaya diagnosis, profilaksis, terapi, dan rehabilitasi secara berkelanjutan.	[32010026] Wilayah; [32020020] Klasifikasi Wilayah;	-	Persentase	persen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Gangguan Trantibum;	Indikator yang menggambarkan jumlah gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	[32010026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin;	-	Persentase	persen
	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di dalam Panti	Gelandangan dan Pengemis;	Bagian dari seluruh gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
10310028	Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional	[K00481] Guru;	Bagian dari populasi guru pada jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD) sederajat, SD sederajat, SMP sederajat, SMA/SMK sederajat, dan pendidikan luar biasa yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang dalam bidang pendidikan.	32010026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [10320055] Tingkat Pendidikan;	-	Persentase	persen
	Persentase Hasil Kelitbangan yang di Rekomendasikan	Hasil; direkomendasikan ;	Bagian dari Hasil Kelitbangan yang direkomendasikan pada tahun berjalan.	OPD;	-	Persentase	persen
	Persentase Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Pelayanan; Penghubung;	Indikator kuantitatif dalam bentuk persen yang digunakan untuk mengukur efektivitas upaya menyatukan arah, waktu, dan tindakan antar-unit atau instansi, dalam rangka menyelenggarakan pelayanan penghubung yang berfungsi sebagai jembatan komunikasi, fasilitasi, dan hubungan kerja antar lembaga, instansi, atau pihak-pihak terkait.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Persentase Hasil Kualitas Pelayanan Publik dan Kelembagaan bagi Aparatur dan Masyarakat	Pelayanan Publik; Aparatur; Masyarakat; Kelembagaan;	Indikator pengukuran dalam bentuk persen yang mencerminkan tingkat keberhasilan institusi pemerintah dalam menyelenggarakan layanan yang berkualitas, baik kepada masyarakat sebagai penerima layanan maupun kepada aparatur sebagai pelaksana layanan dalam sistem kelembagaan yang tertata.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase Hasil Pengawasan APIP dan BPK yang telah ditindaklanjuti	APIP dan BPK;	Bagian dari Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah selesai ditindaklanjuti.	[25020054] Klasifikasi Instansi Pemerintah;	-	Persentase	persen
	Persentase Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Promosi; Produk; Unggulan; Pelestarian; Seni; Budaya;	Ukuran kuantitatif yang menggambarkan seberapa besar keberhasilan dalam mempromosikan produk-produk khas yang diutamakan, sekaligus menunjukkan efektivitas upaya dalam menjaga dan melestarikan seni serta kebudayaan tradisional suatu daerah.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase Hibah FKPD Provinsi Kepulauan Riau	Hibah; FKDP;	Perbandingan Instansi Anggota FKPD yang Menerima hibah dengan jumlah Instansi Anggota FKPD.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase Hibah Ormas yang Terealisasi	Hibah; Organisasi kemasyarakatan (Ormas);	Perbandingan Hibah Ormas yang telah terealisasi terhadap seluruh hibah.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
10410097	Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronis yang Mendapatkan Tambahan Asupan Gizi	[K00803] Kehamilan; [K01359] Pelayanan Antenatal;	Bagian dari populasi ibu hamil dengan risiko kurang energi kronis, yang ditandai dengan ukuran lingkar lengan atas kurang dari 23,5 cm, yang mendapatkan tambahan asupan gizi, baik pabrikan maupun berbasis pangan lokal.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Persentase Implementasi pembangunan lokasi prioritas perbatasan dan kerjasama perbatasan dalam rencana aksi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan	Implementasi pembangunan di Lokpri; kerjasama Perbatasan. ;	Bagian dari Implementasi pembangunan lokasi prioritas perbatasan dan kerjasama perbatasan dalam rencana aksi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan	[32010026] Wilayah	-	Persentase	persen
	Persentase Instansi Pemerintah yang Mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	BPK;	Bagian dari Instansi Pemerintah yang Mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	[25020054] Klasifikasi Instansi Pemerintah;	-	Persentase	persen
	Persentase Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang diawasi	Pengelolaan Limbah; Limbah; Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);	Bagian dari pengelolaan limbah B3 berizin resmi yang diawasi secara aktif oleh instansi berwenang (pusat atau daerah) pada periode dan wilayah tertentu	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase Jalan Kondisi Mantap	[K00659] Jalan Provinsi; [K00740] Kategori Kondisi Baik dan Sedang; Jalan Nasional; [K00656] Jalan;	Bagian dari panjang ruas prasarana transportasi darat yang memenuhi kategori kondisi baik dan sedang	[32020026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	SIKN JIKN;	Bagian arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase Jumlah Daerah yang Dianalisis Ketersediaan Bahan Pangan	Persentase; Analisis; Ketersediaan Pangan;	Bagian dari banyaknya daerah yang dilakukan penelitian untuk mengetahui keadaan sebenarnya mengenai kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak memenuhi kebutuhan.	[32010026] Wilayah; Tahun Penyajian	-	Persentase	persen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Persentase Jumlah Data Wilayah Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Wilayah cekungan air tanah;	Perbandingan jumlah data wilayah cekungan air tanah dengan jumlah wilayah pengamatan potensi air tanah.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase Jumlah Karyawan yang mengikuti Diklat > 20 Jam/Tahun	Karyawan; Diklat;	Bagian dari seluruh orang yang bekerja pada suatu lembaga yang telah mengikuti proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan dengan durasi akumulatif lebih dari 20 jam pelajaran selama satu tahun.	Periode Tahun	-	Persentase	persen
	Persentase Jumlah Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik yang telah Melaksanakan Kewajiban Usaha Sesuai Ketentuan	Tenaga Listrik;	Perbandingan pelaku usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara yang melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan dengan seluruh jumlah Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara.	Tahun;	-	Persentase	persen
	Persentase Jumlah Pemegang Perizinan Operasi yang telah Melakasanakan Kewajiban Usaha Sesuai Ketentuan	Pemegang Perizinan Operasi Yang Telah Melakasanakan Kewajiban Usaha Sesuai Ketentuan;	Perbandingan pelaku usaha Pemegang Perizinan Operasi yang melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan dengan seluruh jumlah pelaku usaha Pemegang Perizinan Operasi.	Tahun;	-	Persentase	persen
	Persentase Jumlah Pemegang Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penananam Modal Dalam Negeri yang Telah Melaksanakan Kewajiban Usaha Sesuai Ketentuan	Tenaga Listrik;	Perbandingan pelaku usaha Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan dengan seluruh jumlah pelaku Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.	Tahun;	-	Persentase	persen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
32010043	Persentase Kabupaten/Kota dengan Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) Paling Banyak 49 Per 100.000 Penduduk	[K00369] Demam Berdarah Dengue (DBD);	Bagian dari populasi kabupaten/kota yang memiliki angka kesakitan demam berdarah dengue (DBD) kurang dari atau sama dengan 49 kasus per 100.000 penduduk dalam kurun waktu satu tahun.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase Kabupaten/Kota yang 50% Puskesmasnya Melaksanakan Tatalaksana Pneumonia Sesuai Standar	Kabupaten; Kota; Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas); Pneumonia; Standar;	Perbandingan banyaknya kabupaten/kota yang 50% puskesmasnya melaksanakan tatalaksana pneumonia sesuai standar terhadap seluruh kabupaten/kota.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase Kabupaten/kota yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pembinaan dan pengawasan Kab/Kota dalam pencegahan; Penanggulangan; Penyelamatan kebakaran dan non kebakaran;	Indikator yang menggambarkan jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran pada kab/kota	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Surveilans Kesga Gizi	Kabupaten; Kota; Surveilans Gizi; Kesehatan; Keluarga;	Perbandingan banyaknya kabupaten/kota yang melaksanakan surveilans gizi terhadap seluruh kabupaten/kota.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase Kabupaten/Kota yang Melakukan Pelayanan Terpadu (Pandu) PTM di Atas 80% Puskesmas	Pelayanan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Pandu PTM); Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);	Perbandingan kabupaten/kota yang melakukan pelayanan terpadu (pandu) PTM di atas 80% puskesmas terhadap seluruh kabupaten/kota	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Literasi Membaca	Kompetensi; Asesmen; Literasi; Literasi Membaca; Kabupaten; Kota;	Bagian dari seluruh kabupaten/kota di suatu provinsi yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional dalam kemampuan literasi membaca.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Numerasi	Kompetensi; Asesmen; Numerasi; Kabupaten; Kota;	Bagian dari seluruh kabupaten/kota di suatu provinsi yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional dalam kemampuan numerasi.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: Literasi Membaca	Standar Kompetensi;	Bagian yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: Literasi Membaca.	Wilayah	-	nilai	persen
	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: Numerasi	Numerasi;	Bagian yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: Numerasi.	Wilayah	-	nilai	persen
	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapat Peringkat Kota Layak Anak (KLA) Madya	Kabupaten/Kota Layak Anak, Madya;	Bagian dari kabupaten/kota yang mendapatkan Peringkat KLA “Madya” dari total kabupaten/kota dalam wilayah yang diukur (nasional atau regional) pada periode tertentu	[32010026] Wilayah;		Persentase	persen
	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pendampingan Satlinmas	Pendampingan Satlinmas;	Indikator yang menggambarkan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pendampingan Satlinmas dari Pemerintah Provinsi	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase Kabupaten/Kota yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	Kabupaten; Kota; GERMAS;	Perbandingan kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) terhadap seluruh kabupaten/kota.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Persentase Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kabupaten; Kota; Promosi Kesehatan; Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;	Perbandingan banyaknya kabupaten/kota yang melaksanakan penyebaran komunikasi informasi dan edukasi (KIE) perilaku hidup bersih dan sehat terhadap banyaknya kabupaten/kota di Provinsi Kepri.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase Kabupaten/Kota yang Sudah Melaksanakan DDHB pada Bumil dan Pengobatan Hepatitis C Sesuai dengan Terapi	Kabupaten; Kota; Hepatitis; Kehamilan; Obat;	Perbandingan banyaknya kabupaten/kota yang sudah melaksanakan DDHB pada bumil dan pengobatan hepatitis C sesuai dengan terapi terhadap seluruh kabupaten/kota.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase Kalibrasi Alat Kesehatan	Kalibrasi; Alat Kesehatan;	Perbandingan banyaknya alat kesehatan yang dikalibrasi pada periode tertentu	Status Kalibrasi; Waktu;	-	Persentase	persen
	Persentase Kasus Ilegal Fishing/Konflik Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Diselesaikan	Ilegal Fishing; Kelautan; Perikanan;	Perbandingan penyelesaian kasus pelanggaran hukum di wilayah laut Indonesia yang melakukan kegiatan illegal fishing/konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan terhadap kasus yang ada	Jenis Kasus (IUU Fisihing / Konflik); [32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase Kasus Ketenagakerjaan yang Tertangani	Kasus; Ketenagakerjaan;	Perbandingan kasus ketenagakerjaan yang tertangani terhadap seluruh kasus ketenagakerjaan	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase Kawasan Konservasi yang Dikelola Minimum	Kawasan Konservasi;	Perbandingan dari Pengelolaan minimum Kawasan Perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan berkelanjutan dibandingkan dengan seluruh kawasan konservasi.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase kebijakan administrasi pembangunan yang disusun secara aktual	Koordinasi dan Kebijakan Administrasi Pembangunan;	Bagian dari kebijakan administrasi pembangunan yang disusun secara aktual	[25020054] Klasifikasi Instansi Pemerintah;	-	Persentase	persen
	Persentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan didaerah	Kebijakan Inovasi;	Bagian kebijakan Inovasi yang diterapkan di daerah.	OPD;	-	Persentase	persen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10110076	Persentase Kebutuhan Keluarga Berencana (KB) yang Tidak Terpenuhi/*Unmet Need* Keluarga Berencana	[K00830] Keluarga Berencana;	Angka yang menunjukkan bagian dari seluruh wanita usia reproduksi (15—49 tahun) yang berkebutuhan mengikuti program keluarga berencana (KB) namun belum terpenuhi.	[32010026] Wilayah; [10120066] Umur/Usia;	-	Persentase	persen
10110076	Persentase Kebutuhan Keluarga Berencana (KB) yang Tidak Terpenuhi/ Unmet Need Keluarga Berencana	[K00830] Keluarga Berencana;	Angka yang menunjukkan bagian dari seluruh wanita usia reproduksi (15-49 tahun) yang berkebutuhan mengikuti program keluarga berencana (KB) namun belum terpenuhi.	[32010026] Wilayah; [10120066] Umur/Usia;		Persentase	persen
	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal	Keamanan Jaringan;	Bagian dari seluruh kegiatan strategis yang diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal.	Jenis Kegiatan;		Persentase	persen
	Persentase kegiatan, kelembagaan dan pelayanan publik pada pemerintaha provinsi yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain instansi penyelenggaraan negara	Kegiatan; Lembaga; Pelayanan Publik; Pemerintahan Daerah; Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;	Perbandingan dari urusan pemerintahan daerah di tingkat provinsi, baik kegiatan pemerintahan, kelembagaan, maupun pelayanan publik yang sudah dilaksanakan secara daring (online) melalui platform resmi dengan nama domain instansi penyelenggara negara, dibandingkan dengan seluruh kegiatan, kelembagaan, dan layanan yang tersedia.	Perangkat Daerah;		Persentase	persen
	Persentase kelengkapan metadata indikator statistik sektoral	Metadata Indikator; Statistik Sektoral;	Bagian dari seluruh kelengkapan metadata indikator statistik sektoral	Perangkat Daerah;		Persentase	persen
	Persentase Keluarga Miskin yang Menerima Bantuan Ekonomi Produktif	Bantuan Ekonomi Produktif;	Bagian dari seluruh keluarga miskin yang menerima bantuan peningkatan ekonomi berupa bantuan modal usaha.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga;	Bagian dari banyaknya bantuan yang tidak dapat dikategorikan sebagai bantuan ekonomi produktif.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Persentase Kenaikan Minat Penanaman Modal	Kenaikan; Minat; Penanaman Modal;	Perbandingan ukuran yang menunjukkan seberapa besar perubahan dalam tingkat minat investor terhadap penanaman modal dengan periode sebelumnya.	[32010026] Wilayah; Sektor;		Persentase	persen
	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku	Pelaku Usaha; Kelautan; Perikanan;	Perbandingan yang menyatakan tingkat ketaatan pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.	Subsektor Usaha; [32010026] Wilayah; Periode Waktu;	-	Persentase	persen
	Persentase Kepesertaan Perusahaan BPJS Ketenagakerjaan	Perusahaan; BPJS Ketenagakerjaan;	Perbandingan perusahaan yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan terhadap seluruh perusahaan	[32010026] Wilayah; [22020004] Jenis Lapangan Usaha;	-	Persentase	persen
	Persentase Keselarasan Muatan Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	Renja; Perangkat daerah; RKPD;	Bagian dari keselarasan antara muatan rencana kerja (Renja) perangkat daerah dengan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang telah disusun dan dilaksanakan.	Perangkat Daerah;	-	Persentase	persen
	Persentase Keselarasan Muatan Renja Perangkat Daerah dengan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Renja; RKPD; Bidang Pemerintahan; Pembangunan Manusia;	Bagian dari Keselarasan antara muatan Rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah dengan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang telah disusun dan dilaksanakan.	Perangkat Daerah;	-	Persentase	persen
	Persentase Keselarasan Muatan Renja Perangkat Daerah dengan RKPD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Keselarasan; Muatan; Renja; RKPD; SDA;	Persentase Keselarasan antara muatan renja persangkat daerah dengan RKPD bidang perekonomian dan SDA yang telah disusun dan dilaksanakan.	Perangkat Daerah;	-	Persentase	persen
	Persentase Keselarasan Muatan RKA Perangkat Daerah dengan RKPD	RKA; Perangkat daerah; RKPD;	Bagian dari Keselarasan antara muatan Rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah dengan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang telah disusun dan dilaksanakan.	Perangkat Daerah;	-	Persentase	persen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Persentase Keselarasan Muatan RKA Perangkat Daerah dengan RKPD Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia	RKA; RKPD; Bidang Pemerintahan; Pembangunan Manusia;	Bagian dari Keselarasan antara muatan Rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah dengan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang telah disusun dan dilaksanakan.	Perangkat Daerah;	-	Persentase	persen
	Persentase Keselarasan Muatan RKA Perangkat Daerah dengan RKPD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Keselarasan; Muatan; RKA; RKPD; SDA;	Persentase Keselasaran antara muatan RKA perangkat daerah dengan RKPD bidang perekonomian dan SDA yang telah disusun dan dilaksanakan.	Perangkat Daerah;	-	Persentase	persen
	Persentase Keselarasan Muatan RKPD Provinsi dengan RKPD Kab/Kota	Keselarasan ; Muatan; RKPD;	Bagian dari keselarasan Muatan RKPD dengan Jumlah prioritas pembangunan RKPD Provinsi dengan RKPD Kab/Kota yang relevan.	Kab/Kota;	-	Persentase	persen
	Persentase Keselarasan Muatan RKPD Provinsi dengan RKPD Kab/Kota Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Keselarasan; Muatan; RKPD; Bidang Perekonomian; SDA;	Persentase keselarasan antara muatan RKPD perangkat daerah dengan RKPD provinsi dan RKPD Kabupaten/Kota Bidang Perekonomian dan SDA.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase Keselarasan Muatan RKPD Provinsi dengan RKPD Kab/Kota Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Keselarasan; Muatan; RKPD; Infrastruktur; Kewilayahan;	Perbandingan Keselarasan antara muatan RKPD provinsi dan Kabupaten/kota Bidang infrastruktur dan kewilayahan yang telah ditetapkan.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase ketepatan waktu tahapan penyusunan APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);	Bagian dari tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tepat waktu (terpenuhi sesuai jadwal dan tenggat waktu yang ditentukan).	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Persentase ketercapaian Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan berkualitas	Ketercapaian Penelitian; Pengembangan; Bidang Ekonomi; Pembangunan; Berkualitas;	Bagian dari ketercapaian penelitian dan pengembangan bidang Ekonomi dan pembangunan.	OPD;	-	Persentase	persen
	Persentase Ketercapaian Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan Berkualitas	Ketercapaian Penelitian; Pengembangan; Penyelenggaraan Pemerintah; Pengkajian; Peraturan Berkualitas;	Bagian dari ketercapaian penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintah dan pengkajian peraturan berkualitas.	OPD;	-	Persentase	persen
	Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	Ketermanfaatan Perpustakaan;	Tingkat kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat karena adanya perpustakaan.	Wilayah		persentase	persen
	Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan terhadap Kebutuhan	Persentase; [K00305] Cadangan Pangan Pemerintah; Kebutuhan;	Bagian dari tersedianya bahan pangan pokok yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat disalurkan untuk keperluan konsumsi maupun dalam rangka stabilisasi harga pangan, penanganan masalah pangan/krisis pangan, pemberian bantuan pangan, kerja sama internasional, dan/atau keperluan lain yang ditetapkan pemerintah terhadap kebutuhan.	[32010026] Wilayah; Tahun Penyajian	-	Persentase	persen
	Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah	Data; Informasi; Lingkungan Hidup;	Bagian dari data/informasi lingkungan yang dipublikasikan dan tersedia melalui sistem informasi daerah sesuai kewajiban penyebaran data lingkungan hidup.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Persentase ketersediaan data Keanekaragaman Hayati	Keanekaragaman Hayati;	Bagian dari tingkat penyediaan data keanekaragaman hayati pada suatu wilayah atau periode tertentu, dibandingkan dengan jumlah data yang seharusnya tersedia berdasarkan standar pengumpulan data nasional, baik berupa dokumentasi spesies, ekosistem, status konservasi, maupun elemen pendukung lainnya.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase Ketersedian Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) terhadap Daerah Rentan Rawan Pangan	Persentase; Lumbung Pangan Masyarakat (LPM); [K00881] Kerawanan Pangan;	Bagian dari seluruh tersedianya sarana fisik untuk penyimpanan pangan guna mewujudkan cadangan pangan masyarakat dan usaha ekonomi produktif masyarakat terhadap kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian masyarakat.	Tahun Penyajian	-	Persentase	persen
33210011	Persentase Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif	[K01647] Perempuan; [K01077] Lembaga Legislatif;	Bagian dari populasi anggota legislatif yang berjenis kelamin perempuan.	[32010026] Wilayah; [11020005] Tingkatan Parlemen;		Persentase	persen
	Persentase Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Terkelola dengan Baik	Koleksi Budaya;	Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dengan baik.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase kompilasi statistik sektoral yang mendapatkan rekomendasi dari BPS	Kompilasi; Statistik Sektoral; Rekomendasi;	Bagian dari seluruh kompilasi statistik sektoral yang mendapatkan rekomendasi dari Badan Pusat Statistik (BPS).	Perangkat Daerah;		Persentase	persen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan pemerintah provinsi	Komunitas; Kemitraan; Pemerintah Daerah; Informasi;	Bagian dari seluruh komunitas masyarakat atau mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dari pemerintah provinsi.	Mitra;		Persentase	persen
	Persentase Konflik Sosial yang Tertangani	Konflik Sosial;	Bagian dari banyaknya konflik sosial yang tertangani.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase Konflik yang Tertangani	Konflik;	Perbandingan konflik yang tertangani dengan seluruh konflik yang masuk.	Jenis Konflik;	-	Persentase	persen
	Persentase Konsistensi Program/Kegiatan RKPD dengan APBD	RKPD; APBD;	Bagian dari besarnya konsistensi penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat serta wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah.		-	Persentase	persen
	Persentase Konsistensi Program/Kegiatan RKPD dengan APBD Perangkat Daerah Mitra Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	RKPD; APBD; Perencanaan Pemerintahan; Pembangunan manusia;	Bagian dari konsistensi Program/Kegiatan RKPD dengan APBD Perangkat Daerah Mitra Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada periode tertentu.	OPD;	-	Persentase	persen
	Persentase konsistensi Program/Kegiatan RKPD dengan APBD Perangkat Daerah Mitra Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	RKPD; APBD; Perekonomian; Sumber Daya Alam;	Bagian dari konsistensi Program/Kegiatan RKPD dengan APBD Perangkat Daerah Mitra Bidang Perencanaan perekonomian dan Sumber Daya Alam pada periode tertentu.	OPD;	-	Persentase	persen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Persentase Konsistensi Program/Kegiatan RKPD dengan APBD Perangkat Daerah Mitra Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	RKPD; APBD; Infrastruktur; Kewilayahan;	Bagian dari konsistensi Program/Kegiatan RKPD pada Perangkat Daerah Mitra Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan yang konsisten dengan APBD pada periode tertentu.	OPD;	-	Persentase	persen
	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi	Konten; Informasi; Program; Arah Kebijakan; Pemerintah Daerah; Strategi Komunikasi;	Bagian dari seluruh konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintahan provinsi sesuai dengan strategi komunikasi.	[32010026] Wilayah;		Persentase	persen
	Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energi Mixed)	Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan;	Perbandingan konsumsi energi baru terbarukan dengan konsumsi energi final.	Tahun;	-	Persentase	persen
	Persentase Koperasi yang Berkualitas	Kinerja koperasi;	Bagian dari seluruh koperasi aktif yang mematuhi ketentuan RAT dan memiliki usaha yang baik.	[32010026] Wilayah	-	Persentase	persen
	Persentase Koperasi yang Mendapat Dukungan Pemberdayaan	Pemberdayaan Koperasi;	Bagian dari seluruh koperasi aktif yang dilakukan pemberdayaan untuk menumbuhkan iklim usaha melalui kebijakan di bidang kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan teknologi/inovasi.	[32010026] Wilayah	-	Persentase	persen
	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di dalam Panti	Lanjut Usia Terlantar;	Bagian dari seluruh lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Disampaikan Tepat Waktu	Keuangan Daerah;	Bagian dari laporan keuangan perangkat daerah, yang disusun oleh pemerintah daerah dan disampaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu tidak melewati batas waktu yang diatur agar transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat terjaga dan dapat dipertanggungjawabkan secara efektif.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase laporan keuangan tahunan daerah yang tepat waktu	keuangan daerah;	Bagian dari laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah dan disampaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu tidak melewati batas waktu yang diatur agar transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat terjaga dan dapat dipertanggungjawabkan secara efektif	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase Layanan Angkutan Darat	Layanan; Angkutan Darat;	Bagian dari seluruh pelayanan transportasi yang menggunakan sarana transportasi darat untuk memindahkan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain melalui jalan darat. Layanan ini dapat diselenggarakan oleh pemerintah	[32010026] Wilayah; Trayek Angkutan Darat;	-	Persentase	persen
	Persentase Layanan Prasarana Angkutan Perairan	Layanan; Angkutan Perairan;	Bagian dari seluruh tingkat ketersediaan prasarana fisik angkutan perairan (seperti dermaga, pelabuhan, jembatan tambat, ponton) yang telah dibangun dan berfungsi, dibandingkan dengan kebutuhan total prasarana yang direncanakan atau diperlukan.	[32010026] Wilayah; Jumlah Pelabuhan Terbangun;	-	Persentase	persen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Pelayanan Publik; Online; Integrasi;	Bagian dari seluruh layanan atau rangkaian kegiatan yang diselelnggarakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Pelayanan Publik;	Perbandingan dari layanan publik yang sudah dapat diakses dan digunakan masyarakat secara daring (online) dan telah terhubung dalam satu sistem terintegrasi (tidak berdiri sendiri), dibandingkan dengan seluruh jenis layanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah	Perangkat Daerah;		Persentase	persen
	Persentase Layanan Sarana Angkutan Perairan	Layanan; Angkutan Perairan;	bagian dari seluruh tingkat ketersediaan atau keterjangkauan layanan angkutan transportasi air (laut, sungai, dan danau) terhadap jumlah kebutuhan atau wilayah yang seharusnya dilayani.	[32010026] Wilayah; Lintasan Angkutan Perairan;	-	Persentase	persen
	Persentase lembaga/orsos penyelenggara pemberdayaan sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi	Lembaga Kesejahteraan Sosial;	Bagian dari organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
31010098	Persentase Limbah Cair yang Diolah Secara Aman	Limbah; Pengelolaan Limbah;	Bagian dari seluruh bahan/barang sisa atau bekas dari suatu kegiatan dan/atau proses produksi berwujud cair yang dikelola secara aman.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Hortikultura)	Persentase; Luas Areal; Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); Tanaman Holtikultura;	Bagian dari seluruh luas permukaan atau ukuran dari tanaman hortikultura yang telah diberikan tindakan pencegahan dan penganggulangan dari serangan organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian tumbuhan.	[32010026] Wilayah; Tahun Penyajian	-	Persentase	persen
	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Pangan)	Persentase; Luas Areal; Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); Tanaman Pangan;	Bagian dari seluruh luas permukaan atau ukuran tanaman pangan yang telah diberikan tindakan pencegahan dan penganggulangan dari serangan organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian tumbuhan.	[32010026] Wilayah; Tahun Penyajian	-	Persentase	persen
	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Perkebunan)	Persentase; Luas Areal; Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); Tanaman Perkebunan;	Bagian dari seluruh luas permukaan atau ukuran tanaman perkebunan yang telah diberikan tindakan pencegahan dan penganggulangan dari serangan organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian tumbuhan.	[32010026] Wilayah; Tahun Penyajian;	-	Persentase	persen
	Persentase Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi	Lahan Kritis; Rehabilitasi;	Bagian dari luas lahan kritis yang telah direhabilitasi melalui kegiatan seperti reboisasi, penghijauan, dan penerapan teknik konservasi tanah dibandingkan dengan total luas lahan kritis dalam wilayah dan periode tertentu.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Persentase Lulusan Pelatihan yang Diterima Kerja	Lulus; Pelatihan; Bekerja;	Perbandingan banyaknya lulusan pelatihan yang diterima kerja terhadap seluruh lulusan pelatihan	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase Maksimum Koefisien Harga Pangan Pokok (Beras) Ditingkat Konsumen	Persentase; Maksimum; Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok antar Waktu; Konsumen;	Bagian dari besarnya hasil yang menunjukkan nilai tertinggi dari suatu indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja stabilisasi harga barang kebutuhan pokok ditingkat konsumen.	[32010026] Wilayah; Tahun Penyajian; Jenis Beras	-	Persentase	persen
	Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi	Masyarakat; Informasi Publik;	Bagian dari seluruh masyarakat yang menerima informasi publik sehingga mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah terhadap semua masyarakat yang menerima informasi publik.	[32010026] Wilayah	-	Persentase	persen
	Persentase Nilai Belanja yang dilakukan melalui Pengadaan	Nilai Belanja; Pengadaan Barang/Jasa;	Bagian dari nilai belanja operasi (satuan rupiah) diluar belanja pegawai yang meliputi belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; dan belanja bantuan sosial dan nilai belanja modal yang pelaksanaanya dilakukan melalui metode pemilihan penyedia barang/jasa.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase Nilai Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Daerah Hasil Pemeriksaan Inspektorat	Kebijakan Pengawasan;	Bagian dari Nilai Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Daerah Hasil Pemeriksaan Inspektorat	[25020054] Klasifikasi Instansi Pemerintah;	-	Persentase	persen
	Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Layanan	Orang Dengan Gangguan Jiwa; Pelayanan Kesehatan;	Perbandingan banyaknya penderita ODGJ berat yang mendapatkan layanan terhadap banyaknya proyeksi penderita ODGJ berat di wilayahnya.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase ODHA baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	Orang dengan HIV dan AIDS; Pengobatan Antiretroviral;	Perbandingan banyaknya ODHA baru yang memulai ARV terhadap banyaknya ODHA baru ditemukan.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Persentase OPD yang Memiliki Data Terpilah Gender dan Anak	Perangkat Daerah; Gender; [K00091] Anak;	bagian dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah menyusun dan menyediakan data terpilah yaitu data yang dikelompokkan berdasarkan karakteristik tertentu, khususnya jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) serta kelompok umur anak terhadap total jumlah OPD	[32010026] Wilayah;		Persentase	persen
	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Perangkat Daerah; Data; Statistik; Evaluasi; Pembangunan;	Perbandingan organisasi perangkat daerah yang menggunakan data statistik untuk keperluan evaluasi pembangunan daerah dengan seluruh perangkat daerah	[32010026] Wilayah	-	Persentase	persen
	Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang sesuai dengan Aturan	[K01263] Organisasi; Ormas;	Perbandingan banyaknya organisasi masyarakat yang sesuai aturan terhadap seluruh organisasi masyarakat yang terdaftar.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Perangkat Daerah; Internet;	Perbandingan perangkat daerah yang terhubung dengan jaringan internet yang disediakan Dinas kominfo berbanding dengan seluruh perangkat daerah yang ada	[32010026] Wilayah	-	Persentase	persen
	Persentase Paket Pengadaan Barang/Jasa yang Proses Pemilihannya Diselesaikan Sesuai Perencanaan	Pengadaan Barang/Jasa;	Bagian dari Paket tender Pengadaan barang/jasa yang proses pemilihannya diselesaikan sesuai perencanaan	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) yang memenuhi ketentuan Perizinan Berusaha	PBF Cabang; Cabang Penyalur Alat Kesehatan; Perizinan Berusaha;	Perbandingan banyaknya Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) yang telah memiliki sertifikat CDOB terhadap seluruh Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK).	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Persentase Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang Dievaluasi Kinerjanya	Evaluasi Kinerja; Pegawai Negeri Sipil (PNS);	Bagian dari jumlah keseluruhan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah dilakukan evaluasi terhadap kinerjanya	[32010026] Wilayah; Predikat kinerja;	-	Persentase	persen
	Persentase Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengikuti Penilaian Kompetensi	Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN); Penilaian Kompetensi; Pegawai Negeri Sipil (PNS);	Bagian dari seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Desember tahun N (diluar tenaga pendidik dan Kependididkan) yang telah mengikuti proses penilaian kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	Pendidikan Menengah; Pendidikan Tinggi; Keahlian;	Bagian dari pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah atau tinggi.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase Pelaksanaan Sidang dan Risalah DPRD	Sidang; Risalah;	Bagian dari banyaknya keterlaksanaan sidang-sidang DPRD beserta penyusunan risalahnya dibandingkan dengan jumlah sidang dan risalah yang direncanakan dalam satu periode tertentu.	[32010026] Wilayah	-	Persentase	persen
	Persentase Pelaporan LHKAN/ SPT Tahunan Tepat Waktu	LHKAN; SPT Tahunan;	Bagian dari Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)/SPT Tahunan Tepat Waktu	[K01411] Pemerintah Daerah;	-	Persentase	persen
	Persentase Pelaporan LHKPN Tepat Waktu	LHKPN;	Bagian dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tepat Waktu	[K01411] Pemerintah Daerah;	-	Persentase	persen
	Persentase Pelayanan Persampahan	Pelayanan Sampah; Wilayah Layanan;	Persentase area atau populasi yang terlayani oleh pengelolaan sampah di suatu wilayah.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Persentase Pelestarian Cagar Budaya	Pelestarian; Cagar Budaya;	Bagian dari seluruh Cagar budaya yang telah ditetapkan, yang mencakup kondisi fisik, fungsi, keberlanjutan nilai budaya, serta pemanfaatannya sesuai prinsip perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Pemanfaatan; Hasil;	Bagian dari hasil Kelitbangan yang ditindaklanjuti di daerah.		-	Persentase	persen
	Persentase Pemanfaatan Tanah yang Sesuai dengan Peruntukkan Tanahnya diatas Izin Lokasi dibandingkan dengan Luas Izin Lokasi yang Diterbitkan	Peruntukan Tanah Izin Lokasi;	Pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi.	[32020026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase pembinaan penatausahaan Keuangan Daerah	Penatausahaan; Keuangan daerah;	Bagian dari penatausahaan keuangan daerah berupa, Terlaksananya kegiatan teknis yang difasilitasi oleh instansi keuangan daerah (misalnya BPKAD/BKAD) atau Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan, bertujuan meningkatkan kualitas pelaksanaan administrasi keuangan—mulai dari penerimaan, pengeluaran, penyusunan, hingga pelaporan keuangan—secara transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan	Ketenagalistrikan;	Perbandingan pelaku usaha ketenagalistrikan yang melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan dengan seluruh jumlah pelaku usaha ketenagalistrikan.	Tahun;	-	Persentase	persen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Persentase Pemenuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai Kebutuhan	Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN); Pemenuhan Aparatur Sipil Negara (ASN); Aparatur Sipil Negara (ASN);	Bagian dari kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dipenuhi dari jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Desember tahun N-1 dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang direkrut di tahun N	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Fungsional Pengawasan	APIP;	Bagian Dari Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Fungsional Pengawasan	[25020054] Klasifikasi Instansi Pemerintah;	-	Persentase	persen
	Persentase Pemenuhan ketersediaan Dokumen Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan Daerah;	Bagian dari dokumen penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah berupa dokumen pendukung yang dibutuhkan dalam melaksanakan urusan kewenangan keuangan di daerah seperti kebijakan daerah, sistem prosedural, klasifikasi rekening, petunjuk teknis, dan lainnya telah tersedia secara lengkap dan mutakhir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase Pemenuhan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemenuhan; Penyusunan; Perencanaan; Penganggaran; Evaluasi Kinerja Perangkat daerah;	Bagian dari Perangkat daerah yang sudah melakukan pemenuhan standar Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.	OPD;	-	Persentase	persen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Persentase Pemerintah Daerah yang Mengadopsi dan Menerapkan Strategi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah yang Selaras dengan Rencana/Strategi Nasional Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang Selaras dengan The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Pemerintah Daerah;	Perbandingan antara pemerintah daerah yang telah mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana / strategi nasional penyelenggaraan penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for disaster risk reduction 2015-2030.	[32010026] Wilayah; Tahun;	-	Persentase	persen
	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan	Pengaduan Masyarakat;	Bagian dari Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditangani/ ditindaklanjuti.	[25020054] Klasifikasi Instansi Pemerintah;	-	Persentase	persen
	Persentase Penanganan Sampah	Sampah; Pengelolaan Sampah;	Bagian dari keseluruhan timbulan sampah yang dikelola sampai proses akhir.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	Persen
	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan	Pencari Kerja; Penempatan Pekerja;	Perbandingan banyaknya pencari kerja terdaftar yang ditempatkan terhadap jumlah seluruh pencari kerja terdaftar	[33220007] Jenis Kelamin;	-	Persentase	persen
	Persentase Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus;	Bagian dari jumlah anak yang termasuk dalam kategori anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) dan telah mendapatkan layanan pendampingan (bantuan hukum, konseling, rehabilitasi, reintegrasi sosial, dll.) terhadap total AMPK yang seharusnya mendapatkan layanan.	[32010026] Wilayah;		Persentase	persen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Persentase Pendidikan Penduduk Usia 7–18 Tahun dengan Kategori Kelompok Pengeluaran 40% Terbawah	Pendidikan; Penduduk; Usia Sekolah (7–18 Tahun); Kelompok Pengeluaran 40% Terbawah;	Bagian dari penduduk berusia 7–18 tahun yang berasal dari rumah tangga dengan kelompok pengeluaran 40% terbawah menurut distribusi pengeluaran nasional yang mengikuti atau telah menyelesaikan pendidikan formal sesuai jenjang usia sekolahnya	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke atas yang Mengunjungi Situs Peninggalan Bersejarah/Kebudayaan	[K02029] Situs Peninggalan Sejarah;	Bagian dari seluruh penduduk berumur 10 tahun ke atas yang dalam periode waktu tertentu pernah mengunjungi tempat/peninggalan bersejarah/warisan budaya kebendaaan di Indonesia (seperti: candi, museum, benteng, gua bersejarah, rumah adat, dsb.).	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
10910038	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Berolahraga	[K01476] Penduduk; [K01253] Olahraga;	Bagian dari seluruh penduduk berumur 5 tahun ke atas yang melakukan olahraga dalam kurun waktu tertentu.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase Penduduk sebagai Pelaku/Pendukung Pertunjukkan Seni yang Menjadikan Keterlibatan sebagai Sumber Penghasilan	[K01476] Penduduk; Seniman; Sumber Penghasilan;	Bagian dari Masyarakat 15 Tahun Keatas yang menjadikan profesi seniman sebagai sumber penghasilan	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
10910042	Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Melakukan Kegiatan Olahraga Tradisional	[K01476] Penduduk; [K01253] Olahraga;	Bagian dari seluruh penduduk berumur 5 tahun ke atas yang dalam periode waktu tertentu pernah melakukan kegiatan olahraga tradisional.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase Penduduk yang pernah terlibat sebagai Pelaku/Pendukung Pertunjukkan Seni	[K01476] Penduduk; Seniman; [K01711] Pertunjukan/Pameran Seni;	Bagian dari populasi penduduk yang pernah berpartisipasi secara langsung (sebagai pelaku) maupun tidak langsung (sebagai pendukung teknis) dalam kegiatan penyajian karya seni di ruang publik	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Persentase Penegakan Pelanggaran Perda dan / atau Perkada	Penegakan Pelanggaran perda/atau perkada;	Indikator yang menggambarkan penegakan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase Penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai Kualifikasi	Penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN); Kualifikasi; Aparatur Sipil Negara (ASN); ;	Bagian dari seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Desember tahun N yang ditempatkan sesuai klasifikasi (latar belakang pendidikan, kompetensi, dan keahliannya) hingga Desember tahun N	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Izin; Rumah Sakit; Fasilitas Pelayanan Kesehatan;	Perbandingan banyaknya penerbitan izin rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah provinsi terhadap banyaknya RS kelas B pada faskes provinsi.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau	Izin Trayek; Angkutan Sungai dan Danau;	Perbandingan antara jumlah izin trayek angkutan sungai dan danau yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah atau instansi berwenang, terhadap jumlah permohonan izin trayek atau kebutuhan trayek yang direncanakan pada periode tertentu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase Penerbitan Izin Usaha Jasa Bongkar Muat, Peralatan, Pengurusan Transportasi, dan Depo Peti Kemas	Izin Usaha; Angkutan laut;	Perbandingan antara jumlah izin usaha yang telah diterbitkan untuk badan usaha penyedia jasa kepelabuhanan (bongkar muat barang, jasa peralatan angkutan laut, jasa pengurusan transportasi, tally mandiri, dan depo peti kemas) dengan jumlah permohonan izin atau kebutuhan izin sesuai perencanaan pada periode tertentu, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Persentase Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat	Izin Usaha; Angkutan laut;	Perbandingan antara jumlah izin usaha angkutan laut untuk kapal pelayaran rakyat (Pelra) yang telah diterbitkan secara resmi oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah, dengan jumlah badan usaha atau pemilik kapal pelayaran rakyat yang seharusnya memiliki izin usaha di wilayah tersebut	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase Pengadaan Barang/Jasa yang Dilaksanakan Secara Elektronik	Pengadaan Barang/Jasa;	Bagian dari pengadaan barang/jasa yg dilaksanakan secara elektronik (seperti melalui aplikasi atau platform digital resmi)	[32010026] Wilayah;	-	Persentase;	persen;
	Persentase Pengadaan barang/jasa yang dilakukan dengan Metode Kompetitif	Pengadaan Barang/Jasa; Metode Kompetitif;	Bagian dari pengadaan barang/jasa yang dilakukan dengan metode kompetitif dimana jumlah paket pengadaan yang dilakukan dengan metode pemilihan penyedia barang/jasa secara kompetitif melalui e-purchasing, tender cepat dan tender.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase Pengaduan Kekerasan yang ditindaklanjuti UPTD PPA	Pengaduan, Kekerasan;	Bagian dari jumlah laporan/pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani melalui proses tindak lanjut oleh UPTD PPA.	[32010026] Wilayah;		Persentase	persen
10410133	Persentase Pengeluaran Pemerintah untuk Layanan Pokok Kesehatan	[K01531] Pengeluaran Pemerintah; [K01361] Pelayanan Kesehatan;	Besarnya pengeluaran belanja pemerintah untuk kesehatan yang dialokasikan dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD).	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
10410134	Persentase Pengeluaran Pemerintah untuk Layanan Pokok Perlindungan Sosial	[K01531] Pengeluaran Pemerintah; [K01685] Perlindungan Sosial;	Besarnya pengeluaran belanja pemerintah untuk perlindungan sosial yang dialokasikan dari anggaran pendapatan dan belanja begara (APBN).	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
25010038	Persentase Pengeluaran Utama Pemerintah	[K01531] Pengeluaran Pemerintah; [K00103] Anggaran;	Bagian dari pengeluaran pemerintah baik pusat maupun daerah yang disetujui lembaga legislatif pada anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah (APBN/APBD).	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang terlaksana	Pengendalian; Evaluasi; Pelaporan;	Bagian dari kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dibandingkan dengan total kegiatan yang direncanakan.		-	Persentase	persen
	Persentase Pengurangan Luas Kawasan Kumuh	Kawasan Kumuh;	capaian kinerja yang diperoleh dari realisasi luas kawasan kumuh yang telah tertangani, dibandingkan dengan jumlah luas kawasan kumuh yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi ditetapkan dalam dokumen legal (SK Bupati/Wali Kota/Gubernur).	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase Pengurangan Sampah	Sampah;	Bagian dari total timbunan sampah yang berhasil dikurangi melalui penerapan strategi pengelolaan seperti pembatasan, penggunaan ulang, atau pendauran ulang.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi	Investasi;	Persentase perubahan relatif dalam jumlah total investasi yang tercatat di Provinsi Kepulauan Riau dari satu periode ke periode berikutnya antara nilai investasi pada akhir periode tertentu dengan nilai investasi pada awal periode tersebut.	Sektor; Lokasi; Jenis Investasi;		Persentase	persen
	Persentase Peningkatan Kelompok Nelayan yang Memiliki Akses Pendanaan Usaha Nelayan	Pendanaan Usaha; Nelayan;	Perbandingan kemampuan dari kelompok nelayan untuk memperoleh akses sumber pendanaan usaha guna mendukung kegiatan usaha perikanan dibandingkan dengan banyaknya nelayan.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Persentase Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat	Partisipasi Politik;	Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat yang dinyatakan dalam persentase.	[32010026] Wilayah; Jenis Pemilihan;	-	Persentase	persen
	Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian	Persentase; Prasarana; [K01705] Pertanian; ;	Bagian dari besarnya segala sesuatu yang menjadi salah satu faktor penting yang mendukung perkembangan pertanian dapat berupa akses pembiayaan dan perlindungan usaha partanian, air untuk pertanian, dan ketersediaan lahan untuk pertanian, pupuk dan pestisida pertanian dan alat dan mesln (alsintan) pertanian.	[32010026] Wilayah; Tahun Penyajian; Jenis Prasarana Pertanian	-	Persentase	persen
	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura	Persentase; Produktivitas; Tanaman Hortikultura;	Bagian dari besarnya kenaikan jumlah hasil panen tanaman hortikultura terhadap luas areal panen atau areal menghasilkan dalam periode tertentu.	Tahun Penyajian; Jenis Komoditas Tanaman Hortikultura	-	Persentase	persen
	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan	Persentase; Produktivitas; [K02955] Usaha Tanaman Pangan;	Bagian dari besarnya kenaikan jumlah hasil panen tanaman pangan (padi dan palawija) terhadap luas areal panen atau areal menghasilkan dalam periode tertentu.	Tahun Penyajian; Jenis Komoditas Tanaman Pangan	-	Persentase	persen
	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan	Persentase; Produktivitas; Tanaman Perkebunan;	Bagian dari besarnya kenaikan jumlah hasil panen tanaman perkebunan terhadap luas areal panen atau areal menghasilkan dalam periode tertentu.	Tahun Penyajian; Jenis Komoditas Tanaman Perkebunan	-	Persentase	persen
	Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak	Persentase; Produktivitas; [K02197] Ternak;	Bagian dari besarnya hasil yang hasil produksi dari hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya, termasuk hewan peliharaan.	Tahun Penyajian; [24120030] Jenis Ternak	-	Persentase	persen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Persentase Peningkatan Sarana Produksi Pertanian	Persentase; Sarana Produksi Pertanian;	Bagian dari besarnya kenaikan kuantitas atau kualitas sarana produksi pertanian (benih, pupuk, pestisida, alsintan) yang tersedia atau dimanfaatkan petani pada tahun berjalan dibandingkan tahun sebelumnya.	Tahun Penyajian; Jenis Sarana Produksi Pertanian	-	Persentase	persen
	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Persentase; Penyakit Hewan Menular;	Bagian dari besarnya penurunan jumlah peristiwa dan kasus penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lain melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, Pakan, peralatan, dan manusia, atau melalui media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.	[32010026] Wilayah; Tahun Penyajian	-	Persentase	persen
	Persentase Penyalahgunaan NAPZA yang Mendapat Rehabilitasi Medis	Narkotika; Psikotropika; Zat Adiktif; Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika;	Bagian dari penyalahguna NAPZA baru yang mendapatkan layanan rehabilitasi medis di institusi penerima wajib lapor (IPWL).	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di dalam Panti	Disabilitas Terlantar;	Bagian dari seluruh penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA, yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial di dalam Panti	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);	Bagian dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA, yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Persentase Penyediaan Listrik bagi Masyarakat Provinsi di Kepulauan Riau	Penyediaan Listrik bagi Masyarakat;	Perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan baik dari listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah tangga.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Prasarana Jalan Provinsi;	Bagian dari seluruh ketersediaan unsur-unsur perlengkapan jalan yang dipasang sesuai standar pada jaringan jalan provinsi dibandingkan dengan kebutuhan perlengkapan jalan yang seharusnya tersedia berdasarkan perencanaan teknis	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Angkutan Orang dalam Trayek;	Bagian dari seluruh Pengaturan, operasional, dan pengawasan layanan transportasi penumpang yang melayani rute atau trayek yang menghubungkan beberapa daerah kabupaten atau kota dalam satu provinsi	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase Penyelesaian Dokumen Kebakaran dan/atau Tindak Lanjutnya	Penyelesaian dokumen kebakaran dan/atau tindak lanjutnya;	Indikator yang menggambarkan jumlah dokumen kebakaran yang telah diselesaikan dan dokumen tindak lanjut	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan Sampai dengan Dinyatakan Sah/Legal	Dokumen; Bencana; Legal;	Perbandingan antara banyaknya dokumen kebencanaan yang telah selesai diproses dan mendapatkan pengesahan resmi/legal dari pejabat berwenang, dibandingkan dengan total dokumen yang direncanakan atau diajukan.	Jenis Dokumen; [32010026] Wilayah; Waktu;	-	Persentase	persen
	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan	Pengaduan Masyarakat;	Bagian dari Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang selesai ditangani/ ditindaklanjuti.	[25020054] Klasifikasi Instansi Pemerintah;	-	Persentase	persen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Sengketa Lingkungan hidup;	Bagian dari pengajuan seluruh sengketa lingkungan hidup yang berhasil diselesaikan baik melalui jalur pengadilan (litigasi) maupun diluar pengadilan (non-litigasi).	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Provinsi Kepri yang Terbina	Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terbina;	Indikator yang menggambarkan jumlah PPNS yang terbina	[32010026] Wilayah; Jenis Kelamin;	-	Persentase	persen
	Persentase Penyuluh yang meningkat Kapasitasnya/Kompetensinya Sesuai dengan Bidang Keahliannya	Persentase; [K01612] Penyuluh; Kapasitas; [K00952] Kompetensi Teknis;	Bagian dari seluruh peningkatan yang meliputi pengetauan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesiflk berkaitan dengan bidang teknis jabatan dari seseorang yang memberikan petunjuk atau penjelasan dalam proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.	[33220007] Jenis Kelamin; Kualifikasi Fungsional	-	Persentase	persen
	Persentase Penyusunan Dokumen Rancangan Peraturan APBD Provinsi	Peraturan daerah Provinsi; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;	Bagian dari dokumen rancangan APBD berupa peraturan daerah dan peraturan kepala daerah terkait APBD Provinsi yang telah disusun pada tahun berjalan.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Persentase penyusunan laporan keuangan daerah yang tepat waktu	keuangan daerah;	Bagian dari laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun termasuk APBD, Laporan Semester I, laporan keuangan tahunan, neraca, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan dilaksanakan dan disampaikan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase perangkat daerah menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Perangkat Daerah; Informasi Publik;	Bagian dari seluruh perangkat daerah yang menjalankan kewajiban sesuai pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Perangkat Daerah		Persentase	persen
	Persentase Perangkat Daerah yang Didampingi dalam Penerapan Manajemen Risiko	Manajemen Risiko;	Bagian dari Perangkat Daerah yang Didampingi dalam Penerapan Manajemen Risiko	[25020054] Klasifikasi Instansi Pemerintah;	-	Persentase	persen
	Persentase Perangkat Daerah yang melakukan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP	Maturitas SPIP;	Bagian dari Perangkat Daerah yang melakukan Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	[K02358] Insiden Siber;	-	Persentase	persen
	Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Nilai SAKIP BB ke Atas	SAKIP;	Bagian dari Perangkat Daerah yang Memiliki Nilai SAKIP BB ke Atas	[25020054] Klasifikasi Instansi Pemerintah;	-	Persentase	persen
	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	Perangkat Daerah; Portal; Situs Web;	Perbandingan dari perangkat daerah yang telah memiliki portal dan situs web sesuai standar dengan seluruh perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang ada.	Perangkat Daerah;		Persentase	persen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Tingkat Kematangan Manajemen Risiko Tingkat 2 Keatas	Manajemen Risiko;	Bagian dari keseluruhan elemen atau individu yang memiliki karakteristik tertentu dan menjadi subjek atau objek dalam penelitian atau studi Perangkat Daerah yang telah Memiliki Tingkat Kematangan Manajemen Risiko Tingkat 2 Keatas	[25020054] Klasifikasi Instansi Pemerintah;	-	Persentase	persen
	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Perangkat Daerah; Internet; Pemerintah Daerah;	Perbandingan dari perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang telah memanfaatkan layanan internet berkualitas dari Dinas Kominfo, dibandingkan dengan seluruh perangkat daerah yang ada.	Perangkat Daerah;		Persentase	persen
	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Perangkat Daerah; Data; Statistik; Perencanaan; Pembangunan Daerah;	Bagian dari seluruh Perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	[32010026] Wilayah;		Persentase	persen
	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Perangkat Daerah; Data; Statistik; Evaluasi; Pembangunan Daerah;	Bagian dari seluruh perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Perangkat Daerah;		Persentase	persen
	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	Perangkat Daerah; Pusat Data;	Bagian dari seluruh perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat dan pemerintah.	Perangkat Daerah;		Persentase	persen
	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menerapkan Tata Kelola Manajemen Risiko sesuai Ketentuan	Manajemen Risiko;	Bagian dari Perangkat Daerah yang telah menerapkan tata kelola manajemen risiko sesuai ketentuan.	[25020054] Klasifikasi Instansi Pemerintah;	-	Persentase	persen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	Perangkat Daerah; Sandi; Komunikasi;	Bagian dari seluruh perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	[32010026] Wilayah;		Persentase	persen
	Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Perangkat Daerah; Internet; Pemerintah Daerah;	Perbandingan dari perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang sudah menggunakan jaringan internet yang difasilitasi/dioperasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, dibandingkan dengan seluruh perangkat daerah yang ada.	Perangkat Daerah;		Persentase	persen
	Persentase Perda dan/atau Perkada yang ditegakkan	Perda dan/atau Perkada yang ditegakkan;	Indikator yang menunjukkan jumlah perda dan/atau perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan selama 1 tahun	Sanksi;	-	Persentase	persen
	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	[K01647] Perempuan; [K00091] Anak; Korban Kekerasan; Layanan;	Bagian dari korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapat layanan secara menyeluruh (layanan pengaduan dan/atau layanan hukum dan/atau layanan psikologi) sesuai kebutuhannya di UPTD PPA.	[32010026] Wilayah;		Persentase	persen
	Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang terlayani	[K01647] Perempuan; [K00091] Anak; Korban Kekerasan;	Bagian dari jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan (pengaduan, pendampingan, kesehatan, bantuan hukum, rehabilitasi, atau perlindungan) dengan terhadap jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat pada periode tertentu.	[32010026] Wilayah;		Persentase	persen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10410142	Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15—49 Tahun yang Proses Kelahiran Anaknya Dilakukan di Fasilitas Kesehatan	[K01647] Perempuan; [K01824] Melahirkan/Kelahiran; [K00443] Fasilitas Pelayanan Kesehatan;	Bagian dari populasi perempuan pernah kawin berumur 15—49 tahun yang pernah melahirkan anaknya dalam kondisi hidup di fasilitas kesehatan dalam dua tahun terakhir.	[32010026] Wilayah; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [10120066] Umur/Usia; [10320055] Tingkat Pendidikan; [10620071] Status Disabilitas;	-	Persentase	persen
10410143	Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15—49 Tahun yang Proses Kelahiran Anaknya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih	[K01647] Perempuan; [K01587] Penolong Kelahiran; [K02177] Tenaga Kesehatan Terlatih;	Bagian dari populasi perempuan pernah kawin berumur 15—49 tahun yang dalam proses melahirkan anaknya dalam kondisi hidup ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih dalam dua tahun terakhir.	[32010026] Wilayah; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [10120066] Umur/Usia; [10320055] Tingkat Pendidikan; [10620071] Status Disabilitas;	-	Persentase	persen
	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani dengan SOP	Pelayanan Perizinan; Pelayanan Non Perizinan; SOP;	Bagian dari total permohonan perizinan dan non perizinan yang dilayani sesuai dengan Prosedur operasi standar yang harus diikuti untuk memastikan konsistensi dan kualitas dalam proses pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.	Jenis Layanan Perizinan;		Persentase	persen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (PF)	Pelayanan Kesehatan Persalinan; Fasilitas Pelayanan Kesehatan;	Perbandingan banyaknya ibu bersalin di wilayah kerja puskesmas yang mendapatkan pertolongan sesuai standar oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan dalam kurun waktu 1 tahun terhadap banyaknya sasaran ibu bersalin yang ada di wilayah kerja puskesmas dalam kurun waktu 1 tahun yang sama.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara per Kebangsaan	Wisatawan Mancanegara; Suku Bangsa ;	Perbandingan banyaknya kunjungan wisatawan mancanegara per kebangsaan ke suatu wilayah dalam periode tertentu, dibandingkan dengan periode sebelumnya.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase Pertumbuhan PAD	PAD;	Bagian dari seluruh peningkatan pendapatan daerah secara berkelanjutan yang dapat menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah (PAD tahun n - PAD tahun n-1) dibagi PAD tahun n-1	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase Pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah	Pajak Daerah;	Perbandingan ukuran kuantitatif yang menunjukkan perkembangan pajak daerah dalam satu tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Pajak Daerah tahun n - PAD tahun n-1) dibagi PAD tahun n-1	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3)	Perusahaan; Keselamatan; Kesehatan Kerja (K-3);	Perbandingan banyaknya perusahaan yang menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja terhadap seluruh perusahaan	Perusahaan;	-	Persentase	persen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak	Perusahaan; Tata Kelola Kerja yang Layak;	Perbandingan banyaknya perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)/Perjanjian Kerja Bersama (PKB), sudah menyusun Struktur Skala Upah, telah membentuk Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit dan telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan terhadap jumlah seluruh perusahaan.	Perusahaan	-	Persentase	persen
	Persentase Perusahaan yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Perusahaan; LKPM;	Perbandingan antara jumlah perusahaan yang telah mengajukan LKPM dengan total jumlah perusahaan yang diwajibkan untuk mengajukan LKPM dalam periode tertentu.	Sektor; Lokasi; Skala Usaha;		Persentase	persen
	Persentase Piutang Pajak Daerah yang Tertagih	Piutang; Pajak Daerah;	Bagian dari seluruh piutang yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada pemerintah daerah	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang Difasilitasi untuk Mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya	Produk; Ekonomi Kreatif; Hak Kekayaan Intelektual;	Jumlah produk ekonomi kreatif yang telah difasilitasi oleh pemerintah atau pihak terkait untuk melakukan proses pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI).	Jenis HKI; [32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase Produk Hukum Penetapan yang difasilitasi	Produk Hukum Daerah; Fasilitasi;	Bagian dari capaian target kinerja atas peraturan pelaksanaan peraturan daerah atau kebijakan kepala daerah untuk mengatur mengenai penyelenggaraan tugas-tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase Produk Hukum Daerah yang terselesaikan	Produk Hukum Daerah; Fasilitasi;	Bagian dari Capaian target kinerja yang terselesaikan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah, yang memiliki kekuatan hukum.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase Produk Hukum Kab/Kota Yang difasilitasi	Produk Hukum Daerah; Fasilitasi;	Bagian dari Rancangan Produk hukum kab/kota yang difasilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Persentase Produk Hukum Pengaturan Daerah yang difasilitasi	Produk Hukum Daerah; Fasilitasi;	Bagian dari Capaian target kinerja yang difasilitasi mengacu pada proporsi peraturan gubernur yang telah melalui proses fasilitasi dari keseluruhan peraturan gubernur yang direncanakan atau ditargetkan dalam suatu periode tertentu.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase Produk Hukum yang didokumentasikan	Produk Hukum Daerah; Dokumentasi;	Bagian dari database peraturan perundang undangan yang dikelola melalui Jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang dipublikasikan.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat	Persentase; Pangan Segar Asal Hewan; Aman; Sehat;	Bagian dari seluruh pangan asal hewan yang belum mengalami pengolahan lebih lanjut selain pendinginan, pembekuan, pemanasan, dan pengasapan yang bebas dari bahaya, pasti, tidak meragukan, tidak mengandung risiko serta mendatangkan kebaikan pada badan.	Jenis Hewan; Tahun Penyajian	-	Persentase	persen
	Persentase Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Aman	Persentase; Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT); Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT);	Bagian dari seluruh produk pangan asal tumbuhan yang belum mengalami pengolahan, yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengelolaan pangan yang aman.	Jenis Tanaman; Tahun Penyajian	-	Persentase	persen
	Persentase Program Strategis Daerah yang Dilakukan Pengawasan	Program Strategis Daerah;	Serangkaian kegiatan yang terencana dan terarah, yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Program ini bersifat strategis karena memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.	[25020054] Klasifikasi Instansi Pemerintah;	-	Persentase	persen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Persentase Proses Revisi RTRW Provinsi dan Ditetapkan/Perda	Perbandingan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); Perubahan Wilayah;	Perbandingan jumlah dokumen tata ruang yang ditetapkan 1 tahun.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
10410149	Persentase Puskesmas dengan Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	[K01838] Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas); [K02174] Tenaga Kesehatan;	Bagian dari populasi puskesmas yang telah terpenuhi/memiliki 9 jenis tenaga kesehatan, mencakup dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, tenaga sanitasi lingkungan, nutrisionis, tenaga apoteker dan/atau tenaga teknis kefarmasian, serta ahli teknologi aboratorium medik, sesuai standar minimal satu untuk masing-masing jenis tenaga kesehatan.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial	Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas); Obat Esensial;	Perbandingan puskesmas yang menyediakan obat esensial terhadap seluruh puskesmas.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase Puskesmas Terakreditasi	Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas); Akreditasi;	Perbandingan puskesmas terakreditasi terhadap seluruh puskesmas	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase Puskesmas yang Melakukan Pelayanan Terpadu PTM	Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas); Kegiatan Pelayanan Terpadu Penyakit Tidak Menular;	Perbandingan banyaknya puskesmas yang melakukan pelayanan terpadu PTM terhadap seluruh puskesmas.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase Puskesmas yang Mempunyai Layanan Upaya Berhenti Merokok	Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas); Pelayanan	Perbandingan banyaknya puskesmas yang mempunyai Layanan Upaya Berhenti Merokok terhadap seluruh puskesmas.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Kesehatan; Merokok;					
	Persentase Rancangan Peraturan Daerah Kab/ Kota yang dievaluasi	Peraturan Daerah Kab/Kota;	Bagian dari Rancangan Peraturan Daerah yang dievaluasi sesuai dengan Ketentuan perundang-undangan.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase Realisasi PAD selain Pajak Daerah terhadap total PAD	PAD;	Bagian dari seluuh penerimaan Retribusi Daerah, Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain PAD terhadap total PAD	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase Realisasi Penerimaan Dana Transfer dibandingkan Target Tahun Berjalan	DBH;	Bagian dari seluruh penerimaan dana pemerintah pusat yang di transfer ke daerah	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase Realisasi Penyerapan Kas Daerah	Kas Daerah;	Bagian dari Kas daerah dimana, pengeluaran kas dikeluarkan oleh pemerintah daerah melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atas beban APBD pada periode tertentu	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase regulasi tentang pelaksanaan APBD yang disusun	Regulasi Pelaksanaan APBD;	Bagian dari regulasi tentang pelaksanaan APBD yang disusun	[32010026] Wilayah	-	Persentase	persen
	Persentase Rekomendasi dan Kebijakan Bidang Perekonomian yang Ditindaklanjuti	Rekomendasi dan Kebijakan Bidang Perekonomian;	Bagian dari Rekomendasi dan Kebijakan Bidang Perekonomian yang sudah Ditindaklanjuti	[25020054] Klasifikasi Instansi Pemerintah;	-	Persentase	persen
	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan Mental Spiritual yang dihasilkan	Rekomendasi Kebijakan; Pembinaan; Mental Spiritual;	Bagian dari Rekomendasi Kebijakan Pembinaan Mental Spiritual yang dihasilkan.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat Non Pelayanan Dasar	Rekomendasi Kebijakan; Kesejahteraan Masyarakat; Pelayanan Dasar;	Bagian dari Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kesejahteraan Masayarakat Non Pelayanan Dasar	Perangkat Daerah;	-	Persentase	persen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Layanan Dasar yang dihasilkan	Rekomendasi Kebijakan; Kesejahteraan Rakyat; Pelayanan Dasar;	Bagian dari Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Layanan Dasar yang dihasilkan.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan	Rekomendasi Kebijakan; Kesejahteraan;	Bagian dari Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase RS Rujukan Provinsi Terakreditasi	Rumah Sakit; Rujukan; Akreditasi;	Perbandingan rumah sakit rujukan terakreditasi terhadap seluruh rumah sakit.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase Ruang Kelas dalam Kondisi Baik	Ruang Kelas; Kondisi Baik;	Bagian dari seluruh ruang kelas Sekolah pada bentuk pendidikan tertentu yang berada dalam kondisi baik sesuai standar sarana pendidikan.	[32010026] Wilayah; Bentuk pendidikan;	-	Persentase	persen
	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi	Rumah Sakit; Akreditasi;	Perbandingan rumah sakit terakreditasi terhadap seluruh rumah sakit	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Rumah Tangga; Rumah Layak huni; Terjangkau;	Bagian dari populasi rumah tangga yang tinggal pada bangunan tempat tinggal yang layak yang dicirikan dengan pemenuhan kriteria ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, memiliki akses air minum, dan memiliki akses sanitasi layak, dapat dijangkau secara ekonomi, dan mendukung keberlanjutan lingkungan dan sosial.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
10710032	Persentase Rumah Tangga dengan Akses pada Layanan Sanitasi Dasar atau Layak	[K01925] Rumah Tangga; [K01953] Sanitasi;	Bagian dari populasi rumah tangga yang bisa mendapatkan fasilitas sanitasi dasar yang layak (yang tidak digunakan bersama dengan rumah tangga lain).	[32010026] Wilayah; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin;	-	Persentase	persen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Persentase Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Rumah Tangga; Sampah;	Bagian dari rumah tangga yang secara rutin menerima layanan pengumpulan sampah (penanganan) yang sesuai standar—yaitu layanan yang mencakup pengambilan sampah dari tempat rumah tangga secara terjadwal dan lengkap.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	[K00829] Rumah Tangga; [K00027] Air Minum Layak; [K00025] Air Minum; Persentase;	Banyaknya rumah tangga yang memiliki akses untuk mendapatkan air minum layak yang berasal dari sumber yang terlindung seperti leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, air hujan dibandingkan dengan seluruh rumah tangga pada suatu wilayah.	[32020026] Wilayah;	-	Persentase	persen
33110011	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak	[K01925] Rumah Tangga; [K01915] Rumah Layak Huni;	Bagian dari populasi rumah tangga yang tinggal pada bangunan tempat tinggal yang layak yang dicirikan dengan pemenuhan kriteria ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, memiliki akses air minum, dan memiliki akses sanitasi layak.	[32010026] Wilayah; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin;	-	Persentase	persen
	Persentase Sarana Air Minum yang Diawasi/Diperiksa Kualitas Air Minumnya Sesuai Standar	Air Minum; Pengelolaan Kualitas Air; Standar;	Perbandingan banyaknya sarana air minum (SAM) yang dilakukan pengawasan eksternal oleh Dinas Kesehatan dalam kurun waktu 1 tahun terhadap keseluruhan SAM yang ada.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase Sarana Distribusi Farmasi Cabang yang Sesuai Standar	Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi;	Perbandingan banyaknya sarana distribusi farmasi cabang yang sesuai standar terhadap seluruh sarana distribusi farmasi cabang.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru yang Mengajar Mulok Bahasa Daerah dan Ekskul Kesenian	Satuan Pendidikan; Guru; Bahasa; Ekstrakuriler; Seni;	Bagian dari seluruh satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar mulok bahasa daerah dan ekskul kesenian.	Status Sertifikasi; [10320051] Status Satuan Pendidikan;	-	Persentase	persen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: Literasi membaca	Standar Kompetensi;	bagian satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: Literasi membaca.	Wilayah	-	nilai	persen
	Persentase Satuan Perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Prasarana; Sarana; Utilitas Umum;	Bagian dari seluruh jumlah satuan rumah/perumahan (baik rumah tapak maupun rusun) yang telah dilengkapi dengan PSU dasar dan fungsional dibandingkan dengan total satuan perumahan yang dibangun pada periode waktu tertentu.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase SDM Aparatur Satpol PP yang memiliki Kompentensi dalam Pelaksanaan Tugas	Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur Satpol PP;	Indikator yang menggambarkan jumlah SDM aparatur Satpol PP yang telah memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas	Jabatan;	-	Persentase	persen
	Persentase SDM Aparatur Satpol yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Aparatur Satpol yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan;	Indikator yang menggambarkan jumlah SDM aparatur Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar, diklat fungsional maupun teknis	[32010026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin;	-	Persentase	persen
	Persentase SDM Pengawasan yang mengikuti Peningkatan Kompetensi	APIP;	Bagian dari Sumber Daya Manusia Pengawasan yang mengikuti Peningkatan Kompetensi	[25020054] Klasifikasi Instansi Pemerintah;	-	Persentase	persen
	Persentase SDM Sejarawan yang Berkompetensi	[K02077] Sumber Daya Manusia (SDM); Sejarawan; [K00952] Kompetensi Teknis;	Bagian dari seluruh sumber daya manusia (SDM) yang berprofesi sebagai sejarawan yang memiliki pengakuan kompetensi (melalui sertifikasi, pendidikan formal sejarah, atau pengalaman profesional yang diakui secara kelembagaan)	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase Sekolah Negeri yang Terakreditasi Minimum B	Akreditasi;	Bagian dari seluruh sekolah negeri pada bentuk pendidikan tertentu yang sudah terakreditasi minimal B.	[33220007] Jenis Kelamin; Bentuk Pendidikan;	-	Persentase	persen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Persentase Sekolah Swasta yang Memperoleh Izin	Izin; Sekolah Menengah Atas; Sekolah Menengah Kejuruan; SLB; Swasta;	Bagian dari seluruh sekolah swasta pada bentuk pendidikan tertentu yang telah memperoleh izin operasional dari instansi berwenang.	[32010026] Wilayah; Bentuk Pendidikan;	-	Persentase	persen
	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi dan/atau aplikasi persandian	Sistem Eletronik; Aplikasi Persandian;	Bagian dari seluruh sistem elektronik yang menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi maupun menggunkaan aplikasi persandian	Jenis sistem elektronik (APLIKASI);		Persentase	persen
	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	Sistem Elektronik; Aset Informasi; Audit;	Bagian dari seluruh sistem elektronik atau asset informasi yang diaudit yang memiliki resiko kategori rendah.	Jenis Sistem Elektronik;		Persentase	persen
	Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi Minimum	Kompetensi; Literasi; Siswa;	Bagian dari seluruh siswa yang memperoleh nilai minimal kompetensi literasi pada asesmen yang berlaku.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi Minimum	Kompetensi; Numerasi; Siswa;	Bagian dari seluruh siswa yang memperoleh nilai minimal kompetensi numerasi pada asesmen yang berlaku.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase Siswa SLB yang diterima di Dunia Usaha dan Dunia Industri	Siswa; Usaha; Industri; Sekolah Luar Biasa (SLB);	Persentase lulusan SLB yang berhasil diterima bekerja di sektor dunia usaha atau dunia industri sesuai kompetensi keahliannya.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase Siswa SMA yang diterima di Perguruan Tinggi	Siswa; Sekolah Menengah Atas; Perguruan Tinggi;	Bagian dari seluruh siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) yang lulus dan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Persentase Siswa SMK yang diterima di Dunia Usaha dan Dunia Industri	Siswa; Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); Usaha, Industri;	Persentase lulusan SMK yang berhasil diterima bekerja di sektor dunia usaha atau dunia industri sesuai kompetensi keahliannya.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan	[K01647] Perempuan; [K01450] Pendapatan;	ukuran proporsi pendapatan yang diperoleh perempuan dibandingkan dengan total pendapatan kerja (perempuan + laki-laki) dalam rumah tangga atau suatu wilayah pada periode tertentu.	[32010026] Wilayah;		Persentase	persen
	Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan	Sumber Daya Pariwisata; Ekonomi Kreatif;	Perbandingan antara banyaknya sumber daya pariwisata serta potensi ekonomi kreatif yang telah mendapatkan peningkatan kapasitas, kualitas, atau fungsionalitas, terhadap total sumber daya dan potensi yang teridentifikasi dalam suatu wilayah pada periode tertentu.	Jenis sumber daya (pariwisata dan ekraf); [32010026] Wilayah; Status (terdata, dikembangkan, aktif maupun non aktif);	-	Persentase	persen
	Persentase survey statistik sektoral yang mendapatkan rekomendasi dari BPS	Survei; Statistik Sektoral; Rekomendasi;	Bagian dari seluruh survei Statistisk sektoral yang telah mendapatkan rekomendasi dari Badan Pusat Statistik (BPS).	Perangkat Daerah;		Persentase	persen
	Persentase taman makam pahlawan yang dikelola Dinas Sosial	Taman Makam Pahlawan;	Bagian dari lokasi pemakaman yang dikhususkan bagi mereka yang berjasa kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk para pahlawan nasional, anggota militer, dan pejabat negara.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
10410152	Persentase Target Populasi yang Telah Memperoleh Vaksin Campak	[K00091] Anak; [K02302] Vaksin;	Bagian dari populasi anak yang telah menerima dua dosis vaksin campak yang sesuai dengan jadwal yang direkomendasikan secara nasional melalui layanan imunisasi rutin pada tahun tertentu.	[32010026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [10320055]	-	Persentase	persen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tingkat Pendidikan;			
10410153	Persentase Target Populasi yang Telah Memperoleh Vaksin DPT3	[K00091] Anak; [K02302] Vaksin;	Bagian dari populasi anak berusia 12—23 bulan yang menerima 3 dosis vaksin DPT pada tahun tertentu.	[32010026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [32020020] Klasifikasi Wilayah;	-	Persentase	persen
10410154	Persentase Target Populasi yang Telah Memperoleh Vaksin Konjugasi Pneumokokus	[K00232] Bayi; [K02302] Vaksin;	Bagian dari populasi bayi yang menerima vaksin konjugasi pneumokokus yang direkomendasikan secara nasional pada tahun tertentu.	[32010026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin;	-	Persentase	persen
	Persentase tempat dan fasilitas umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar	Tempat dan Fasilitas Umum; Pengawasan di Bidang Kesehatan; Standar;	Perbandingan banyaknya TFU (Sekolah, Pasar, Puskesmas) yang dilakukan pengawasan sesuai standar di wilayah kabupaten/kota dalam kurun waktu 1 tahun terhadap seluruh TFU (Sekolah, Pasar, Puskesmas) yang terdaftar.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar	Pengelolaan Pangan; Standar;	Perbandingan banyaknya TPP yang memenuhi syarat kesehatan berdasarkan hasil Inspeksi Kesehatan Lingkungan sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun terhadap keseluruhan TPP.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitasi	Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat;	Bagian dari tenaga inti pengendali kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di masyarakat	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Persentase Tenaga Pendidik yang Bersertifikasi	Tenaga Pendidik; Sertifikasi; Sekolah Menengah Atas;	Bagian dari seluruh tenaga pendidik di Sekolah pada bentuk pendidikan tertentu yang memiliki sertifikat pendidik sesuai peraturan yang berlaku.	[32010026] Wilayah; Bentuk pendidikan;	-	Persentase	persen
	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Tugas; Fungsi;	Perbandingan dalam bentuk persentase antara jumlah kegiatan yang telah direalisasikan sesuai rencana kerja DPRD dengan jumlah total kegiatan yang direncanakan dalam satu tahun anggaran, yang terkait dengan pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.	[32010026] Wilayah	-	Persentase	persen
	Persentase tersedianya Keputusan Gubernur Tentang Hasil Evaluasi RAPBD Kab/Kota	Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);	Bagian dari RAPBD berupa dokumen formal yang berisi penilaian dari Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD beserta Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (misalnya UU No. 32/2004 dan Permendagri No. 77/2021)	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase Terselenggaranya Dukungan Kerjasama Penanaman Modal	Kerjasama; Penanaman Modal;	Perbandingan antara dukungan kerjasama dalam penanaman modal yang telah terealisasi dibandingkan dengan keseluruhan dukungan kerjasama yang direncanakan atau diharapkan.	Lokasi; Sektor; Jenis Kerjasama;		Persentase	persen
	Persentase Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	Perangkat daerah; tingkat kematangan perangkat daerah;	Anngka yang menunjukkan hasil penilaian terhadap efektivitas dan efisiensi perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang meliputi penilaian terhadap tata laksana (proses bisnis), budaya organisasi, dan inovasi yang menggambarkan organisasi perangkat daerah		-	Persentase	persen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Persentase titik yang diamankan berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	Titik; Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS);	Perbandingan titik yang diamankan berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi (PHKS) dengan seluruh titik yang telah diamankan	[32010026] Wilayah;		Persentase	persen
	Persentase Total Daerah yang Diintervensi Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase; Intervensi; [K00881] Kerawanan Pangan;	Bagian dari seluruh banyaknya daerah yang telah mendapatkan tindakan intervensi dalam rangka penanganan terhadap kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian masyarakat.	[32010026] Wilayah; Tahun Penyajian	-	Persentase	persen
	Persentase Total Kredit terhadap PDRB	[K00991] Kredit; [K01776] Produk; Domestik Regional Bruto (PDRB);	Bagian dari seluruh Total Pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur terhadap PDRB.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase Total Proyek Konstruksi yang di bawa ke Tahun Berikutnya yang Ditandatangani pada Kuartal Pertama	Proyek Konstruksi; Kuartal Pertama / Triwulan Pertama;	Bagian dari total proyek konstruksi dimana Kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu Pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n adalah kontrak proyek konstruksi infrastruktur yang meliputi dasar pelaksanaan kegiatan konstruksi melalui kontrak konstruksi, yang memiliki nilai di atas 50 Milyar Rupiah, yang ditandatangani pada triwulan pertama (Januari-Maret).	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Persentase tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti	Tuna Sosial dan Korban perdagangan orang;	Bagian dari orang yang karena faktor tertentu, tidak atau kurang mampu untuk melaksanakan kehidupan yang layak atau sesuai dengan norma agama, sosial atau hukum serta secara sosial cenderung terisolasi dari kehidupan masyarakat.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase UMKM Ekspor	[K02274] Usaha Mikro; [K02269] Usaha Kecil; [K02273] Usaha Menengah [K00420] Ekspor;	Bagian dari Pelaku Usaha yang produknya dipasarkan di luar negeri.	[32010026] Wilayah	-	Persentase	persen
	Persentase UMKM yang Mengikuti Pelatihan	[K02274] Usaha Mikro; [K02269] Usaha Kecil; [K02273] Usaha Menengah; [K01354] Pelatihan;	jumlah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang mengikuti pelatihan.	[32010026] Wilayah; [23020048] Skala Usaha	-	Persentase	persen
	Persentase UMKM yang Naik Kelas	[K02274] Usaha Mikro; [K02269] Usaha Kecil; [K02273] Usaha Menengah;	Bagian dari seluruh usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang berpindah ke kategori yang lebih tinggi.	[32010026] Wilayah; [23020048] Skala Usaha	-	Persentase	persen
	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang tidak Melanggar Perda	Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi;	Perbandingan Jumlah Usaha Tambang yang sesuai kewenangan provinsi yang tidak melanggar perda terhadap Jumlah Usaha Tambang yang sessuai kewenangan provinsi dikali seratus.	Wilayah dan Jenis Komoditas;	-	Persentase	persen
	Persentase Wanita Usia 30 - 50 Tahun yang Dilakukan Skrining Kanker Payudara dan Kanker Serviks	Perempuan; Kanker Payudara; Kanker Leher Rahim;	Perbandingan banyaknya wanita usia 30 - 50 tahun yang dilakukan skrining kanker payudara dan kanker serviks terhadap seluruh wanita usia 30-50 tahun.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Warga Negara; Korban; Bencana; Rumah Layak Huni;	Bagian dari warga negara yang terdampak bencana alam atau non-alam dan telah mendapatkan fasilitasi rumah yang memenuhi kriteria layak huni dari pemerintah.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase Warga Negara pada Kondisi Kejadian Luar Biasa yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	Kejadian Luar Biasa; Pelayanan Kesehatan;	Bagian dari warga negara yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada di Provinsi	Layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada;	Indikator yang menggambarkan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan Hukum perda dan Perkada	Subjek;	-	Persentase	persen
	Persentase Warga Negara yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	Krisis Kesehatan; Bencana; Pelayanan Kesehatan;	Bagian dari warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni	Relokasi; Rumah Layak Huni;	Bagian dari warga negara (individu atau rumah tangga) yang direlokasi karena pelaksanaan program pembangunan pemerintah daerah provinsi dan telah mendapatkan fasilitasi berupa penyediaan rumah yang memenuhi kriteria layak huni.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang telah ditetapkan terhadap Total Registrasi	Warisan Budaya Tak Benda; [K01861] Registrasi;	Besarnya elemen Warisan Budaya Tak Benda (WBTb) yang telah ditetapkan secara resmi oleh pemerintah (melalui penetapan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) terhadap total jumlah elemen WBTb yang telah diajukan atau didaftarkan dalam sistem pencatatan nasionalbudaya tak benda yang telah ditetapkan	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pertumbuhan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang ke Provinsi	Perjalanan wisata; Wisatawan Nusantara;	Perbandingan banyaknya perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke suatu provinsi dalam periode tertentu, dibandingkan dengan periode sebelumnya.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Pesentase Instansi Pemerintah dengan Skor SAKIP ≥ B	SAKIP;	Bagian dari Instansi Pemerintah dengan Skor SAKIP ≥ B	[25020054] Klasifikasi Instansi Pemerintah;	-	Persentase	persen
	Pesentase Pengeluaran/Belanja Pemerintah untuk Pendidikan	Belanja Daerah; [K02373] Pendidikan;	Bagian dari belanja pemerintah berupa Besar alokasi atau realisasi anggaran pemerintah (pusat atau daerah) yang digunakan untuk sektor pendidikan dibandingkan dengan total pengeluaran atau belanja pemerintah secara keseluruhan dalam suatu periode anggaran tertentu.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Presentase Penyuluh Pertanian yang Menerapkan Teknologi Pertanian	Persentase; Penyuluh Pertanian; Teknologi Pertanian;	Bagian dari seluruh seseorang yang memberikan petunjuk atau penjelasan dalam proses pembelajaran mengenai pertanian yang telah menerapkan suatu teknologi yang digunakan dalam kegiatan pertanian untuk menghasilkan produk pertanian yang berkualitas dan berkelanjutan.	[32010026] Wilayah; Tahun Penyajian	-	Persentase	persen
10410158	Prevalensi Anemia pada Ibu Hamil Berumur 15—49 Tahun	[K00102] Anemia; [K00803] Kehamilan;	Bagian dari seluruh ibu hamil berusia 15—49 tahun yang memiliki kadar hemoglobin dalam darah kurang dari 11,0 g/dl pada pemeriksaaan saat kunjungan pertama (K1).	[32010026] Wilayah; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [10320055] Tingkat Pendidikan;	-	Persentase	persen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan/Prevalence of Undemourishment	[K00930] Ketidakcukupan Konsumsi Pangan/*Undernourishment*;	Bagian dari populasi penduduk di suatu wilayah yang secara reguler mengonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.	[32010026] Wilayah; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [10620071] Status Disabilitas; [33220007] Jenis Kelamin;	-	Persentase	persen
10410160	Prevalensi Obesitas pada Penduduk Berumur 18 Tahun ke Atas	[K01246] Obesitas;	Bagian dari populasi penduduk umur 18 tahun ke atas dengan hasil	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
10410163	Prevalensi Tekanan Darah Tinggi	[K00521] Hipertensi;	Bagian dari populasi penduduk umur 18 tahun ke atas dengan hasil pengukuran tekanan darah sistolik lebih besar dari 140 mmHg dan/atau tekanan darah diastolik lebih besar dari 90 mmHg.	[32010026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [32020020] Klasifikasi Wilayah;	-	Persentase	persen
10410162	Prevalensi Tengkes/*Stunting* pada Balita	[K02057] Tengkes/Stunting;	Bagian dari populasi anak berusia di bawah lima tahun yang bertubuh pendek dan sangat pendek ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar.	[32010026] Wilayah; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin;	-	Persentase	persen
10410164	Prevalensi *Wasting* pada Balita	[K02320] Wasting; [K00206] Balita;	Bagian dari populasi anak balita yang menderita gizi kurang dan gizi buruk.	[32010026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin;	-	Persentase	persen
	Proporsi Anggaran Domestik yang didanai oleh Pajak Domestik	Pendapatan Asli Daerah (PAD);	Perbandingan Total Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Dengan Belanja Daerah (tidak termasuk transfer ke daerah dan dana desa / TKDD	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi	[K02269] Usaha Kecil; [K02273] Usaha Menengah;	Perbandingan antara jumlah unit usaha kecil dan menengah non pertanian terhadap seluruh unit usaha non pertanian pada tahun yang sama.	[32010026] Wilayah	-	Total	unit
	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional	PDRB; Wilayah Metropolitan;	Perbandingan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku dari wilayah metropolitan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, yang digunakan sebagai indikator kinerja ekonomi strategis dalam dokumen perencanaan nasional.	[32010026] Wilayah;	-	Proporsi	-
	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Pendidikan Tinggi; Kualifikasi; Penduduk;	Bagian dari penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki ijazah pendidikan tinggi (Diploma, Sarjana, atau setara).	[32010026] Wilayah;	-	Proporsi	
	Proporsi Perempuan yang Berada di Posisi Managerial (Eselon II)	Perempuan; Manajerial; Eselon;	Bagian dari pejabat eselon II yang berjenis kelamin perempuan	[32010026] Wilayah;	-	Proporsi	
	Proporsi sekolah dengan akses terhadap air minum layak	Sekolah; air minum; layak;	Bagian dari sekolah pada bentuk pendidikan tertentu yang memiliki akses terhadap air minum layak	Wilayah Bentuk Pendidikan	-	Proporsi	
	Proporsi sekolah dengan akses terhadap fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	Sekolah; Akses; Sanitasi; Higienis;	Bagian dari sekolah pada bentuk pendidikan tertentu yang memiliki fasilitas cuci tangan yang terdiri dari air, sanitasi, dan higienis bagi semua terhadap total sekolah.	[32010026] Wilayah; Bentuk Pendidikan; [33220007] Jenis Kelamin;	-	Proporsi	
	Proporsi sekolah dengan akses terhadap fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin	Sekolah; Sanitasi; Jenis Kelamin;	Bagian dari sekolah pada bentuk pendidikan tertentu yang memiliki fasilitas sanitasi dasar terpisah berdasarkan jenis kelamin terhadap total sekolah.	[32010026] Wilayah; Bentuk Pendidikan;	-	Proporsi	

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Proporsi sekolah dengan akses terhadap internet untuk tujuan pengajaran	Sekolah; internet; pengajaran;	Bagian dari sekolah pada bentuk pendidikan tertentu yang memiliki akses internet untuk tujuan pengajaran	Wilayah Bentuk Pendidikan	-	Proporsi	
	Proporsi sekolah dengan akses terhadap komputer untuk tujuan pengajaran	Sekolah; komputer; pengajaran;	Bagian dari sekolah pada bentuk pendidikan tertentu yang memiliki akses komputer untuk tujuan pengajaran	Wilayah Bentuk Pendidikan	-	Proporsi	
24210013	Proporsi Sekolah dengan Akses Terhadap Listrik	[K01976] Sekolah; [K01111] Listrik;	Bagian dari seluruh populasi sekolah yang memiliki akses terhadap listrik.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Proporsi Sumber Daya yang Dialokasikan oleh Pemerintah secara langsung untuk Program Pemeberantasan kemiskinan	Sumber Daya; [K00847] Kemiskinan;	banyaknya anggaran atau sumber daya pemerintah (baik berupa dana, tenaga kerja, fasilitas, atau dukungan lainnya) yang secara spesifik dialokasikan dan digunakan langsung untuk melaksanakan program atau kegiatan yang bertujuan mengurangi atau mengentaskan kemiskinan di wilayahnya.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
10810081	Proporsi Wanita dan Anak Perempuan Mengalami Kekerasan Emosional oleh Pasangan atau Mantan Pasangan	[K01647] Perempuan; [K00811] Kekerasan Emosional;	Bagian dari perempuan dewasa dan anak perempuan yang mengalami kekerasan emosional oleh pasangan atau mantan pasangan.	[32010026] Wilayah; [32020020] Klasifikasi Wilayah;		Proporsi	-
10810052	Proporsi Wanita dan Anak Perempuan Mengalami Kekerasan Fisik oleh Pasangan atau Mantan Pasangan	[K01647] Perempuan; [K00812] Kekerasan Fisik;	Bagian dari perempuan dewasa dan anak perempuan yang mengalami kekerasan fisik oleh pasangan atau mantan pasangan.	[32010026] Wilayah; [32020020] Klasifikasi Wilayah;		Proporsi	-
10810082	Proporsi Wanita dan Anak Perempuan Mengalami Kekerasan Seksual oleh Pasangan atau Mantan Pasangan	[K01647] Perempuan; [K00813] Kekerasan Seksual;	Bagian dari perempuan dewasa dan anak perempuan yang mengalami kekerasan seksual oleh pasangan atau mantan pasangan.	[32010026] Wilayah; [32020020] Klasifikasi Wilayah;		Proporsi	-

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10310038	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK Sederajat antara Penduduk Disabilitas dan non-Disabilitas	[K01289] Partisipasi Sekolah; [K01979] Sekolah Menengah Atas (SMA); [K01981] Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);	Angka yang menggambarkan ketimpangan partisipasi antara penduduk dengan disabilitas dan tanpa disabilitas yang sedang duduk di bangku SMA/SMK sederajat secara umum, baik penduduk yang berusia SMA/SMK sederajat maupun tidak.	[32010026] Wilayah; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [10620071] Status Disabilitas;	-	Rasio	persen
10310040	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK Sederajat antara Penduduk Perempuan dan Laki-laki	[K01289] Partisipasi Sekolah; [K01979] Sekolah Menengah Atas (SMA); [K01981] Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);	Angka yang menggambarkan ketimpangan partisipasi antara penduduk perempuan dan laki-laki yang sedang duduk di bangku SMA/SMK sederajat secara umum, baik penduduk yang berusia SMA/SMK sederajat maupun tidak.	[32010026] Wilayah; [32020020] Klasifikasi Wilayah;	-	Rasio	persen
10310039	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK Sederajat antara Penduduk Perdesaan dan Perkotaan	[K01289] Partisipasi Sekolah; [K01979] Sekolah Menengah Atas (SMA); [K01981] Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);	Angka yang menggambarkan ketimpangan partisipasi antara penduduk di perdesaan dan perkotaan yang sedang duduk di bangku SMA/SMK sederajat secara umum,baik penduduk yang berusia SMA/SMK sederajat maupun tidak.	[32010026] Wilayah;	-	Rasio	persen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Belanja Pegawai; [K00481] Guru; [K02174] Tenaga Kesehatan;	Angka yang menggambarkan proporsi belanja pegawai daerah selain guru dan tenaga kesehatan terhadap total belanja APBD atau terhadap belanja wajib tertentu. Berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium	[32010026] Wilayah;	-	Rasio	persen
	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Belanja Pegawai; [K00481] Guru; [K02174] Tenaga Kesehatan;	Angka yang menggambarkan proporsi belanja pegawai daerah selain guru dan tenaga kesehatan terhadap total belanja APBD atau terhadap belanja wajib tertentu. Termasuk di dalamnya adalah gaji dan tunjangan pegawai non-guru/tenaga kesehatan, honorarium, kepala daerah dan wakilnya, DPRD, lembur, dan kompensasi lainnya.	[32010026] Wilayah;	-	Rasio	persen
	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum	Urusan Pemerintahan;	Proporsi anggaran yang dialokasikan untuk urusan pemerintahan umum—seperti perangkat pemerintahan, administrasi publik, keamanan, perencanaan, dan legislasi—dalam keseluruhan belanja APBD, setelah dikurangi belanja transfer	[32010026] Wilayah;	-	Rasio	persen
	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Rumah Sakit; Rujukan;	Angka yang menyatakan banyaknya rumah sakit rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana, dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar.	[32010026] Wilayah;	-	Rasio	-

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Rasio Guru SMA/SMK terhadap Murid Sekolah Menengah	Guru; Sekolah Menengah Atas; Sekolah Menengah Kejuruan; Murid; Pendidikan Menengah;	Perbandingan jumlah guru SMA/SMK terhadap jumlah murid SMA/SMK pada tahun ajaran tertentu.	[32010026] Wilayah;	-	Rasio	guru per 10000 murid
	Rasio Guru SMA/SMK terhadap Murid Sekolah Menengah	Guru; Murid; Sekolah Menengah Atas (SMA); Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);	Perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah murid di SMA/SMK	[32010026] Wilayah;	-	Rasio	guru per 10000 murid
	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	[K00809] Kekerasan; [K00091] Anak;	Perbandingan jumlah anak yang mengalami kekerasan terhadap jumlah penduduk usia anak <18 Tahun diwilayah tersebut (per 10.000 penduduk anak).	[32010026] Wilayah;		rasio	-
	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dihitung per 100.000 penduduk perempuan	[K00809] Kekerasan; [K01647] Perempuan; [K01642] Perdagangan Orang;	indikator statistik yang menunjukkan perbandingan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan (termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang/TPPO) dengan jumlah penduduk perempuan, lalu dinyatakan per 100.000 penduduk perempuan.	[32010026] Wilayah;		rasio	-
	Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah	Sekolah; Penduduk; Pendidikan Menengah;	Perbandingan jumlah sekolah pendidikan menengah terhadap total penduduk usia 16-18 tahun	[32010026] Wilayah;	-	Rasio	sekolah per 10000 penduduk
	Rasio Kewirausahaan Provinsi	[K02166] Pekerja Mandiri/Wirausaha; [K00117] Angkatan Kerja;	Perbandingan antara populasi wirausaha pemula ditambah populasi wirausaha mapan terhadap populasi angkatan kerja.	[32010026] Wilayah	-	Persentase	persen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Rasio Konektifitas Provinsi	Konektifitas;	Persentase ketersediaan jaringan transportasi antar Wilayah Kab/Kota dibandingkan dengat target kebutuhan jaringan transportasi	[32010026] Wilayah;	-	Rasio	-
	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang dilayani oleh Jaringan Irigasi	[K02359] Irigasi;	Luas kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.	[32020026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Rasio Luas Kawasan Pemukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir	[K00759] Kawasan Permukiman; Infastruktur Pengendalian Banjir;	Mengukur rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Provinsi.	[32020026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Rasio Luas Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai Rawan Abrasi, Erosi, dan Akresi yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengaman Pantai di WS Kewenangan Provinsi	[K00759] Kawasan Permukiman; [K01507] Pengaman Pantai;	Pemukiman yang yang terletak sepanjang pantai yang dimana rentan dengan abrasi, erosi dan akresi.	[32020026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Kontribusi; Pajak Daerah;	Persentase besaran kontribusi penerimaan Pajak Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Rasio pegawai Fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan	Jabatan Fungsional; Aparatur Sipil Negara (ASN);	Bagian dari total pegawai Pegawai Negeri Sipil (PNS) (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) yang menduduki jabatan fungsional	[32010026] Wilayah;	-	Rasio	
	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	Pegawai Negeri Sipil (PNS); Pendidikan Tinggi; Pendidikan Menengah; Pendidikan Dasar;	Perbandingan antara Jumlah pegawai menurut pendidikan Perguruan Tinggi dan Pegawai pendidikan menengah/dasar pada suatu daerah dalam waktu tertentu	[32010026] Wilayah;	-	Rasio	

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Rasio Siswa per ruang kelas SMA/MA/SMK/MAK	Siswa; Ruang kelas; [K01979] Sekolah Menengah Atas (SMA); [K01981] Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); MA; MAK;	Perbandingan antara jumlah siswa SMA/SMK terhadap jumlah ruang kelas.	[32010026] Wilayah;	-	Rasio	siswa per kelas
	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Koperasi aktif; [K01776] Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ;	Perbandingan antara nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu terhadap PDRB Atas Harga Berlaku.	[32010026] Wilayah	-	Persentase	persen
	Rasio Wirausaha Baru	Wirausaha Baru;	Perbandingan antara pelaku usaha yang berusaha sendiri dan pelaku usaha yang dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar, memiliki jiwa kewirausahaan serta mengelola minimal satu usaha inovatif yang terdaftar di sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik terhadap populasi angkatan kerja.	[32010026] Wilayah	-	Persentase	persen
10410165	Rata-rata Konsumsi Alkohol Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas per Kapita	[K00089] Minuman Keras; [K01476] Penduduk;	Rata-rata volume minuman keras/beralkohol yang dikonsumsi setiap penduduk berumur 15 tahun ke atas dalam setahun terakhir.	[32010026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [10620071] Status Disabilitas;	-	Rasio	liter per kapita

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
24510026	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara	[K02332] Wisatawan Mancanegara;	Rata-rata banyaknya hari yang dihabiskan oleh wisatawan mancanegara di Indonesia yang dihitung berdasarkan pergantian tanggal.	[32010026] Wilayah;	-	Rata-rata	hari
	Ratio Kinerja Lalu Lintas di Jalan Provinsi	Kepadatan Jalan;	Perbandingan antara volume lalu lintas aktual yang melewati suatu ruas jalan terhadap kapasitas maksimum jalan tersebut dalam kondisi standar.	[32010026] Wilayah;	-	Rasio	-
	Realisasi Pendapatan Retribusi Perhubungan	Pendapatan Daerah;	Jumlah pendapatan yang berhasil dikumpulkan dari pungutan retribusi sektor perhubungan oleh Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pendapatan dalam periode waktu tertentu (biasanya tahunan), dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam APBD.	[32010026] Wilayah;	-	Total	rupiah
	Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi (LPPD) Provinsi Kepuluan Riau	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;	Angka yang menggambarkan hasil pengukuran kinerja Pemerintahan Daerah	[32010026] Wilayah	-	Indeks	-
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	[K01753] Pola Pangan Harapan (PPH);	Angka yang menggambarkan jumlah dan komposisi atau ketersediaan pangan yang diperoleh dari perkalian persentase angka kecukupan energi setiap golongan bahan pangan dengan bobotnya.	[3200026] Wilayah;	-	Indeks	-
	Status Akreditasi RSJKO EHD	Akreditasi Rumah Sakit;	Status yang diberikan kepada RSJKO EHD berdasarkan nilai akreditasinya	-	-	-	-
	Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib	Akreditasi Rumah Sakit;	Pengakuan terhadap mutu pelayanan rumah sakit setelah dilakukan penilaian bahwa rumah sakit telah memenuhi standar akreditasi yang disetujui oleh Pemerintah.	-	-	-	-

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Status Rumah Sakit Pendidikan pada RSJKO Engku Haji Daud	Rumah Sakit Pendidikan;	Penilaian resmi terhadap rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran dan/atau kedokteran gigi, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi.	-	-	-	-
	Status Rumah Sakit Pendidikan pada RSUD Raja Ahmad Tabib	Status; Rumah Sakit Pendidikan;	Penilaian resmi terhadap rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran dan/atau kedokteran gigi, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi.	-	-	-	-
	Target Pendapatan	Target; Pendapatan Daerah;	Jumlah pendapatan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai sasaran atau rencana dalam satu periode anggaran (umumnya dalam satu tahun anggaran)	Jenis Pendapatan;	-	Jumlah	rupiah
	Terciptanya Lingkungan yang Aman dan Responsif terhadap Anak	Lingkungan; Aman; Responsif; Anak;	Kondisi dimana anak dapat tumbuh, berkembang, berpartisipasi, dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah, serta memperoleh respon cepat, tepat, dan sesuai dengan kebutuhan mereka dari keluarga, masyarakat, pemerintah, maupun lembaga layanan.	[32010026] Wilayah;		Persentase	persen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Terlaksananya Pelatihan PATBM	Pelatihan; PATBM;	kondisi dimana kegiatan peningkatan kapasitas bagi pengurus dan/atau anggota Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) telah dilaksanakan melalui pelatihan, bimbingan teknis, workshop, atau bentuk fasilitasi lain, dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan peran masyarakat dalam mencegah, mengidentifikasi, menangani, serta merujuk kasus kekerasan dan pelanggaran hak anak di tingkat desa/kelurahan.	[32010026] Wilayah;		Orang	orang
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi di Provinsi Kepulauan Riau	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi;	Dokumen pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.	[32010026] Wilayah; Tahun;	-	Jumlah	dokumen
	Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM lembaga penanganan anak	SDM; Lembaga; Anak;	Kondisi dimana sumber daya manusia (SDM) yang bekerja pada lembaga penanganan anak, baik pemerintah maupun non-pemerintah, telah memperoleh kegiatan penguatan kompetensi melalui pelatihan, bimbingan teknis, workshop, supervisi, atau bentuk pengembangan kapasitas lainnya, dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam memberikan layanan perlindungan dan pemenuhan hak anak.	[32010026] Wilayah;		Orang	orang
	Terlaksananya pertemuan penguatan jejaring Gugus Tugas TPPO dan SPPT PKKTP.	Gugus Tugas; Perdagangan Orang;	Banyaknya pertemuan koordinasi yang melibatkan seluruh unsur dan anggota gugus tugas pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.	[32010026] Wilayah;		Total	pertemuan

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Terlaksananya Rapat sosialisasi pencegahan perkawinan usia anak	Sosialisasi; Perkawinan; Anak;	kondisi dimana kegiatan pertemuan resmi yang bertujuan untuk menyampaikan informasi, edukasi, dan meningkatkan pemahaman masyarakat, aparat desa/kelurahan, lembaga pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pihak terkait lainnya mengenai dampak negatif perkawinan usia anak dan pentingnya pencegahan, telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan terdokumentasi.	[32010026] Wilayah;		kegiatan	kegiatan
	Terpeliharanya Aset EBT di Provinsi Kepulauan Riau	EBT (Energi Baru Terbarukan);	Sumber energi dari alam yang tidak habis dan ramah lingkungan, seperti energi surya, angin, air, panas bumi, dan biomassa.	[32010026] Wilayah; Tahun;	-	Jumlah	dokumen
	Tersedianya Data, Peraturan, Kebijakan Daerah terkait Konservasi Energi di Provinsi Kepulauan Riau	Konservasi Energi;	Dokumen kebijakan daerah terkait konservasi energi.	Tahun;	-	Jumlah	dokumen
	Tersedianya Lokasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota	[K01384] Pembangunan;	Luas Tanah Izin lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal		-		ha
	Tersedianya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	Pengembangan, Komunikasi Informasi Edukasi (KIE);	suatu proses penyampaian pesan, informasi yang diberikan kepada masyarakat atau pasangan usia subur oleh Penyuluh Keluarga Berencana atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana tentang program KB baik melalui komunikasi interpersonal, kelompok maupun menggunakan media.	[32010026] Wilayah;		Total	informasi
	Tersedianya Sistem Data Energi	Data Energi;	Dokumen data pemanfaatan energi.	[32010026] Wilayah; Tahun;	-	Jumlah	dokumen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Terselenggaranya Musrenbang RKPD Provinsi Kepulauan Riau	Terselenggaranya ; Musrenbang; RKPD;	Banyaknya jumlah Musrenbang RKPD Provinsi Kepulauan Riau yang diselenggarakan.	[32010026] Wilayah;	-	Total	kegiatan
	Tersusunnya Publikasi Profil Pembangunan Provinsi Kepuluauan Riau	Publikasi; Profil Pembangunan;	Banyaknya Publikasi yang memuat gambaran umum tentang keadaan geografi dan iklim,pemerintahan, serta perkembangan kondisi sosial-demografi dan perekonomian di Provinsi Kepuluauan Riau.		-	Total	buku
	Tertib Pemanfaatan Air Tanah	Pemanfaatan Air Tanah;	Menyelesaikan dokumen Pemanfaatan Air Tanah sesuai ketentuan.	Tahun;	-	Jumlah	kab/kota
10410172	Tingkat Insiden Malaria	[K01133] Malaria;	Angka yang menunjukkan endemisitas/tingkat penularan malaria yang digambarkan dengan kejadian malaria pada tiap 1.000 penduduk berisiko dalam satu tahun.	[32010026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin;	-	Tingkat	kejadian perseribu orang
10410170	Tingkat Insiden Tuberkulosis (TB)	[K02230] Tuberkulosis (TB);	Banyaknya kasus seseorang yang didiagnosis menderita tuberkulosis, baik kasus baru maupun kambuh pada suatu periode tertentu per 100.000 penduduk.	[32010026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin;	-	Tingkat	kasus perseratus ribu penduduk
	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Keamanan; [K00600] Informasi;	Perbandingan antara jumlah nilai per area keamanan informasi dengan jumlah area penilaian.	-	1. Kurang 2. Cukup 3. Baik 4. Sangat baik 5. Memuaskan	Persentase	persen
	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip	Keberadaan dan Keutuhan Arsip;	Bagian dari keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.	-	1. Level 0 (Belum ada) 2. Level 1 (Rintisan) 3. Level 2 (Berkembang) 4. Level 3 (Terdefinisi)	-	-

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					5. Level 4 (Terkelola) 6. Level 5 (Optimum)		
	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip sebagai Pertanggungjawaban setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara	Keberadaan dan Keutuhan Arsip;	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.	-	1. Level 0 (Belum ada) 2. Level 1 (Rintisan) 3. Level 2 (Berkembang) 4. Level 3 (Terdefinisi) 5. Level 4 (Terkelola) 6. Level 5 (Optimum)	-	-
	Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah; Tingkat Kematangan Perangkat Daerah;	Hasil penilaian terhadap efektivitas dan efisiensi perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang meliputi penilaian terhadap tata laksana (proses bisnis), budaya organisasi, dan inovasi yang menggambarkan organisasi perangkat daerah		-	Persentase	persen
	Tingkat kepatuhan terhadap regulasi	Kepatuhan; Regulasi;	Perkembangan jumlah lembaga yang mematuhi suatu regulasi pada periode tertentu terhadap periode sebelumnya.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja	Ketersediaan Arsip;	Urgensi ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	-	1. Level 0 (Belum ada) 2. Level 1 (Rintisan) 3. Level 2 (Berkembang) 4. Level 3 (Terdefinisi) 5. Level 4 (Terkelola)	-	-

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					6. Level 5 (Optimum)		
	Tingkat Maturitas SPIP	SPIP;	Penilaian Level Kematangan SPIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau oleh BPKP yang dilaksanakan setiap tahun: Ukuran kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam mencapai tujuan pengendalian intern	-	-	-	-
10210100	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	[K00117] Angkatan Kerja;	Bagian dari penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja, memiliki pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, dan sedang mencari pekerjaan/menganggur.	[32010026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin;	-	Persentase	persen
10210100	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	[K00117] Angkatan Kerja;	Bagian dari penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja, memiliki pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, dan sedang mencari pekerjaan/menganggur.	[32010026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin;		Persentase	persen
	Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG, PILPRES)	Pemilu; Pemilih;	Persentase Partisipasi pemilih dalam Pemilu Berbanding Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilu.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
10210083	Tingkat Pengangguran Terbuka	[K01510] Pengangguran; [K00117] Angkatan Kerja;	Bagian dari penduduk dalam angkatan kerja yang tidak terserap ke pasar kerja.	[32010026] Wilayah; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [10120066] Umur/Usia; [10620071] Status Disabilitas; [10320055] Tingkat Pendidikan;	-	Persentase	persen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Tingkat Penguasaan IPTEK disesuaikan dengan Karakteristik Daerah, dalam Rumpun Arah Pembangunan (IE) yang sama	IPTEK; Karakteristik; Daerah; Rumpun Arah Pembangunan (IE);	Ilmu yang mempelajari perkembangan teknologi berdasarkan pengetahuan. IPTEK juga bisa dipahami sebagai kumpulan pengetahuan ilmiah dan penerapan praktisnya dalam bentuk teknologi.		-		
10310057	Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SD Sederajat	[K02098] Tamat Sekolah; [K01977] Sekolah Dasar (SD);	Bagian dari populasi penduduk berusia 13 sampai dengan 15 tahun yang telah menamatkan pendidikan tingkat sekolah dasar atau sederajat.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
10310057	Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SD Sederajat	[K02098] Tamat Sekolah; [K01977] Sekolah Dasar (SD);	Bagian dari populasi penduduk berusia 13 sampai dengan 15 tahun yang telah menamatkan pendidikan tingkat sekolah dasar atau sederajat.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
10310058	Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SMA Sederajat	[K02098] Tamat Sekolah; [K01979] Sekolah Menengah Atas (SMA);	Bagian dari populasi penduduk berusia 16 sampai dengan 18 tahun yang telah menamatkan pendidikan tingkat menengah pertama atau sederajat.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
10310058	Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SMA Sederajat	[K02098] Tamat Sekolah; [K01979] Sekolah Menengah Atas (SMA);	Bagian dari populasi penduduk berusia 16 sampai dengan 18 tahun yang telah menamatkan pendidikan tingkat menengah pertama atau sederajat.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
10310059	Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SMP Sederajat	[K02098] Tamat Sekolah; [K01984] Sekolah Menengah Pertama (SMP);	Bagian dari populasi penduduk berusia 19 sampai dengan 21 tahun yang telah menamatkan pendidikan tingkat sekolah menengah atas atau sederajat.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
10310059	Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SMP Sederajat	K02098] Tamat Sekolah; [K01984] Sekolah Menengah Pertama (SMP);	Bagian dari populasi penduduk berusia 19 sampai dengan 21 tahun yang telah menamatkan pendidikan tingkat sekolah menengah atas atau sederajat.	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10210101	Tingkat Produktivitas Pekerja	[K01306] Pekerja;	Besaran kontribusi pekerja dalam pembentukan nilai tambah suatu produk dalam proses kegiatan ekonomi yang dihitung dengan pendekatan rasio antara produk berupa barang dan jasa dengan banyaknya tenaga kerja yang digunakan dalam satuan waktu tertentu.	[32010026] Wilayah; [22020004] Jenis Lapangan Usaha;	-	Rasio	rupiah per orang
	Tingkat Upah Riil terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) per Jam	Balas Jasa dan Upah Pekerja; Nilai UMP; Upah Riil;	Perbandingan upah riil pekerja terhadap upah minimum provinsi per jam	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Total Pendapatan Pemerintah Daerah sebagai Proporsi terhadap PDRB Menurut Sumbernya	Pendapatan Asli Daerah (PAD);	Banyaknya penerimaan Pendapatan Asli Daerah Daerah dengan Produk Domestik Regional Bruto	[32010026] Wilayah;	-	Persentase	persen
	Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau	Pengeluaran; Wisatawan;	Banyaknya seluruh biaya yang dikeluarkan oleh wisatawan selama melakukan perjalanan dan tinggal di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.	Jenis wisatawan; [32010026] Wilayah;	-	Total	milyar rp
10410187	Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	[K02240] Umur/Usia;	Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir.	[32010026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin;	-	Rata-rata	tahun
	Volume Ekspor Ikan	Ekspor; Ikan;	Jumlah ikan (dan/atau produk perikanan) yang dikirim ke luar negeri dalam periode tertentu	[32010026] Wilayah;	-	Total	ton
	Volume Produksi Budidaya Laut	Produksi; Budidaya; Laut;	jumlah hasil panen dari kegiatan budidaya organisme laut (seperti ikan, kerang, rumput laut, udang, teripang, dll.).	[32010026] Wilayah;	-	Total	ton
	Volume Produksi Budidaya Payau	Produksi; Budidaya; Payau;	Jumlah hasil panen dari kegiatan budidaya perikanan yang dilakukan di perairan payau (campuran air tawar dan air laut, biasanya di tambak atau muara)	[32010026] Wilayah;	-	Total	ton

Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan
				Penyajian	Isian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Volume Produksi Budidaya Rumput Laut	Produksi; Budidaya; Rumput Laut;	Jumlah hasil panen rumput laut dari kegiatan budidaya di laut atau perairan payau dalam periode waktu tertentu	[32010026] Wilayah;	-	Total	ton
	Volume Produksi Budidaya Tawar	Produksi; Budidaya; Tawar;	Jumlah hasil panen dari kegiatan budidaya perikanan yang dilakukan di perairan tawar (misalnya kolam, danau, waduk, sungai, atau keramba jaring apung di air tawar)	[32010026] Wilayah;	-	Total	ton
	Volume Produksi Olahan Perikanan	Produk; Hasil Perikanan;	Banyaknya produk dari proses pengolahan hasil perikanan.	[32010026] Wilayah; Tahun;	-	Total	ton
	Volume Produksi Perikanan Tangkap	Produksi; Penangkapan Ikan; Pembudidayaan Ikan;	jumlah hasil tangkapan ikan (dan biota laut lainnya yang bernilai ekonomis) yang diperoleh nelayan dalam kurun waktu tertentu.	[32010026] Wilayah;	-	Total	Ton

B. Konsep dan Definisi

Kode Konsep	Nama Konsep	Definisi Konsep
(1)	(2)	(3)
	Administrasi	Usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi.
	Administrasi keuangan	Penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan.
	Advokasi	Upaya untuk membela, mempengaruhi, atau mendukung sesuatu, seperti program, kebijakan, atau kepentingan tertentu.
	AIDS	Sekumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV.
K00019	Air Baku	Air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu.
K02340	Air Bersih	Air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah melalui proses pengolahan ataupun tanpa pengolahan.
	Air Laut	Air asin dalam jumlah yang banyak dan luas yang menggenangi dan membagi daratan.
	Air Limbah	Air sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan.
K00025	Air Minum	Air yang memenuhi syarat kesehatan (aspek kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan) dan dapat diminum, baik telah melalui proses pengolahan ataupun tidak.
K00160	Air Susu Ibu (ASI)	Susu yang diproduksi oleh manusia untuk konsumsi bayi dan merupakan sumber gizi utama bayi yang belum dapat mencerna makanan padat.
K00032	Air Tanah	Air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
	Akademik	Bidang kegiatan yang terkait langsung dengan ilmu pengetahuan, keterampilan kognitif, dan pembelajaran formal di satuan pendidikan.
K00035	Akreditasi	Pengakuan terhadap seseorang atau institusi yang diberikan oleh lembaga yang berwenang berdasarkan syarat kebakuan atau kriteria tertentu.
	Akreditasi Rumah Sakit	Pengakuan terhadap mutu pelayanan rumah sakit setelah dilakukan penilaian bahwa rumah sakit telah memenuhi standar akreditasi yang disetujui oleh pemerintah.

Kode Konsep	Nama Konsep	Definisi Konsep
(1)	(2)	(3)
	Akseptor IB	Ternak betina produktif yang dimanfaatkan untuk inseminasi buatan.
	Akses dan Layanan Kearsipan	Penyelenggaraan akses arsip statis sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan ANRI; termasuk fasilitas untuk kenudahan publik dan penegakan prinsip keutuhan serta keamanan arsip
	Akses Publik	Hak setiap orang untuk memperoleh, melihat, meminta salinan, menghadiri pertemuan publik, menyebarluaskan informasi publik melalui saluran yang tersedia.
	Akuntabilitas Kinerja	Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban yang dilakukan secara periodik.
	Akuntansi	Proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
	Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI)	Alat yang digunakan untuk mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan ikan.
	Alat dan Mesin Pertanian	Peralatan yang dioperasikan dengan motor penggerak ataupun tanpa motor penggerak untuk kegiatan budi daya pertanian seperti traktor, robot, alat kontrol, sprayer, fertigasi, fumigator, komputer, alat irigasi, dan mesin pengolah pakan.
	Alat Kesehatan	Instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
	Alat Penangkapan Ikan (API)	Sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
	Alat Peraga	Segala sesuatu yang digunakan sebagai media untuk memperjelas konsep atau materi pelajaran agar lebih mudah dipahami peserta didik.
	Alat Praktik	Sarana pendidikan berupa perangkat yang digunakan peserta didik untuk melakukan kegiatan praktik dalam rangka penguasaan kompetensi kejuruan atau keterampilan tertentu.
	Aman	Bebas dari bahaya; pasti; tidak meragukan; tidak mengandung risiko.
K00091	Anak	Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
	Anak Terlantar	Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
	Anak Usia Sekolah	Anak umur lebih dari 6 tahun sampai sebelum berusia 18 tahun.

Kode Konsep	Nama Konsep	Definisi Konsep
(1)	(2)	(3)
	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak yang menjadi korban pornografi, anak dengan HIV/AIDS, anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, anak korban kejahatan seksual, anak korban jaringan terorisme, anak penyandang disabilitas, anak korban perlakuan salah dan penelantaran, anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya, dan anak dengan masalah lainnya.
	Analisis	Penelitian terhadap suatu kejadian (artikel, tindakan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan sebenarnya (penyebab, keadaan, dan sebagainya).
	Analisis Jabatan	Proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan.
	Ancaman Bencana	Suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
	Anggaran Daerah	Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta ditetapkan dengan peraturan daerah.
	Anggaran Responsif Gender (ARG)	Anggaran yang merespon kebutuhan, permasalahan, aspirasi, dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender.
K00103	Anggaran;	Rencana untuk menunjukkan berapa banyak uang yang akan diperoleh seseorang atau organisasi dan berapa banyak yang akan mereka butuhkan atau dapat belanjakan.
	Anggota	Orang orang yang termasuk dalam suatu golongan/ kelompok, seperti dalam suatu organisasi,keluarga/perkumpulan.
	Angka Kecukupan Energi (AKE)	Rata-rata angka kecukupan energi masyarakat Indonesia per orang per hari pada tingkat konsumsi, mengacu pada standar yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
	Angka Kesembuhan	Angka yg menunjukkan persentase orang/hewan yang berhasil pulih dari penyakit setelah mendapat pengobatan.
	Angka Kredit	Nilai kuantitatif dari hasil kerja Pejabat Fungsional.
	Angka Melanjutkan	Proporsi penduduk pada kelompok umur tertentu yang telah tamat pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu dan melanjutkan bersekolah pada jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.
K00117	Angkatan Kerja	Penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengganggguran.

Kode Konsep	Nama Konsep	Definisi Konsep
(1)	(2)	(3)
	Angkutan Darat	Angkutan yang dilakukan di darat dengan menggunakan kendaraan seperti mobil, bus, kereta api, dan sebagainya.
K00123	Angkutan Laut	Angkutan kapal untuk penumpang, barang, atau hewan dalam satu atau lebih perjalanan antarpelabuhan.
	Angkutan Orang dalam Trayek	Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum yang dilakukan pada jaringan lintasan dan waktu pelayanan tertentu, sesuai izin trayek.
	Angkutan Penyeberangan	Angkutan yang melayani lintas penyeberangan dalam satu kesatuan jaringan jalan dan merupakan perpanjangan dari jalan.
	Angkutan Perairan	Kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.
	Angkutan Sungai dan Danau	Kegiatan angkutan orang dan/atau barang melalui alur sungai, danau, rawa, atau perairan sejenis dengan menggunakan kapal atau kendaraan air lainnya.
	Antar Kerja	Suatu sistem yang meliputi pelayanan informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan perantaraan kerja.
	Anti Retroviral (ARV)	Obat yang sifatnya tidak mematikan tapi menekan laju perkembangan HIV di dalam tubuh manusia.
K00147	Aparatur Sipil Negara	Alat kelengkapan negara, terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari.
K00147	Aparatur Sipil Negara (ASN)	Alat kelengkapan negara, terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari.
	APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)	Rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
	APIP	Pengawasan yang dilakukan oleh seperangkat aparat pengawasan secara fungsional baik dari internal pemerintah maupun dari eksternal pemerintah yang dilaksanakan berdasarkan atas tugas umum dari pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rancangan program dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sumarsono, 2010).
	Arah Kebijakan	Rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
	Arah Pembangunan	Konsep, rancangan, atau program yang menjadi panduan untuk melakukan proses perubahan dan pengembangan menuju tujuan tertentu dalam berbagai aspek kehidupan.

Kode Konsep	Nama Konsep	Definisi Konsep
(1)	(2)	(3)
	Asesmen	Kegiatan mengumpulkan, menganilis, dan menginterpretasi data atau informasi tentang peserta didik dan lingkungannya untuk memperoleh gambaran tentang kondisi individu dan lingkungannya sebagai bahan untuk memahami individu dan pengembangan program layanan bimbingan dan konseling yang sesuai dengan kebutuhan.
K00159	Aset	Semua kekayaan yang dipunyai oleh individu ataupun kelompok, baik berwujud maupun tidak berwujud, yang memiliki nilai akan manfaat bagi setiap orang atau perusahaan.
	Aset Tetap	Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
	Asia Power Index	Pengukuran tahunan kekuatan relatif negara-negara di kawasan Asia-Pasifik oleh Lowy Institute, yang mengevaluasi 27 negara berdasarkan delapan indikator, termasuk ekonomi, militer, hubungan ekonomi, pertahanan, pengaruh diplomatik, dan budaya, untuk memahami kemampuan mereka dalam membentuk dan merespons lingkungan eksternal.
	Asistensi	Kegiatan mengasistensi perencanaan sektoral menurut sektor-sektor bidang pendapatan, penanaman modal, perizinan, dan kepariwisataan.
	Atribut	Tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
	Audit	Identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi, pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
	Badan	Sekumpulan orang yang merupakan kesatuan untuk mengerjakan sesuatu.
	Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
	Bahan	Barang yang akan dibuat menjadi sesuatu.
K00194	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Zat, energi dan/atau komponen lain karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk lain.
	Bahan Habis Pakai	Bahan/barang yang sekali dipakai langsung habis, atau tidak dapat digunakan kembali untuk pemakaian berikutnya.

Kode Konsep	Nama Konsep	Definisi Konsep
(1)	(2)	(3)
	Bahan Medis Habis Pakai	Alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai (single use) yang daftar produknya diatur dalam peraturan perundang-undangan.
K00201	Bahasa	Sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri.
K00212	Bandar Udara	Kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan faSilitas penunjang lainnya.
K02346	Bangunan Gedung	Wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
	Banjir	Peristiwa meluapnya air sungai melebihi palung sungai.
K00713	Bank	Badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dalam masyarakat, terutama memberikan kreditdan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.
	Bantuan	Sesuatu yang dipakai untuk membantu; pertolongan.
	Bantuan Ekonomi Produktif	Bantuan yang diberikan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan, dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan.
	Bantuan Keuangan	Bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
	Bantuan sosial	Pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
	Barang Milik Daerah	Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
K00232	Bayi	Anak berusia/berumur kurang dari satu tahun.

Kode Konsep	Nama Konsep	Definisi Konsep
(1)	(2)	(3)
	BBI	Unit pelaksana teknis daerah (UPTD) di bawah pengelolaan dan pengawasan Dinas Kabupaten/Kota, yang bertugas melaksanakan penerapan teknik perbenihan ikan, distribusi benih, perbanyakan induk, pelestarian sumber daya ikan, serta pengendalian mutu benih melalui sertifikasi.”
	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
	Beban	Kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
K00237	Bekerja	Kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir, tidak termasuk orang yang melakukan pekerjaan tetapi tidak bermaksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan.
	Bela negara	Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin dan mewujudkan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya.
K00240	Belajar	Usaha yang dilakukan untuk memperoleh kepandaian atau ilmu.
	Belanja Daerah	Semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
	Belanja Pegawai	Berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah dan wakil kepala daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.
K00255	Bencana	Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam, dan/atau faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
	Bencana sosial	Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
	Benih	Tanaman atau bagian darinya yan digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.
	Benih Hortikultura	Tanaman hortikultura atau bagian darinya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.

Kode Konsep	Nama Konsep	Definisi Konsep
(1)	(2)	(3)
	Beragam, Bergizi Seimbang; dan Aman (B2SA)	Kaidah mengonsumsi pangan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan tubuh untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.
	Biaya penunjang operasional	Biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah.
	Biaya Personal	Biaya pendidikan yang dikeluarkan secara langsung oleh peserta didik atau orang tua/walinya untuk membiayai kebutuhan pribadi dalam proses pembelajaran.
	Bibit Ternak	Ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
	Bidang Pemerintah	Sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara, atau sekumpulan orang yang bertanggung jawab untuk menjalankan kekuasaan tersebut.
	Bidang Perekonomian	Ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan, yang mencakup keuangan, perindustrian, dan perdagangan, serta berhubungan dengan tata kehidupan perekonomian suatu negara atau organisasi.
	Bimbingan	Petunjuk (penjelasan) cara mengerjakan sesuatu; tuntunan; pimpinan / kata pendahuluan; kata pengantar.
	Biologi	Ilmu pengetahuan yang mempelajari makhluk hidup dan lingkungannya, mencakup struktur, fungsi, pertumbuhan, evolusi, persebaran, dan taksonomi.
	BPJS Ketenagakerjaan	Badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.
	BPK	Proses evaluasi laporan keuangan suatu entitas (perusahaan, organisasi, atau pemerintah) untuk memastikan bahwa laporan tersebut disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan material dan penyajian yang menyesatkan.
K02347	Buang Air Besar	Proses makhluk hidup membuang kotoran atau tinja padat atau setengah-padat yang berasal dari sistem pencernaan.
	Budaya	Hasil olah pikiran dan akal budi manusia yang mencakup adat istiadat, kebiasaan, serta pola hidup yang berkembang dan melekat dalam masyarakat.
	Budaya Kerja	Sikap dan perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan.
	Budidaya	Usaha yang bermanfaat dan memberi hasil.

Kode Konsep	Nama Konsep	Definisi Konsep
(1)	(2)	(3)
	Bunga	Imbalan jasa untuk penggunaan uang atau modal yang dibayar pada waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan, umumnya dinyatakan sebagai persentase dari modal pokok.
	Cabang Penyalur Alat Kesehatan	Unit usaha dari penyalur alat kesehatan yang telah memiliki pengakuan untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, penyaluran alat kesehatan dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
K00305	Cadangan Pangan Pemerintah	Persediaan bahan pangan pokok yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat disalurkan untuk keperluan konsumsi maupun dalam rangka stabilisasi harga pangan, penanganan masalah pangan/krisis pangan, pemberian bantuan pangan, kerja sama internasional, dan/atau keperluan lain yang ditetapkan pemerintah.
	Cagar Budaya	Warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
	Calon Pekerja Migran Indonesia	Setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
	Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik	Pedoman yang digunakan dalam rangkaian kegiatan distribusi dan pengendalian mutu yang bertujuan untuk menjamin agar produk Alat Kesehatan yang disalurkan senantiasa memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai tujuan penggunaannya.
	Cekungan Air Tanah	Suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologik, tempat semua kejadian hidrogeologik seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
	Cicilan	Uang untuk mencicil (utang dan sebagainya) / angsuran.
	Cold Storage	Fasilitas penyimpanan hasil perikanan pada suhu rendah untuk menjaga kualitas dan kesegarannya.
	Contoh/Sampel	Satu atau lebih satuan satuan (unit) hasil yang dipilih dari suatu kumpulan (populasi) satuan, atau bagian terpilih dari hasil dengan jumlah yang lebih besar.
	Daerah	Bagian permukaan bumi dengan karakteristik alam tertentu, lingkungan atau wilayah pemerintah, kawasan untuk tujuan khusus, atau tempat dengan keadaan atau peristiwa yang sama, seperti daerah tropis atau daerah penghasil kopra.
	Daerah	Bagian permukaan bumi dalam kaitannya dengan keadaan alam dan sebagainya yang khusus.
K00322	Daerah Aliran Sungai (DAS)	Suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami.

Kode Konsep	Nama Konsep	Definisi Konsep
(1)	(2)	(3)
	Dana	Semua aset atau benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh dengan cara apa pun dan dalam bentuk apa pun, termasuk dalam format digital atau elektronik, alat bukti kepemilikan, atau keterkaitan tidak terbatas pada kredit bank, cek perjalanan, cek yang dikeluarkan oleh bank, perintah pengiriman uang, saham, sekuritas, obligasi, bank draf, dan surat pengakuan utang.
	Dana Bagi Hasil	Bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
	Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Dana darurat	Dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa.
	Dana Pensiun	Badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.
K00349	Dana Perimbangan	Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
	Dana Pihak Ketiga	Dana yang dihimpun oleh bank dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito.
	Darurat	Keadaan sukar (sulit) yang tidak tersangka-sangka (dalam bahaya, kelaparan, dan sebagainya) yang memerlukan penanggulangan segera; keadaan terpaksa; keadaan sementara.
	Data	Keterangan yang benar dan nyata.
	Data	Informasi yang berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi.
	Data Kepegawaian	Informasi terkait identitas, status, riwayat jabatan, pendidikan, pelatihan, dan kinerja ASN yang digunakan dalam proses pengelolaan manajemen aparatur sipil negara.
	Data Kesehatan	Angka dan fakta kejadian berupa keterangan dan tanda-tanda yang secara relatif belum bermakna bagi pembangunan kesehatan.
	Daya Tarik Wisata	Segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Kode Konsep	Nama Konsep	Definisi Konsep
(1)	(2)	(3)
K00370	Demokrasi	Bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya; pemerintahan rakyat.
K00371	Desa	Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
K00371	Desa	Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
	Destinasi Pariwisata	Kawasan geografis yang berda dalam satu atau lebih wilayah admistratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksebilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
	Diklat	Proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil.
	Dikukuhkan	Menetapkan sesuatu secara resmi sehingga memiliki kekuatan meningkat.
	Diploma	Jenjang program pendidikan vokasi pada pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan keahlian terapan tertentu.
	Direkomendasikan	Dianjurkan, diperkuat, atau dipercaya.
K00388	Disabilitas	Keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama sehingga mengalami hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan, dan menyebabkan keterbatasan dalam melaksanakan tugas atau kegiatan sehari-hari, seperti kesulitan melihat, kesulitan mendengar, berbicara tidak lancar, kesulitan memahami/hilang ingatan/gangguan jiwa, lambat dalam belajar/memahami elajaran, keterbatasan berjalan, keterbatasan bergerak, kesulitan mengambil barang kecil menggunakan jari.
	Disabilitas Terlantar	Penyandang disabilitas meliputi anak dan orang dewasa yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga.
	Diseminasi	Penyebarluasan ide, gagasan, dan sebagainya.
	Diseminasi Informasi	Penyebaran informasi secara timbal balik dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat baik diminta atau tidak diminta, yang dapat dilakukan melalui media massa maupun bentuk media komunikasi lainnya dan/ atau lembaga-lembaga komunikasi masyarakat.
	Disiplin	Ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan (tata tertib dan sebagainya).

Kode Konsep	Nama Konsep	Definisi Konsep
(1)	(2)	(3)
	Disiplin Aparatur Sipil Negara	Kesanggupan aparatur sipil negara untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
K00391	Distribusi	Penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat.
K00397	Dokter	Lulusan pendidikan kedokteran yang ahli dalam hal penyakit dan pengobatan.
K00864	Dokumen	Perihal kepemilikan terhadap suatu aset atau dokumen, baik dilengkapi dengan bukti kepemilikan maupun tidak, yang berada dalam penguasaan seseorang atau usaha/perusahaan, termasuk di dalamnya aset atau dokumen yang masih dalam proses kredit, sedang digadaikan, atau digunakan oleh orang lain.
	Dokumentasi	Pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan.
	Dukungan Psikososial	Penyediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar sehingga meminimalkan tekanan, antara lain fasilitas olah raga, fasilitas bermain, fasilitas beribadah, fasilitas musik, fasilitas penyaluran hobi dan/atau tenaga konseling sehingga dapat meminimalkan masalah psikososial.
	Dunia Usaha	Usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
	Edukasi	Proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.
	Ekonomi Biru	Sebuah pendekatan untuk meningkatkan pengelolaan Kelautan berkeranjutan serta konservasi Laut dan sumber daya pesisir beserta efosistemnya dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan prinsip_ prinsip antara lain keterlibatan masyarakat, efisiensi sumber daya, meminimalkan limbah, dan nilai tambah ganda (muttipre reuenuel.
	Ekonomi Hijau	Sistem perekonomian yang rendah karbon, efisien sumber daya, dan inklusif secara sosial, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan tanpa merusak lingkungan.
K00417	Ekonomi Kreatif	Perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
K00418	Ekosistem	Keadaan khusus tempat komunitas suatu organisme hidup dan komponen organisme tidak hidup dari suatu lingkungan yang saling berinteraksi.

Kode Konsep	Nama Konsep	Definisi Konsep
(1)	(2)	(3)
	Ekosistem Ekonomi Kreatif	keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh pelaku ekonomi kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.
K00420	Ekspor	Kegiatan membawa keluar barang dari wilayah suatu negara, baik bersifat komersial maupun bukan komersial (barang hibah, sumbangan, hadiah), serta barang yang akan diolah di luar negeri dan hasilnya dimasukkan kembali ke negara tersebut secara legal.
	Ekspor Perikanan	Kegiatan penjualan dan pengiriman produk perikanan ke luar negeri.
	Ekuitas Dana	Kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
K00433	Emisi Gas Rumah Kaca	Lepasnya gas rumah kaca (GRK) ke atmosfer pada suatu area dalam jangka waktu tertentu.
	Eselon	Tingkatan jabatan struktural.
	Evakuasi	Pengungsian atau pemindahan penduduk dari daerah-daerah yang berbahaya, misalnya bahaya perang, bahaya banjir, meletusnya gunung api, ke daerah yang aman.
	Evaluasi	Penilaian
	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan tahunan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja dan pelaksanaan tugas pembantuan, sedangkan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) adalah proses penilaian yang dilakukan pemerintah pusat terhadap kinerja pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota, dan keseluruhan kegiatan tersebut merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya, termasuk tugas pembantuan, akuntabilitas, dan standar pelayanan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
	Evaluasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil	Proses penilaian secara sistematis terhadap hasil kerja dan perilaku kerja ASN dalam periode tertentu.
	Fakir Miskin	Orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
	Fasilitas	Sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi; kemudahan.
	Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi	Sarana yang digunakan untuk mendistribusikan atau menyalurkan sediaan farmasi, yaitu pedagang besar farmasi dan instalasi sediaan farmasi.

Kode Konsep	Nama Konsep	Definisi Konsep
(1)	(2)	(3)
K00443	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif, yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah.daerah, dan/atau masyarakat.
	Fasilitasi	Tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis,supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh menteri dalam negeri kepada provinsi serta menteri dalam negeri dan/atau gubernur kepada kabupaten/kota terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Upaya yang dilakukan oleh pemerintah (pusat/provinsi maupun perangkat daerah) untuk memberikan dukungan, bantuan, dan layanan administrasi agar kepala daerah dan DPRD dapat melaksanakan tugas, wewenang, hak, dan kewajibannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Kegiatan atau proses yang dilakukan untuk membantu, mendorong, dan mempermudah terwujudnya kerja sama antar daerah.
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kegiatan fasilitasi komunikasi yang dilaksanakan oleh asisten administrasi umum dan staf ahli.
	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi untuk pelaksanaan koordinasi dan kebutuhan operasional untuk mendukung kelancaran aktifitas/kegiatan asisten administrasi umum dan staf ahli meliputi belanja operasional kantor seperti makan minum tamu, makan minum rapat, alat tulis kantor, belanja alat dan bahan untuk kegiatan kantor, biaya perjalanan dinas.
	Fasilitasi Peraturan Gubernur dan kebijakan Perekonomian	Fasilitasi peraturan gubernur adalah proses pembinaan, pendampingan, dan/atau pengawasan yang dilakukan oleh kementerian dalam negeri (Mendagri) terhadap rancangan peraturan gubernur sebelum ditetapkan. Tujuannya agar peraturan gubernur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, selaras dengan kebijakan nasional, dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Mekanisme fasilitasi biasanya berupa review dokumen, pemberian masukan, atau evaluasi atas rancangan peraturan gubernur.
	Fasilitasi Sosial	Fasilitas yang disediakan oleh pemerintah atau swasta untuk masyarakat, seperti puskesmas, rumah sakit, kantor pemerintah, dan sekolah.
	Fisika	Ilmu tentang zat dan energi (seperti panas, cahaya, dan bunyi) Ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala alam dan interaksi materi, energi, ruang, dan waktu, dengan menggunakan metode ilmiah untuk memahami hukum-hukum dasar alam.
	Forum Anak	Wadah partisipasi anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok anak atau kelompok kegiatan anak atau perseorangan, dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat,keinginan, dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan

Kode Konsep	Nama Konsep	Definisi Konsep
(1)	(2)	(3)
	Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD)	Forum koordinasi pimpinan daerah dibentuk untuk menunjang urusan pemerintahan umum berada baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan.
	Fraksi	Kelompok dalam badan legislatif yang terdiri atas beberapa anggota yang sepaham dan sependirian.
	Frekuensi	Jumlah pemakaian suatu unsur bahasa dalam suatu teks atau rekaman.
	Fungsi	Jabatan (pekerjaan) yang dilakukan.
	Fungsi Penganggaran	Mencakup fungsi otorisasi, perencanaan, pengendalian, distribusi, alokasi, dan stabilisasi.
	Gaji / Upah	Hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
	Gangguan Trantibum	Semua kondisi yang disebabkan oleh perilaku tidak tertib yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan terganggunya kepentingan umum.
	Gelandangan	Orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
	Gemar Membaca	Sikap dan kebiasan positif individu atau masyarakat yang mencinta kegiatan membaca sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, yang ditumbuhkan melalui dukungan lingkungan, fasilitas, dan kebijakan yang mendorong literasi.
	Gender	Nilai, peran, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya masyarakat.
	GERMAS	Suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
	GMP (Good Manufacturing Practices)	Cara produksi yang baik (good manufacturing practices/GMP) adalah pedoman tata cara pengolahan hasil perikanan yang baik untuk menghasilkan produk yang bermutu, aman, dan layak konsumsi.
	Golongan	Kedudukan pegawai negeri sipil dalam sistem kepegawaian yang ditentukan berdasarkan pangkat, yang mencerminkan jenjang karier serta menjadi dasar penggajian dan hak-hak kepegawaian lainnya.

Kode Konsep	Nama Konsep	Definisi Konsep
(1)	(2)	(3)
	Griya Sehat	Fasilitas pelayanan kesehatan tradisional yang menyelenggarakan perawatan/pengobatan tradisional dan komplementer oleh tenaga kesehatan tradisional.
	Gugus Tugas	Sekelompok orang dengan keahlian atau kompetensi tertentu yang disatukan untuk melaksanakan tugas khusus atau memecahkan masalah tertentu, biasanya bersifat sementara.
K00481	Guru	Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
	Hak Anak	Bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, Keluarga, masyarakat, negara,pemerintah, dan pemerintah daerah.
	Hak Kekayaan Intelektual	Hak yang timbul dari hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.
	Harga Pangan	Salah satu indikator yang dapat menjelaskan kondisi ketahanan pangan suatu wilayah.
	Harmonisasi	Proses mencari keselarasan dan keserasian, atau dapat juga diartikan sebagai pengharmonisan itu sendiri, yaitu proses dan perbuatan mengharmoniskan atau membuat sesuatu menjadi harmonis.
	Hasil	Sesuatu yang diadakan atau dibuat oleh usaha (misalnya hasil sawah, hasil industri), pendapatan atau perolehan (misalnya pendapatan dari menyewakan rumah), serta akibat atau kesudahan dari suatu kegiatan atau peristiwa (misalnya hasil pertandingan).
	Hasil Fasilitasi Penataan	Memberikan fasilitas termasuk dokumen yang berisi hasil mengenai Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan, serta Dokumen Kawasan Strategis Nasional.
	Hasil monitoring	"Hasil" dari "pemantauan" atau "pemonitoran". "pemantauan" diartikan sebagai hasil memantau, yang berarti sebuah pengamatan, pencatatan, atau pengamatan cermat terhadap suatu hal untuk tujuan tertentu, seperti yang dijelaskan dalam definisi kata "pantauan".
	Hasil Perikanan	Ikan yang ditangani, diolah, dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa ikan hidup, ikan segar, ikan beku, dan olahan lainnya.
K00515	Hepatitis	Penyakit radang pada organ hati manusia yang dapat disebabkan oleh banyak faktor, salah satu yang terbanyak adalah infeksi virus.
	Hewan	Binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.

Kode Konsep	Nama Konsep	Definisi Konsep
(1)	(2)	(3)
	Hibah	Pemberian (dengan sukarela) dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.
	Higienis	berkenaan dengan atau sesuai dengan ilmu kesehatan; bersih; bebas penyakit.
	Hilang	Tidak ada lagi; lenyap; tidak kelihatan.
	HIV	Virus yang menyerang sel darah putih yang mengakibatkan menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia sehingga tubuh manusia mudah terserang oleh berbagai macam penyakit.
	Human Immunodeficiency Virus	Virus yang menyebabkan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS).
	Ideologi	Umpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat (kejadian) yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup.
	Ikan	Segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
	Ilegal Fishing	Kegiatan perikanan yang tidak sah / kegiatan perikanan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
K00583	Imunisasi Dasar	Upaya peningkatan kekebalan seseorang secara aktif yang diberikan kepada bayi berusia kurang dari satu tahun terhadap penyakit : a. Hepatitis B; b. Poliomyelitis; c. Tuberkulosis; d. Difteri; e. Pertusis; f. Tetanus; g. Pneumonia dan meningitis yang disebabkan oleh Hemophilus influenza tipe b (Hib); dan h. Campak.
	Indikator kinerja	Ukuran atau petunjuk yang digunakan untuk menilai pencapaian atau prestasi dari suatu kemampuan kerja.
	Industri	Seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
	Industri Kecil	Industri yang menghasilkan barang dan jasa dalam skala kecil, biasanya menggunakan tenaga kerja terbatas dan teknologi sederhana.
	Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Badan usaha yang memenuhi kriteria industri kecil atau industri menengah dan telah ditetapkan sebagai penerima fasilitas KITE IKM.

Kode Konsep	Nama Konsep	Definisi Konsep
(1)	(2)	(3)
	Industri Pariwisata	Kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
	Industri Rumah Tangga	Industri kecil yang dikelola oleh keluarga, menggunakan peralatan sederhana, dengan tenaga kerja terbatas, serta hasil produksinya biasanya untuk dipasarkan secara lokal.
	Industri Rumahan	Salah satu usaha mikro yang banyak menyerap tenaga kerja perempuan,namun dalam pelaksanaannya belum banyak mendapat dukungan dari para pihak terkait.
K00600	Informasi	Keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
K00600	Informasi	Keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
	Informasi Keuangan Daerah	Informasi anggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan.
	Informasi Publik	Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
	Informatika	Ilmu yang berkaitan dengan transformas fakta berlambang, khususnya dengan menggunakan peralatan otomatis (seperti komputer).
	Infrastruktur	Padanan kata dari prasarana.
	Infrastruktur pengendali banjir	Kegiatan menyediakan/membangun infrastruktur pengendali banjir sehingga dapat melindungi daerah irigasi dari resiko banjir.
	Inklusi keuangan	Ketersediaan akses dan pemanfaatan atas produk dan/atau layanan PUJK yang terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan masyarakat.
	Inseminasi Buatan (IB)	Teknik memasukkan mani atau semen ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting.
	Insentif	Tambahan penghasilan (uang, barang, dan sebagainya) yang diberikan untuk meningkatkan gairah kerja; uang perangsang.

Kode Konsep	Nama Konsep	Definisi Konsep
(1)	(2)	(3)
K00618	Internet	Jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit.
	Interoperabilitas Data	Kemampuan sistem elektronik dengan karakteristik yang berbeda untuk berbagi pakai data dan informasi secara terintegritas dalam penyelenggaraan dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
	Intervensi	Langkah atau tindakan yang dilakukan untuk memengaruhi atau memperbaiki suatu keadaan.
	Inventarisasi	Kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik negara/daerah.
K00622	Investasi	Penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.
	IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi)	Cara, metode, atau proses penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin Ilmu Pengetahuan yang bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan kualitas kehidupan manusia.
K02359	Irigasi	Usaha penyedian, pengaturan, dan pembuangan air untuk menujang pertanian.
	Isu Strategis	Masalah yang krusial dan dampaknya luas, yang memerlukan perencanaan dan penanganan yang matang menggunakan strategi yang tepat agar tidak menimbulkan efek negatif yang lebih besar terhadap tujuan yang ingin dicapai.
	Izin	Pernyataan mengabulkan (tidak melarang dan sebagainya); persetujuan membolehkan.
	Izin lokasi	Izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk keperluan usaha dan/atau kegiatannya.
	Izin Trayek	Persetujuan tertulis yang diberikan oleh pihak yang berwenang kepada badan usaha angkutan umum untuk menjalankan kendaraan di lintasan atau jalur tertentu dengan waktu dan tujuan yang telah ditetapkan.
K00633	Izin Usaha	Legalitas yang diberikan kepada wirausaha untuk memulai dan/atau menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
K00645	Jabatan Fungsional	Sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
	Jabatan Fungsional Analis Kebijakan	Jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan kegiatan meliputi analisis dan advokasi kebijakan.

Kode Konsep	Nama Konsep	Definisi Konsep
(1)	(2)	(3)
K01764	Jabatan Manajerial	Manajer merencanakan, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kegiatan secara menyeluruh dari suatu perusahaan, pemerintahan, dan organisasi lainnya, atau dari unit organisasi di dalamnya, dan merumuskan dan meninjau kembali kebijakan, hukum, ketentuan dan peraturan-peraturan.
K00656	Jalan	Prasarana transportasi yang dilakukan untuk lalu lintas orang (kendaraan dan sebagainya).
K00677	Jaminan Sosial	Suatu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
	Jaringan Infomasi Kearsipan Nasional (JIKN)	Jaringan yang memungkinkan akses publik terhadap arsip melalui simpul-simpul di daerah dan perguruan tinggi.
	Jaringan Intra	Jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
K00697	Jemaah Haji	Warga negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
K00704	Jenis Kelamin	Pembedaan makhluk hidup secara fisiologis menurut jenis dan kemampuan organ reproduksi.
	Jumlah	Banyaknya (tentang bilangan atau sesuatu yang dikumpulkan menjadi satu) dan hasil dari operasi aritmetika penambahan.
K00709	Kabupaten	Daerah swantara tingkat II yang dikepalai oleh bupati, setingkat dengan kota (madya) dan merupakan bagian langsung dari provinsi yang terdiri atas beberapa kecamatan.
	Kabupaten/Kota Layak Anak	Kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secaraterencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
	Kabupaten/Kota Sehat	Suatu kondisi kabupaten/kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah.
	Kalibrasi	Kegiatan peneraan untuk menentukan kebenaran nilai penunjukkan alat ukur dan/atau bahan ukur.
	Kampanye	Gerakan (tindakan) serentak (untuk melawan, mengadakan aksi, dan sebagainya).
	Kanker Leher Rahim	Keganasan yang terjadi pada leher rahim yang merupakan bagian terendah dari rahim yang menonjol ke puncak liang senggama.
	Kanker Payudara	Keganasan yang berasal dari sel kelenjar, saluran kelenjar, dan jaringan penunjang payudara, tidak termasuk kulit payudara.

Kode Konsep	Nama Konsep	Definisi Konsep
(1)	(2)	(3)
	Kantin	Ruang tempat menjual minuman dan makanan (di sekolah, di kantor, di asrama, dan sebagainya).
K02362	Kapal Penangkapan Ikan	Kapal perikanan yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan, serta memiliki alat penangkapan ikan.
	Kapasitas	Kemampuan atau keterampilan dalam melakukan sesuatu.
	Kapasitas Daerah	Kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan ancaman dan potensi kerugian akibat bencana secara terstruktur, terencana dan terpadu.
	Kapasitas terpasang	Keluaran atau kemampuan maksimum.
	Karakteristik	Tanda, ciri, atau fitur yang dapat digunakan sebagai identifikasi; kekhasan atau kualitas yang membedakan.
	Karakteristik Daerah	Ciri-ciri atau kekhasan-kekhasan yang dimiliki suatu wilayah, baik dari segi alam maupun sosial, yang membuatnya memiliki keunikan tersendiri dan berbeda dengan wilayah lain.
	Karantina	Tempat penampungan yang lokasinya terpencil guna mencegah terjadinya penularan (pengaruh dan sebagainya) penyakit dan sebagainya; Tern tempat untuk menahan ternak impor yang baru datang dari luar negeri, guna mencegah penyebaran penyakit menular.
	Karyawan	Orang yg bekerja pd suatu lembaga (kantor, perusahaan, dsb) dengan mendapat gaji (upah); pegawai; pekerja.
	Kas Daerah	Tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
	Kasus	Keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara; keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal.
	Kawasan Budi Daya Perikanan	Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budidaya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
K00745	Kawasan Hutan	Wilayah tertentu, yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
K00753	Kawasan Konservasi	Kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai suatu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Kode Konsep	Nama Konsep	Definisi Konsep
(1)	(2)	(3)
	Kawasan Kumuh	Kawasan permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat serta tidak memenuhi persyaratan penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
	Kawasan Perbatasan	Bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain.
K00759	Kawasan Permukiman	Bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
	Kawasan Rawan Bencana	Wilayah yang memiliki kondisi ataukarakteristik geologi, biologi, hidrologi, klimatologi, geografi, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
	Kawasan Strategis Pariwisata	Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
	Kawasan Tanpa Rokok	Ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.
	Keahlian	Kemahiran dalam suatu ilmu (kepandaian, pekerjaan).
	Keamanan Pangan Segar	Kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan Segar dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
	Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	Kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah PSAT dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
K02364	Keamanan Siber	Perlindungan terhadap aset informasi dengan mengatasi risiko yang muncul akibat adanya ancaman terhadap aset informasi yang diproses, disimpan, dan dikirimkan melalui sistem informasi yang saling terhubung.
	Keanekaragaman Hayati	Keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk daratan, lautan, dan ekosistem perairan lainnya, serta kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya, mencakup keanekaragaman dalam spesies, antar spesies, dan ekosistem.

Kode Konsep	Nama Konsep	Definisi Konsep
(1)	(2)	(3)
	Kearifan lokal	Nilai, norma, pengetahuan, dan praktik yang hidup, berkembang, serta dipertahankan oleh masyarakat setempat yang menjadi dasar dalam pengelolaan kehidupan sosial, budaya, dan lingkungan.
	Kebakaran	Peristiwa terbakarnya sesuatu (rumah, hutan, dan sebagainya).
	Keberadaan dan Keutuhan Arsip	Keberadaan dan keutuhan arsip adalah kondisi yang menunjukkan bahwa arsip berada pada tempat yang semestinya dan dalam keadaan utuh sebagaimana adanya sejak diciptakan, tidak berubah, tidak rusak, dan tidak berpindah secara tidak sah.
	Kebijakan	Rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan.
	Kebijakan Pengawasan	Serangkaian aturan, pedoman, atau prinsip yang ditetapkan untuk mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan, baik dalam konteks organisasi maupun pemerintahan, agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan berjalan secara efektif dan efisien.
	Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah adalah kebijakan dan/atau aturan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
	Kebijakan umum anggaran (KUA)	Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
	Kebudayaan	Segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
	Kebutuhan	Sesuatu yang diperlukan; keperluan.
	Kebutuhan Aparatur Sipil Negara	Proses penentuan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diperlukan berdasarkan analisa jabatan dan beban kerja untuk melaksanakan tugas instansi secara efektif dan efisien.
	Kebutuhan ASN secara nasional	Jumlah dan jenis Jabatan ASN yang dibutuhkan pada Instansi Pemerintah secara nasional.
	Kebutuhan ASN setiap Instansi Pemerintah	Jumlah dan jenis Jabatan ASN yang dibutuhkan pada masing masing Instansi Pemerintah.
	Kegemaran Membaca	Kesenanagan dan kebiasaan membaca yang ditanamakan, dibina, dan dikembangkan sejak dini dalam lingkungan keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.
	Kegiatan	Aktivitas; usaha; pekerjaan atau kekuatan dan ketangkasan (dalam berusaha); kegairahan.

Kode Konsep	Nama Konsep	Definisi Konsep
(1)	(2)	(3)
	Kegiatan Pelayanan Terpadu Penyakit Tidak Menular	Kegiatan penemuan dan penanganan kasus PTM dan manajemen faktor risiko PTM di FKTP secara terpadu.
	Kegiatan pusat	Kegiatan pokok atau kegiatan utama yang menjadi tumpuan atau fokus.
	Kegiatan Strategis, Pembangunan Wilayah dan dana alokasi khusus	Kegiatan yang bersifat strategis dan/atau kegiatan lain yang berdampak signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar, percepatan pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
K00803	Kehamilan	Masa ketika embrio atau janin (fetus) berkembang di dalam rahim seorang perempuan.
	Kejadian Luar Biasa	Timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus kepada terjadinya wabah.
K00809	Kekerasan	Setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
K00811	Kekerasan Emosional	Setiap perbuatan terhadap seseorang yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan yang ditunjukkan.
K00812	Kekerasan Fisik	Setiap perbuatan terhadap seseorang yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan yang ditunjukkan dengan perilaku menonjok, menendang, mencambuk atau memukul dengan benda, mencekik, membekap, mencoba menenggelamkan atau membakar dengan sengaja, menggunakan atau mengancam dengan pisau atau senjata lain.
K00813	Kekerasan Seksual	Perilaku seksual yang berbahaya atau tidak diinginkan yang dikenakan kepada seseorang, dapat berupa pelecehan seksual (sexual abuse), eksploitasi atau kekerasan seksual dengan hubungan (contact), dan eksploitasi seksual tanpa hubungan (non-contact).
K00824	Kelautan	Hal yang berhubungan dengan laut dan/atau kegiatan di wilayah laut yang meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
	Kelayakan	Perihal layak (patut, pantas); kepantasan; kepatutan.
	Kelembagaan	Hal-hal yang berkenaan dengan lembaga (organisasi, badan, dsb).
	Kelengkapan Pakaian Dinas	Kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

Kode Konsep	Nama Konsep	Definisi Konsep
(1)	(2)	(3)
	Kelompok	Kumpulan yang terdiri atas beberapa benda atau orang yang berada bersama-sama; golongan.
	Kelompok Tani Hutan	Kelompok—kumpulan individu dalam suatu wadah organisasi—yang terbentuk berdasarkan kebersamaan, keserasian, kesamaan profesi dan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya alam, dengan keinginan bekerja sama untuk meningkatkan usaha tanaman hutan dan kesejahteraan anggotanya.
	Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga.
K00829	Keluarga	Seseorang atau sekelompok orang yang terdaftar dalam kartu keluarga (KK), kecuali mereka yang terdaftar tetapi tidak tinggal bersama keluarga tersebut, serta mereka yang tidak memiliki KK, merujuk pada unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
K00830	Keluarga Berencana	Upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
	Keluarga Berkualitas	Keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
K00831	Keluarga Miskin	Keluarga yang mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari, meliputi kesulitan pangan (dari segi frekuensi, porsi, dan kecukupan gizi), kesulitan sandang, dan kesulitan perumahan (misal dari segi kelayakan).
	Keluarga pahlawan	Isteri/suami Pahlawan yang bersangkutan dan anak kandung/angkat menurut peraturan kepegawaian/perburuhan yang berlaku.
K00836	Kelurahan	Daerah pemerintahan yang paling bawah yang dipimpin oleh seorang lurah.
	Kemampuan APIP	Perubahan tingkat kapabilitas APIP yang diukur melalui penilaian kapabilitas APIP, sesuai standar yang ditetapkan oleh BPKP, dan dilakukan secara berkala untuk meningkatkan efektivitas pengawasan intern.
K00847	Kemiskinan	Suatu situasi saat seseorang tidak dapat atau tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum yang diperlukan untuk hidup layak dan bermartabat.
K00851	Kemitraan	Kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.
	Kenaikan Pangkat	Kenaikan tingkat pegawai dalam golongan ruang yang lebih tinggi sesuai ketentuan yang berlaku.

Kode Konsep	Nama Konsep	Definisi Konsep
(1)	(2)	(3)
	Kepadatan Jalan	Jumlah kendaraan atau orang yang berada di suatu ruas jalan tertentu dalam satuan panjang pada waktu tertentu.
	Kepala daerah	Gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau wali kota bagi Daerah kota.
	Kepala Sekolah	Kepala Sekolah/Madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin taman kanak-kanak/raudhotul athfal (TK/RA), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan (SMK/MAK), atau sekolah menengah atas luar biasa (SMALB) yang bukan sekolah bertaraf internasional (SBI) atau yang tidak dikembangkan menjadi sekolah bertaraf internasional (SBI).
	Kepatuhan	Hal patuh; ketaatan terhadap peraturan, perintah, dan sebagainya.
K00864	Kepemilikan aset atau Dokumen	Perihal kepemilikan terhadap suatu aset atau dokumen, baik dilengkapi dengan bukti kepemilikan maupun tidak, yang berada dalam penguasaan seseorang atau usaha/perusahaan, termasuk di dalamnya aset atau dokumen yang masih dalam proses kredit, sedang digadaikan, atau digunakan oleh orang lain.
	Kepemudaan	Berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
	Kependudukan	Hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, ciri utama, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama serta lingkungan penduduk tersebut.
	Kerangka	Garis besar; rancangan.
K00881	Kerawanan Pangan	Kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian masyarakat.
	Kerja Sama Antar Pemerintah	Kerja Sama Antar Daerah yang bertujuan untuk memenuhi urusan pemerintahan dan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat yang dikoordinasikan, didukung, dan dapat dimediasi oleh pihak tertentu, seperti OPD yang membidangi kerjasama dan OPD perencanaan, untuk memastikan kelancaran pelaksanaannya dan mengakomodasi kepentingan semua pihak yang terlibat.
	Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan

Kode Konsep	Nama Konsep	Definisi Konsep
(1)	(2)	(3)
		Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.
	Kerja Sama yang dievaluasi	Laporan kerja sama daerah antar pemerintah dan kerja sama dengan swasta atau pihak ketiga yang pada setiap tahun akan di monitoring dan di evaluasi secara menyeluruh.
	Kerjasama	Kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah, dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama.
	Kerjasama perbatasan	Dokumen rencana kerja tahunan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.
K00893	Kerukunan Umat Beragama	Keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar.
	Kerusuhan Massa	Kekacauan atau huru hara, keadaan yang tidak tentram yang di lakukan atau terjadi di tengah tengah orang banyak (kerumunan massa).
	Kesehatan	Keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.
	Kesehatan Reproduksi	Keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi.
	Kesejahteraan	Hal atau keadaan sejahtera; keamanan, keselamatan, ketenteraman.
	Kesejahteraan	Suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual, yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, ketentraman lahir batin-sehingga memungkinkan setiap warga negara untuk memenuhi kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial dengan menjunjung tinggi HAM dan kewajiban sesuai pancasila.
	Kesejahteraan Keluarga	Kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisikmateril guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
	Kesejahteraan Sosial	Kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
K00016	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3)	Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat bekerja.

Kode Konsep	Nama Konsep	Definisi Konsep
(1)	(2)	(3)
	Keselarasan	Kesesuaian atau kecocokan.
K00908	Kesetaraan Gender	Hak yang semestinya didapatkan agar laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan ikut berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan.
	Kesiapsiagaan	Serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
	Ketahanan	Hal atau keadaan tahan (dalam arti: kuat, kukuh, dan sebagainya).
	Ketahanan	Perihal tahan (kuat); kekuatan (hati, fisik); daya tahan.
	Ketahanan Nasional	Kondisi dinamis suatu bangsa yang meliputi ketangguhan dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam bentuk ancaman yang membahayakan integritas, identitas, serta perjuangan mewujudkan tujuan perjuangan nasional.
K00914	Ketahanan Pangan	Kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
	Ketahanan Pangan dan Gizi	Kondisi terpenuhinya kebutuhan Pangan dan Gizi bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan Gizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk mewujudkan Status Gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
K00915	Ketenagakerjaan	Segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
	Ketenagalistrikan	Segala sesuatu yang meyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
	Ketentraman	Kondisi dimana seseorang atau masyarakat berada dalam suasana tenang, damai, dan bebas dari gangguan yang dapat menimbulkan keresahan.
	Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum)	Suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
	Keterangan	Informasi atau penjelasan yang diberikan untuk memperjelas atau memberikan gambaran tentang sesuatu.

Kode Konsep	Nama Konsep	Definisi Konsep
(1)	(2)	(3)
	Ketermanfaatan Perpustakaan	Perwujudan dari fungsi dan tujuan perpustakaan sebagai srana pelayanan informasi, pendidikan, literasi, pelestarian budaya, dan rekreasi ilmiah yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kecerdasan bangsa.
	Ketersediaan Pangan	Kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
	Ketersedian Arsip	Pencipta arsip wajib menjamin ketersediaan arsip sebagai alat akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah.
	Ketertiban Umum	Keadaan tertib, teratur dan disiplin yang berlaku di masyarakat secara luas untuk menjaga keteraturan kehidupan bersama.
K00930	Ketidakcukupan Konsumsi Pangan/ Undernourishment	Kondisi seseorang secara reguler mengonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif dan produktif sesuai dengan standar energi minimum yang dibutuhkan menurut umur, jenis kelamin dan tinggi badan.
	Keuangan Daerah	Semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
	Kewaspadaan Dini	Serangkaian upaya/tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini.
	Kewenangan	Hak dan Kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.
	Kewilayahan	Konsep yang mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan penataan, pengelolaan, dan pemahaman mengenai daerah atau wilayah tersebut.
	Kewirausahaan	Aktivitas dalam menciptakan dan/atau mengembangkan suatu usaha yang inovatif dan berkelanjutan.
	KIE (Komunikasi, Infomasi, dan Edukasi)	Serangkaian kegiatan penyampaian pesan, penyebarluasan informasi, dan pemberian pemahaman kepada masyarakat guna meningkatkan literasi, kesadaran informasi, serta pelestarian dan pemanfaatan sumber daya infomasi secara bertanggungj awab, sesuai dengan fungsi layanan perpustakaan dan arsip sebagaimana diatur dalam perundang undangan.
	Kimia	Ilmu tentang susunan, sifat, dan reaksi suatu unsur atau zat. Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan tersebut.
	Kinerja Koperasi	Koperasi aktif yang mematuhi ketentuan RAT dan memiliki usaha yang baik.

Kode Konsep	Nama Konsep	Definisi Konsep
(1)	(2)	(3)
	Kinerja PNS	Hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada organisasi/unit sesuai dengan SKP dan Perilaku Kerja.
	Klarifikasi	Pengkajian dan penilaian terhadap Perda untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
K01754	Klinik	Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistis.
	Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok antar Waktu	Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja stabilisasi harga barang kebutuhan pokok.
	Koleksi Budaya	Merujuk pada benda-benda, karya, dan hasil kebudayaan yang bernilai sejarah, sosial, dan/atau kultural yang dilestarikan dan dikelola pleh negara, masyarakat, atau imdividu sebgai bagaian dari indentitas kebudayaan.
	Koleksi Perpustakaan	Segala jenis bahan pustaka yang dikumpulkan dan disediakan oleh perpustakaan untuk kepentingan pemustaka.
	Komisi Informasi	Lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.
	Kompetensi	Seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan, yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh Peserta Didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu.
K00952	Kompetensi Teknis	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesiflk berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
K00952	Kompetensi teknis	Pengetahuan, Keterampilan, dan sikap / perilaku yanga dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaiatan dengan bidang teknis jabatan.
	Kompetisi	Proses atau kegiatan perlombaan yang diikuti peserta didik atau masyarakat dalam rangka mengukur kemampuan, keterampilan, dan prestasi pada bidang tertentu.
	Kompilasi	Kumpulan yang tersusun secara teratur (tentang daftar informasi, karangan dan sebagainya).
K00955	Komputer	Alat elektronik otomatis yang dapat menghitung atau mengolah data secara cermat menurut instruksi, dan memberikan hasil pengolahan, serta dapat menjalankan sistem multimedia (film, musik, televisi, faksimile, dan sebagainya), biasanya terdiri atas unit pemasukan, unit pengeluaran, unit penyimpanan, serta unit pengontrolan.

Kode Konsep	Nama Konsep	Definisi Konsep
(1)	(2)	(3)
	Komunikasi	Pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami; hubungan; kontak.
	Komunikasi Informasi Edukasi (KIE)	Kegiatan komunikasi untuk meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku keluarga, masyarakat dan penduduk dalam Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	Metode yang digunakan untuk mengubah perilaku melalui penyebarluasan komunikasi, informasi, motivasi dan edukasi kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman yang sama, pengetahuan dan kemauan guna berpartisipasi secara aktif dalam upaya kesehatan.
	Komunitas	Kelompok organisme (orang dan sebagainya) yang hidup dan saling berinteraksi di dalam daerah tertentu.
	Komunitas Masyarakat	Kelompok individu (organisme manusia) yang hidup bersama dan berinteraksi dalam wilayah tertentu; juga disebut masyarakat atau paguyuban.
	Kondisi Khusus	Keterangan atau batasan makna yang lebih terperinci dan terbatas pada lingkup tertentu.
	Konektifitas	Tingkat keterhubungan antarwilayah, pusat pertumbuhan, dan jaringan transportasi untuk mendukung kelancaran arus barang, jasa, dan manusia.
K00962	Konflik Sosial	Perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
	Konservasi Energi	Upaya sistematis, terencana, dan terpadu guna melestarikan sumber daya energi dalam negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya.
	Konsultasi	Pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan (nasihat, saran, dan sebagainya) yang sebaik-baiknya.
	Konsultasi Publik	Bentuk diskusi atau pertukaran pikiran dengan masyarakat untuk mendapatkan arahan, nasihat, atau saran.
	Konsumen	Pemakai barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dan sebagainya).
	Konsumsi	Pemakaian barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dan sebagainya); Barang-barang yang langsung memenuhi keperluan hidup kita; makanan.
	Konten	Semua bentuk informasi yang dapat berupa tulisan, gambar, suara, animasi, atau kombinasi dari semuanya dalam bentuk digital, termasuk software aplikasi untuk diunduh (download).
	Kontribusi	Pemberian atau andil terhadap suatu kegiatan.

Kode Konsep	Nama Konsep	Definisi Konsep
(1)	(2)	(3)
	Koordinasi	Tindakan menyelaraskan (mengatur) kegiatan beberapa pihak agar teratur dan tidak saling bertentangan.
	Koordinasi dan Kebijakan Administrasi Pembangunan	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah adalah serangkaian kegiatan manajemen berupa monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang dimaksudkan untuk menjamin agar kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan RKPD.
	Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk membahas dan menunjang kelancaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di daerah. Kegiatan ini mencakup koordinasi untuk menjaga stabilitas daerah, penanganan konflik, pembinaan wawasan kebangsaan, serta koordinasi antarinstansi untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul di wilayah daerah.
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Badan Layanan Umum Daerah atau disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan.
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Maksud dari monitoring Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi adalah untuk memperoleh dan menyampaikan gambaran kondisi kinerja BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi secara keseluruhan kepada seluruh pemangku kepentingan.
	Koperasi Aktif	Koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota.
K00974	Korban	Orang yang mengalami penderitaan, meninggal dunia, atau hilang akibat kecelakaan, bencana, tindak kejahatan, dan/atau kondisi membahayakan manusia.
	Korban Bencana	Orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
	Korban Kekerasan	Seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana kekerasan.
K00989	Kota	Daerah swantara tingkat II yang dikepalai oleh wali kota, setingkat dengan kabupaten dan merupakan bagian langsung dari provinsi.
K00991	Kredit	Pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur.
	Krisis Kesehatan	Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, korban luka/sakit, pengungsian, dan/atau adanya potensi bahaya yang berdampak pada kesehatan masyarakat yang membutuhkan respon cepat di luar kebiasaan normal dan kapasitas kesehatan tidak memadai.
	Kualifikasi	Keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu (menduduki jabatan dan sebagainya).

Kode Konsep	Nama Konsep	Definisi Konsep
(1)	(2)	(3)
	Kualitas	Ukuran atau nilai dari mutu suatu benda, jasa, atau kemampuan seseorang.
	Kualitas Keluarga	Kondisi Keluarga yang ditentukan dari dimensi kualitas legalitas dan struktur, kualitas ketahanan fisik, kualitas ketahanan ekonomi, kualitas ketahanan sosial psikologi, dan kualitas ketahanan sosial budaya dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak.
	Kualitas teknis	Tingkat mutu atau derajat baik buruknya sesuatu yang ditinjau dari segi teknik, cara, atau metode tertentu dalam suatu bidang.
	Kuartal Pertama / Triwulan Pertama	Periode 1 Januari hingga 31 Maret (Triwulan Pertama) dalam laporan pemerintahan, yang mencerminkan pelaksanaan program dan kegiatan serta penyerapan anggaran selama tiga bulan pertama tahun fiskal.
	Kunjungan Tamu	Kegiatan kedatangan seseorang atau sekelompok orang ke suatu instansi, lembaga, atau wilayah tertentu dalam rangka menjalankan tugas, menjalin hubungan kerja sama, memperoleh informasi, melakukan studi banding, atau kepentingan lainnya yang bersifat resmi maupun tidak resmi.
	Kurikulum	Menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
K01012	Kusta	Penyakit menahun yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterum leprae yang menyerang kulit dan saraf yang secara perlahan-lahan menyebabkan kerusakan pada anggota tubuh.
	Laboratorium	Tempat atau kamar dan sebagainya tertentu yang dilengkapi dengan peralatan untuk mengadakan percobaan (penyelidikan dan sebagainya).
	Laboratorium Bahasa	Sarana penunjang pembelajaran bahasa yang dilengkapi dengan perangkat teknologi dan media audio-visual untuk meningkatkan keterampilan berbahasa peserta didik, baik lisan maupun tulisan.
	Laboratorium Biologi	Ruang yang dilengkapi dengan peralatan dan bahan khusus yang digunakan untuk kegiatan praktik, eksperimen, pengamatan, dan pembelajaran dalam bidang Biologi.
	Laboratorium Fisika	Ruang yang dilengkapi dengan peralatan, instrumen, dan bahan praktik yang digunakan untuk kegiatan eksperimen, pengamatan, dan pembelajaran dalam bidang Fisika.
	Laboratorium Kimia	Ruang yang dilengkapi dengan peralatan, bahan, dan instrumen khusus yang digunakan untuk kegiatan eksperimen, praktik, dan pengamatan dalam bidang Kimia.
	Laboratorium Komputer	Ruang yang dilengkapi dengan perangkat komputer, jaringan, dan sarana pendukung lainnya yang digunakan untuk pembelajaran teknologi informasi, komunikasi, serta keterampilan komputer.

Kode Konsep	Nama Konsep	Definisi Konsep
(1)	(2)	(3)
K01019	Lahan	Bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
K01031	Lahan Kritis	Lahan yang tidak mampu lagi berperan sebagai unsur produksi pertanian, baik sebagai media pengatur tata air maupun sebagai perlindungan alam lingkungan.
K01049	Lalu Lintas	Perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain (dengan jalan pelayaran, kereta api, dan sebagainya).
K01055	Lanjut Usia	Seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas.
	Lanjut Usia Terlantar	Organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
	Laporan	Pemberitahuan atau keterangan tertulis maupun lisan yang berisi data, fakta, atau berita mengenai suatu hal sebagai bentuk penyampaian informasi.
	Laporan administrasi	Pemberian bahan atau keterangan secara objektif dan berdasarkan kenyataan di bidang personel, material, keuangan, dan tata kantor .
	Laporan Analisis Kondisi Daerah	Sebuah berita atau laporan yang berisi hasil penguraian atau penyelidikan terhadap suatu daerah, yang dilakukan dengan menelaah setiap bagian dan hubungan antar bagian untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai keadaan, sebab, atau duduk perkara di daerah tersebut.
	Laporan Evaluasi Kinerja BUMD dan BLUD	BUMD dan BLUD mempunyai tugas dalam pembinaan dan pengembangan bidang BUMD dan BLUD seperti pengumpulan bahan perumusan kebijakan bidang BUMD dan BLUD, peningkatan kinerja BUMD dan BLUD sesuai hasil monitoring, pemantauan dan evaluasi.
	Laporan Hasil Pengawasan	Media komunikasi resmi yang digunakan untuk menyampaikan hasil audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya.
	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
	Laporan Kinerja pada Website Kepri	Laporan Kinerja adalah ikhtiar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/ APBD).

Kode Konsep	Nama Konsep	Definisi Konsep
(1)	(2)	(3)
	Laporan Operasional (LO)	Disebut dengan nama Laporan Kinerja Keuangan dan bersifat opsional – dalam SAP Berbasis Akrual menjadi salah satu PSAP untuk pelaporan atas pendapatan dari sumber daya ekonomi yang diperoleh dan beban untuk kegiatan pelayanan pemerintahan.
	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran, yang memuat capaian kinerja makro dan urusan pemerintahan, serta realisasi anggaran, dan inovasi daerah, yang disampaikan Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat sebagai bentuk akuntabilitas publik dan dasar evaluasi kinerja pemerintahan daerah.
K01063	Laut	Ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
	Layanan	Pelayanan, hasil pekerjaan melayani; bantuan atau fasilitas yang diberikan.
	Layanan	Usaha untuk membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan orang lain.
	Layanan Informasi	Pelayanan informasi yang diberikan suatu kantor atau perusahaan melalui lisan, telepon, atau surat sebagai jawaban atas berbagai hal yang ditanyakan mengenai informasi.
	Layanan perpustakaan	Proses pemberian jasa dan /atau bantuan oleh perpustakaan kepada pemustaka dalam rangka memanfaatkan dan mendayagunakan koleksi perpustakaan.
	Legal	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum.
	Legalisasi	Pengesahan (menurut undang-undang atau hukum).
K02366	Lembaga	Badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha.
	Lembaga kearsipan	Lembaga yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam engelolaan arsip yang meliputi pembinaan, pengelolaan, penyelamatan, dan pelayanan arsip.
	Lembaga Kerjasama Tripartit	Forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh, dan Pemerintah.
	Lembaga Kesejahteraan Sosial	Organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
	Lembaga Keuangan	Semua badan yang melalui kegiatan - kegiatannya dibidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat.

Kode Konsep	Nama Konsep	Definisi Konsep
(1)	(2)	(3)
	Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Lembaga milik pemerintah atau lembaga masyarakat berbadan hukum yang melakukan upaya peningkatan kualitas hidup Anak baik dalam pelaksanaan kebijakan, kegiatan, maupun administrasi dalam penyelenggaraan layanan.
	Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	Lembaga milik pemerintah atau lembaga masyarakat berbadan hukum yang melakukan upaya Perlindungan Perempuan darivkekerasan, baik dalam pelaksanaan kebijakan, kegiatan, maupun administrasi dalam penyelenggaraan layanan.
	Lembaga Profesi Aparatur Sipil Negara	Wadah bagi ASN untuk mengembangkan profesionalisme, menjaga kode etik serta mewujudkan jiwa korps ASN sebagai pemersatu bangsa.
	LHKAN, SPT Tahunan	ASN memiliki kewajiban melaporkan harta kekayaannya dengan 2 mekanisme, yakni Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan SPT Tahunan.
	LHKPN	Laporan yang wajib disampaikan oleh penyelenggara negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun. Kewajiban lain yang menyertai LHKPN adalah mengumumkan harta kekayaan dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaannya. Tujuan dari pembuatan LHKPN adalah sebagai bagian dari wewenang yang dimiliki KPK yaitu melaksanakan langkah atau upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi atara lain dengan melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN.
K01097	Limbah	Bahan/barang sisa atau bekas dari suatu kegiatan dan/atau proses produksi yang fungsinya sudah berubah dari aslinya, termasuk sampah, kecuali yang dapat dimakan atau diminum oleh manusia dan/atau hewan.
	Lingkungan	Segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan memengaruhi perkembangan kehidupan manusia.
K01105	Lingkungan Hidup	Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
	Link and match (terhubung)	Kebijakan penyelarasan dan keterkaitan antara dunia pendidikan, khususnya pendidikan vokasi dan kejuruan, dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) sehingga lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
	Listrik	Daya atau kekuatan yag ditimbulkan pleh adanya pergesekan atau melalui proses kimia, dapat digunakan untuk menghasilkan panas atau cahaya, atau untuk menjalankan mesin.
	Literasi	Kemampuan untuk mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan/atau bebicara.
	Literasi Membaca	Kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi dari berbagai teks untuk tujuan tertentu.

Kode Konsep	Nama Konsep	Definisi Konsep
(1)	(2)	(3)
	LKPJ	Dokumen yang disusun oleh pemerintah daerah (termasuk Bappeda) untuk melaporkan kepada DPRD mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah selama satu tahun anggaran, mencakup penjabaran APBD, hasil pelaksanaan program dan kegiatan, serta capaian kinerja secara keseluruhan. Bappeda sendiri bertugas untuk menyusun laporan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD dan masyarakat.
K01115	Logistik	Bagian dari rantai pasok/supply chain yang menangani arus barang, arus informasi dan arus uang melalui proses pengadaan/procurement, penyimpanan/warehousing, transportasi/transportation, distribusi/distribution, dan pelayanan pengantaran/delivery services sesuai dengan jenis, kualitas, jumlah, waktu dan tempat yang dikehendaki konsumen, secara aman, efektif dan efisien, mulai dari titik asal/point of origin sampai dengan titik tujuan/point of destination.
	Lokasi Prioritas (Lokpri)	Wilayah yang ditetapkan sebagai lokasi prioritas pembangunan dan pengembangan, yang biasanya berada di kawasan perbatasan atau daerah yang memiliki potensi strategis.
	Lokus pembudayaan	Tempat atau istitusi yang menjadi pusat berlangsungnya proses penanaman, pembiasaan, dan penguatan nilai, sikap, atau budaya tertentu, seperti karakter, literasi, atau budi perkerti.
	Lomba	Kegiatan perlombaan yang diselenggarakan untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, serta menumbuhkan semangat berprestasi peserta didik.
	Luas	Lebar atau lapang; bidang yang terbentang; ukuran permukaan suatu bidang (dapat diukur dalam satuan seperti meter persegi, hektare, dsb).
	Luas Areal	Luas permukaan atau ukuran suatu wilayah.
	Luka	Belah (pecah, cedera, lecet, dan sebagainya) pada kulit karena kena barang yang tajam dan sebagainya.
	Lulus	Berhasil (dalam ujian); dapat melalui dengan baik (dalam menghadapi segala cobaan).
	Lumbung Pangan Masyarakat (LMP)	Sarana fisik untuk penyimpanan pangan guna mewujudkan cadangan pangan masyarakat dan usaha ekonomi produktif masyarakat.
	Madrasah Aliyah	Sekolah agama (Islam) tingkat menengah atas.
	Madya	Sedang; pertengahan.
	Makan Minum Pasien	Makanan dan minuman yang diberikan kepada pasien yang pengadaannya dapat berupa bahan makanan basah, bahan makanan kering dan/atau dalam bentuk makanan jadi.

Kode Konsep	Nama Konsep	Definisi Konsep
(1)	(2)	(3)
K01131	Makanan	Segala zat, baik mentah maupun yang telah diproses, yang dimaksudkan untuk konsumsi manusia; termasuk minuman dan zat yang digunakan dalam pembuatannya, termasuk bahan yang telah rusak dan karenanya tidak lagi layak untuk dikonsumsi manusia, tetapi tidak termasuk kosmetik, tembakau, atau zat yang hanya digunakan sebagai obat.
	Maksimum	Nilai terbesar yang dapat dicapai dalam kondisi tertentu.
K01133	Malaria	Penyakit infeksi yang banyak dijumpai di daerah tropis, disertai gejala demam dan turun naiknya suhu yang tidak teratur, ditularkan oleh nyamuk anofeles.
	Manajemen	Manajemen: (1) penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran; (2) pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan organisasi.
	Manajemen layanan	Rangkaian proses pengelolaan layanan yang mencakup perencanaa, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan kepada pemustaka atau pengguna arsip memenuhi standar kualitas, efektif, efesiaen, dan memberikan kepuasan bagi pengguna.
	Manajemen Risiko	Penilaian yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko.
	Manajemen usaha kelompok	Pengelolaan kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan secara bersama oleh sekumpulan orang dengan tujuan tertentu, dengan memanfaatkan sumber daya secara efektif.
	Masalah Hukum	Persoalan atau hal yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun ketentuan hukum yang berlaku, yang perlu diselesaikan.
	Masyarakat	Seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
	Materi	Segala sesuatu yang menjadi isi atau pokok bahasan (pelajaran, ceramah, laporan, dsb).
K02358	Maturitas SPIP	Maturitas SPIP mengacu pada sejauh mana suatu entitas pemerintah telah menerapkan dan menjalankan sistem pengendalian internalnya.
	MCP KPK	Platform pengawasan dan monitoring pencegahan korupsi yang dikembangkan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Sistem ini digunakan untuk memantau capaian kinerja pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) dalam menerapkan program-program pencegahan korupsi secara terukur dan terstruktur.
	Mebel	Perabot yang digunakan sebagai kelengkapan rumah, sekolah, atau kantor yang dapat dipindahkan, seperti meja, kursi, lemari, dan tempat tidur.

Kode Konsep	Nama Konsep	Definisi Konsep
(1)	(2)	(3)
	Media	Alat (sarana) komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk.
	Media	Sarana, perantara, atau alat untuk menyampaikan sesuatu.
	Media Komunikasi Publik	Saluran informasi yang digunakan dalam proses komunikasi publik baik secara langsung maupun tidak langsung.
K01152	Mediasi	Proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.
	Medical Check Up (MCU) rutin / berkala	Pemeriksaan kesehatan pada waktu-waktu tertentu terhadap tenaga kerja yang dilakukan oleh dokter.
	Medis	Berkaitan dengan bidang kedokteran.
	Meninggal	Mati; Berpulang.
	Mental Spritual	Kegiatan yang ditujukan untuk mendorong kemauan dan kemampuan serta pembinaan ketakwaan.
K01173	Merokok	Aktivitas membakar tembakau maupun cerutu kemudian menghisap asapnya baik menggunakan rokok maupun pipa; setiap hari maupun kadang-kadang.
	Mesin/peralatan	Perangkat atau alat teknis yang digunakan untuk mengubah tenaga atau mempermudah pekerjaan dalam kegiatan operasional atau produksi, mencakup unit mesin dan alat bantu lainnya yang bekerja secara sistematis.
	Metadata Indikator	Instrumen untuk menyusun Metadata Indikator Statistik yang memberikan informasi dari indikator yang dihasilkan.
	Metode Kompetitif	Persaingan sehat dan terbuka dimana pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat antara penyedia yang setara, serta mengikuti ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
	Mikrofilaria Rate (Mf) 1% atau Lebih	Indikator sebagai kabupaten/kota endemis filariasis yang dihitung dengan cara membagi jumlah sediaan yang positif mikrofilaria dengan jumlah sedian darah yang diperiksa dikali seratus persen.
	Mitra	Teman sekerja; rekan; pihak yang bekerja sama dalam suatu usaha atau kegiatan.
	Modal Manusia	Konsep ekonomi yang mengacu pada nilai ekonomi dari aset tak berwujud yang dimiliki oleh orang-orang, seperti pendidikan, pelatihan, dan kesehatan, yang dapat meningkatkan potensi dan produktivitas mereka.
	Monitoring / Pemantauan	Kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Kode Konsep	Nama Konsep	Definisi Konsep
(1)	(2)	(3)
	Muatan	Barang yang diangkut dengan kendaraan atau isi kapal dan sebagainya.
	Muatan lokal	Muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
	Murid	Orang (anak) yang sedang berguru (belajar, bersekolah).
	Musrenbang	Forum untuk menyusun rencana pembangunan yang melibatkan partisipasi berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah dan masyarakat.
K01202	Musyawarah	Pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah.
	Mutasi	Pemindahan pegawai dari satu jabatan ke jabatan lain.
	Mutasi Aparatur Sipil Negara	Perpindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari satu unit kerja ke unit kerja yang lain di dalam atau antar instansi pemerintah dalam satu daerah atau antar daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara	Alamat internet dari Instansi yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
K01208	Narkotika	Zat atau obat, termasuk yang berasal dari tanaman, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menyebabkan mati rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan.
	Nasional	Segala hal yang bersifat kebangsaan, atau berkaitan dengan suatu bangsa, yang meliputi kebudayaan hingga cita-cita.
	Naskah Akademik	Naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapatdipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang,Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
	Naskah dinas	Dokumen resmi yang digunakan dalm penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan administrasi negara.
	Nelayan	Orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
	Neraca Bahan Makanan	Salah satu alat yang digunakan untuk menganalisis situasi ketersediaan pangan di suatu negara/wilayah dalam kurun waktu tertentu berdasarkan aspek penyediaan dan pemanfaatan pangan.

Kode Konsep	Nama Konsep	Definisi Konsep
(1)	(2)	(3)
	Nilai Belanja	Nilai belanja operasi (satuan rupiah) diluar belanja pegawai yang meliputi belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; dan belanja bantuan sosial dan nilai belanja modal yang pelaksanaanya dilakukan melalui metode pemilihan penyedia barang/jasa.
	Nomor register	Pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan. .
	Non Kebakaran	Kondisi/Situasi yang tidak terkait dengan kebakaran atau tidak melibatkan api.
	Non Medis	Tidak berkaitan dengan ilmu pengobatan (kedokteran).
	Non-Akademik	Bidang kegiatan yang tidak langsung terkait dengan mata pelajaran, tetapi mendukung pengembangan potensi, bakat, minat, kepribadian, dan keterampilan sosial peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler.
	Nonperizinan	Segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
	Numerasi	Kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari dalam berbagai jenis konteks yang relevan.
K01238	Obat	Bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia atau hewan.
	Obat Esensial	Obat yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat terbanyak dan tercantum dalam Daftar Obat Esensial Nasional.
	Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)	Wujud gagasan, praktik, objek, pengetahuan, manuskrip, adat istiadat, alat, teknologi, ritus, dan situs yang mengandung nilai budaya yang hidup dalam masyarakat dan/atau yang pernah hidup dan menjadi bagian dari identitas bangsa.
K01253	Olah raga	Segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
K01253	Olahraga	Segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
	Operasional	Secara operasi; bersifat operasi; berhubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.
	Opini pengawasan pelayanan publik Ombudsman (Opini)	Pernyataan formal ombudsman kepada penyelenggara sebagai hasil penilaian.

Kode Konsep	Nama Konsep	Definisi Konsep
(1)	(2)	(3)
	Optimasi Lahan Pertanian	Usaha meningkatkan pemanfaatan sumber daya lahan pertanian menjadi lahan usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan melalui upaya perbaikan dan peningkatan daya dukung lahan, sehingga dapat menjadi lahan usaha tani yang lebih produktif.
	Orang Dengan Gangguan Jiwa	Orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.
	Orang dengan HIV dan AIDS	Orang yang sudah terinfeksi HIV.
	Orang Tua	Ayah dan/atau ibu kandung,atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
K01263	Organisasi	Suatu sistem perserikatan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama secara terencana, terpadu dan terarah untuk mencapai tujuan tertentu, baik formal (berbadan hukum) maupun tidak, serta biasanya dibingkai dalam suatu keanggotaan dan kepengurusan (memiliki ketua, sekretaris dan bendahara) dan memiliki aturan-aturan tertentu.
	Organisasi Masyarakat (Ormas)	Organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
	Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	Semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian tumbuhan.
K01276	Pajak	Pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya.
	Pajak Air Permukaan	Pajak atas Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi dan/atau badan.
	Pajak air tanah	Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
	Pajak Alat Berat	Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
	Pajak Daerah	Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
	Pajak Kendaraan Bermotor	Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
	Pajak Pokok	Pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

Kode Konsep	Nama Konsep	Definisi Konsep
(1)	(2)	(3)
	Pakaian dinas	Seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
	Pakan	Makanan ternak (hewan, ikan piaraan).
	Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Gabungan aneka pangan sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang memenuhi standar keamanan pangan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.
	Pangan Lokal	Makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
	Pangan Segar Asal Hewan	Pangan asal hewan yang belum mengalami pengolahan lebih lanjut selain pendinginan, pembekuan, pemanasan, dan pengasapan.
	Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	Pangan asal tumbuhan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pangan olahan yang mengalami pengolahan minimal meliputi pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan (blanching), dan/atau proses lain tanpa penambahan bahan tambahan pangan kecuali pelapisan dengan bahan penolong lain yang diijinkan untuk memperpanjang masa simpan.
	Panti Sosial	Lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
	Pariwisata	Berbagai Macam Kegiatan Wisata Dan Didukung Berbagai Fasilitas Serta Layanan Yang Disediakan Oleh Masyarakat, Pengusaha, Pemerintah, Dan Pemerintah Daerah.
	Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
	Partisipasi politik	Kegiatan seseorang atau kelompok yang aktif dalam kehidupan politik anatara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan politik (public policy).
K01289	Partisipasi Sekolah	Keikutsertaan penduduk dalam pendidikan, baik pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, maupun pendidikan yang setara.
	Pasca	Sesudah.
	PATBM	Sebuah Gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.
	Payau	Agak asin karena tercampur air laut (air tawar, biasanya di muara).

Kode Konsep	Nama Konsep	Definisi Konsep
(1)	(2)	(3)
	PBF Cabang	Cabang PBF yang telah memiliki izin untuk melakukan pengadaan, penyimpanan, penyaluran Obat dan/atau Bahan Obat dalam jumlah besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
K01776	PDRB	Nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam sektor perekonomian pada suatu wilayah, atau merupakan nilai ekonomi barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di wilayah tertentu.
	Pegawai	Orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan, dan sebagainya).
K01300	Pegawai Negeri Sipil	Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat sebagai aparatur sipil negara (ASN) secara tetap untuk menduduki jabatan pemerintahan.
K01301	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
	Pejuang	Warga Negara Indonesia yang dalam masa revolusi fisik antara tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan tanggal 27 Desember 1949 yang berperan secara aktif berjuang untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia di dalam kesatuan bersenjata resmi dan/atau kelaskaran yang diakui oleh pemerintah pada masa perjuangan, termasuk di dalamnya anggota satuan yang bertugas di bidang Palang Merah Indonesia (PMI)/tenaga kesehatan yang melaksanakan fungsi kesehatan lapangan, dapur umum/juru masak, persenjataan dan amunisi yang melaksanakan fungsi perbekalan, caraka/kurir/penghubung yang melaksanakan fungsi komunikasi, penjaga kampung/keamanan/mata-mata yang melaksanakan fungsi Intelijen dalam rangka pengawasan wilayah, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.
K02166	Pekerja Mandiri/Wirausaha	Pekerja yang mempunyai sikap, semangat, perilaku, dan kemampuan untuk melakukan atau menangani kegiatan atau usaha yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan memberikan penghasilan bagi dirinya sendiri atau orang lain.
	Pekerja Sosial Masyarakat	Warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdi untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
K01321	Pelabuhan	Tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
	Pelabuhan Pengumpan	Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan dari dan ke pelabuhan pengumpul atau pelabuhan utama serta melayani wilayah sekitarnya.

Kode Konsep	Nama Konsep	Definisi Konsep
(1)	(2)	(3)
	Pelabuhan Penyeberangan	Pelabuhan yang digunakan sebagai tempat kegiatan menaikkan dan menurunkan penumpang, kendaraan, dan/atau barang yang menggunakan kapal penyeberangan untuk menghubungkan jaringan jalan yang terputus oleh perairan.
	Pelaksanaan	Proses, cara, atau perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan, dan sebagainya.
	Pelaksanaan Acara	Kegiatan atau proses menjalankan rangkaian kegiatan yang telah direncanakan dalam suatu acara, termasuk koordinasi teknis, pengaturan waktu, tempat, tamu undangan, keprotokolan, hingga evaluasi kegiatan setelah acara selesai.
	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Dokumen yang berisi hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang memuat hasil capaian pelaksanaan program dan kegiatan, serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mencakup LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban).
	Pelaku Ekonomi Kreatif	Orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
	Pelaku Industri	Individu, kelompok, atau badan hukum yang menjalankan usaha di bidang pengolahan barang atau jasa industri.
K01337	Pelaku Usaha	Perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan pada bidang tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan.
K01340	Pelanggaran	Tindakan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
	Pelaporan	Tindakan menyampaikan berita, keterangan, atau informasi yang berisi fakta secara objektif mengenai suatu hal, baik lisan maupun tulisan, yang bisa berupa informasi berita, keterangan, pemberitahuan, hingga pertanggungjawaban.
K01354	Pelatihan	Kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, maupun sikap sesuai kompetensi.
	Pelatihan Berbasis Kompetensi Kerja	Pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.
	Pelayanan	Usaha melayani kebutuhan orang lain (dalam organisasi, instansi, dsb).

Kode Konsep	Nama Konsep	Definisi Konsep
(1)	(2)	(3)
	Pelayanan Advokasi Hukum	Serangkaian tindakan pemberian bantuan penanganan masalah hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.
	Pelayanan Dasar	Pelayanan publik untuk memenuhi Kebutuhan Dasar Warga Negara.
K01361	Pelayanan Kesehatan	Setiap upaya yang diselenggarakan secara sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok dan/ataupun masyarakat.
	Pelayanan Kesehatan Persalinan	Setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan pada ibu sejak dimulainya persalinan hingga 6 (enam) jam sesudah melahirkan.
	Pelayanan Kesehatan Tradisional	Pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
	Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi	Suatu bentuk pelayanan kesehatan yang mengombinasikan pelayanan kesehatan konvensional dengan pelayanan kesehatan tradisional komplementer, baik bersifat sebagai pelengkap maupun pengganti dalam keadaan tertentu.
K01368	Pelayanan Publik	Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif. .
	Pelayanan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Pandu PTM)	Laporan monitoring faktor risiko penyakit tidak menular berbasis Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
	Pelestarian	Proses, cara, perbuatan melestarikan (menjaga supaya tetap tidak rusak, tidak punah, dan sebagainya).
	Pelestarian naskah kuno	Segala upaya yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, melindungi, merawat, menyimpan, mendigitalisasi, dan menyelamatkan naskah kuno sebagai bagaian dari bahan pustaka nasional dan warisan budaya bangsa, agar tetep lestari dan dapat dimanfaatkan oleh generasi sekarang dan mendatang.
	Pemanfaatan	Proses, cara, perbuatan memanfaatkan (mengambil manfaat, menggunakan untuk keuntungan tertentu).
	Pemanfaatan data	Proses atau tindakan menjadikan data sebagai suatu yang berguna.
	Pemanfaatan Ruang	Upaya untuk mewujudkan struktur Ruang dan pola Ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
K01379	Pemasaran	Proses, cara, perbuatan memasarkan suatu barang dagangan.

Kode Konsep	Nama Konsep	Definisi Konsep
(1)	(2)	(3)
	Pemasaran Ikan	Rangkaian kegiatan memasarkan Ikan dan produk olahannya mulai dari merencanakan, menentukan harga, melakukan promosi, mendistribusikan sampai kepada konsumen.
K01384	Pembangunan	Proses, cara, perbuatan membangun.
	Pembangunan Daerah	Proses perubahan yang mengarah pada kemajuan, pertumbuhan, atau perbaikan, dan daerah sebagai wilayah tertentu atau lingkungan pemerintahan seperti provinsi, kabupaten, atau kecamatan.
	Pembangunan Keluarga	Upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
K01386	Pembangunan Manusia	Pembangunan potensi individu dan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dendengan menjamin ketersediaan pada akses kebutuhan dasar manusia, seperti kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial.
	Pemberdayaan	Proses, cara, perbuatan memberdayakan.
	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Kegiatan pembinaan ketahanan untuk memperkuat fungsi ekonomi Keluarga demi meningkatkan kesejahteraan Keluarga, mendukung penghapusan kemiskinan dan memperkuat/memantapkan pelaksanaan Program Bangga Kencana.
	Pemberdayaan Koperasi	Upaya yang dilakukan dalam bentuk pertumbuhan iklim usaha melalui kebijakan yang mencakup aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan teknologi/inovasi.
	Pemberdayaan Masyarakat	Usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolelctif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
	Pemberdayaan Perempuan	Upaya untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri.
	Pemberdayaan Petani	Segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.

Kode Konsep	Nama Konsep	Definisi Konsep
(1)	(2)	(3)
	Pemberhentian Aparatur Sipil Negara	Proses pengakhiran status ASN dari jabatan atau instansi pemerintah berdasarkan alasan tertentu seperti pensiun, pengunduran diri, atau pelanggaran disiplin.
	Pemberhentian dari Jabatan	Pemberhentian yang mengakibatkan PNS tidak lagi menduduki JA, JF, atau JPT.
	Pemberhentian Sementara sebagai PNS	Pemberhentian yang mengakibatkan PNS kehilangan statusnya sebagai PNS untuk sementara waktu.
	Pemberian Insentif	Dukungan kebijakn fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor yang mempunyai nilai ekonomis.
	Pemberian Kemudahan	Penyediaan fasilitas nonfiskal dan pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/ atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.
	Pemberian Obat Pencegahan Secara Massal Filariasis	Pemberian obat yang dilakukan untuk mematikan mikrofilaria secara serentak kepada semua penduduk sasaran di wilayah endemis Filariasis.
	Pembiayaan daerah	Semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
K01391	Pembibitan Ikan	Kegiatan membiakkan ikan dalam media baik air tawar, air laut maupun air payau sampai umur, bentuk, dan ukuran tertentu, yang peruntukannya sebagai input untuk kegiatan budidaya pembesaran.
	Pembimbingan	Proses, cara, perbuatan memberikan bimbingan.
	Pembinaan	Usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik Pembinaan adalah upaya yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi Pegawai Negeri Sipil agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Pembinaan	Usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
K01405	Pembudidayaan Ikan	Kegiatan pemeliharaan, pembesaran, dan/atau pembiakan ikan serta panen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
	Pemeliharaan	Menjaga kelestarian dan keberlanjutan warisan budaya.
	Pemeliharaan Alat Kesehatan	Suatu kegiatan menjaga kondisi alat kesehatan agar memenuhi persyaratan mutu, keamanan, manfaat, keselamatan, dan laik pakai.

Kode Konsep	Nama Konsep	Definisi Konsep
(1)	(2)	(3)
	Pemenuhan Aparatur Sipil Negara	Proses pengisian jabatan ASN yang telah ditetapkan melalui seleksi dan penempatan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.
	Pemenuhan Kebutuhan Operasional	Meliputi gaji dan tunjangan, medical *check up*, penyediaan pakaian dinas, dan dana operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
	Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewan dan penyidikan penyakit pada hewan atau ternak, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan melalui laboratorium baik untuk kepentingan konsumsi perdagangan yang dilakukan dari tempat asal atau di pos pemeriksaan hewan.
K01411	Pemerintah daerah	Entitas pemerintahan yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengatur wilayah administrasi tertentu di bawah kewenangan Pemerintah Pusat.
	Pemetaan Kompetensi	Proses mengidentifikasi dan menilai kompetensi, potensi, dan keahlian Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertujuan untuk pengembangan kompetensi ASN dan penyusunan profil kompetensi.
	Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	Proses identifikasi penilaian potensi dan kompetensi yang dimiliki oleh ASN untuk menentukan kesesuaian dengan standar kompetensi jabatan yang dibutuhkan.
	Pemilih	Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pemah kawin.
	Pemilu	Sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasra, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
K01416	Pemimpin	Orang yang memiliki kemampuan untuk mengarahkan, mempengaruhi, dan menginspirasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama.
	Pemulihan	Serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
	Pemusnahan arsip	Kegiatan penghancuran fisik arsip yang tidak memiliki nilai guna dan telah habis retensinya, serta tidak memiliki nilai guna sekunder, dan telah dinyatakan usul musnah oleh unit kearsipan dan disetujui oleh lembaga kearsipan.
	Pemutakhiran	Pembaharuan data.

Kode Konsep	Nama Konsep	Definisi Konsep
(1)	(2)	(3)
	Penanaman Modal	Segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
	Penanaman Modal Asing (PMA)	Kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha- di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penenam modal dalam negeri.
	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indoenesia.
	Penanganan Konflik	Serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik.
	Penanggulangan Bencana	Serangkaian Upaya Yang Meliputi Penetapan Kebijakan Pembangunan Yang Berisiko Timbulnya Bencana, Kegiatan Pencegahan Bencana, Tanggap Darurat, Dan Rehabilitasi.
K01439	Penangkapan Ikan	Kegiatan menangkap dan mengumpulkan organisme air, termasuk tanaman yang ada di laut, pesisir, maupun perairan darat, baik untuk dikonsumsi manusia maupun untuk keperluan lainnya, dengan menggunakan berbagai alat seperti jaring dan perangkap.
	Penatausahaan	Rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN/ BMD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
K01441	Pencari Kerja	Angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam atau luar negeri, dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja.
	Pencatatan Sipil	Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
	Pencegahan Bencana	Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
	Pencegahan Korupsi	Serangkaian upaya strategis dan preventif yang bertujuan untuk meminimalkan penyebab dan peluang terjadinya korupsi melalui penanaman nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas sejak dini hingga pada level institusi pemerintah dan masyarakat. Upaya ini melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat, dan lembaga hukum, melalui pendidikan, reformasi birokrasi, penguatan sistem pengawasan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Kode Konsep	Nama Konsep	Definisi Konsep
(1)	(2)	(3)
K01444	Pencemaran Udara	Masuknya zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam udara oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu udara yang telah ditetapkan.
	Pendaftaran naskah kuno	Untuk mendokumentasikan keberadaan naskah kuno, memastikan hak naskah tersebut, dan menjamin kelestariannya melalui pendaftaran di lembaga yang berwenang.
	Pendampingan	Segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan dalam rumah tangga untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
	Pendanaan	Penyediaan dana.
K01449	Pendanaan Usaha	Modal kerja dan investasi yang diberikan oleh lembaga keuangan pelaksana kepada usaha mikro dan usaha kecil guna pembiayaan usaha produktif.
K01450	Pendapatan	Penghasilan yang timbul dari pelaksanaan aktivitas normal entitas yang dikenal dengan sebutan yang beragam seperti keuntungan, penjualan, fee, bunga, dividen, royalti, dan sewa; atau perolehan uang atas hasil kerja berupa gaji, upah lembur, bonus, tunjangan.
	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
K01454	Pendapatan Daerah	Penerimaan oleh bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
	Pendataan	Proses sistematis pengumpulan dan pencatatan informasi atau data.
K02183	Pendidik	Tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
K02373	Pendidikan	Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Kode Konsep	Nama Konsep	Definisi Konsep
(1)	(2)	(3)
	Pendidikan Dasar	Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
	Pendidikan khusus	Pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
	Pendidikan Lanjutan	Pendidikan formal yang diikuti ASN untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan, sebagaimana dimungkinkan dalam kebijakan pengembangan kompetensi ASN.
	Pendidikan Menengah	Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
	Pendidikan Tinggi	Jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
	Pendistribusian	Proses, cara, perbuatan mendistribusikan.
K01476	Penduduk	Semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan/atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.
	Penegak Hukum	Proses, cara, perbuatan menegakan aturan atau ketentuan hukum agar di taati dan dilaksanakan secara benar.
	Penegakan	Suatu tindakan untuk menegakkan atau memastikan sesuatu (seperti hukum atau peraturan) dipatuhi dan dilaksanakan dengan benar, sehingga menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat.
K00798	Penelitian/Riset	Kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.
	Penempatan Aparatur Sipil Negara	Proses penunjukan ASN untuk menduduki jabatan tertentu berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kebutuhan instansi pemerintah.
K01486	Penempatan Pekerja	Kegiatan pelayanan untuk mempertemukan pekerja sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan, dan pemulangan.

Kode Konsep	Nama Konsep	Definisi Konsep
(1)	(2)	(3)
	Penerima Bantuan	Seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau penyandang masalah kesejahteraan sosial.
	Penetapan Angka Kredit	Hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam Jabatan Fungsional.
	Pengadaan	Proses, cara, perbuatan mengadakan, menyediakan, dsb.
	Pengadaan Aparatur Sipil Negara	Proses seleksi dan rekrutmen untuk mengisi jabatan ASN yang dilakukan secara terbuka dan objektif berdasarkan kebutuhan instansi dan kualifikasi pelamar.
	Pengadaan Barang/Jasa	Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
	Pengaduan	Pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukumseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.
	Pengaduan Masyarakat	Pengaduan berkadar pengawasan adalah pengaduan yang mengandung informasi tentang indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang oleh aparatur, yang berpotensi merugikan masyarakat atau negara.
	Pengaduan Masyarakat	Pengaduan berkadar pengawasan adalah pengaduan yang mengandung informasi tentang indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang oleh aparatur, yang berpotensi merugikan masyarakat atau negara.
K01507	Pengaman Pantai	Upaya untuk melindungi dan mengamankan daerah pantai dan muara sungai dari kerusakan akibat erosi, abrasi, dan akresi.
	Pengambilan Contoh/Sampel	Proses penetapan bagian atau unit dari lot produksi hewan, contoh/sampel harus mewakili kumpulan produk yang akan diuji.
	Pengawasan	Proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar kegiatan perencanaan, pengadaan, pemanfaataan dan pemeliharaan prasarana olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Pengawasan	Bagian permukaan bumi dalam kaitannya dengan keadaan alam dan sebagainya yang khusus.
	Pengawasan arsip	Kegiatan menilai kesesuaian antara prinsip, dan standar kearsipan dengan penyelenggran kearsipan.
	Pengawasan di Bidang Kesehatan	Kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.

Kode Konsep	Nama Konsep	Definisi Konsep
(1)	(2)	(3)
	Pengelolaan	Serangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian suatu entitas, seperti perusahaan ataupun instansi.
	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Kumpulan catatan, laporan, dan data yang dihasilkan dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kebijakan publik. Dokumen ini menjadi bukti fisik dari setiap tahapan pembuatan dan penerapan kebijakan di suatu pemerintahan.
	Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi di Provinsi Kepulauan Riau	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) atau sekarang berubah menjadi PERUMDAM atau PERSERODA, merupakan salah satu unit usaha milik daerah, yang bergerak dalam distribusi air bersih bagi masyarakat umum. Salah satu aspek penting dalam sanitasi adalah pengelolaan limbah.
	Pengelolaan Hubungan	Suatu proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi dalam membina serta menjaga hubungan baik antara suatu institusi dengan pihak internal maupun eksternal, guna menciptakan kerja sama yang harmonis, efektif, dan berkelanjutan.
K01518	Pengelolaan Kualitas Air	Upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya.
K01519	Pengelolaan Limbah	Kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah.
K01519	Pengelolaan Limbah	Kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah.
	Pengelolaan Pangan	Upaya terpadu yang meliputi pengaturan, kebijakan Pengendalian, Pengembangan, dan Pengawasan Pangan.
K01524	Pengelolaan Sampah	Kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
K01536	Pengeluaran	Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi barang dan jasa, baik yang berasal dari pembelian, pemberian, maupun produksi sendiri, yang dibedakan atas konsumsi makanan maupun bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang, tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain.
	Pengembangan	Usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan sesuatu menjadi lebih baik.
K01543	Pengembangan	Kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung ilmu pengetahuan dan yang telah terbukti kebenarannya dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat, ilmu pengetahuan dan teknologi.
	Pengembangan Karir	Upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan Standar Kompetensi Jabatan dan rencana pengembangan karier.

Kode Konsep	Nama Konsep	Definisi Konsep
(1)	(2)	(3)
	Pengembangan Mutu	Proses untuk meningkatkan kualitas Mutu secara berkesinambungan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit secara efisien dan efektif.
	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Pengaturan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, agar ada kejelasan tugas, efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, dan tidak terjadi tumpang tindih.
	Pengemis	Orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan memintaminta di muka umum dengan pelbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas.
	Pengendalian	Proses, cara, atau perbuatan mengendalikan; pengekangan.
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;	Pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan segala aktivitas konstruksi dan proyeksi dana keuangan dimasa mendatang sesuai dengan alokasi dananya. Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik APBD setiap SKPD Provinsi Kepulauan Riau.
	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan lingkungan dalam bentuk pengamatan dan pengidentifikasian, pencegahan, pengamanan, pemberantasan, dan/atau pengobatan.
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	Segala kegiatan atau upaya untuk mencegah dan menanggulangi serangan OPT terhadap tanaman.
	Penggunaan arsip	Kegiatan memnafaatkan arsip, khusus arsip statis, oleh perorangan atau lembaga untuk kepentingan pemerintah, pelayanan, publik, ilmu pengetahuan, hukum,sejarah, atau tujuan sah laiannya.
	Pengharagaan Aparatur Sipil Negara	Pengakuan yang diberikan kepada Pegawai ASN atas prestasi kerja dan/atau pengabdian yang luar biasa.
	Penghargaan	Perbuatan (hal dan sebagainya) menghargai; penghormatan.
	Penghubung	Alat untuk menghubungkan atau orang yang menjadi perantara atau pengantar (antara satu pihak dan pihak lain).
	Pengobatan Antiretroviral	Bagian dari pengobatan HIV dan AIDS untuk mengurangi risiko penularan HIV, menghambat perburukan infeksi oportunistik, meningkatkan kualitas hidup penderita HIV, dan menurunkan jumlah virus (viral load) dalam darah sampai tidak terdeteksi.
	Pengolahan Ikan	Rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku Ikan sampai menjadi produk akhir.
	Pengungsi	Orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.

Kode Konsep	Nama Konsep	Definisi Konsep
(1)	(2)	(3)
	Penilaian	Penentuan nilai dari suatu pekerjaan untuk menentukan skala gaji, syarat-syarat kenaikan pangkat, dan perangsang terhadap pekerjaan.
	Penilaian Kesesuaian	Kegiatan yang bertujuan untuk menentukan mutu suatu barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi persyaratan acuan.
	Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara	Proses evaluasi terhadap hasil kerja dan perilaku kerja ASN berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk menentukan tingkat pencapaian dan kontribusi terhadap organisasi.
	Penilaian Kompetensi	Proses membandingkan kompetensi yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil dengan kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dengan menggunakan Assessment Center atau metode penilaian lainnya.
	Peningkatan Kualitas Permukiman (PKP)	Upaya untuk memperbaiki atau membangun kembali kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang sudah ada agar memenuhi standar minimum kelayakan hunian dan infrastruktur dasar.
	Peningkatan SDM	Proses atau upaya menjadikan kualitas potensi manusia (tenaga, pikiran, kemampuan, keterampilan) lebih baik, lebih tinggi, atau lebih maju agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mencapai tujuan tertentu.
	Penjaga Sekolah	Tenaga nonkependidikan pada satuan pendidikan yang bertugas menjaga, merawat, dan mengamankan lingkungan sekolah agar proses pembelajaran berjalan dengan tertib, aman, dan nyaman.
	Penyakit Hewan	Gangguan kesehatan pada Hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme patogen.
	Penyakit Hewan Menular	Penyakit yang ditularkan antara Hewan dan Hewan, Hewan dan manusia, serta Hewan dan media pembawa penyakit Hewan lain melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, Pakan, peralatan, dan manusia, atau melalui media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
	Penyalur Alat Kesehatan	Perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran alat kesehatan dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
K01596	Penyandang Disabilitas	Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
K01596	Penyandang Disabilitas terlantar	Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Kode Konsep	Nama Konsep	Definisi Konsep
(1)	(2)	(3)
	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani,rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
	Penyediaan informasi	Kewajiban badan publik untuk menyediakan informasi publik kepada masyarakat.
	Penyelamatan	Upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
	Penyelenggaraan	Proses,cara/hasil dalam mengurus, melaksanakan/mengusahakan suatu kegiatan.
	Penyelenggaraan pembauran kebangsaan	Proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis, melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan, dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku, dan etnis masing-masing dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
	Penyelenggaraan penanggulangan bencana	Serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
	Penyesuaian Ijazah	Penyesuaian ijazah adalah proses penyesuaian atau penyetaraan ijazah yang diperoleh seseorang, terutama bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan jenjang pendidikan yang berlaku di Indonesia untuk keperluan kenaikan pangkat.
	Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
	Penyimpangan Keuangan Daerah	Segala tindakan yang melanggar aturan, prosedur, dan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang mengakibatkan kerugian negara atau daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penyimpangan ini dapat berupa tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau bentuk-bentuk kecurangan lainnya dalam pengelolaan anggaran daerah.
	Penyu	Jenis ikan yang dilindungi, walaupun secara biologis bukan ikan.
K01612	Penyuluh	Seseorang yang memberikan petunjuk atau penjelasan dalam proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Kode Konsep	Nama Konsep	Definisi Konsep
(1)	(2)	(3)
	Penyuluh Pertanian	Perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan proses pembelajaran bagi Petani serta Pelaku Usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
	Penyuluhan	Proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
	Penyusunan	Proses,cara, atau perbuatan menyusun.
	Penyusunan laporan berkala	Suatu proses atau kegiatan membuat berita atau informasi yang disajikan secara teratur pada waktu-waktu tertentu.
	Penyusutan Arsip	Kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan.
	Perangkat daerah	Unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
	Peraturan daerah	Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
	Peraturan Daerah Kab/Kota	Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.
	Peraturan Daerah Provinsi	Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
	Peraturan Kepala Daerah (PERKADA)	Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Wali kota.
K01634	Perawat	Seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Perbaikan	Proses, cara, atau perbuatan memperbaiki; pembetulan; penyempurnaan; pengubahan menjadi lebih baik.
	Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	Alat, bahan, atau campuran bahan untuk pemeliharaan dan perawatan untuk kesehatan manusia, yang ditujukan untuk penggunaan di rumah tangga dan fasilitas umum.

Kode Konsep	Nama Konsep	Definisi Konsep
(1)	(2)	(3)
K01642	Perdagangan Orang	Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
	Peredaran Benih	Kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran benih kepada masyarakat di dalam negeri dan/atau luar negeri, baik untuk diperdagangkan maupun tidak diperdagangkan.
	Peremajaan	Penggantian tanaman tua atau tidak produktif dengan tanaman baru.
K01647	Perempuan	Orang (manusia) yang mempunyai ciri fisiologis tertentu, seperti menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan/atau menyusui.
	Perencanaan	Suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
K01651	Perguruan Tinggi	Pendidikan pada jalur pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang dapat berupa program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktoral.
	Perhubungan	Sesuatu yang menyangkut hubungan atau keterkaitan anatar hal, sekaligus dalam konteks transportasi, komunikasi, maupun lalu lintas.
K01654	Perhutanan Sosial	Sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya.
K01655	Perikanan	Segala sesuatu yang bersangkutan dengan penangkapan, pemiaraan, dan pembudidayaan ikan.
	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat menolong diri sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat.
	Perintis kemerdekaan	Perintis Kemerdekaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Perintis Kemerdekaan pemberian penghargaan/tunjangan atau kepada Perintis Pergerakan Ke bangsaan/ Kemerdekaan.
	Periode	Jangka waktu tertentu yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan.
	Perizinan	Hal pemberian izin.

Kode Konsep	Nama Konsep	Definisi Konsep
(1)	(2)	(3)
	Perizinan Berusaha	Legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
K02376	Perjalanan Wisata	Bepergian/perjalanan yang dilakukan oleh penduduk Indonesia dari tempat tinggal biasanya ke tempat di luar lingkungan sehari-hari di wilayah geografis Indonesia secara sukarela selama kurang dari 12 bulan dan bukan bertujuan untuk bekerja (memperoleh upah/gaji dari penduduk di tempat yang dituju) atau sekolah secara rutin.
	Perkebunan	Segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman Perkebunan.
	Perlengkapan Sekolah	Segala sesuatu berupa sarana pendidikan yang secara langsung menunjang proses belajar mengajar di sekolah, seperti buku, alat tulis, papan tulis, media pembelajaran, dan peralatan laboratorium.
	Perlindungan	Tindakan atau upaya untuk menjaga sesuatu dari kerusakan, bahaya, atau pelanggaran.
	Perlindungan Anak	Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
	Perlindungan Hutan	Usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan di dalam dan di luar kawasan hutan dan hasil hutan serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi, serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.
	Perlindungan Perempuan	Segala upaya untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada perempuan serta pemenuhan haknya melalui perhatian yang konsisten, terstruktur, dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai Kesetaraan Gender.
	Permasalahan	Suatu hal yang sudah ada dan memerlukan solusi, karena dapat menimbulkan sesuatu yang belum sesuai dengan harapan.
K01692	Pernikahan/Perkawinan	Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga.
	Perpustakaan	Institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
K01694	Perpustakaan	Institusi pengelolaan koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitan, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk para pumustaka.

Kode Konsep	Nama Konsep	Definisi Konsep
(1)	(2)	(3)
	Perpustakaan elektronik	Perpustakaan yang mengelola, meyimpan, dan menyediakan koleksi dalam bentuk digital atau elektronik, serta memberikan layanan inofmasi kepada pemustaka melaluai pemanfaatan teknologi infomasi dan komunikasi.
	Persandian	Kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
	Persentase	Bagian dari keseluruhan yang dinyatakan dalam persen.
K01705	Pertanian	Kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
K01711	Pertunjukan/Pameran Seni	Karya seni yang dipertontonkan maupun dipamerkan pada suatu pertunjukan atau event tertentu sehingga dapat dinikmati atau diapresiasi oleh masyarakat luas meliputi antara lain: seni film, seni musik/suara, seni rupa, seni sastra, seni tari budaya Indonesia, seni teater/pewayangan, dan seni lainnya.
	Perubahan	Hal (keadaan) berubah; peralihan; atau pertukaran.
	Perundang-undangan	Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
K01715	Perundungan/Bullying	Segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus menerus.
K01716	Perusahaan	Suatu badan yang melakukan kegiatan ekonomi dengan menanggung risiko usaha, baik berbadan hukum maupun tidak, yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
K01735	Peserta Didik	Peserta Didik Anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
	Pestisida	Zat atau senyawa kimia, zat pengatur dan perangsang tumbuh, bahan lain, serta organisme renik, atau virus yang digunakan untuk melakukan perlindungan tanaman.
	Peta	Suatu gambaran dad urisur-unsur alam dan/ atau buatan manusia, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.

Kode Konsep	Nama Konsep	Definisi Konsep
(1)	(2)	(3)
K01744	Petani	Seseorang dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha pertanian di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
	Petugas Pemeriksa Fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	Pegawai negeri sipil yang telah memenuhi kompetensi dan diberikan kewenangan oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas teknis di bidang perikanan tangkap untuk melakukan pemeriksaan fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan.
	Pinjaman	Uang yang harus dibayarkan kepada pemilik modal dalam jangka waktu tertentu (satu bulan atau satu tahun).
	Pinjaman daerah	Semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
	Piutang	Aset lancar yang timbul ketika suatu entitas (misalnya perusahaan atau pemerintah) telah memberikan barang atau jasa kepada pihak lain tetapi belum menerima pembayaran.
	Pneumonia	Suatu peradangan akut di parenkim paru yang disebabkan oleh infeksi patogen (bakteri, virus, jamur dan parasit), namun tidak termasuk Mycobacterium tuberculosis.
	Pokok-pokok pikiran DPRD	Hasil penyerapan aspirasi masyarakat yang telah disinkronkan dengan prioritas pembangunan daerah, yang disampaikan oleh DPRD kepada pemerintah daerah sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
K01753	Pola Pangan Harapan (PPH)	Susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama.
	Portal web	Pengoperasian situs web yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara database besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari.
	Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular	Bentuk peran serta masyarakat dalam melakukan kegiatan deteksi dini dan pemantauan faktor risiko PTM yang dilaksanakan secara terpadu, rutin, dan periodik.
	Prasarana	Segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, dan sebagainya).
	Prasarana Pertanian	Segala sesuatu yang menjadi penunjang utama dan pendukung budi daya pertanian termasuk lahan, jaringan irigasi dan/atau drainasi, jalan penghubung, tenaga listrik dan jaringannya sampai ke lokasi pascapanen, gudang, rumah atau penaung tanaman, gudang berpendingin, dan bangsal penanganan pascapanen.
	Prioritas	Sesuatu yang didahulukan dan diutamakan daripada yang lain.

Kode Konsep	Nama Konsep	Definisi Konsep
(1)	(2)	(3)
	Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
	Prioritas Nasional	Program/kegiatan/proyek untuk pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan kebijakan Presiden lainnya. .
K01773	Produk	Barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi itu.
	Produk	Barang yang dibuat atau dihasilkan oleh suatu perusahaan (pabrik, industri, dll.) untuk diperjualbelikan.
K01776	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam sektor perekonomian pada suatu wilayah, atau merupakan nilai ekonomi barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di wilayah tertentu.
K01776	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam sektor perekonomian pada suatu wilayah, atau merupakan nilai ekonomi barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di wilayah tertentu.
32010044	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	Nilai tambah bruto atas barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota), dengan nilai barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku.
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Kehutanan	Nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam sektor kehutanan pada suatu wilayah, atau merupakan nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di wilayah tertentu.
	Produk Hukum Daerah	Produk hukum berbentuk peraturan meliputi perda atau nama lainnya, perkada, PB KDH, peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD.
	Produk Pangan Asal Hewan	Daging, susu, telur dan hasil turunannya, serta semua bahan yang berasal dari Hewan yang dimanfaatkan untuk konsumsi manusia misalnya madu, sarang burung walet, dan gelatin.
K01779	Produksi	Proses mengeluarkan hasil.
	Produksi Benih	Serangkaian kegiatan untuk menghasilkan benih bermutu.
	Produktivitas	Kemampuan untuk menghasilkan sesuatu; daya produksi; keproduktifan.
	Profil Pembangunan	Gambaran tentang proses perubahan dan kemajuan yang terjadi di suatu wilayah atau dalam suatu sektor tertentu, misalnya profil pembangunan ekonomi suatu daerah atau profil pembangunan infrastruktur di suatu negara.

Kode Konsep	Nama Konsep	Definisi Konsep
(1)	(2)	(3)
	Program	Rancangan mengenai asas serta usaha (dalam ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya) yang akan dijalankan.
	Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga	Upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dengan cara Puskesmas meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan dengan mendatangi keluarga.
	Program Kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Upaya terencana dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan Keluarga berkualitas melalui pengaturan kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, serta mengatur kehamilan.
K01811	Program Pelatihan	Suatu rumusan tertulis yang memuat rancangan pencapaian kompetensi secara komprehensif sebagai dasar pelaksanaan berbagai pengetahuan dan/atau keterampilan yang diselenggarakan berdasarkan kurikulum besbasis kompetensi.
	Program Pembentukan	Instrumen perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
	Program Strategis Daerah	Serangkaian kegiatan yang terencana dan terarah, yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Program ini bersifat strategis karena memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.
	Promosi	Kegiatan komunikasi untuk meningkatkan volume penjualan dengan pameran, periklanan, demonstrasi, dan usaha lain yang bersifat persuasif.
	Promosi Aparatur Sipil Negara	Pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam jabatan yang lebih tinggi dalam satu instansi pemerintah.
	Promosi Kesehatan	Proses untuk memberdayakan masyarakat melalui kegiatan menginformasikan, mempengaruhi dan membantu masyarakat agar berperan aktif untuk mendukung perubahan perilaku dan lingkungan serta menjaga dan meningkatkan kesehatan menuju derajat kesehatan yang optimal.
	Provinsi	Wilayah administratif yang merupakan daerah tingkat I yang dipimpin oleh seorang Gubernur dan memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
	Proyek Konstruksi	Kontrak proyek konstruksi infrastruktur yang meliputi dasar pelaksanaan kegiatan konstruksi melalui kontrak konstruksi, yang memiliki nilai di atas 50 Milyar Rupiah, yang ditandatangani pada triwulan pertama (Januari-Maret).
K01828	Psikotropika	Zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoatif melalui pangaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Kode Konsep	Nama Konsep	Definisi Konsep
(1)	(2)	(3)
	Publikasi	Tindakan atau proses mempublikasikan, menyebarluaskan, atau mengumumkan informasi kepada umum.
	Publikasi	Mengumumkan, menerbitkan, menyiarkan, atau menyebarkan sesuatu, terutama dalam bentuk buku, majalah, atau media lain. Secara lebih luas, publikasi merujuk pada tindakan membuat informasi, ide, atau karya tersedia untuk umum melalui berbagai media, baik cetak maupun elektronik.
	Pulau-pulau kecil terluar	Pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
K01833	Pupuk	Bahan yang diberikan pada tanah, air, atau daun dengan tujuan untuk memperbaiki pertumbuhan tanaman, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau menambah unsur hara.
	Pusat data	Fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
	Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)	Wilayah yang ditetapkan sebagai pusat kegiatan ekonomi, perdagangan, dan pelayanan di kawasan perbatasan. .
K01838	Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
	Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga)	Tempat pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga yang dilakukan oleh tenaga konselor dan psikolog atau tenaga layanan profesi lainnya sesuai kebutuhan melalui peningkatan kapasitas orang tua/keluarga atau orang yang bertanggung jawab terhadap Anak dalam menjalankan tanggung jawab mengasuh dan melindungi Anak agar tercipta kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan,keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik Anak, termasuk perlindungan dari kekerasan,eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.
K02380	Putus Sekolah	Predikat yang diberikan kepada mantan peserta didik yang tidak mampu menyelesaikan suatu jenjang pendidikan sehingga tidak dapat melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan berikutnya.
	Rakyat	Sekelompok besar orang yang menghuni suatu wilayah atau negara, dan seringkali merujuk pada "orang banyak" atau "people" yang memiliki hak dan kewajiban sama dalam lingkup publik atau kolektif, berbeda dari kepentingan individu. .
	Rakyat Terlatih	Komponen dasar kekuatan pertahanan keamanan negara yang mampu melaksanakan fungsi ketertiban umum, perlindungan rakyat, keamanan rakyat, dan perlawanan rakyat dalam rangka penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.
	Rancangan	Sesuatu yang sudah dirancang.

Kode Konsep	Nama Konsep	Definisi Konsep
(1)	(2)	(3)
	Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)	Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disusun oleh kepala daerah sebagai dokumen awal penyusunan APBD.
	Rapat	Pertemuan (untuk membicarakan sesuatu).
	Rapat Koordinasi Optimalisasi UMKM	Pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta berkesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai.
	Rawan	Mudah menimbulkan gangguan keamanan atau bahaya; gawat.
	Rawan Bencana	Kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
	Realisasi	Pelaksanaan (rencana, program, dan sebagainya); perwujudan; kenyataan.
	Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Realisasi APBD adalah pencapaian penggunaan anggaran daerah (baik pendapatan maupun belanja) yang sudah disahkan dalam Perda APBD pada tahun berjalan hal ini mencerminkan seberapa jauh target APBD (rencana) bisa diwujudkan dalam bentuk kinerja keuangan nyata (uang masuk/pendapatan dan uang keluar/belanja).
	Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)	Pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan segala aktivitas konstruksi dan proyeksi dana keuangan dimasa mendatang sesuai dengan alokasi dananya.
	Reformasi Birokrasi	Upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek pada penerapan pelayanan prima.
	Reformasi Hukum	Perubahan secara drastis untuk perbaikan dibidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualltas bersih dan akumabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
K01861	Registrasi	Pencatatan; pendaftaran (dalam register).
	Regulasi	Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
	Regulasi kebijakan anggaran	Dokumen perundang-undangan yang menetapkan kerangka fiskal, prioritas anggaran, pagu anggaran, aturan teknis penyusunan anggaran, serta kebijakan ekonomi-fiskal terkait penggunaan anggaran—baik pada tingkat nasional (APBN/RAPBN) maupun daerah (APBD/RKA-SKPD).
	Regulasi Pelaksanaan APBD	Pokok kebijakan yang menjadi petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam menyusun, membahas, dan menetapkan APBD yang ditetapkan melalui peraturan daerah.

Kode Konsep	Nama Konsep	Definisi Konsep
(1)	(2)	(3)
	Rehabilitasi	Upaya perbaikan dan/atau pemulihan sarana dan prasarana pendidikan yang rusak agar dapat difungsikan kembali secara optimal dalam mendukung proses pembelajaran.
K01870	Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika	Suatu proses pemulihan klien gangguan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif, baik dalam bentuk rawat jalan maupun rawat inap, baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang, yang bertujuan untuk mengubah perilaku dan mengembalikan fungsi individu tersebut di masyarakat.
	Rehabilitasi Sosial	Proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
	Rekomendasi	Keputusan Komnas HAM berdasarkan penilaian atas dugaan diskriminasi ras dan etnis.
	Rekomendasi dan Kebijakan Bidang Perekonomian	Kebijakan ekonomi adalah tindakan pemerintah suatu negara dalam menetapkan kebijakan atau keputusan di bidang ekonomi. Secara umum, kebijakan ekonomi di suatu negara dibedakan menjadi kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan produksi, kebijakan perdagangan mancanegara dan kebijakan ketenagakerjaan.
	Rekomendasi dan Kebijakan Energi dan Air	Serangkaian pedoman, peraturan, dan tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah atau organisasi untuk mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi energi.
	Rekomendasi Kebijakan	Suatu naskah ringkas yang disampaikan kepada pemerintah dan/atau kementerian/lembaga yang berisi masukan tentang tindakan-tindakan yang harus diputus atau diambil dalam menyelesaikan suatu isu.
	Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Serangkaian tindakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu.
	Rekomendasi Kebijakan Sumber Daya Alam	Kebijakan pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya Kemandirian Energi.
	Rekomendasi Surat Edaran Gubernur	Ekonomi makro adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk memengaruhi target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan.
	Rekonsiliasi	Proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dalam beberapa sistem/subsistem berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
	Rekonstruksi	Pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
	Relevan	Kait-mengait; bersangkut-paut; berguna secara langsung.

Kode Konsep	Nama Konsep	Definisi Konsep
(1)	(2)	(3)
	Relokasi	Pemindahan tempat tinggal korban bencana dari lokasi lama ke lokasi baru yang lebih aman dan layak untuk dihuni.
	Remaja	Kelompok usia 10 tahun sampai berusia 18 tahun.
	Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.	Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.
	Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)	Dokumen perencanaan dan pengangggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	Dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahunan, berisi penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan RPJM Nasional. .
	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)	Dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun, yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).
	Renja	Rangka sesuatu yang akan dikerjakan yang berkaitan dengan pekerjaan atau kegiatan yang akan dilakukan.
	Reses	Masa perhentian sidang (parlemen); masa istirahat dari kegiatan bersidang.
	Responsif	Cepat tanggap; lekas bereaksi.
	Responsif Gender	Perhatian secara konsisten dan sistematis untuk merespons kebutuhan,permasalahan, aspirasi, dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang bertujuan untuk mewujudkanKesetaraan Gender.
K01898	Retribusi daerah	Pendapatan atas pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
	Revitalisasi	Upaya penguatan, pembaruan, atau penyegaran kembali fungsi, peran, dan kualitas suatu satuan pendidikan agar lebih relevan dengan kebutuhan pembangunan, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta dunia kerja.
	Risalah	Catatan singkat mengenai jalannya rapat atau pembicaraan yang berisi pokok-pokok masalah yang dibicarakan dan keputusan yang diambil.

Kode Konsep	Nama Konsep	Definisi Konsep
(1)	(2)	(3)
	Risiko Bencana	Potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
	RKA	Dokumen perencanaan dan penganggaran yang memuat rincian program, kegiatan, dan anggaran yang diperlukan oleh suatu kementerian, lembaga, atau daerah dalam satu tahun anggaran untuk mencapai tujuan strategisnya.
	RKPD	Penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
K01905	Ruang Kelas	Suatu ruangan di dalam bangunan sekolah atau kampus, yang berfungsi sebagai tempat untuk kegiatan tatap muka dalam proses kegiatan belajar mengajar (KBM).
	Ruang Laboratorium	Tempat berlangsungnya pembelajaran secara praktek yang memerlukan peralatan khusus.
	Ruang Perpustakaan	Tempat menyimpan dan memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka.
	Ruang Praktik	Sarana pendidikan berupa ruang khusus yang digunakan peserta didik untuk melakukan kegiatan pembelajaran berbasis praktik atau keterampilan sesuai dengan kompetensi keahlian yang diajarkan.
	Ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS)	Tempat untuk menangani peserta didik yang mengalami gangguan kesehatan dini dan ringan di sekolah.
	Rujukan	Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas masalah kesehatan masyarakat dan kasus-kasus penyakit yang dilakukan secara timbal balik secara vertikal maupun horizontal meliputi sarana, rujukan teknologi, rujukan tenaga ahli, rujukan operasional, rujukan kasus, rujukan ilmu pengetahuan, dan rujukan bahan pemeriksaan laboratorium.
	Rumah	Bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
	Rumah Dinas	Bangunan rumah yang dimiliki atau dikuasai oleh negara dan disediakan untuk tempat tinggal pejabat atau pegawai negeri guna mendukung pelaksanaan tugas kedinasan.
	Rumah Korban Bencana	Rumah yang dimiliki dan dihuni masyarakat yang mengalami kerusakan akibat bencana alam atau non-alam, dan menjadi objek intervensi pemerintah untuk direhabilitasi, dibangun kembali, atau direlokasi agar kembali layak dan aman dihuni.
K01915	Rumah Layak Huni	Rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

Kode Konsep	Nama Konsep	Definisi Konsep
(1)	(2)	(3)
	Rumah Negara	Bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas Pejabat dan/atau Pegawai Negeri;.
K01919	Rumah Sakit	Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
	Rumah Sakit Pendidikan	Rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran dan/atau kedokteran gigi, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi.
K01926	Rumah Tangga	Seseorang atau sekelompok orang yang tinggal bersama dalam satu pengelolaan makan/minum dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
K01932	Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP)	Rumah tangga yang memelihara/menguasai/melakukan kegiatan pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar (khusus tanaman pangan termasuk yang seluruhnya dikonsumsi sendiri).
	Rumpun	Kelompok tumbuhan yang tumbuh anak-beranak seperti memiliki akar yang sama (contohnya buluh, tebu, pisang), serta golongan besar bangsa (bahasa) yang sama asal dan jenisnya.
	Rumput Laut	Tumbuhan laut yang berthalus, hidup di dasar laut, dan dapat dimakan atau dijadikan bahan makanan (misalnya agar-agar, karaginan, dan alginat).
	Saham	Surat bukti pemilikan bagian modal dalam suatu perseroan terbatas.
	SAKIP	Rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk mengukur, mengumpulkan data, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan, dan melaporkan kinerja instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja.
K01945	Sampah	Sisa kegiatan sehari-hari dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
	Sandi	Rahasia; kode.
K01953	Sanitasi	Usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan dan kebersihan lingkungan, terutama kesehatan masyarakat.
	Sarana	Fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan tugas dan fungsi pekerjaan.
	Sarana Pertanian	Segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan/atau bahan yang dibutuhkan untuk budi daya pertanian termasuk benih tanaman dan benih hewan atau bibit hewan, pupuk, pestisida, pakan, dan alat dan mesin pertanian.

Kode Konsep	Nama Konsep	Definisi Konsep
(1)	(2)	(3)
	Sarana Produksi Pertanian	Segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan/atau bahan yang dibutuhkan untuk produksi pertanian termasuk benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu; dan alat dan mesin pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
	Sarjana	Gelar strata satu yang dicapai oleh seseorang yang telah menamatkan pendidikan tingkat terakhir di perguruan tinggi.
	Satlinmas	Organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh lurah dan/atau kepala desa untuk melaksanakan Linmas.
	Satpol PP	Perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi/tugas pemerintahan di bidang tertentu di provinsi, kabupaten, atau kota.
	Satuan Pendidikan Formal	Kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal, yang bersifat terstruktur dan berjenjang, mencakup satuan pendidikan dasar dan menengah, yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.
	Sehat	Yang mendatangkan kebaikan pada badan.
	Sejarawan	Orang yang mendalami ilmu sejarah dan menuliskannya berdasarkan hasil penelitian dan kajian ilmiah.
K01976	Sekolah	Lembaga pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan belajar dan mengajar serta menerima dan memberi pelajaran sesuai dengan tingkatan, jurusan dan sebagainya, yang memiliki unsur pendukung seperti sarana dan prasarana serta sesuai aturan yang berlaku.
K01978	Sekolah Luar Biasa	Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan/atau sosial, yang terintegrasi pada jalur formal untuk jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah dalam satu manajemen pengelolaan.
K01979	Sekolah Menengah Atas	Salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari sekolah menengah pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat, termasuk hasil belajar yang diakui setara dengan SMP.
K01981	Sekolah Menengah Kejuruan	Salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari sekolah menengah pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat, termasuk hasil belajar yang diakui setara dengan SMP.

Kode Konsep	Nama Konsep	Definisi Konsep
(1)	(2)	(3)
K01984	Sekolah Menengah Pertama	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari sekolah dasar (SD) atau bentuk lain yang sederajat, termasuk hasil belajar yang diakui setara dengan SD.
	Sekolah Swasta	Satuan pendidikan yang didirikan dan/atau dikelola oleh masyarakat (bukan pemerintah).
	Sekretariat daerah	Unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah.
	Sektor	Lingkungan suatu usaha resmi yang dapat menampung tenaga kerja.
	Sengketa	Sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan: perkara yang kecil dapat juga menimbulkan besar; daerah-daerah yang menjadi rebutan (pokok pertengkaran).
	Sengketa Lingkungan hidup	Perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
K01992	Seni	Ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. .
	Seniman	Orang yang memiliki kemampuan, keahlian, dan/atau bakat dalam menciptakan, mengekspresikan, dan/atau menampilkan karya seni dalam berbagai bentuk ekspresi budaya, baik secara tradisional maupun kontemporer, dan berperan aktif dalam proses pelestarian, pengembangan, serta pemanfaatan kebudayaan nasional.
	Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional	Suatu wadah untuk melakukan penapisan melalui proses pengkajian, penelitian, dan/atau pengujian terhadap metode pelayanan kesehatan tradisional yang sedang berkembang dan/atau banyak dimanfaatkan oleh masyarakat.
K02383	Sertifikasi	Rangkaian proses untuk mendapatkan pengakuan formal dari pihak yang berwenang atas kepatuhan organisasi atau kompetensi sumber daya manusia berdasarkan standar tertentu, baik yang berlaku secara nasional maupun internasional.
	Sertifikasi Benih	Proses pemberian sertifikat terhadap kelompok benih melalui serangkaian pemeriksaan dan/atau pengujian serta memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal.
	Sertifikasi Kompetensi Kerja	Proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia dan/atau internasional.
	Sertifikat	Keterangan atau laporan pemeriksaan yang diberikan oleh suatu lembaga kepada seseorang atau badan usaha atas pemenuhan atau telah memenuhi persyaratan sesuai yang diminta untuk tujuan tertentu.

Kode Konsep	Nama Konsep	Definisi Konsep
(1)	(2)	(3)
	Sidang	Pertemuan resmi yang diadakan oleh suatu badan atau lembaga untuk membicarakan dan memutuskan suatu perkara atau urusan.
	Sinkronisasi	Bagian dari prinsip kerja efektif dan efisien antar unit organisasi. Dilakukan melalui proses bisnis, rapat koordinasi, forum, dan konsultasi langsung dengan lembaga terkait untuk menyelaraskan perencanaan, penyusunan, dan kebijakan pembangunan lintas sektor.
	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data dan pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggung jawaban dan peninggkatan kinerja instansi pemerintah.
	sistem elektronik	Serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
	Sistem informasi	Keterpaduan sistem antara manusia dan mesin yang mencakup komponen perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, sumber daya manusia, dan substansi informasi yang dalam pemanfaatannya mencakup fungsi input, process, output, storage, dan communication.
	Sistem Informasi ASN	Rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi. .
	sistem informasi kearsipan nasional (SIKN)	Menyajikan informasi arsip, yang autentik, utuh, dan terpercaya; arsip sebagai tulang punggung negara.
	Sistem Informasi Kepegawaian	Sistem yang digunakan untuk mengelola data dan informasi terkait data ASN secara terintegrasi dan berbasis teknologi informasi guna mendukung manajemen kepegawaian.
	Sistem Informasi Kesehatan	Seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan kesehatan.
	Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit	Suatu sistem teknologi informasi komunikasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses pelayanan Rumah Sakit dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan dan prosedur administrasi untuk memperoleh informasi secara tepat dan akurat, dan merupakan bagian dari Sistem Informasi Kesehatan.
	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai aparatur sipil negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE.

Kode Konsep	Nama Konsep	Definisi Konsep
(1)	(2)	(3)
	Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG)	Serangkaian proses untuk mengantisipasi kejadian kerawanan pangan dan gizi yang mencakup tahapan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian dan penyebaran informasi situasi pangan dan gizi.
K02026	Siswa	Seseorang yang bersekolah atau menuntut ilmu pada tingkat sekolah dasar dan menengah.
K02029	Situs Peninggalan Sejarah	Bukti-bukti baik tertulis maupun tidak tertulis yang menunjukkan peristiwa-peristiwa sejarah dari masyarakat masa lampau, seperti candi, istana, kerajaan, prasasti dan benteng.
	Situs Web	Koleksi dokumen format html dari suatu lembaga pemerintahan pusat dan daerah dalam web server.
	SKPD	Perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang bertindak sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
	SKPDB (Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana)	Satu kesatuan upaya terstruktur dalam satu komando yang digunakan untuk mengintegrasikan kegiatan penanganan darurat secara efektif dan efisien dalam mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak pada saat keadaan darurat bencana.
	SOP/Juknis Prosedur Penetapan Izin Usaha Bidang Perikanan Budidaya	SOP/Juknis Prosedur Penetapan Izin Usaha Bidang Perikanan Budidaya adalah tata cara baku berupa petunjuk teknis yang berisi tahapan kegiatan untuk menetapkan pernyataan izin usaha yang berhubungan dengan kegiatan pemeliharaan dan pengembangbiakan ikan secara terarah dan bermanfaat.
	Sosial	Sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat secara umum, kehidupan di dalam masyarakat, atau hubungan antar individu dalam suatu kelompok masyarakat.
	Sosialisasi	Upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dan dihayati oleh masyarakat.
	SPIP	Sistem pengendalian yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan daerah, bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
	Spiritual	Kegiatan yang ditujukan untuk mendorong kemauan dan kemampuan serta pembinaan ketakwaan.
	Stakeholder Pariwisata	Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha sebagai pihak yang berperan dalam penyelenggaraan kepariwisataan.
K02385	Standar	Spesifikasi teknis yang dirancang untuk memastikan kualitas, keselamatan, kepatuhan produk, proses, dan layanan.
	standar kompetensi	Standar kompetensi adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki untuk menyelesaikan suatu jenjang dan/atau satuan pendidikan.

Kode Konsep	Nama Konsep	Definisi Konsep
(1)	(2)	(3)
	Standar Nasiona Perpustakaan (SNP)	Pedoman yang diterapkan pemerintah untuk penyelenggaran perpustakaan di Indonesia yang mencakup berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, koleksi, sarana dan prasarana, layanan, serta teknologi informasi, guna memastikan kualitas layanan yang terstandarisasi dan kesetraan akses informasi di seluruh indonesia.
	Standar Operasinal Prosedur	Serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
	Standar Operating Prosedure (SOP)/ Tata cara kerja Baku	Suatu sistem yang dirancang guna menertibkan, merapikan, dan memudahkan suatu pekerjaan.
	Statistik	Data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik.
	statistik sektoral	Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok intansi yang bersangkutan.
	Status	Penilaian resmi terhadap kualitas suatu lembaga atau program.
	Status Keadaan Darurat Bencana	Suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
	Stok	Persediaan barang keperluan untuk perbekalan / sediaan barang yang diperdagangkan / persediaan barang yang digunakan apabila sediaan sudah habis.
23020097	Subsektor Ekonomi Kreatif	Bagian-bagian dari sektor ekonomi kreatif yang mencakup berbagai jenis kegiatan yang menghasilkan nilai tambah dari hasil daya kreasi, pengembangan, dan pemanfaatan kreativitas, keterampilan, dan potensi individu atau kelompok masyarakat.
K02070	Suku Bangsa	Kelompok etnis dan budaya masyarakat yang terbentuk secara turun temurun.
	Sumber daya	Segala sesuatu yang berupa tenaga, dana, bahan, sarana, dan prasarana yang dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan.
	Sumber Daya Alam	Unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. .
	Sumber daya Alam (SDA)	Potensi alam yang dapat dikembangkan untuk proses produksi.
K02077	Sumber Daya Manusia (SDM)	Potensi manusia yang dapat dikembangkan untuk proses produksi.

Kode Konsep	Nama Konsep	Definisi Konsep
(1)	(2)	(3)
	Sumber daya Manusia Kesehatan	Tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan yang mendukung, menunjang, terlibat, bekerja, dan mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan.
	Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Setiap orang yang mengelola informasi dan komunikasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah.
	Sumber Daya Pariwisata	Seluruh potensi alam, budaya, buatan, serta infrastruktur dan sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan pariwisata.
	Sumber Penghasilan	Asal atau kegiatan ekonomi yang memberikan tambahan kemampuan ekonomis (pendapatan) kepada seseorang atau entitas, baik berupa upah, hasil usaha, keuntungan modal, maupun pendapatan lain.
	Supervisi	Kegiatan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang bertugas melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan tujuan mempercepat penyelesaian perkara dan menciptakan sinergi antar instansi terkait. Supervisi ini mencakup bentuk pengawasan, penelitian, maupun penelaahan.
	Surat Edaran Tentang Pengendalian Inflasi Menjelang Hari Raya Idul Fitri	Cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input, barang dan jasa yang diperjual-belikan.
	Surat Keputusan	Dokumen resmi yang diterbitkan oleh pejabat berwenang sebagai dasar hukum atas suatu keputusan administratif.
	Survei	Cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.
	Survei Kepuasan Masyarakat	Pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.
	Surveilans Gizi	Kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap masalah gizi masyarakat dan indikator pembinaan gizi.
	Swasta	Bukan milik pemerintah; partikelir.
	Taman Makam Pahlawan	Taman Makam Pahlawan Nasional yang selanjutnya disingkat TMPN adalah taman makam pahlawan nasional yang berada di provinsi dan kabupaten/kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
	Tanaman Hortikultura	Tanaman yang menghasilkan buah, sayuran, bahan obat nabati, florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
	Tanaman Perkebunan	Tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha perkebunan.

Kode Konsep	Nama Konsep	Definisi Konsep
(1)	(2)	(3)
	Target	Sasaran yang hendak dicapai; tujuan.
	Tata Kelola Kerja yang Layak	Sistem manajemen ketenagakerjaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)/Perjanjian Kerja Bersama (PKB), sudah menyusun Struktur Skala Upah, telah membentuk Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit dan telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
	tata ruang	Wujud struktur ruang dan pola ruang.
	Tata Usaha	Bagian dari tenaga kependidikan yang bertugas melaksanakan administrasi sekolah, yang mencakup pengelolaan surat-menyurat, arsip, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, serta mendukung kelancaran proses pembelajaran.
	Tawar	Tidak asin (tentang air).
K02130	Teknologi	Cara, metode, atau proses penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan dalam pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan kualitas keluaran atau tujuan tertentu.
	Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
	Teknologi Pertanian	Teknologi yang digunakan dalam kegiatan pertanian untuk menghasilkan produk pertanian yang berkualitas dan berkelanjutan.
	Telekomunikasi	Setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari hasil informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
	Tempat dan Fasilitas Umum	Lokasi, sarana, dan prasarana kegiatan bagi masyarakat umum.
K02148	Tempat Tinggal	Rumah (bidang dan sebagainya) tempat orang berdiam atau menetap.
	Tenaga Ahli	Tenaga profesional yang memiliki keahlian di bidang tertentu dan dipekerjakan oleh fraksi di DPR/DPRD untuk memberikan dukungan teknis, konseptual, analisis, dan rekomendasi dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang fraksi.
	Tenaga Kependidikan	Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
K02159	Tenaga Kerja	Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Kode Konsep	Nama Konsep	Definisi Konsep
(1)	(2)	(3)
	Tenaga Kerja Konstruksi	Setiap orang yang memiliki keterampilan atau pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan Pekerjaan Konstruksi yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi.
K02174	Tenaga Kesehatan	Setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan/atau dinas sosial daerah kabupaten/kota untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di kecamatan.
	Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang Kesejahteraan Sosial.
K02181	Tenaga Listrik	Suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.
	Terbina	Menggambarkan kondisi atau keadaan sesuatu (baik individu, kelompok,maupun lembaga) yang telah melalui proses pembinaan sehingga lebih teratur, terarah, dan berkembang sesuai tujuan pembinaan.
	Terintegrasi	Sudah diintegrasikan; dapat diintegrasikan.
	Terjangkau	Kondisi di mana harga barang, layanan, atau akses terhadap kebutuhan dasar masih sesuai dengan kemampuan daya beli masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah, tanpa membebani secara finansial secara berlebihan.
	Terlatih	Sudah biasa melakukan sesuatu; sudah mendapat latihan; mahir.
K02197	Ternak	Hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya, termasuk hewan peliharaan untuk hobi. .
	Terselenggaranya	Bentuk pasif dari kata dasar selenggara, yang berarti mengadakan suatu kegiatan atau peristiwa. Jadi, terselenggara merujuk pada keadaan di mana sebuah kegiatan telah berhasil diadakan atau dilaksanakan.
	Tim Reaksi Cepat	Suatu Tim yang dibentuk oleh Kepala BNPB, terdiri dari instansi/lembaga teknis/non teknis terkait yang bertugas melaksanakan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana pada saat tanggap darurat meliputi penilaian kebutuhan (Needs Assessment), penilaian kerusakan dan kerugian (Damage and Loses Assessment) serta memberikan dukungan pendampingan (membantu SATKORLAK PB/BPBD Provinsi/SATLAK PB/BPBD Kabupaten/Kota) dalam penanganan darurat bencana.

Kode Konsep	Nama Konsep	Definisi Konsep
(1)	(2)	(3)
	Tingkat kematangan perangkat daerah	Gambaran tentang tingkat kematangan proses pelaksanaan aktivitas dalam organisasi yang pada dasarnya bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam melaksanakan proses produksi.
	Titik	Komponen JKS yang dapat menerima, membuat, menyimpan atau mengirim data/informasi.
K02212	Toleransi	Sifat atau sikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri.
K02220	Transaksi	Persetujuan jual beli antara dua pihak.
	Transaksi non tunai	Pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK),cek, bilyet giro, uang elektronik/sejenisnya.
	Transfer	Penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian serta dana bagi hasil milik pemerintah daerah.
K02222	Transmigrasi	Perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan yang diselenggarakan oleh pemerintah.
	Treatment Coverage	Jumlah semua kasus TBC yang dilaporkan dan diobati diantara jumlah estimasi kasus TBC yang ditemukan.
K02230	Tuberkulosis (TB)	Penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang dapat menyerang paru-paru dan organ lainnya.
	Tugas	Pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang.
	Tuna Sosial	Seseorang dan/atau sekelompok orang yang karena faktor tertentu, tidak atau kurang mampu untuk melaksanakan kehidupan yang layak atau sesuai dengan norma agama, sosial atau hukum serta secara sosial cenderung terisolasi dari kehidupan masyarakat.
	Tunjangan Jabatan	Tunjangan jabatan struktural atau tunjangan jabatan fungsional atau tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.
K01591	Tutupan Lahan	Kenampakan biofisik di permukaan bumi yang terdiri dari areal bervegetasi, lahan terbuka, lahan terbangun, serta tubuh air dan lahan basah.
	Uji Kompetensi	Proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan/atau kompetensi sosial kultural dari seorang Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.

Kode Konsep	Nama Konsep	Definisi Konsep
(1)	(2)	(3)
	Ujian	Kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan.
	Ujian Dinas	Syarat kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke jenjang pangkat yang lebih tinggi secara reguler.
	UKPBJ	Unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
	Unggulan	Sesuatu yang lebih menonjol, lebih berkualitas, atau lebih diutamakan dibandingkan yang lain.
	Unit	Bagian terkecil dari sesuatu yang dapat berdiri sendiri; satuan / kadar yang digunakan untuk mengukur (menilai dan sebagainya) sesuatu; dasar ukuran / kata penggolong untuk barang selengkapnya dengan bagian-bagiannya (kendaraan, komputer, dan sebagainya).
	Unit Kearsipan	Satuan kerja pada lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan yang memiliki fungsi kearsipan, yaitu pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis.
	Unit Pelaksanaan Teknis	Unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
	Unjuk Rasa	Kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.
	Upah Minimum Provinsi (UMP)	Upah minimum yang berlaku untuk seluruh Kabupaten/Kota di satu Provinsi.
	Upaya Kesehatan Masyarakat	Setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
	Upaya Kesehatan Perseorangan	Suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
	Upayah Pencegahan	Proses, cara, perbuatan mencegah; penegahan; penolakan.
	Urusan Pemerintahan	Kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah unluk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
K02261	Usaha	Suatu kegiatan dengan tujuan menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memperoleh keuntungan dan/atau memenuhi kebutuhan sendiri.

Kode Konsep	Nama Konsep	Definisi Konsep
(1)	(2)	(3)
	Usaha Ekonomi Produktif	Serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha saling menguntungkan.
K02269	Usaha Kecil	Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
K02273	Usaha Menengah	Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
K02274	Usaha Mikro	Usaha ekonomi produktif milik perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
K02279	Usaha pariwisata	Usaha yang menyediakan produk berupa barang dan/atau jasa untuk kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
	Usaha Perikanan	Kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran. .
	Usaha Perikanan Tangkap	Usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan Ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.
K02955	Usaha Tanaman Pangan	Kegiatan pertanian yang menghasilkan produk tanaman pangan (padi dan palawija) termasuk usaha pembibitan tanaman pangan, dan bukan sebagai buruh tani atau pekerja keluarga. .
	Utilitas	Pendukung infrastruktur pendidikan yang sifatnya wajib untuk menjamin layanan pendidikan berjalan optimal.
	Utilitas Umum	Kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
K02302	Vaksin	Antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati, masih hidup tapi dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, yang telah diolah, berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid, protein rekombinan yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit infeksi tertentu.
	Verifikasi	Pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang, dan sebagainya.

Kode Konsep	Nama Konsep	Definisi Konsep
(1)	(2)	(3)
	Video Digital	Jenis sistem video recording yang bekerja menggunakan sistem digital dibandingkan dengan analog dalam hal representasi videonya.
	Wakil Kepala daerah	Untuk Daerah provinsi disebut wakil gubernur, untuk Daerah kabupaten disebut wakil bupati, dan untuk Daerah kota disebut wakil wali kota.
	Warga Negara	Orang yang secara sah diakui sebagai bagian dari suatu negara berdasarkan hukum atau perjanjian.
	Warisan Budaya Tak Benda	Warisan budaya yang tidak berwujud (intangible), yang hidup di tengah masyarakat, diwariskan dari generasi ke generasi, terus-menerus diciptakan ulang oleh masyarakat dan kelompoknya, dan memberikan mereka rasa identitas serta berkesinambungan.
	Wawasan kebangsaan	Cara pandang bangsa Indonesia ten tang diri dan lingkungannya mengu tamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
	Wawasan Nasional	Cara pandang suatu bangsa dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta dalam hubungan antarnegara yang merupakan hasil perenungan filsafat tentang diri dan lingkungannya dengan memperhatikan sejarah dan kondisi sosial budaya serta memanfaatkan konstelasi geografis guna menciptakan dorongan dan rangsangan dalam usaha mencapai tujuan nasional.
K02323	Wilayah	Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
	Wilayah Metropolitan	Kawasan perkotaan yang terdiri atas satu kawasan perkotaan inti dan beberapa kawasan perkotaan di sekitarnya yang membentuk satu kesatuan sistem perkotaan.
K02325	Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)	Wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.
	Wirausaha Baru	Pelaku usaha yang berusaha sendiri dan pelaku usaha yang dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar sebagaimana dimaksud dalam status pekerjaan yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik, memiliki jiwa Kewirausahaan berupa pengetahuan, keterampilan, motif, sikap, dan perilaku, memiliki dan mengelola setidaknya satu usaha inovatif yang sudah terdaftar pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
K02331	Wisatawan	Orang yang melakukan perjalanan di luar lingkungan sehari-hari dengan lama perjalanan kurang dari 12 bulan dan bukan bertujuan untuk memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi serta bukan merupakan kegiatan rutin.

Kode Konsep	Nama Konsep	Definisi Konsep
(1)	(2)	(3)
K02332	Wisatawan Mancanegara	Setiap orang yang melakukan perjalanan ke suatu negara di luar negara tempat tinggalnya, kurang dari satu tahun, didorong oleh suatu tujuan utama (bisnis, berlibur, atau tujuan pribadi lainnya), selain itu bekerja dengan penduduk negara yang dikunjungi.
K02334	Wisatawan Nusantara	Penduduk Indonesia yang melakukan perjalanan diluar lingkungan sehari-hari di wilayah geografis Indonesia dengan lama perjalanan kurang dari 12 bulan dan bukan bertujuan untuk memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi serta bukan merupakan kegiatan rutin.
	Zat Adiktif	Bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
	Zona Integritas	Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di Instansi Pemerintah. Perangkat Daerah yang ingin membangun Zona Integritas harus memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam peraturan tersebut, termasuk persyaratan pada level instansi pemerintah dan unit kerja yang diusulkan.
	Zoonosis	Penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.

PENUTUP

Penyusunan **Dokumen Kompilasi Standar Data Statistik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025** merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola data daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dokumen ini menjadi acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam menerapkan standar data statistik sektoral, sekaligus memperkuat implementasi kebijakan **Satu Data Indonesia** di tingkat Provinsi Kepulauan Riau.

Melalui penerapan dokumen ini diharapkan:

1. Terwujud keseragaman konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran data sektoral di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
2. Meningkatnya kualitas metadata dan interoperabilitas data;
3. Terbentuk sistem data yang terintegrasi antarperangkat daerah; serta
4. Tersedianya data yang valid, terbuka, dan dapat dimanfaatkan dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen untuk terus melakukan pembaruan dan penyempurnaan kompilasi ini secara berkala agar selalu relevan dengan dinamika kebutuhan data pembangunan dan kebijakan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2024). Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik 846 Tahun 2024 Tentang Standar Data Statistik Nasional. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2025). Standar Data Statistik 2024 Volume 1. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

DISKOMINFO Kepri

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah
Gedung Daeng Kamboja Lantai III, Pulau Dompak Seri Darul Makmur
Kota Tanjungpinang
Email : kominfo@kepriprov.go.id